

**TERBENTUKNYA IDENTITAS  
KEBANGSAAN PADA MASA SEBELUM DAN  
SESUDAH KEMERDEKAAN**

Oleh:

**Drs. Nana Supriatna, M.Ed.**

**DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN  
DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
2004**



# GLOSARIUM

- Akomodatif adalah sikap untuk menerima perbedaan pandangan dan kepentingan.
- Diskriminasi adalah suatu sikap dan tindakan untuk membeda-bedakan orang berdasarkan golongan, suku, agama, kepentingan kelompok, dan lain-lain.
- Egaliter adalah cara pandang yang menganggap orang lain, kebudayaan lain atau kelompok lain memiliki kedudukan yang sama dengan kelompoknya.
- Integrasi berarti penyatuan. Bagi Indonesia, konsep integrasi menyangkut semua aspek kehidupan, bukan hanya geografis melainkan juga persamaan budaya, kepentingan, bahasa, dan ideologi.
- Keragaman adalah diversity atau corak ragam yang berbeda-beda.
- Nasionalisme adalah semangat kebangsaan yang dilandasi oleh persamaan nasib. Nasionalisme Indonesia tumbuh karena persamaan nasib sebagai bangsa yang dijajah oleh kolonialisme Belanda.
- Kelompok migran terdidik adalah kelompok masyarakat yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan mengembangkan kemampuannya sesuai dengan pendidikan yang dimilikinya. Pada awal abad ke-20, kelompok ini adalah yang memiliki pendidikan Barat atau yang bersekolah di sekolah-sekolah Belanda.
- Konsep bangsa terbentuk karena adanya persamaan dalam hal budaya, sistem kepercayaan, adat-istiadat, dan kepentingan bersama.
- Melting pot adalah tempat berbagai etnis melepaskan identitas budaya asalnya sedikit demi sedikit, dan kemudian merangkul budaya baru yang dimiliki oleh berbagai etnis tersebut.
- Tradisi bahari adalah tradisi yang berhubungan dengan pemanfaatan laut sebagai penunjang kebutuhan hidup.

Rezim politik adalah sistem politik dan pemerintahan serta orang-orang yang duduk dalam struktur pemerintahan.

Orde adalah jaman. Istilah Orde lama dan Orde baru terbentuk karena sistem pemerintahan yang berlangsung berusaha membedakan antara sistem pemerintahannya dengan sistem pemerintahan sebelumnya.

Demokrasi Liberal adalah demokrasi yang mengacu pada negara-negara Barat yang menganut sistem parlementer.

Demokrasi terpimpin adalah istilah pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden Sukarno yang memegang hampir semua lembaga kenegaraan di bawah kekuasaan eksekutif.

Gerakan disintegrasi adalah gerakan untuk memisahkan diri dari pemerintahan yang sah.

founding fathers adalah istilah lain dalam bahasa Inggris dari para pendiri bangsa. Bung Karno, Bung Hatta serta tokoh-tokoh lainnya yang berjuang dan berjasa dalam menegakkan negara RI dalam disebut sebagai para pendiri bangsa.

lembaga kenegaraan adalah lembaga yang harus ada dalam sebuah negara yang berdaulat. Ketika RI pertama kali berdiri lembaga yang didirikan adalah kepresidenan, parlemen dengan nama KNIP, kementerian, angkatan perang dan lembaga lainnya yang dipandang perlu.

wilayah Indoensia yang dibentuk pada proklamasi meliputi bekas Hindia Belanda walaupun secara de facto RI hanya menguasai beberapa wilayah saja, terutama Jawa.

kementerian RI merupakan salah satu lembaga kenegaraan. Jumlah mementrian pada pasca proklamasi masih sangat terbatas sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara.

penyerahan kedaulatan bagia bangsa Indonesia sebenarnya tidak diperlukan lagi sebab bangsa Indonesia telah memiliki kedaulatan sejak proklamasi. Oleh karena itu, istilah "penyerahan kedaulatan" sering kali ditulis dengan menggunakan tanda kutip.

## **KATA PENGANTAR**

Modul ketiga ini disusun sesuai dengan deskripsi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Sejarah dan mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi atau Kurikulum tahun 2004. Oleh karena itu, uraian pada setiap kegiatan belajar pada modul ini memuat kompetensi tertentu yang harus dimiliki oleh peserta didik dan harus nampak pada akhir kegiatan belajar.

Beberapa kegiatan untuk menunjang tercapainya kompetensi dapat dipelajari pada keseluruhan materi modul ini. Semoga modul ini bermanfaat dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Modul kedua ini berisi kajian mengenai wawasan kebangsaan yang harus dipahami oleh peserta didik. Identitas kebangsaan sebagai bangsa Indonesia yang kita kenal sekarang tidak terbentuk dalam waktu serta proses yang singkat. Proses tersebut terbentuk dan didasari oleh kondisi serta perkembangan masyarakat Indonesia sejak jaman prasejarah hingga sekarang. Walaupun konsep kebangsaan baru terbentuk pada awal abad ke-20, kondisi ke arah terbentuknya identitas kebangsaan tersebut dapat dikaji lebih jauh pada awal terbentuknya masyarakat Indoensia yaitu sejak jaman kedatangan bangsa Indonesia ke kepulauan Indoensia pada jaman prasejarah, jaman terbentuknya pengaruh Hindu-Budha dan Islam serta pertemuan bangsa Indoensia dengan bangsa-bangsa Barat pada jaman penjajahan. Sejak proses migrasi bangsa Indoensia dari luar wilayah Indoensia serta terbentuknya pemukim di kawasan Nusantara dan pertemuan dengan bangsa-bangsa lain tersebut maka identitas masyarakat Indonesia mulai terbentuk yang ditandai dengan sistem kemasyarakatan, sistem religi dan kepercayaan, sistem kerajaan dan ketatanegaraan, serta sistem sosial-budaya lainnya. Melalui pertemuan dengan bangsa-bangsa asing, baik secara politis, sosial-budaya, ekonomi dan kultural maka bangsa Indoensi pun mulai menyadari tentang pentingnya membentuk identitas kebangsaan pada awal abad ke-20. Pada modul kedua ini akan dikaji masyarakat prasejarah Indoensia, masyarakat pada masa tradisi Hindu-Budha, Masyarakat Muslim, serta masyarakat pada masa penjajahan sejak abad ke-17 hingga abad ke-20. Modul Kedua ini akan dibagi menjadi beberapa penggalan berikut ini.

Modul ini tersusun atas kerjasama Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan – Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Nasional dengan Lembaga Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia.

Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan  
Dr.Gatot Hari Priowirjanto

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	ii
Glosarium.....	iii
Bab 1. PENDAHULUAN.....	1
A. Deskripsi.....	1
B. Prasyarat.....	1
C. Petunjuk Penggunaan Modul.....	2
D. Tujuan akhir.....	2
E. Kompetensi.....	3
F. Cek Kemampuan.....	3
Bab II. PEMBELAJARAN .....	4
Kegiatan Belajar 1 .....	4
A. Karakteristik Indonesia dan Peranan Sejarah Islam Proses Integrasi .....	4
B. Pelayaran dan Perdagangan Menuju Terbentuknya Wawasan Kebangsaan .....	9
C. Peranan Bahasa Melayu dalam Proses Terbentuknya Wawasan Kebangsaan .....	12
D. Mobilitas Penduduk Menuju Integrasi Bangsa .....	
E. Belajar dari Pengalaman Sejarah Menuju Terbentuknya Wawasan Kebangsaan .....	14
Kegiatan Belajar 2 .....	
A. Pertumbuhan dan Perkembangan dan Pergerakan Nasional Indonesia .....	22
B. Pertumbuhan dan Perkembangan Wawasan Kebangsaan pada masa Pergerakan Nasional Indonesia .....	26
C. Pembentukan Wawasan Kebangsaan pada Zaman Pendudukan Jepang .....	50
Kegiatan Belajar 3 .....	68
A. Membentuk Lembaga Kenegaraan .....	68
B. Upaya Mempertahankan Kedaulatan Negara .....	75
C. Ujian Terhadap Wawasan Kebangsaan pada saat Demokrasi Terpimpin .....	83
D. Perdebatan dalam Konstituante dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 .....	89
E. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin .....	92
F. Kehidupan/Pergolakan Politik di Daerah semasa Demokrasi Liberal dan Terpimpin .....	98

Kegiatan Belajar 4 .....	
A. Kelahiran Orde Baru .....	113
B. Masa Transisi dari Orde Lama ke Orde Baru .....	116
C. Pembangunan Nasional .....	119
D. Kekuasaan Negara dan Dampaknya bagi Kehidupan Masyarakat .....	122
E. Wawasan Kebangsaan di Era Reformasi .....	124
F. Menguji Wawasan Kebangsaan di Era Reformasi .....	135
G.	
BAB III EVALUASI .....	147





**TERBENTUKNYA IDENTITAS  
KEBANGSAAN PADA MASA SEBELUM DAN  
SESUDAH KEMERDEKAAN**

Oleh:

**Drs. Nana Supriatna, M.Ed.**

**DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN  
DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
2004**

# GLOSARIUM

- Akomodatif adalah sikap untuk menerima perbedaan pandangan dan kepentingan.
- Diskriminasi adalah suatu sikap dan tindakan untuk membeda-bedakan orang berdasarkan golongan, suku, agama, kepentingan kelompok, dan lain-lain.
- Egaliter adalah cara pandang yang menganggap orang lain, kebudayaan lain atau kelompok lain memiliki kedudukan yang sama dengan kelompoknya.
- Integrasi berarti penyatuan. Bagi Indonesia, konsep integrasi menyangkut semua aspek kehidupan, bukan hanya geografis melainkan juga persamaan budaya, kepentingan, bahasa, dan ideologi.
- Keragaman adalah diversity atau corak ragam yang berbeda-beda.
- Nasionalisme adalah semangat kebangsaan yang dilandasi oleh persamaan nasib. Nasionalisme Indonesia tumbuh karena persamaan nasib sebagai bangsa yang dijajah oleh kolonialisme Belanda.
- Kelompok migran terdidik adalah kelompok masyarakat yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan mengembangkan kemampuannya sesuai dengan pendidikan yang dimilikinya. Pada awal abad ke-20, kelompok ini adalah yang memiliki pendidikan Barat atau yang bersekolah di sekolah-sekolah Belanda.
- Konsep bangsa terbentuk karena adanya persamaan dalam hal budaya, sistem kepercayaan, adat-istiadat, dan kepentingan bersama.
- Melting pot adalah tempat berbagai etnis melepaskan identitas budaya asalnya sedikit demi sedikit, dan kemudian merangkul budaya baru yang dimiliki oleh berbagai etnis tersebut.
- Tradisi bahari adalah tradisi yang berhubungan dengan pemanfaatan laut sebagai penunjang kebutuhan hidup.

Rezim politik adalah sistem politik dan pemerintahan serta orang-orang yang duduk dalam struktur pemerintahan.

Orde adalah jaman. Istilah Orde lama dan Orde baru terbentuk karena sistem pemerintahan yang berlangsung berusaha membedakan antara sistem pemerintahannya dengan sistem pemerintahan sebelumnya.

Demokrasi Liberal adalah demokrasi yang mengacu pada negara-negara Barat yang menganut sistem parlementer.

Demokrasi terpimpin adalah istilah pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden Sukarno yang memegang hampir semua lembaga kenegaraan di bawah kekuasaan eksekutif.

Gerakan disintegrasi adalah gerakan untuk memisahkan diri dari pemerintahan yang sah.

founding fathers adalah istilah lain dalam bahasa Inggris dari para pendiri bangsa. Bung Karno, Bung Hatta serta tokoh-tokoh lainnya yang berjuang dan berjasa dalam menegakkan negara RI dalam disebut sebagai para pendiri bangsa.

lembaga kenegaraan adalah lembaga yang harus ada dalam sebuah negara yang berdaulat. Ketika RI pertama kali berdiri lembaga yang didirikan adalah kepresidenan, parlemen dengan nama KNIP, kementerian, angkatan perang dan lembaga lainnya yang dipandang perlu.

wilayah Indoensia yang dibentuk pada proklamasi meliputi bekas Hindia Belanda walaupun secara de facto RI hanya menguasai beberapa wilayah saja, terutama Jawa.

kementerian RI merupakan salah satu lembaga kenegaraan. Jumlah kementerian pada pasca proklamasi masih sangat terbatas sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara.

penyerahan kedaulatan bagia bangsa Indonesia sebenarnya tidak diperlukan lagi sebab bangsa Indonesia telah memiliki kedaulatan sejak proklamasi. Oleh karena itu, istilah "penyerahan kedaulatan" sering kali ditulis dengan menggunakan tanda kutip.

# **BAB I PENDAHULUAN**

---

## **A. DESKRIPSI**

Modul ketiga ini berjudul **Terbentuknya Identitas Kebangsaan** dan merupakan bagian dari modul Pendidikan Kewarganegaraan dan Sejarah. Modul ini terdiri dari empat kegiatan belajar yaitu 1) Proses Integrasi Menuju Terbentuknya Wawasan Kebangsaan pada Masa Pergerakan Nasional. 2) Bentuk-bentuk Perjuangan Pada Masa Pergerakan Nasional Indonesia, 3) Ujian Mempertahankan Wawasan Kebangsaan Pasca Kemerdekaan Hingga Meletusnya G-30S/1965, dan 4) Memperkuat Wawasan Kebangsaan Pada Masa Orde Baru dan Reformasi.

Modul ini merupakan kelanjutan dari modul kedua tentang menganalisis hakikat wawasan kebangsaan dan menjadi materi yang penting untuk memberikan pemahaman bagi peserta didik untuk mempelajari modul berikutnya. Setelah mempelajari modul ini para peserta didik diharapkan memiliki kompetensi berupa pemahaman mengenai wawasan kebangsaan.

## **B. PRASYARAT**

Untuk menguasai modul ini para peserta didik memiliki: kemampuan membaca teks sejarah serta keinginan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman dari teks yang dibacanya. Keinginan untuk memiliki wawasan kebangsaan sebagai salah satu syarat menjadi warga negara dewasa.

## **C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL**

### **a. Petunjuk bagi siswa:**

- gunakan modul ini sebagai salah satu sumber untuk memahami sejarah Indonesia dan meningkatkan wawasan kebangsaan Anda.
- Bacalah seluruh isi modu untuk meningkatkan wawasan kebangsaan Anda.
- Lakukanlah kegiatan diskusi kelas dengan teman dan bertanyalah pada guru Anda apabila menemukan masalah yang sulit.
- Yakinkan bahwa kemampuan anda tergantung dari kegiatan mempelajari dan memahami modul ini.

### **b. Petunjuk untuk guru:**

- pelajari modul ini sebelum disampaikan kepada para siswa
- jelaskanlah kepada para siswa setelah Anda menguasai modul ini.
- Bimbinglah para siswa dalam mehamami modul ini.
- Catatlah kemajuan belajar siswa.
- Lakukan evaluasi secara berkala terutama untuk mneguji pegnetahuanserta kompetensinya.
- Beri kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dan mengaplikasikan pengetahuan, ketrampilan dan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari.

## **D. TUJUAN AKHIR**

Tujuan akhir yang diharapkan adalah agar para siswa memiliki wawasan kebangsaan, wawasan yang luas sehingga dengan kemampuan yang dimilikinya mereka memiliki kemampuan untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya.

## **E. KOMPETENSI**

Kompetensi yang harus dimiliki siswa adalah mengembangkan wawasan kebangsaan.

## **F. CEK KEMAMPUAN**

Untuk mengecek kemampuan, pelajari tujuan pembelajaran yang dicantumkan pada awal modul.

## **BAB II PEMBELAJARAN**

### **Kegiatan Belajar 1.**

### **Proses Integrasi Menuju Terbentuknya Wawasan Kebangsaan pada Masa Pergerakan Nasional.**

#### **A. Karakteristik Indonesia dan Peranan Sejarah Islam dalam Proses Integrasi**

**Kondisi geografis** kepulauan Indonesia merupakan salah satu faktor yang paling sulit dalam membentuk kesatuan Nusantara. Kesulitan itu akan bertambah besar dengan keanekaragaman suku bangsa yang memiliki adat-istiadat dan bahasa berbeda yang tinggal di pulau-pulau yang terpisah itu. Oleh karena itu, makna integrasi bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang paling penting.

Dalam peta terlihat bahwa wilayah Indonesia terdiri dari kepulauan besar dan kecil yang jumlahnya belasan ribu. Banyak di antara pulau-pulau tersebut dipisahkan oleh selat dan laut yang jaraknya ratusan bahkan ribuan kilometer. Misalnya, jarak antara Pulau Sumatra dan Sulawesi, Maluku dan Papua, lebih dari 2000 km. Begitu juga jarak antara Kepulauan Nusa Tenggara di selatan dan Kepulauan Sangir Talaud di ujung paling utara lebih dari 2000 km. Pulau-pulau besar dan kecil tersebut dihuni oleh berbagai suku bangsa yang masing-masing memiliki keragaman etnis dan budaya.

Dalam konsep integrasi, laut-laut dan selat yang berada di wilayah Indonesia merupakan penyatu. Demikian pula keragaman suku-suku bangsa, budaya, dan bahasa yang secara alami telah mengalami proses evolusi sejak migrasi bangsa Austronesia ribuan tahun yang lalu.

Terintegrasinya kepulauan yang tersebar di garis khatulistiwa dan memiliki keragaman budaya daerah, bahasa, dan bentuk fisik tersebut menuju kesatuan politis merupakan proses yang sulit dan panjang. Untuk itu diperlukan keinginan, tekad, dan upaya suku-suku bangsa yang tinggal di kepulauan tersebut.

Mengapa Islam yang berkembang di Indonesia menjadi faktor yang mempercepat proses integrasi bangsa Indonesia? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut dapat dilihat secara etis, kultural, historis, dan ideologis.

Secara etis, ajaran Islam tidak mengakui adanya perbedaan golongan dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa etika Islam bersifat demokratis karena agama Islam tidak mengenal strata sosial. Bagi penganut Islam, semua orang yang menganut Islam dianggap sebagai saudara dan memiliki kedudukan yang sama. Cara pandang seperti ini dipraktekkan oleh para pedagang Islam di seluruh Nusantara, dalam pergaulan di kota-kota pelabuhan Nusantara. Di kota-kota dagang penting Nusantara, seperti Malaka, Pasai, Banten, Cirebon, Tuban, Demak, Makassar, Ambon, dan lain-lain terjadi hubungan yang egaliter (berada dalam posisi yang sama).

Misalnya, para pedagang yang berada di Malaka, Banten, dan lain-lain menganggap para pedagang Islam yang berasal dari berbagai daerah dan suku bangsa Indonesia sebagai saudara. Terjadilah keterikatan di antara mereka dan perasaan sebagai saudara. Perbedaan-perbedaan latar belakang suku, adat-istiadat, bahasa, tradisi, dan lain-lain menjadi tidak begitu penting karena semuanya merasa berada dalam satu pandangan dan kedudukan yang sama. Mereka merasa bersatu karena pandangan mereka yang sama tersebut.

Dari persamaan pandangan mengenai etika sosial tersebut terdapat dua hal yang dipengaruhinya. Pertama, perdagangan di antara orang-orang Islam berkembang dengan pesat. Seperti dijelaskan pada Bab 5, masuknya Islam ke Indonesia terjadi melalui proses perdagangan. Dengan adanya perdagangan tersebut selain Islam menyebar di Nusantara, perdagangan di kepulauan ini pun ikut berkembang pesat. Faktor etika sosial yang dianut para pedagang Nusantara berpengaruh terhadap perkembangan kegiatan ekonomi dagang. Kedua, adanya pandangan tersebut telah mendorong terciptanya perasaan terintegrasi di antara para pedagang penganut Islam yang memiliki latar belakang berbeda-beda tersebut. Tampaknya dalam kegiatan dagang, faktor perbedaan etnis, budaya, bahasa, dan lain-lain diabaikan. Mereka beranggapan bahwa yang terpenting adalah keuntungan. Keuntungan tersebut harus dinikmati bersama-sama di antara mereka yang menganut agama yang sama.

Budaya Islam atau kultural Islam mendukung terbentuknya sikap dan pandangan yang integral. Para pedagang Islam dan penganut Islam di Indonesia pada awal berkembangannya tidak memusuhi penganut kepercayaan lain.



Secara kultural (budaya), pemeluk Islam di Indonesia tidak mempertentangkan ajaran Islam dengan adat-istiadat atau kepercayaan yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha. Sebagian besar wali yang menyebarkan Islam di Jawa menggunakan pendekatan budaya setempat untuk menyebarkan Islam. Para wali dan ulama penganut ajaran tasawwuf berpandangan bahwa para penganut ajaran lain harus tetap dihormati. Mereka berpandangan bahwa pemeluk kepercayaan lain harus didekati dengan metode yang paling bisa diterima oleh mereka.

Dilihat dari awal perkembangan Islam di Indonesia, tampaknya perbedaan kepercayaan, tradisi, dan adat istiadat bukan merupakan faktor disintegrasi. Sikap para pedagang, penyebar Islam, dan penganut Islam Indonesia yang akomodatif terhadap perbedaan pandangan, adat-istiadat, dan kepercayaan setempat yang telah lebih dulu dianut menyebabkan tidak terjadinya konflik budaya. Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia tidak menimbulkan benturan-benturan budaya antara budaya Islam dan budaya setempat. Seperti telah diuraikan pada modul terdahulu adanya sikap akomodatif tersebut dapat mempercepat terjadinya akulturasi dan melahirkan kebudayaan khas Indonesia. Sikap toleransi pemeluk Islam terhadap pemeluk kepercayaan lain menjadi salah satu faktor yang membantu terjadinya proses integrasi bangsa.

Hasil akulturasi antara kebudayaan Islam dan kebudayaan lokal Indonesia baik dalam bentuk gagasan maupun bentuk fisik telah melahirkan identitas baru di kalangan pemeluk Islam di Indonesia. Ternyata, kebudayaan Islam (bukan sebagai ajaran agama) di Indonesia berbeda dengan kebudayaan Islam di negara-negara Islam lain. Kekhasan dan persamaan kebudayaan Islam Indonesia yang dianut oleh suku-suku bangsa Indonesia menciptakan perasaan bersatu di antara pemeluk-pemeluknya. Dengan demikian, hasil akulturasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam proses integrasi bangsa.

Sikap toleransi dalam aspek budaya dapat juga dilihat dalam praktek perdagangan. Para pedagang Islam berpandangan bahwa mereka bisa berdagang dengan siapa pun tanpa melihat latar belakang agama. Secara kultural para pedagang Islam memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan suku bangsa, agama, dan golongan dalam kegiatan dagang. Misalnya, para pedagang Islam di Malaka, Banten, Makassar, dan lain-lain bukan hanya berdagang dengan pedagang Islam dari Arab, Persia, Gujarat melainkan dengan para pedagang non-Islam dari Cina, Champa, dan lain-lain. Jadi secara historis, walaupun

perdagangan abad ke-14 sampai 17 didominasi para pedagang Islam, mereka bersedia berdagang dengan siapa pun tanpa melihat perbedaan latar belakang bangsa dan agama.

Para pedagang Nusantara awalnya tidak menentang bangsa asing yang berdagang di perairan Indonesia. Namun pada perkembangan selanjutnya, para pedagang Nusantara berubah sikap. Mereka menyadari bahwa sikap terbuka tersebut ternyata telah disalahgunakan oleh para pedagang Barat yang ingin menguasai sumber barang dagangan. Para pedagang Nusantara melihat bahwa para pedagang Barat tersebut berambisi untuk menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Jatuhnya Malaka ke tangan bangsa Portugis **(1511)** adalah bukti adanya pemaksaan kehendak pedagang Barat dalam menguasai wilayah dagang di Nusantara.

Peristiwa jatuhnya pelabuhan Malaka tersebut merupakan awal perubahan sikap pedagang Nusantara. Sejak peristiwa itu, para pedagang Nusantara mulai berhati-hati dengan pedagang asing terutama dari Barat (Eropa). Para pedagang Islam mulai menyadari bahwa datangnya para pedagang Portugis di kepulauan Nusantara bukan hanya ingin berdagang, tetapi memiliki tujuan politis ingin menghancurkan kekuatan Islam.

Mengapa bangsa Portugis ingin menghancurkan kekuatan Islam? Sejak zaman kejayaan Islam yang ditandai dengan adanya ekspansi kekuasaan Dinasti Umayyah di Kordoba, menimbulkan benih-benih permusuhan dari bangsa Portugis terhadap kekuatan Islam. Ternyata penaklukan Jazirah Iberia (wilayah bangsa Portugis dan Spanyol) oleh dinasti Islam Umayyah abad ke-7 M dan disusul dengan kekuasaan Islam atas wilayah Eropa lainnya sampai abad ke-15, serta jatuhnya Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, ke tangan kerajaan Islam Turki Usmania tahun 1453, menimbulkan kebencian bangsa Eropa terhadap kekuatan Islam yang pernah menaklukkannya.

Bangsa Portugis dan Spanyol yang secara historis pernah dikuasai oleh orang-orang Islam ingin membalas dendam terhadap penaklukan tersebut. Tujuan ini diperkuat oleh ambisi mengejar kejayaan dan menguasai sumber perdagangan rempah-rempah. Mereka berusaha untuk menjelajah dunia dan menguasai jalur dagang internasional yang pada umumnya dikuasai oleh para pedagang Islam. Dengan ambisi tersebut, satu per satu kekuatan Islam diperangi dan pelabuhan-pelabuhannya diduduki. Setelah berhasil melalui pantai barat, selatan, dan timur Afrika, mereka sampai ke Samudra Hindia dan bertemu dengan pedagang-pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan sepanjang

jalur tersebut. Akhirnya, mereka sampai di Malaka dan berhasil menaklukkan dan menguasai pelabuhan itu tahun 1511. Berhasil merebut Malaka, bangsa Portugis terus berusaha menaklukkan kekuatan-kekuatan Islam lainnya di Nusantara, antara lain Pelabuhan Banten dan Ambon, Maluku.

Tindakan bangsa Portugis tersebut disusul oleh bangsa Belanda yang memiliki ambisi yang kurang lebih sama. Bangsa Belanda pun berusaha untuk menguasai sumber penghasil rempah-rempah dan pelabuhan-pelabuhan penting kerajaan Islam Nusantara. Dengan politik disintegrasinya (*divide et impera*), satu per satu pelabuhan-pelabuhan penting Nusantara, seperti Sunda Kalapa, Ambon, Makassar, Demak, Cirebon, dan lain-lain dikuasainya.

Peranan Islam dalam proses integrasi telah dipengaruhi oleh perkembangan historis di atas. Berdasarkan perkembangan tersebut, para pedagang Islam serta kerajaan-kerajaan Islam Nusantara melihat bahwa kedatangan orang-orang Barat bukan hanya untuk berdagang melainkan juga untuk menaklukkan kekuasaan Islam di Nusantara. Mereka mulai sadar bahwa kekuatan asing telah menyalahgunakan keterbukaan sikap pedagang Islam dan keterbukaan laut Nusantara.

Dari perkembangan historis tersebut terdapat dua hal penting yang diakibatkannya. Pertama, peranan pedagang Islam di Laut Nusantara mengalami kemunduran karena para pedagang asing (Barat) mulai memonopoli perdagangan di kawasan tersebut.

Kedua, Islam telah dijadikan sebagai satu kekuatan ideologis untuk melawan kekuatan asing. Latar belakang historis datangnya bangsa Barat dengan misinya tersebut telah menyatukan kerajaan-kerajaan Islam secara ideologis untuk menghadapi Barat. Walaupun mereka tidak bersatu secara politis, terdapat kesamaan pandangan bahwa kekuatan asing tersebut akan menghancurkan kekuatan Islam. Oleh karena itu, Islam harus digunakan sebagai satu kekuatan ideologis untuk mengusir penjajah. Pandangan yang sama secara ideologis di antara kerajaan-kerajaan Islam Nusantara tersebut menempatkan Islam sebagai faktor yang mempercepat proses integrasi.

Dalam sejarah Indonesia, Islam telah digunakan sebagai kekuatan ideologis untuk menyatukan semua unsur perlawanan terhadap kekuatan kolonialisme Barat. Perlawanan daerah-daerah di Indonesia terhadap kekuatan Belanda pada abad ke-19 merupakan bukti bahwa Islam telah digunakan sebagai kekuatan ideologis. Para pemimpin perlawanan di daerah yang pada umumnya karismatis dan memiliki pengetahuan agama Islam yang tinggi

memanfaatkan kekuatan ideologis tersebut yang telah dianut masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Dengan kekuatan tersebut, semangat untuk mengusir penjajah semakin besar. Rakyat yang berada di bawah pemimpin karismatis percaya bahwa Belanda adalah kafir, penjajah yang zalim, dan musuh Islam. Dengan semangat perang sabil, perlawanan di daerah abad ke-19 merupakan perang yang melemahkan kekuatan militer pemerintah kolonial Belanda.

Contoh-contoh bahwa Islam telah digunakan sebagai kekuatan ideologis dapat dilihat dalam Perang Saparua (1817), Perang Padri (1819-1832), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Banjarmasin (1852, 1859, 1862), Perang Aceh (1873-1912), dan perlawanan petani Banten (1888). Walaupun perang-perang tersebut masih bersifat kedaerahan, secara historis dapat dikatakan bahwa perang yang dilandasi oleh kekuatan ideologis Islam itu telah menjadi dasar bagi lahirnya nasionalisme Indonesia pada awal abad ke-20.

Dari uraian di atas terlihat bahwa secara etis, sosial-budaya, ideologis, dan historis, Islam memiliki peran yang besar dalam proses integrasi bangsa. Gerakan nasionalisme atau gerakan kebangsaan Indonesia awal abad ke-20 sebenarnya dasar-dasarnya telah diletakkan sejak tumbuh dan berkembangnya penganut serta kekuatan politik Islam di Nusantara sejak abad ke-16.

## **B. Pelayaran dan Perdagangan Menuju Terbentuknya Wawasan Kebangsaan**

Pelayaran dan perdagangan antarpulau di kawasan Nusantara memiliki peran penting dalam proses integrasi bangsa Indonesia. Peranan tersebut dapat dilihat pada tiga hal penting. **Pertama**, pelayaran dan perdagangan antarpulau telah menghubungkan penduduk satu pulau dengan lainnya. **Kedua**, melalui pelayaran dan perdagangan antarpulau terjadi proses percampuran dan penyebaran budaya satu daerah terhadap daerah lainnya. Ketiga, dengan pelayaran dan perdagangan antarpulau proses integrasi bangsa mengalami percepatan.

Dengan adanya pelayaran dan perdagangan antarpulau terjadilah **hubungan antarpenduduk** satu pulau dan pulau lainnya. Penduduk di ujung Nusantara bagian timur bisa berhubungan dengan penduduk yang tinggal di ujung Nusantara bagian Barat. Penduduk yang tinggal di kota-kota pelabuhan pulau-pulau Nusantara sebelah selatan, seperti Jawa dan Nusa Tenggara bisa berhubungan dengan penduduk yang berada di kota-kota pelabuhan Nusantara bagian utara, seperti Aceh, Malaka, Makassar, dan lain-lain.

Dalam pelayaran dan perdagangan tersebut **laut memegang peranan yang sangat penting**. Laut digunakan sebagai jalan bebas hambatan yang bisa digunakan oleh penduduk setiap pulau. Dengan demikian, laut Nusantara dan selat-selat yang memisahkan pulau-pulau tersebut bukan merupakan pemisah atau pembatas penduduk yang tinggal di satu pulau dengan penduduk yang tinggal di pulau lainnya. Laut merupakan jalan penghubung sekaligus sebagai pemersatu penduduk yang tinggal di kepulauan Nusantara.

Hubungan pelayaran dan perdagangan antarpulau yang sangat ramai pada abad ke-15-16 sebenarnya telah dirintis sejak zaman prasejarah dan diteruskan oleh zaman kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Walaupun tidak diketahui dengan pasti bagaimana pelayaran zaman prasejarah, kedatangan bangsa Austronesia ke kepulauan Nusantara bukan melalui darat, karena sejak 4000 tahun yang lalu kepulauan Nusantara sudah terpisah dari daratan Asia. Diduga bahwa kedatangan bangsa tersebut menggunakan jalur laut. Dengan demikian sejak zaman prasejarah, bangsa Indonesia memiliki tradisi bahari, yaitu tradisi kehidupan masyarakat yang menggunakan laut sebagai sarana kehidupan.

Dengan masuknya pengaruh Islam, pelayaran dan perdagangan Nusantara mengalami kejayaan. Pada zaman ini terjadi hubungan antara penghasil barang dagangan dan pusat-pusat penjualan barang dagangan. Kota-kota pelabuhan Nusantara menjadi pusat pertemuan pedagang yang datang dari berbagai pulau dan memiliki latar belakang budaya berbeda-beda. Pedagang Islam di kawasan Nusantara bagian barat bukan hanya berdagang di pelabuhan-pelabuhan Nusantara di sebelah barat melainkan juga ke timur. Demikian juga sebaliknya. Para pedagang dari Ambon, Ternate, Tidore, Makassar, Banjarmasin, dan lain-lain berlayar serta berdagang di pelabuhan-pelabuhan Nusantara Barat, seperti Pasai, Malaka, Banten, Sunda Kalapa, Gresik, dan lain-lain. Para pedagang Jawa yang berdagang di Banten memperoleh barang dagangan berupa rempah-rempah dari Maluku. Begitu juga para pedagang dari Ternate, Tidore, dan Makassar mengangkut beras dari Jawa dan menjualnya di pelabuhan Nusantara Timur.

Masuknya Kolonialisme Barat sejak abad ke-16 telah menimbulkan solidaritas dan persamaan di antara para pedagang Nusantara. Setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511, sebagian kegiatan perdagangan Nusantara dialihkan ke Aceh, Banten, Makassar, dan Gresik. Di kota-kota tersebut, seperti halnya di Malaka sebelum 1511, terjadi pertemuan antar

berbagai suku bangsa. Dari pertemuan tersebut, terjadilah pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan adat-istiadat yang berbeda-beda. Dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol, dan kemudian Belanda terjadi hubungan yang lebih erat di antara para pedagang Nusantara. Eratnya hubungan tersebut dibuktikan dengan semakin ramainya pelabuhan-pelabuhan Nusantara setelah peristiwa 1511 tersebut. Tampak dengan adanya monopoli perdagangan Portugis di Malaka menyebabkan solidaritas pedagang Nusantara lebih meningkat. Semakin ramainya pelabuhan-pelabuhan Nusantara, menunjukkan bahwa mereka lebih memilih berdagang dengan sesama suku bangsa yang berasal dari kepulauan yang sama.

Masuknya bangsa Barat (Eropa) di kawasan Nusantara yang memaksakan monopoli perdagangan berpengaruh terhadap proses integrasi bangsa sejak abad ke-16. Hal ini disebabkan dua faktor, yaitu sebagai berikut.

Pertama, melalui perdagangan antarpulau, pada zaman kejayaan Islam terjadi pertukaran budaya, pengalaman, dan pengetahuan yang berasal dari pedagang yang memiliki latar belakang etnis berbeda-beda tersebut. Mereka melihat bahwa terdapat persamaan di antara mereka, seperti agama yang dianut, budaya, bentuk fisik, dan warna kulit. Mereka melihat bahwa pedagang Nusantara tersebut memiliki persamaan. Persamaan tersebut semakin terasa setelah mereka bandingkan dengan agama, warna kulit, dan bentuk fisik pedagang Barat tersebut.

Kedua, adanya perasaan yang sama juga semakin meningkat setelah mereka sama-sama dirugikan oleh pendatang Barat tersebut melalui politik monopoli, pembatasan dan bentuk kekerasan serta kelicikan. Dengan demikian timbullah solidaritas di antara para pedagang Nusantara untuk menghadapi kekuatan pedagang asing tersebut. Walaupun secara politis hal itu tidak dibuktikan dalam tindakan perlawanan bersama, perasaan solidaritas telah memperkuat aspek ideologis atau moral bahwa monopoli, pemaksaan kehendak, dan kekerasan serta kelicikan pedagang Barat harus dilawan. Perkembangan historis dalam aspek pelayaran dan perdagangan tersebut berpengaruh terhadap proses integrasi bangsa.

Secara historis dapat dikatakan bahwa konsep bangsa ditandai dengan adanya persamaan hal budaya, sistem kepercayaan, adat-istiadat, dan kepentingan bersama. Para pedagang Nusantara memiliki kepentingan bersama untuk mengambil perannya kembali di bidang perdagangan setelah kejayaan mereka diruntuhkan oleh kelicikan dan monopoli dagang bangsa Eropa. Sikap

fair (wajar) berupa persaingan bebas dan terbuka melalui laut Nusantara ternyata disalahgunakan oleh pedagang Barat. Sikap solidaritas sebagai satu bangsa timbul setelah mereka memiliki kepentingan bersama untuk menghadapi monopoli dan kelicikan pedagang asing tersebut. Walaupun secara politis baru terwujud dalam abad ke-20 (17 Agustus 1945), konsepsi bangsa yang terintegrasi sudah dirintis melalui perkembangan historis pelayaran dan perdagangan sejak abad ke-16.

### **C. Peranan Bahasa Melayu Dalam Proses Terbentuknya Wawasan Kebangsaan.**

Bahasa Melayu memiliki peran yang besar dalam proses menuju integrasi bangsa Indonesia. Bahasa ini tumbuh dan berkembang sejalan dengan proses penyebaran Islam, migrasi suku bangsa Melayu dan pelayaran, serta perdagangan di Nusantara. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pergaulan antarsuku bangsa, sehingga menjadi lingua franca.

Mengapa bahasa Melayu tumbuh menjadi bahasa yang banyak digunakan oleh suku-suku bangsa Nusantara? Jawabannya terletak pada pertumbuhan budaya Melayu yang di dalamnya juga mencakup Bahasa Melayu yang kemudian menjadi lingua franca. Taufik Abdullah, sejarawan dan staf ahli LIPI (**Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia**), mengemukakan bahwa pertumbuhan budaya Melayu dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut.

- a. Perkembangan pelayaran dan perdagangan jarak jauh dan lokal yang perannya antara lain dimainkan oleh suku bangsa Melayu.
- b. Pengembaraan sarjana Melayu di daerah Melayu dan di luar daerah Melayu. Tradisi seperti ini menurut catatan Ibnu Batutah sudah dimulai pada abad ke-13. Setelah banyak sarjana Melayu yang beragama Islam tradisi pengembaraan tersebut dilakukan dalam rangka penyebaran Islam. Bahasa yang digunakannya tentu saja bahasa Melayu.
- c. Adanya arus perpindahan penduduk suku bangsa Melayu yang diperkirakan dimulai sejak abad ke-15. Mereka menyebar dari Sumatra, Asia Tenggara, berbagai daerah di Nusantara, dan Madagaskar. Melalui perpindahan penduduk tersebut, terjadilah penyebaran budaya dan bahasa Melayu ke wilayah-wilayah yang didatanginya.
- d. Adanya perkawinan antardinasti dan aliansi politik di Nusantara berpengaruh terhadap penyebaran budaya dan bahasa Melayu. Diperkirakan bahwa

melalui perkawinan antardinasti berbudaya Melayu dan non-Melayu berpengaruh terhadap penyebaran budaya kedua belah pihak. Dalam hal ini, budaya Melayu mempengaruhi lingkungan keraton atau dinasti nonMelayu.

Ketika perdagangan Nusantara mengalami perkembangan pesat pada abad ke-15, bangsa Melayu yang telah tersebar di sebagian wilayah Nusantara mengambil perannya. Dalam kegiatan tersebut, mereka menggunakan bahasa Melayu dalam percakapan sehari-hari. Diperkirakan bahwa dengan peran aktif suku bangsa Melayu dalam perdagangan antar pelabuhan Nusantara menyebabkan kebudayaan dan bahasa Melayu menyebar di pelabuhan-pelabuhan tersebut. Begitu dominannya bahasa tersebut dipergunakan di kota-kota pelabuhan, seperti Malaka, Pasai, Aceh, Banten, Banjarmasin, Gresik, Makassar, dan lain-lain mendorong suku-suku bangsa lain yang berdagang di kota-kota pelabuhan tersebut mempelajarinya dan menggunakannya.

Tampaknya sikap pedagang Nusantara yang berpikir praktis dalam melakukan kegiatannya menyebabkan "**terpilihnya**" Bahasa Melayu sebagai bahasa dalam transaksi dagang. Para pedagang Nusantara menyadari bahwa mereka berasal dari latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Untuk memperlancar komunikasi dalam perjanjian dagang, penentuan harga, dan jenis barang diperlukan bahasa yang paling banyak dikenal dan digunakan oleh penduduk di kota-kota pelabuhan. Dengan menggunakan bahasa yang sama, para pedagang bisa membeli dan menjual barangnya dengan mudah.

Selain faktor kepraktisan di atas, digunakannya bahasa Melayu dalam komunikasi dagang dipengaruhi oleh **sikap terbuka** dan toleransi di antara para pedagang Nusantara. Dengan latar belakang yang berbeda-beda, para pedagang Nusantara menyadari bahwa pemaksaan bahasa daerahnya masing-masing untuk dipergunakan oleh suku lainnya merupakan satu bentuk pemaksaan. Pemaksaan kehendak terhadap suku-suku lain akan menimbulkan konflik atau pertentangan. Digunakannya bahasa tersebut merupakan satu proses yang alamiah yang ditunjang oleh perkembangan budaya Melayu. Sebaliknya, suku-suku lain memilih bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan di antara mereka atas dasar kesadaran dan segi praktis semata untuk kelancaran kegiatan dagang mereka. Sikap terbuka yang dimiliki para pedagang tersebut merupakan landasan yang kuat bagi terintegrasinya suku-suku bangsa Indonesia.

Dilihat dari perspektif integrasi, digunakannya satu bahasa untuk berkomunikasi antarsuku bangsa yang berbeda-beda memungkinkan terjadinya pe-



nyebaran budaya yang satu dan lainnya. Dengan digunakannya bahasa yang sama, pengenalan budaya yang berbeda-beda akan semakin intensif. Melalui komunikasi akan ditemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan adat-istiadat, tradisi atau kebiasaan hidup masing-masing suku bangsa. Unsur persamaan budaya bisa dijadikan dasar untuk membentuk identitas yang sama atau penguat sebagai satu bangsa. Adapun perbedaannya bisa digunakan sebagai sarana untuk memperkaya budaya dan meningkatkan toleransi, pemahaman atas perbedaan-perbedaan itu. Dengan sikap toleransi, konflik yang menjurus ke arah disintegrasi atau perpecahan bisa dihindari.

Melalui perkembangan sejarah, akhirnya bahasa Melayu digunakan oleh organisasi pergerakan nasional pada awal abad ke-20. Bahasa ini menjadi cikal bakal Bahasa Indonesia. Dengan digunakannya bahasa yang sama, cita-cita politik mengintegrasikan untuk seluruh bangsa bisa diwujudkan dalam bahasa politik yang sama. Akhirnya, integrasi bahasa secara politis benar-benar diwujudkan dalam pernyataan politik Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928: menjunjung tinggi bahasa persatuan Bahasa Indonesia, selain menyatakan bertanah air dan berbangsa satu, Bangsa Indonesia.

#### **D. Mobilitas Penduduk Menuju Integrasi bangsa.**

Terbentuknya wawasan kebangsaan serta proses integrasi bangsa Indonesia dipengaruhi pula oleh mobilitas penduduknya atau migrasi. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya. Migrasi memungkinkan terjadinya persebaran penduduk satu daerah ke daerah lain di kepulauan Nusantara.

Dalam menuju integrasi bangsa, mobilitas penduduk merupakan aspek yang sangat penting. Karakteristik etnis atau suku-suku bangsa Indonesia yang dibentuk oleh lingkungan geografisnya berupa pulau-pulau yang terpisah menyebabkan satu pulau diidentikkan atau disamakan dengan satu identitas atau lebih budaya etnis. Misalnya, Pulau Sumatra identik dengan suku bangsa Melayu, Pulau Jawa identik dengan suku Jawa, Pulau Bali identik dengan suku Bali, Sulawesi identik dengan Bugis dan Makassar, Maluku dan Irian identik dengan Melanesia. Dalam perkembangan sejarah Indonesia, sejak abad ke-16 dapat dilihat bahwa keeksklusifan atau kekhususan pulau-pulau Nusantara dengan etnis tertentu tersebut sangat mudah dipecah-belah oleh kekuatan kolonial yang ingin menguasai pulau-pulau tersebut. Kekuatan asing telah me-

lihat bahwa karakteristik tersebut merupakan faktor yang memperlemah bangsa Indonesia, dan oleh karena itu bisa dimanfaatkan oleh kekuatan asing untuk politik disintegrasi.

Melalui migrasi penduduk dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu pulau ke pulau lain, setiap pulau di Indonesia dihuni oleh berbagai golongan suku bangsa. Proses migrasi tersebut berpengaruh positif terhadap integrasi bangsa. Dengan mobilitas penduduk itu, pada akhirnya setiap pulau di kepulauan Nusantara akan dihuni oleh berbagai golongan etnis dan memungkinkan terjadinya akulturasi budaya di antara mereka.

Proses migrasi suku-suku bangsa Indonesia berkembang sejalan dengan proses historis bangsa itu. Dalam hal ini migrasi bangsa Melayu merupakan yang paling penting. Dari catatan yang dikemukakan oleh Taufik Abdullah sebelumnya dapat dilihat bahwa suku bangsa Melayu telah bermigrasi ke Semenanjung Malaka, Filipina Selatan, Pantai Kalimantan Barat dan Selatan, Sunda Kalapa, dan kepulauan Indonesia lainnya. Pengaruh positif dari migrasi suku bangsa tersebut adalah tersebarnya budaya dan bahasa Melayu. Bahasa Melayu kemudian digunakan sebagai bahasa pergaulan bukan hanya antarsuku Melayu yang bertempat tinggal di pulau-pulau berbeda-beda melainkan juga oleh suku-suku bangsa non-Melayu.

Ramainya perdagangan Nusantara abad ke-15-16 dan perkembangan politik kerajaan-kerajaan Islam Nusantara berpengaruh terhadap adanya migrasi penduduk di Nusantara. Dalam hal pertama, para pedagang Islam Nusantara memegang peranan penting. Mereka bermukim di kota-kota pelabuhan yang jaraknya jauh dari pulau tempat mereka berasal. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai golongan migran pedagang. Misalnya pedagang dari Makassar, Bugis, Ambon, Gresik, Melayu, Malaka, dan Jawa memiliki permukiman di kota pelabuhan Banten.

Sejak abad ke-15, kota-kota pelabuhan Nusantara menjadi tempat berkumpul dan bermukimnya pedagang yang memiliki latar belakang budaya berbeda-beda. Banyak di antara mereka yang kemudian bertempat tinggal menetap dan bercampur dengan penduduk setempat. Walaupun tidak dicatat dalam sejarah mengenai jumlahnya, percampuran tersebut tetap berpengaruh positif terhadap proses integrasi antarsuku bangsa di Indonesia.

Perkembangan **politik** di Jawa abad ke-17 berpengaruh terhadap migrasi penduduk. Misalnya, pada masa berkuasanya Sultan Agung di Mataram (1613-1645) banyak penduduk Mataram yang tidak menyukai gaya

kepemimpinannya, sehingga menjadi **mengungsi ke daerah lain** yaitu sebagai berikut:

- 1) Rakyat Madura yang tidak mau tunduk pada penguasa Mataram, memohon perlindungan pada Sultan Banten. Kemudian Mereka bermukim dan menetap di Banten.
- 2) Sebagian pasukan Mataram yang gagal menyerang Batavia 1629, banyak yang melarikan diri ke kerajaan Islam Banten dan menjadi warga Banten.
- 3) Petani dari Jawa Tengah yang tidak mau membayar pajak ke Sultan Mataram. Mereka melarikan diri ke pesisir utara Jawa Barat. Mereka mencari lahan subur di daerah Karawang, Indramayu, dan Cirebon untuk ber-sawah. Perkembangan ini diikuti oleh tindakan Sultan Agung yang kemudian mengirimkan petani-petani ke daerah itu dalam rangka meningkatkan produksi beras.

Para pelarian politik tersebut kemudian menetap di wilayah Jawa Barat dan bergaul dengan penduduk setempat. Sampai sekarang kebudayaan yang berkembang di daerah tersebut merupakan campuran kebudayaan Sunda dan Jawa. Mereka lebih senang disebut orang Banten, Cirebon, Indramayu daripada disebut orang Sunda atau Jawa.

**Migrasi penduduk Indonesia** pada abad ke-19 banyak mendapat pengaruh dari perkembangan politik dan ekonomi pada abad itu. Ketika pemerintah kolonial Belanda memberlakukan sistem tanam paksa atau *cultuur stelsel* (**1830-1870**), banyak penduduk Jawa yang dipindahkan ke Sumatra. Mereka dipekerjakan di pusat-pusat perkebunan sebagai kuli kontrak. Mereka dibayar oleh pemerintah dengan upah yang rendah. Meskipun demikian, mereka terus bekerja di tempat tersebut dan menjadi pemukim tetap sampai melahirkan generasi berikutnya.

Tahun 1870 banyak dibuka usaha perkebunan swasta terutama di Sumatra dan Jawa. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, pemilik perkebunan mendatangkan buruh dalam jumlah besar dari daerah yang padat penduduknya. Perkembangan ini mendorong penduduk dari Jawa secara sukarela bermigrasi ke pusat-pusat perkebunan lainnya terutama di Sumatra. Mereka disebut **kelompok migran ke pusat perkebunan**.

Sampai akhir abad ke-19, penduduk Jawa telah menyebar di Lampung, Sumatra Utara, Kalimantan, dan daerah lainnya di luar Jawa. Akibat dari perkembangan itu adalah komposisi etnis di daerah-daerah tersebut sudah lebih majemuk dibandingkan dengan sebelumnya. Di beberapa daerah yang semula

hanya dihuni oleh etnis tertentu menjadi multietnis. Misalnya, daerah Lampung telah dihuni oleh etnis Lampung, Jawa, Sunda, serta Melayu. Kalimantan Barat telah dihuni oleh etnis Melayu, Daya, Madura, Jawa, dan Cina. Jadi, dapat dikatakan bahwa karena perkembangan dan daya tarik ekonomi, suatu daerah di Indonesia bisa dihuni oleh berbagai etnis. Kondisi tersebut berpengaruh positif terhadap proses integrasi, apabila di antara mereka mengadakan hubungan yang terbuka satu dengan lainnya.

Dengan adanya hubungan yang saling terbuka di antara berbagai etnis yang tinggal di daerah tertentu akan terjadi percampuran budaya (**akulturasi**) dan fisik (**perkawinan**). Dengan cara seperti itu akan lahir identitas budaya baru yang menjadi milik bersama. Percampuran tersebut akan mengarah kepada proses integrasi bangsa.

Migrasi penduduk daerah-daerah di Indonesia ke pusat-pusat pendidikan, walaupun jumlahnya kecil, ternyata berpengaruh paling besar terhadap proses integrasi bangsa. Sejak pemerintah kolonial membuka sekolah-sekolah untuk golongan Belanda, Indo, dan Bumi Putra (**pribumi**) di kota-kota besar Nusantara abad ke-19 dan awal abad ke-20 terjadi migrasi penduduk dari berbagai daerah di Nusantara ke kota-kota tersebut. Kemudian kota-kota tersebut menjadi pusat bermukimnya golongan terdidik yang berasal dari berbagai daerah. Sekolah-sekolah guru di Bandung, Malang, Surabaya, dan Medan dimasuki oleh pelajar pribumi dari kalangan bangsawan daerah di Indonesia.

Begitu juga dengan sekolah pertanian di Bogor, kedokteran di Jakarta, teknik di Bandung menjadi tempat untuk melahirkan golongan terdidik yang berpandangan integral tentang kebangsaan Indonesia. Golongan *migran terdidik* di perkotaan, seperti di **Batavia (Jakarta)**, Bandung atau Surabaya akhirnya menjadi pelopor dalam mengintegrasikan pandangan berbagai suku bangsa ke dalam wawasan kebangsaan.

Lahirnya organisasi-organisasi politik (**Sarikat Islam, Boedi Utomo, Indische Partij**, dan **lain-lain**) serta perkumpulan-perkumpulan pemuda daerah (**Jong Sumatra, Java, Maluku, Aceh, Pemuda Sekar Rukun**) di Jakarta pada awal abad ke-20 adalah sebagai bukti keberhasilan golongan migran terdidik dalam mengembangkan wawasan integral. Golongan tersebut telah meninggalkan pandangan sempit kedaerahan.

Mereka mengembangkan pandangan baru yang lebih integral atau lebih terpadu berupa wawasan kebangsaan. Melalui pendidikan, pandangan mereka

tentang diri dan lingkungan budayanya sudah lebih luas, dari pandangan kedaerahan ke pandangan nasional. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya migrasi golongan terdidik ini, proses integrasi menuju pada negara kesatuan dilakukan dengan pandangan-pandangan yang luas golongan terpelajar melalui perjuangan politik kebangsaan.

Dari faktor-faktor integrasi yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa proses integrasi menuju kesatuan bangsa, bahasa, dan negara Indonesia merupakan proses yang panjang. Dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, akhirnya paham integralistik muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Gerakan kebangsaan (pergerakan nasional) yang berkembang pada awal abad ke-20 bukan merupakan gerakan yang dilandasi oleh paham yang muncul pada awal abad tersebut, melainkan dipengaruhi oleh proses integrasi yang terjadi sejak ratusan tahun yang lalu.

Perkembangan etnis, kultural, historis, dan ideologis Islam pelayaran dan perdagangan Nusantara, bahasa Melayu, migrasi penduduk dan akultuasi budaya, dan lahirnya golongan terdidik merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi lahir dan berkembangnya paham kebangsaan atau nasionalisme pada awal abad ke-20.

## **E. Belajar dari Pengalaman Sejarah Menuju Terbentuknya Wawasan Kebangsaan.**

### **1) Pelajaran yang Harus Terus Dikaji**

Mengkaji kembali perkembangan sejarah bangsa Indonesia abad ke-16-19, banyak pelajaran dapat diambil oleh generasi sekarang.

**Pertama**, integrasi suatu bangsa merupakan suatu proses historis yang panjang. Dengan demikian integrasi tidak dilakukan dalam satu atau dua kejadian sejarah melainkan terjadi dalam suatu proses yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Kita merasa sebagai satu bangsa karena ada keterikatan budaya satu dengan lainnya, ada persamaan kepentingan, menggunakan bahasa yang sama, mengakui sistem nilai yang sama, ada persamaan identitas, dan adanya solidaritas sebagai satu bangsa yang sama.

**Kedua**, semakin sering terjadi hubungan atau komunikasi, kontak budaya, pergaulan antargolongan suku bangsa, agama dan tradisi daerah di Indonesia, maka akan semakin baik terbentuknya identitas bangsa. Melalui komunikasi yang terbuka antarsuku bangsa, sikap prasangka, sentimen

kesukuan atau kedaerahan lambat laun dapat dihilangkan. Dengan demikian, proses integrasi akan lebih cepat.

**Ketiga**, semakin terdidik suatu bangsa, semakin baik paham kebangsaan bangsa itu. Dalam hal ini pandangan sempit kedaerahan, kesukuan, agama, dan lain-lain bisa dihilangkan melalui pendidikan. Melalui pendidikan, cara pandang orang tentang diri dan lingkungannya akan meluas. Lingkungan hidup mereka bukan hanya daerah dan suku bangsa yang berada di sekitarnya melainkan juga daerah dan suku bangsa yang berada di luar lingkungan geografis mereka.

**Keempat**, dalam perkembangan proses integrasi terdapat faktor yang memperkuat dan faktor yang memperlemah. Faktor penguat telah diuraikan di atas. Adapun faktor yang dapat memperlemah integrasi meliputi, sikap primordialisme, kesukuan, kedaerahan, diskriminasi, kesenjangan sosial-ekonomi, kemiskinan, dan kebodohan, isolasi, masuknya paham asing yang negatif, eksklusifisme, fanatisme agama yang sempit, dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan.

## 2) Faktor Disintegrasi yang Harus Diatasi

### a). Primordialisme

**Primordialisme** adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan golongan berdasarkan identitas daerah, agama, ras, suku, atau golongannya.

Secara etimologi, primordialisme berasal dari kata Latin **prima** atau **primus** yang artinya "yang utama." Primordialisme merupakan sikap atau pandangan yang sempit karena lebih mengutamakan identitas atau kepentingan daerah, suku, atau budaya lokalnya dibandingkan dengan kepentingan umum atau bangsa. Dengan demikian, pandangan primordialisme sering diartikan sebagai suatu paham kedaerahan, kesukuan, ras, fanatisme agama yang sempit, dan lain-lain.

Golongan masyarakat yang menganut paham primordialisme dalam pelaksanaannya biasanya akan melakukan diskriminasi sikap dan tindakan yang membedakan-bedakan orang berdasarkan golongan, suku, ras, agama, dan lainnya. Dengan diskriminasi seperti itu, golongan, suku, ras, atau penganut agama yang samalah yang diutamakan terlebih dahulu, sedangkan golongan yang lain diabaikan atau dinomorduakan.

### b). Kebodohan dan Isolasi

**Kebodohan dan isolasi** atau ketertutupan adalah juga faktor-faktor yang menghambat integrasi. Masyarakat yang bodoh biasanya memiliki pandangan yang sempit. Mereka mengisolasi diri dalam lingkungan tempat tinggalnya. Mereka memandang dunia ini hanya terbatas pada lingkungan sosialnya. Di luar lingkungan sosial mereka adalah orang lain atau orang asing yang dipandang berbeda dengan mereka. Kondisi masyarakat seperti ini merupakan faktor penghambat integrasi karena akan sangat mudah dipecah-pecah oleh golongan yang berniat untuk mengadakan perpecahan atau disintegrasi.

### **c). Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Ekonomi**

Kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi adalah faktor yang menghambat integrasi. Kesenjangan sosial ekonomi, baik kesenjangan antar golongan masyarakat ataupun kesenjangan antardaerah, adalah faktor yang memperlemah integrasi. Apabila kemiskinan dan kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin ini terjadi kebetulan pada etnis atau golongan tertentu, yang muncul adalah sikap prasangka dan kecemburuan dari golongan yang miskin terhadap yang kaya. Apabila kebetulan yang miskin dan yang kaya tersebut berasal dari etnis atau suku yang berbeda, isu yang muncul ke permukaan adalah bukan masalah kesenjangan sosial-ekonominya melainkan soal etnis atau suku bangsa. Faktor ini bahkan jauh lebih buruk dibandingkan dengan faktor-faktor yang memperlemah di atas. Alasannya adalah karena aspek sosial ekonomi merupakan aspek yang paling mendasar yang berkaitan dengan kebutuhan manusia.

Gerakan disintegrasi yang terjadi di beberapa kawasan dunia, seperti di Eropa Timur, Uni Soviet, dan Yugoslavia dapat dijadikan sebagai contoh betapa faktor kesenjangan mempercepat disintegrasi bangsa. Walaupun dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, gerakan disintegrasi di kawasan tersebut memperlihatkan kuatnya kesenjangan sosial ekonomi dan kesenjangan daerah. Daerah-daerah yang miskin yang dihuni oleh etnis tertentu merasa didominasi oleh etnis lain yang berhasil dalam bidang ekonomi. Pertentangan antar etnis atau golongan di negara-negara tersebut menyebabkan terjadinya disintegrasi atau perpecahan.

Proses integrasi bangsa Indonesia yang dimulai sejak abad ke-16 sampai abad ke-19 dan diteruskan pada abad ke-20 melalui gerakan kebangsaan sebenarnya tidak berakhir sampai terbentuknya negara kesatuan

RI, 17 Agustus 1945, melainkan terus berlanjut sampai sekarang. Selama proses tersebut, kedua faktor penguat dan penghambat terus berhadapan. Mengenai faktor mana yang lebih kuat mempengaruhi proses integrasi tersebut, bergantung bagaimana bangsa dan negara tersebut memperjuangkannya. Apabila faktor penguat itu terus dipelihara dan faktor penghambat terus dihilangkan, integrasi bangsa akan tetap terjaga.



## Kegiatan Belajar 2.

### Bentuk-bentuk Perjuangan Pada Masa Pergerakan Nasional Indonesia.

#### A. Pertumbuhan dan Perkembangan dan Pergerakan Nasional Indonesia

##### 1). Pengertian Pergerakan Nasional Indonesia

Pada awal abad ke-20, perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda tidak lagi dilakukan dengan cara peperangan seperti halnya pada abad-abad sebelumnya. Jika pada abad ke-17 hingga 19 perlawanan dilakukan melalui kekuatan senjata maka pada abad ke-20 perlawanan dilakukan melalui organisasi-organisasi yang bergerak di bidang sosial-budaya, ekonomi, dan politik. Organisasi-organisasi tersebut disebut sebagai organisasi pergerakan nasional.

Adapun ciri-ciri organisasi pergerakan nasional adalah sebagai berikut.

- a. Keanggotaannya tidak didasarkan atas kelompok etnis (**suku**) tertentu melainkan semua kelompok etnis.
- b. Sebagian besar pemimpin organisasi pergerakan nasional itu berasal dari kalangan terdidik yang memperoleh pendidikan Barat serta kelompok intelektual yang sudah bergaul dengan berbagai bangsa, baik melalui sekolah di dalam negeri, Belanda, maupun yang telah menunaikan ibadah haji.
- c. Organisasi-organisasi pergerakan nasional tersebut memiliki tujuan yang jelas bagi kepentingan seluruh bangsa di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, dan politik.
- d. Organisasi-organisasi pergerakan nasional memiliki paham kebangsaan atau nasionalisme.

Dengan demikian, pergerakan nasional Indonesia yang terjadi pada awal abad ke-20 dapat diartikan sebagai pergerakan di seluruh wilayah Indonesia yang berasal dari berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya yang terhimpun dalam organisasi-organisasi pergerakan dan bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik serta untuk memperoleh kemerdekaan dari penjajah Belanda. Kata nasional

diartikan sebagai seluruh bangsa dan bukan hanya daerah-daerah seperti terjadi pada abad-abad sebelumnya.

Tumbuh dan berkembangnya nasionalisme Indonesia meliputi semua aspek kehidupan berupa semangat untuk memberdayakan ekonomi, pendidikan, politik, sosial, dan budaya yang diwujudkan dalam bentuk perjuangan organisasi pergerakan nasional yang moderat atau radikal, yang mau bekerja sama (**kooperatif**) maupun tidak bekerja sama (**non-kooperatif**) dengan pemerintah kolonial Belanda.

## 2).Latar Belakang Pergerakan Nasional Indonesia

Pada umumnya lahir, tumbuh, dan berkembangnya pergerakan nasional di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keadaan dunia internasional (**ekstern**) serta kondisi yang terjadi di dalam negeri (**intern**) pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

### a. Faktor Ekstern

**Pertama**, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di seluruh negara-negara jajahan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin merupakan fase timbulnya kesadaran tentang pentingnya semangat nasional, perasaan senasib sebagai bangsa terjajah, serta keinginan untuk mendirikan negara berdaulat lepas dari cengkeraman imperialisme. Fase tumbuhnya anti imperialisme tersebut berkembang bersamaan dengan atau dipengaruhi oleh lahirnya golongan terpelajar yang memperoleh pengalaman pergaulan internasional serta mendapat pendidikan formal dari negara-negara Barat. Selain itu, paham-paham baru yang lahir di Eropa, seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan komunisme mulai menyebar ke negeri jajahan melalui kalangan terpelajar. Paham-paham tersebut pada dasarnya mengajarkan tentang betapa pentingnya persamaan derajat semua warga negara tanpa membedakan warna kulit, asal usul keturunan, dan perbedaan keyakinan agama. Paham tersebut masuk ke Indonesia dan dibawa oleh tokoh-tokoh Belanda yang berpandangan maju, golongan terpelajar Indonesia yang memperoleh pendidikan Barat, serta alim ulama yang menunaikan ibadah haji dan memiliki pergaulan dengan sesama umat Muslim seluruh dunia.

**Kedua**, Perang Dunia I yang berlangsung 1914-1918 telah menyadarkan bangsa-bangsa terjajah bahwa negara-negara imperialis telah berperang di antara mereka sendiri. Perang tersebut merupakan perang memperebutkan

daerah jajahan. Tokoh-tokoh pergerakan nasional di Asia, Afrika dan Amerika Latin telah menyadari bahwa kini saatnya telah tiba bagi mereka untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah yang sudah lelah berperang. Berakhirnya Perang Dunia I yang ditandai dengan adanya rumusan damai mengenai penentuan nasib sendiri (**self determination**) disambut positif oleh negeri-negeri jajahan. Tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia semakin memiliki pijakan perjuangan dengan adanya konsep yang diciptakan oleh Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson, tersebut. Bagi tokoh pergerakan nasional Indonesia, konsep **self determination** harus diperjuangkan dan bukan diatur oleh pemerintah kolonial Belanda. Salah seorang tokoh nasionalis yang menyuarkan konsep **self determination** bagi bangsa Indonesia adalah **Iwa Kusumasumantri**, pengurus Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda pada 1923.

**Ketiga**, konflik ideologi dunia antara kapitalisme atau imperialisme sosialisme atau komunisme telah memberikan dorongan bagi bangsa-bangsa terjajah untuk melawan kapitalisme atau imperialisme Barat. Lahirnya komunisme melalui **Revolusi Rusia 1917** yang diikuti dengan semangat anti kapitalisme dan imperialisme telah mempengaruhi tumbuhnya ideologi perlawanan di negara-negara jajahan terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat. Sebagian organisasi pergerakan nasional Indonesia, seperti PKI telah menggunakan ideologi komunis sebagai ideologi perjuangan melawan Belanda yang identik dengan kapitalisme Barat.

**Keempat**, lahirnya nasionalisme di Asia dan di negara-negara jajahan lainnya di seluruh dunia telah mengilhami tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905 telah memberikan keyakinan bagi tokoh nasionalis Indonesia bahwa bangsa kulit putih Eropa dapat dikalahkan oleh kulit berwarna Asia. Demikian juga, model pergerakan nasional yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi di India, Mustapha Kemal Pasha di Turki, serta Dr. Sun Yat Sen di Cina telah memberikan inspirasi bagi kalangan terpelajar nasionalis Indonesia bahwa imperialisme Belanda dapat dilawan melalui organisasi modern dengan cara memajukan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan politik pada bangsa Indonesia terlebih dahulu sebelum memperjuangkan kemerdekaan.

## **b. Faktor Intern**

**Pertama**, sistem penjajahan Belanda yang eksploitatif terhadap sumber daya alam dan manusia Indonesia serta sewenang-wenang terhadap warga pribumi telah menyadarkan penduduk Indonesia tentang adanya sistem kolonialisme dan imperialisme Barat yang menerapkan ketidaksamaan dan perlakuan yang membeda-bedakan (diskriminatif).

**Kedua**, kenangan akan kejayaan masa lalu. Rakyat Indonesia pada umumnya menyadari bahwa mereka pernah memiliki negara kekuasaan yang jaya dan berdaulat di masa lalu (**Sriwijaya dan Majapahit**). Kejayaan ini menimbulkan kebanggaan dan meningkatnya harga diri sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu, rakyat Indonesia berusaha untuk mengembalikan kebanggaan dan harga diri sebagai suatu bangsa tersebut.

**Ketiga**, lahirnya kelompok terpelajar Indonesia yang memperoleh pendidikan Barat dan Islam dari luar negeri. Kesempatan ini terbuka setelah pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 menjalankan Politik Etis (**edukasi, imigrasi, dan irigasi**).

Orang-orang Indonesia yang memperoleh pendidikan Barat berasal dari kalangan priyayi abangan yang memiliki status bangsawan. Sebagian lainnya berasal dari kalangan priyayi dan santri yang secara sosial ekonomi memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji serta memperoleh pendidikan tertentu di luar negeri. Kelompok ini oleh sejarawan **Sartono Kartodirdjo (1990)** disebut sebagai **homines novi** atau orang-orang baru yang terbentuk karena faktor pendidikan dan yang memiliki sikap, pandangan, dan orientasi tentang lingkungan masyarakatnya. Pada kedua kelompok inilah paham-paham nasionalisme, demokrasi, sosialisme, komunisme, dan liberalisme masuk.

**Keempat**, lahirnya kelompok terpelajar Islam telah menyadarkan bangsa Indonesia terjajah yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Kelompok intelektual Islam telah menjadi **agent of change** atau agen pengubah cara pandang masyarakat bahwa nasib bangsa Indonesia yang terjajah tersebut tidak dapat diperbaiki melalui belas-kasihan penjajah seperti Politik Etis misalnya. Nasib bangsa Indonesia harus diubah oleh bangsa Indonesia sendiri dengan cara memberdayakan bangsa melalui peningkatan taraf hidup di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya.

**Kelima**, semangat persamaan derajat tersebut berkembang menjadi gerakan politik yang sifatnya nasional. Tindakan pemerintah kolonial yang semakin represif seperti pembuangan para pemimpin Indische Partij pada 1913, ikut campurnya Belanda dalam urusan internal Sarekat Islam, dan

penangkapan tokoh-tokoh nasionalis telah menimbulkan gerakan nasional untuk memperoleh kebebasan berbicara, berpolitik, serta menentukan nasib sendiri tanpa dicampuri pemerintah kolonial Belanda.

## **B. Pertumbuhan dan Perkembangan Wawasan Kebangsaan pada masa Pergerakan Nasional Indonesia.**

### **a. Budi Utomo (BU)**

Politik Etis yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda membawa dampak munculnya priyayi Jawa yang "baru" atau priyayi rendahan. Mereka memiliki pandangan bahwa pendidikan adalah kunci untuk kemajuan. Kelompok inilah yang merupakan kelompok pertama pembentuk suatu organisasi yang benar-benar modern.

Dilatarbelakangi situasi ekonomi yang memburuk di Pulau Jawa karena eksploitasi kolonial dan westernisasi, seorang priyayi baru, Dr. Wahidin Sudirohusodo bangkit mengangkat kehormatan rakyat Jawa dengan memberikan pengajaran. Ia berusaha menghimpun dana beasiswa (**Study Fond**) untuk memberikan pendidikan Barat kepada golongan priyayi Jawa.

Propaganda yang dijalankan oleh Dr. Wahidin tersebut disambut oleh **Soetomo**, seorang mahasiswa **School Tot Opleiding van Indische Arsten (STOVIA)** atau **Sekolah Dokter Jawa**. Bersama rekan-rekannya dia mendirikan **Budi Utomo (BU)** di Jakarta pada 20 Mei 1908.

Organisasi BU ini sejak awal sudah menetapkan bahwa bidang perhatiannya meliputi penduduk Jawa dan Madura. Sejak kelahirannya terdapat pro dan kontra. Yang kontra membuat organisasi tandingan bernama **Regent Bond**, yang anggota-anggotanya berasal dari kalangan bupati penganut status quo yang tidak ingin berubah. Sedang yang pro, seperti antara lain **Tirto Kusumo** dari Karang Anyar merupakan kalangan muda yang berpandangan maju.

Pada kongres BU yang diselenggarakan pada 3-5 Oktober 1908, Tirto Kusumo diangkat menjadi Ketua Pengurus Besar. Dalam kongres ini, **etno-nasionalisasi** semakin bertambah besar. Selain itu, dalam kongres tersebut juga timbul dua kelompok, yaitu kelompok pertama diwakili oleh golongan pemuda yang merupakan minoritas yang cenderung menempuh jalan politik dalam menghadapi pemerintah kolonial. Adapun kelompok kedua merupakan golongan mayoritas diwakili oleh golongan tua yang menempuh perjuangan dengan cara lama, yaitu sosiokultural.

Golongan minoritas yang berpandangan maju dalam organisasi ini dipelopori oleh **Dr. Tjipto Mangunkusumo**. Dia ingin menjadikan Budi Utomo bukan hanya sebagai partai politik yang mementingkan rakyat, melainkan juga sebuah organisasi yang kegiatannya tersebar di Indonesia, bukan hanya di

Jawa dan Madura. Sementara golongan tua menginginkan pembentukan dewan pimpinan yang didominasi oleh para pejabat generasi tua. Golongan ini juga mendukung pendidikan yang luas bagi kaum priyayi dan mendorong kegiatan pengusaha Jawa. Tjipto terpilih sebagai seorang anggota dewan. Namun, pada 1909 dia mengundurkan diri dan akhirnya bergabung dengan **Indische Partij** yang perjuangannya bersifat radikal.

Dalam perkembangan selanjutnya BU tetap meneruskan cita-cita yang mulia menuju "kemajuan yang selaras buat tanah air dan bangsa." Ketika pecah Perang Dunia I (**1914**) BU turut memikirkan cara mempertahankan Indonesia dari serangan luar. Dalam rapat umumnya di Bandung pada 5-6 Agustus 1915 ditetapkan mosi yang menegaskan perlunya milisi yang harus diputuskan dalam parlemen. Menurut BU, untuk tujuan itu harus dibentuk dewan perwakilan rakyat terlebih dahulu. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, BU ikut dalam komite "**Indie Weeber**," yang dalam rapat-rapatnya diusulkan untuk membentuk **Dewan Rakyat (Volksraad)**. Atas usulan BU tersebut ternyata Dewan Rakyat baru dapat terealisasi diakhir perang, yaitu 1918. Dalam Dewan ini banyak orang BU yang jadi wakilnya. Belanda memang memberi peluang pada BU karena BU bersikap moderat sehingga pemerintah kolonial tidak terlalu mengkhawatirkan organisasi tersebut.

Pada dekade ketiga abad ke-20, April 1930, BU dibuka keanggotannya bagi semua golongan bangsa Indonesia. Pada kongres April 1931, anggaran dasar BU diubah untuk membuka diri. Pada kongres itu diputuskan untuk bekerja sama dengan organisasi lain yang berdasarkan prinsip kooperasi. Dalam konferensi yang diselenggarakan pada Desember 1932 di Solo, diumumkan tentang disahkannya badan persatuan yang terdiri dari organisasi-organisasi yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Umumnya organisasi itu akan bersifat kooperasi tapi terhadap sesuatu hal yang lain bisa jadi non kooperasi.

Walaupun pada awalnya organisasi ini dikhususkan untuk masyarakat Jawa dan Madura, sebagai organisasi modern pertama dalam pergerakan nasional yang bertujuan untuk memajukan masyarakat pribumi dan usianya paling lama, BU merupakan fase pertama dari nasionalisme Indonesia. Ternyata fase etnonasionalisme dalam pergerakan nasional Indonesia harus dilalui sebagai proses penyaluran diri terhadap identitas bangsa Jawa khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

## **b. Sarekat Islam (SI)**

**Sarekat Islam (SI)** pada awalnya adalah perkumpulan bagi pedagang Islam yang didirikan pada akhir 1911 di Solo, oleh Haji Samanhudi. Dengan nama semula **Sarekat Dagang Islam (SDI)**, Organisasi ini melakukan perjuangan berdasarkan kooperasi dengan tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji Islam. SDI juga bertujuan agar para pedagang Islam

dapat bersaing dengan pedagang Barat maupun Timur Asing. SDI kemudian berkembang sangat cepat. Hal ini disebabkan oleh:

- 1) perdagangan keturunan Tionghoa adalah suatu halangan buat perdagangan Indonesia (**monopoli bahan-bahan batik**) ditambah pula dengan tingkah laku mereka yang tidak mengenakan pada pedagang pribumi;
- 2) kemajuan gerak langkah penyebaran agama Kristen yang merupakan tantangan bagi para penganut Islam;
- 3) cara adat lama yang bertentangan dengan ajaran Islam yang terus dipertahankan di daerah kerajaan-kerajaan Jawa, makin lama makin dirasakan sebagai penghinaan terhadap umat Islam.

Perkumpulan pedagang Islam tumbuh pesat terutama setelah Tjokroaminoto masuk dan kemudian menjadi pemimpin Sarekat Dagang Islam. Organisasi ini kemudian diganti namanya menjadi Sarekat Islam (**SI**) sejak 1912. Ternyata setelah berganti nama, organisasi ini memiliki pengaruh politik yang besar dan perkembangannya semakin pesat. Tujuan SI mencapai kemajuan rakyat yang nyata dengan jalan persaudaraan, persatuan, dan tolong-menolong di antara kaum muslimin. Keanggotaannya terbuka untuk setiap lapisan masyarakat yang beragama Islam. Tujuan utama SI adalah untuk mengembangkan perekonomian yang dengan tegas dinyatakan oleh **HOS Tjokroaminoto** pada 26 Januari 1913. Cita-cita itu mendapat sambutan luar biasa sehingga pengaruh SI semakin meluas di kalangan umat Islam dan mendapat perhatian serius dari pemerintah kolonial Belanda. Kurang dari satu tahun SI menjadi organisasi massa yang cukup besar pada zamannya.

Perkembangan SI yang pesat tersebut mengkhawatirkan pemerintah kolonial Belanda. **Gubernur Jenderal Idenburg** tidak menolak kehadiran SI. Namun, ketika SI meminta badan hukum, Idenburg hanya memberi badan hukum bagi SI lokal bukan sentral SI, dengan pertimbangan bahwa SI lokal tidak akan membahayakan politik pemerintahannya. Kanalisasi Idenburg cukup berhasil, walaupun timbul perlawanan dari SI lokal di Garut dalam kasus **Afdeling B**. Setelah kejadian itu, **Central SI (SI Pusat)** diberi pengakuan badan hukum pada Maret 1916.

Pada Juni 1916, kongres SI menghasilkan sebuah cita-cita terbentuknya satu bangsa bagi penduduk Indonesia. Pada kongres 1917, SI mulai dimanfaatkan oleh kekuatan lain untuk kepentingan politik tertentu. Sejak saat itu, SI mulai disusupi aliran revolusioner sosialis dengan tokohnya **Semaun** yang menduduki ketua SI cabang Semarang. Dengan masuknya Semaun, tujuan SI kemudian berubah menjadi membentuk pemerintah sendiri dan perjuangan melawan penjajah dari kapitalisme yang jahat. Dalam kongres diputuskan tentang keikutsertaan SI dalam Volksraad.

Pada kongres SI ketiga tahun 1918, pengaruh SI semakin meluas. Begitu pula pengaruh Semaun di SI. CSI masih membiarkan kaum sosialis-komunis yang ada di dalam tubuh SI, dengan alasan untuk mencegah perpecahan. Pada kongres yang ke-5 di Yogyakarta, 2-6 Maret 1921, ditetapkan ketentuan baru

tentang anggaran dasar SI yang merupakan hasil persetujuan dengan kaum komunis. Keterangan ini dirancang oleh dua orang komisaris, yaitu **Agus Salim** dan Semaun. Isinya menyatakan bahwa penjajahan dalam lapangan kebangsaan dan perekonomian itu adalah buah dari kapitalisme dan kapitalisme hanya bisa dikalahkan oleh persatuan kaum buruh dan petani.

Pada 10 Oktober 1921, diselenggarakan kongres ke-6. Pada Kongres tersebut dicetuskan perlunya disiplin partai, seperti pada organisasi atau partai politik. Sikap ini dikemukakan oleh Agus Salim dan **Abdul Muis**. Dengan adanya disiplin partai ini, seseorang harus memilih antara SI atau organisasi lain. Pilihan ini sebenarnya bertujuan untuk membersihkan barisan SI dari unsur-unsur komunis. PKI tentu saja tidak setuju dengan pilihan tersebut, walaupun akhirnya mereka menerima setelah suara terbanyak menyatakan usul tersebut dapat ditetapkan sebagai keputusan partai. Dengan keputusan tersebut, seseorang tidak mungkin menjadi anggota SI sekaligus menjadi anggota PKI.

Setelah Semaun dan Darsono dikeluarkan dari organisasi, SI pecah menjadi dua, yaitu **SI Merah** dan **SI Putih**. SI Merah yang dipimpin oleh Semaun berpusat di Semarang dan berazaskan komunis. Adapun SI Putih dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto yang berlandaskan Islam.

Pada kongres SI ke-VII, organisasi ini berubah menjadi **Partai Sarekat Islam (PSI)**, sedangkan SI Merah menjadi **Sarekat Rakyat** yang kemudian menjadi organisasi yang berada di bawah naungan PKI.

Kongres PSI 1927 menyatakan bahwa tujuan perjuangan adalah mencapai kemerdekaan nasional. Karena tujuannya yang jelas itulah maka PSI menggabungkan diri dengan **Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)**. Pada tahun itu juga nama PSI ditambah namanya dengan "Indonesia" menjadi PSII untuk menunjukkan perjuangan kebangsaan Indonesia.

Karena keragaman cara pandang di antara elite partai, PSII pecah menjadi beberapa partai politik, seperti **Partai Islam Indonesia** yang dipimpin oleh **Sukiman**, **PSII Kartosuwiryo**, **PSII Abikusno**, dan **PSII** sendiri. Perpecahan itu melemahkan PSII dalam perjuangannya.

### c. Indische Partij

Indische Partij merupakan organisasi campuran orang Indo dengan Pribumi. Didirikan oleh **Dr. Ernest Francois Eugene Douwes Dekker** pada 25 Desember 1912. Dr. Ernest Francois Eugene Douwes Dekker adalah seorang keluarga jauh **Edward Douwes Dekker (Multatuli)**. Dia kemudian bekerja sama dengan dua orang Jawa terkemuka, **Tjipto Mangunkusumo** dan **Suardi Suryaningrat**. Ketiga tokoh ini dikenal dengan sebutan **Tiga Serangkai**.

**Indische Partij** menyatakan bahwa nasionalisme merupakan hal paling penting dan oleh karena itu harus diperjuangkan. Partai ini juga dengan tegas



menyatakan harus dicapainya kemerdekaan Indonesia dari pemerintah kolonial Belanda. Dalam perjuangannya, partai ini bersikap radikal terutama dalam menghadapi sistem kolonial Belanda. Indische Partij menuntut dihapusnya eksploitasi rakyat dan oleh karena itu mereka beranggapan bahwa penghapusan eksploitasi dapat dicapai apabila Hindia Belanda memperoleh kemerdekaan sistem politik dan pemerintahan yang demokratis.

Dalam perkembangannya, ternyata golongan mayoritas pribumi lebih banyak terserap ke organisasi lain daripada ke IP, meskipun Douwes Dekker telah berkeliling Jawa untuk melakukan propaganda dan mensosialisasikan partai ini pada 1912. Sementara unsur Indo Eropa yang konservatif lebih cenderung bergabung dengan **Indische Bond**.

Anggaran dasar **Indische Partij** menetapkan tujuan membangun lapangan hidup, menganjurkan kerja sama atas dasar persamaan ketatanegaraan, memajukan tanah air Hindia Belanda, dan mempersiapkan kehidupan rakyat merdeka. Indische Partij berdiri atas dasar nasionalisme yang menampung semua suku bangsa di Hindia Belanda dengan tujuan akhir mencapai kemerdekaan. Paham kebangsaan ini kemudian diolah dan dikembangkan oleh partai-partai lain, seperti **Perhimpunan Indonesia (PI)** dan **Partai Nasional Indonesia (PNI)**.

Karena keradikalan partai ini, pemerintah kolonial bersikap keras dan oleh karena itu tidak memberi badan hukum. Sikap pemerintah kolonial semakin keras terutama setelah setelah munculnya artikel Suwardi Suryaningrat pada peringatan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari jajahan Prancis. Artikel ini berjudul "**Als ik een Nederlander was**" (**Andaikata aku seorang Belanda**). Artikel ini membuat pemerintah kolonial Belanda marah dan disusul dengan ditangkapnya ketiga tokoh Indische Partij yang kemudian diasingkan ke Belanda. Pada 4 Mei 1913, Indische Partij dinyatakan sebagai partai terlarang.

Walaupun sudah dibubarkan, ketiga tokoh ini tetap berjuang. Douwes Dekker tetap di jalur politik. Suwardi Suryaningrat yang kemudian lebih dikenal sebagai **Ki Hajar Dewantara** terjun dalam bidang pendidikan. Adapun Tjipto Mangunkusumo meneruskan perjuangannya yang radikal walaupun dalam beberapa waktu harus berjuang di dalam penjara.

Meskipun organisasi ini berumur pendek, Indische Partij telah memberikan perlawanan gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Partai ini merupakan partai pertama yang menanamkan paham kebangsaan.

#### **d. Muhammadiyah**

**Muhammadiyah** merupakan organisasi Islam modern yang paling penting di Indonesia yang berdiri di Yogyakarta pada 18 November 1912. Organisasi ini terbentuk karena masyarakat Islam yang berpandangan maju menginginkan terbentuknya sebuah organisasi yang mampu menampung aspirasi mereka dan menjadi sarana bagi kemajuan umat Islam. Keberadaan

tokoh-tokoh Islam yang berpandangan maju tersebut terbentuk karena pendidikan serta bergaul dengan kalangan Islam di seluruh dunia melalui ibadah haji. Salah seorang tokoh tersebut adalah **KH. Ahmad Dahlan** yang kemudian mendirikan organisasi ini.

Pada 1890, KH Ahmad Dahlan naik haji ke Mekkah dan belajar bersama **Ahmad Khatib**. Dia pulang dari haji dengan tekad untuk memperbaiki pemikiran umat Islam di Jawa dan menentang usaha-usaha penyebaran agama lain. Pada 1909, Ahmad Dahlan masuk organisasi Budi Utomo dengan harapan bisa mengadakan pembaruan. Namun, karena organisasi tersebut tidak mampu menampung aspirasinya, dia kemudian keluar dan mendirikan Muhammadiyah.

Muhammadiyah didirikan atas dasar agama dan bertujuan untuk melepaskan agama Islam dari adat kebiasaan yang jelek yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul.

Dalam pergerakannya, Muhammadiyah berkembang dalam bidang pendidikan serta kesejahteraan sosial, seperti mendirikan rumah yatim piatu, rumah fakir miskin, balai pengobatan, dan rumah sakit. Pada mulanya organisasi ini berkembang secara lambat. Organisasi ini ditentang, diabaikan oleh para pejabat, guru-guru Islam gaya lama di desa-desa, hierarki-hierarki keagamaan yang diakui pemerintah, dan oleh komunitas-komunitas orang-orang yang saleh yang menolak ide-ide modern. Dengan demikian, pada masa awal kelahirannya, Muhammadiyah tidak memiliki dukungan dan simpati dari berbagai golongan.

Muhammadiyah mendapat badan hukum dari Gubernur Jenderal Belanda melalui surat ketetapan No. 81 tanggal 22 Agustus 1914 yang memberi ijin pendirian di daerah Yogyakarta. Setelah berbadan hukum, organisasi ini mulai mendapat sambutan kalangan Islam sehingga dapat berkembang dengan baik. Karena perkembangannya yang semakin meluas itu, Muhammadiyah membuka cabang di luar Yogya. Pada 16 Agustus 1920, dikeluarkan SK Pemerintah No. 40 yang mengizinkan pendirian cabang Muhammadiyah di luar Yogya. Kemudian pada 2 September 1921 dengan SK No 36, Muhammadiyah diizinkan didirikan di seluruh wilayah Hindia Belanda.

Antara 1920-1925, Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah untuk mendidik anak bangsa. Dua tahun setelah KH. Ahmad Dahlan wafat, Muhammadiyah hanya beranggotakan 4000 orang. Akan tetapi dengan jumlah anggota yang kecil itu, Muhammadiyah telah mampu mendirikan 55 sekolah dengan 4000 murid, 2 balai pengobatan di Yogya dan Surabaya, satu panti asuhan, dan sebuah rumah untuk orang miskin. Organisasi ini terus berkembang dan hingga 1938 telah menyebar ke semua pulau utama Indonesia.

Setelah menyebar luas ke seluruh Indonesia, organisasi ini mampu mengelola 834 masjid dan langgar, 31 perpustakaan umum, dan 1774 sekolah, serta memiliki 5516 orang mubalig pria dan 2114 mubalig wanita. Dapat dikatakan sejarah Islam Modern di Indonesia sesudah 1925 adalah sejarah Muhammadiyah. Walaupun unsur politik dalam organisasi ini kecil, peranannya

dalam pergerakan nasional serta dalam menumbuhkan kesadaran bangsa tentang pentingnya kemajuan dan kemerdekaan adalah sangat besar.

#### **e. Gerakan dan Organisasi Pemuda**

Organisasi pemuda yang didirikan pada awal abad ke-20 meliputi organisasi-organisasi yang didukung oleh para pemuda di daerah. Salah satu di antaranya adalah Perkumpulan Pasundan. Perkumpulan ini didirikan pada 1914 dengan tujuan mempertinggi derajat kesopanan, kecerdasan, memperluas kesempatan kerja, dan penghidupan kegiatan masyarakat. Pemimpinnya adalah R. Kosasih Surakusumah, R. Otto Kusuma, dan Bupati Serang R.A.A. Jatiningrat. Organisasi Pasundan merupakan organisasi semacam Budi Utomo bagi orang Sunda.

Pada masa sesudah sekitar 1909, di seluruh Indonesia banyak bermunculan organisasi-organisasi baru di kalangan elite terpelajar yang sebagian besar didasarkan atas identitas-identitas kesukuan. 1) Sarekat Ambon (1920) dan organisasi-organisasi pendahulunya, seperti Molukus Politik Verbond, bertujuan untuk melindungi kepentingan orang-orang Ambon. Organisasi ini bersifat radikal, ingin berparlemen dan meminta pemerintahan sendiri. Perkumpulan yang lain adalah Jong Java (1918) yang keanggotaannya khusus untuk orang-orang Jawa.

Organisasi lainnya yang berusaha menampung para pemuda dan mahasiswa adalah Sarekat Sumatra (Sumatranen Bond, 1918) yang merupakan kelompok mahasiswa Sumatra, Jong Minahasa (Pemuda Minahasa, 1918), yaitu organisasi untuk orang-orang Minahasa, dan Timorsch Verbond atau Persekutuan orang-orang Timor (1921) yang didirikan oleh orang-orang Timor dari Pulau Roti dan Savu untuk melindungi kepentingan-kepentingan rakyat Timor. Selain itu, pada 1923 dibentuk pula Kaum Betawi di bawah pimpinan M. Husni Thamrin yang berusaha memajukan hak-hak warga Betawi. Organisasi ini bertujuan memajukan perdagangan, pertukaran pengajar. M. Husni Thamrin kemudian menjadi anggota Volksraad dan Ketua Fraksi Nasional.

Organisasi tersebut di atas tidak hanya mencerminkan adanya keghairahan baru untuk berorganisasi pada zaman pergerakan nasional, namun juga mencerminkan kuatnya identitas-identitas kesukuan dan kemasyarakatan yang terus berlangsung. Unsur-unsur etnosentrismenya juga masih ada dengan mengisolasi diri, tetapi regionalisme itu juga perlahan dapat menciptakan nasionalisme. Regionalisme itu selalu dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial untuk memecah belah dengan melakukan infiltrasi.

Perkumpulan pemuda didirikan juga untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Perkumpulan pemuda pertama adalah Tri Koro Dharmo (Tiga Tujuan Mulia) yang berdiri pada 7 Maret 1915 di gedung perkumpulan Budi Utomo. Tri Koro Dharmo bertujuan untuk mengadakan suatu tempat latihan untuk calon-calon pemuda nasional. Cinta tanah air menjadi dorongan bagi berdirinya organisasi ini. Organisasi ini kemudian diganti namanya menjadi

Jong Java yang orientasinya lebih luas dari sekedar organisasi daerah, serta berorientasi pada pergerakan rakyat.

Setelah berkembangnya rasa nasionalisme pada akhir Perang Dunia I, kegiatan Jong Java beralih ke politik. Dalam kongresnya pada 1926 di Solo, organisasi ini memiliki anggaran dasar yang menyebutkan ingin menghidupkan rasa persatuan dengan seluruh bangsa Indonesia dan bekerja sama dengan semua organisasi pemuda yang ada guna membentuk kesatuan Indonesia. Organisasi ini juga berkeinginan melakukan fusi dengan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Organisasi Jong Java dan yang lainnya dibubarkan dan diganti dengan Indonesia Muda yang bertujuan Indonesia merdeka.

Di Sumatra, lahir Jong Sumatra Bond pada 9 Desember 1927 dengan tujuan memperkokoh ikatan sesama murid Sumatera dan mengembangkan kebudayaan Sumatra. Organisasi ini dipimpin oleh M. Yamin. Kehadiran organisasi ini segera diikuti dengan berdirinya Jong Minahasa dan Jong Celebes.

Pada Kongres Pemuda I, Mei 1926, untuk pertama kalinya beberapa organisasi pemuda berhasil dikumpulkan dalam sebuah kongres. Kongres yang dipimpin oleh M. Tabrani ini dihadiri Jong Java, Jong Sumatra, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Islamieten Bond, dan Perkumpulan Pemuda Theosofi. Walaupun tidak berhasil membuat fusi, mereka telah sepakat tentang paham persatuan. Baru pada 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda II dapat dipadukan semua organisasi pemuda menjadi satu kekuatan nasional. Kesepakatan tersebut diikuti dengan ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yang terkenal dengan Sumpah Pemuda.

Jong Islamieen Bond adalah anggota Jong Java yang keluar karena mempunyai prinsip keislaman yang kuat dan tidak dapat diakomodasi oleh organisasi yang ada. Tujuan organisasi ini adalah memajukan pengetahuan Islam. Walaupun tidak berpolitik, organisasi ini bernaung dalam SI. Pendiriannya yang kuat menyebabkan dia tidak mau berfusi ke PPPI.

#### **f. Organisasi Kepanduan**

Selain organisasi pemuda yang sifatnya politis, lahir pula organisasi kepanduan. Kepanduan mulai ada pada permulaan Perang Dunia I. Kegiatannya difokuskan pada olah raga dengan anggotanya sebagian besar dari kalangan murid-murid sekolah, baik sekolah pribumi maupun Belanda.

Salah satu organisasi kepanduan adalah Ned Indische Badvinders Vereeniging (NIPV). Organisasi ini merupakan kepanduan campuran pertama yang didirikan pada 1917. Organisasi kepanduan Indonesia yang pertama adalah Javaansche Padvinders Organisatie (JPO) didirikan di Solo (1916) oleh Mangkunegoro VII.

Setelah 1920, organisasi kepanduan berkembang sejalan dengan berkembangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Dalam organisasi politik pun terdapat organisasi kepanduan, seperti Sarekat Islam Afdeling Pandu, Hizbul Wathon, dan Nationale Islamitische Padvinderij. Pada 1938, didirikan

Badan Pusat Persaudaraan Kependuaan untuk menampung organisasi-organisasi kependuaan yang sudah ada. Organisasi tersebut pada Februari 1941 mengadakan perkemahan bersama.

#### **g. Partai Komunis Indonesia (PKI)**

Hampir bersamaan waktunya dengan berdirinya Indische Partij, lahir pula organisasi pergerakan sosialis yang mengadopsi nilai-nilai perjuangan komunisme dari Rusia. Gerakan ini dipelopori oleh seorang Marxis Belanda yang ingin menyebarkan teori-teori Marxis di Indonesia. Konsep perjuangannya adalah mempertentangkan kelas antara kaum pribumi sebagai buruh dan penjajah sebagai kapitalisme Barat. Salah seorang pembawa ajaran tersebut ke Indonesia adalah **Sneevliet**, pendiri organisasi **Indische Demokratische Vereeniging (ISDV)**.

Sneevliet berusaha mempengaruhi tokoh-tokoh terkemuka pada perkumpulan orang Indonesia untuk menerima ajaran Marxis. Setelah itu tokoh-tokoh Marxis dalam ISDV menyusup ke tubuh organisasi SI yang dianggap memiliki basis massa yang banyak dan bersedia menerima pikiran-pikiran radikal perjuangan sosialis. Selain itu, anggota SI yang radikal bisa masuk ISDV tanpa harus meninggalkan SI. Pada 1917, pengikut ISDV membentuk fraksi di SI.

Komunisme cepat berkembang di kalangan rakyat Indonesia yang terjajah. Kondisi buruknya kehidupan ekonomi pribumi dapat dimanfaatkan dengan baik oleh tokoh-tokoh komunis Indonesia. Tokoh-tokoh komunis juga dengan jeli dapat memanfaatkan kondisi buruknya hubungan antara gerakan politik dan pemerintah Belanda. ISDV semakin kuat setelah pecahnya Revolusi Rusia pada 1917, berdirinya Uni Soviet, dan Communis International (Comintern) Maret 1919. Komunis Indonesia makin radikal dan mendapat dukungan yang luas setelah pada 1922 melakukan pemogokkan-pemogokkan untuk menuntut kenaikan upah dari kaum kapitalis.

Karena gerakannya yang radikal dan menentang kapitalisme Belanda maka orang-orang ISDV diusir Belanda. Pimpinan komunis di Indonesia diambil alih oleh orang Indonesia sendiri dan kemudian mendirikan organisasi dengan nama Perserikatan Komunis Hindia pada Mei 1920. Pada 1924 nama ini berubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI dengan cepat berkembang karena mendapat banyak dukungan dari kalangan rakyat jelata yang terjajah. PKI masuk Komintern pada 1920. Tokoh-tokoh PKI di antaranya, Semaun, Alimin, Tan Malaka, dan Darsono.

Kekuatan PKI berada di kalangan buruh yang karena situasi dan kondisi ekonomi akibat depresi ekonomi sejak berakhirnya Perang Dunia I merasa tidak memiliki organisasi yang memperjuangkan kepentingan mereka. Banyak buruh yang diberhentikan atau upahnya diturunkan.

PKI menyebarkan pengaruhnya sampai ke luar Jawa. Karena aktifitasnya yang praktis dan radikal, organisasi ini dengan tegas menyatakan ingin melakukan gerakan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda. Tokoh-tokohnya dengan cerdas mampu memanfaatkan militansi Islam yang juga berkeinginan untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, banyak tokoh Islam yang direkrut untuk menyebarkan propaganda PKI yang anti kapitalisme Belanda. Misalnya di daerah berbasis Islam, Banten dan Minangkabau, terjadi pemberontakan untuk melawan kapitalisme Barat. Pemberontakan yang terjadi pada 1926 dan 1927 tersebut dapat ditumpas karena tidak terorganisir dan bersifat lokal.

Akibat pemberontakan PKI yang gagal, pemerintah Hindia Belanda melakukan penindasan terhadap pengikutnya. Pemimpinnya dibuang, sejumlah 13.000 anggotanya ditangkap, 4.000 orang dihukum, dan 1.300 orang dibuang ke Digul. Oleh pemerintah kolonial, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang, walaupun aktivitas politiknya masih terus berjalan. Semaun, Darsono, dan Alimin meneruskan propaganda untuk mendukung aksi revolusioner dan menuntut kemerdekaan Indonesia.

#### **h. Taman Siswa**

Perguruan Taman Siswa lahir pada 1922, dipimpin oleh Suwardi Suryaningrat. Taman Siswa merupakan organisasi yang bertujuan mengembangkan pendidikan dan kebudayaan. Taman Siswa tidak hanya berkuat dengan ide tapi juga merealisasikannya dengan mendirikan sekolah-sekolah sebagai bukti mengembangkan pendidikan dan kebudayaan nasional untuk menghadapi dominasi pendidikan dan kebudayaan kolonial.

Organisasi Taman Siswa selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Pemimpin dan rakyat bersatu sehingga pergerakan rakyat dapat diarahkan agar tidak menimbulkan bencana pada masyarakat Indonesia.

Dalam perkembangannya, organisasi Taman Siswa dijadikan alat untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Melalui pendidikan Taman Siswa dapat dihasilkan golongan elit terdidik yang akan berperan dalam pergerakan nasional. Dengan makin berkembangannya sekolah swasta, baik yang dikelola oleh Taman Siswa maupun yang dikelola oleh organisasi, membuat semakin suburnya golongan nasionalis di kalangan anak bangsa. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah kolonial karena dengan semakin banyaknya sekolah swasta, semakin subur pula perluasan gagasan nasionalisme di Indonesia yang dianggap akan mengancam eksistensi pemerintah kolonial Belanda di Indonesia.

Pemerintah kolonial berusaha untuk mematikan sekolah swasta dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sekolah Liar pada 1932. Undang-undang itu melarang beroperasinya sekolah-sekolah yang tidak mendapat izin dari pemerintah kolonial. Dengan penentangan dan perjuangannya yang terus-menerus, akhirnya Taman Siswa berhasil mempengaruhi pemerintah kolonial

untuk menghapuskannya. Undang-Undang tersebut akhirnya dicabut pemerintah pada tahun 1933. Ditengah situasi pergerakan nasional yang sedang mandek akibat dengan dinon-aktifkannya para pemimpin pergerakan oleh pemerintah, Taman Siswa muncul sebagai lembaga alternatif dalam melanjutkan perjuangan.

Pencabutan UU sekolah liar itu terpaksa dilakukan pemerintah karena kuatnya dukungan terhadap Taman Siswa dari berbagai organisasi pergerakan seperti PSII, PNI Baru, Muhammadiyah, Budi Utomo, Partindo, dan lain-lain. Organisasi-organisasi tersebut menyatakan berdiri di belakang Ki Hajar Dewantara dan menentang sikap pemerintah kolonial.

#### **i. Partai Nasional Indonesia (PNI)**

Sesudah organisasi komunis dilarang oleh pemerintah kolonial, terbukalah kesempatan yang besar untuk mendirikan organisasi baru. Kaum terpelajar dan intelektual serta tokoh-tokoh perjuangan lainnya berusaha memikirkan strategi yang harus dijalankan untuk mencegah agar organisasi-organisasi baru tidak terperangkap pada kendala yang sama. Untuk itu mereka berkesimpulan bahwa kekerasan dan radikalisme bukan jalan perjuangan yang baik dalam menghadapi pemerintah kolonial.

Atas dasar itulah, orang-orang dari Algemene Studie Club Bandung pada 4 Juli 1927 mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) di Bandung. Organisasi yang dipimpin oleh **Ir. Soekarno** ini didirikan untuk menampung orang-orang yang merasa aspirasinya tidak terwakili dalam organisasi-organisasi politik yang ada saat itu. Tujuan PNI adalah untuk mencapai Indonesia merdeka dengan asas perjuangan berdiri di atas kaki sendiri, nonkooperasi, dan **marhaenisme**.

Sebagai sebuah organisasi yang baru, PNI dapat dikatakan cepat perkembangannya. Hal ini salah satunya disebabkan karena adanya faktor Ir. Soekarno yang pandai memukau massa dengan gaya oratornya. Ia sering berpidato dengan propaganda-propaganda yang bertema, antara lain karakter yang buruk dari penjajah, konflik antara pengusaha dan petani, "front sawo matang melawan front kulit putih," menghilangkan ketergantungan dan menegakkan kemandirian, serta perlunya pembentukan negara dalam negara.

Propaganda-propaganda Ir. Soekarno yang menarik dukungan masyarakat telah mengkhawatirkan pemerintah kolonial Belanda. Gubernur Jenderal

Belanda dalam pembukaan sidang Volksraad pada 15 Mei 1928 memberi peringatan kepada pemimpin PNI untuk menahan diri dalam ucapan dan propagandanya. Karena tidak dihiraukan, peringatan kedua kemudian disampaikan pada Juli 1929.

Pada akhir 1929 tersiar kabar bersifat provokasi yang menyebutkan bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan pada awal 1930. Berdasarkan hal tersebut pemerintah kolonial Belanda segera mengadakan penangkapan terhadap para pemimpin PNI, seperti **Ir. Soekarno, Maskun, Gatot**

**Mangkupraja**, dan **Supriadinata**. Penangkapan itu terjadi pada 24 Desember 1929. Mereka kemudian diajukan ke depan pengadilan **Landraad** di Bandung.

Pengadilan Ir. Soekarno dan rekannya dihadiri oleh banyak kalangan, baik dari tokoh-tokoh pergerakan di luar maupun di dalam kota Bandung. Pidato pembelaan Soekarno dikenal dengan **Indonesia Menggugat** yang di dalamnya berisi antara lain pandangan Soekarno mengenai pergerakan nasional, pentingnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, dan dihapuskannya pemerintah kolonial.

Pengadilan tersebut menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara untuk Soekarno, 2 tahun untuk Gatot Mangkuraja, 1 tahun 8 bulan untuk Maskun dan 1 tahun 3 bulan untuk Supriadinata dengan tuduhan melanggar pasal 153 dan 169 KUHP, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan menentang kekuasaan pemerintah.

Dipenjarakannya tokoh-tokoh penting PNI menimbulkan kekhawatiran bagi anggota PNI yang lain. Bila mereka mengikuti jejak para pemimpin PNI itu maka mereka merasa berada dalam bahaya. Untuk keselamatan para anggota, pengurus besar PNI memutuskan untuk membubarkan PNI pada 1933.

Sementara itu, salah seorang tokoh PNI yang merasa khawatir dengan kondisi tersebut, Mr. Sartono, kemudian menyelenggarakan kongres luar biasa. Dalam kongres tersebut dia berhasil mendirikan partai baru bernama Partai Indonesia (Partindo) dengan Sartono sendiri sebagai ketuanya.

Ternyata usaha ini menghadapi kesulitan karena jumlah anggota Partindo jauh lebih sedikit dibandingkan dengan anggota PNI dulu. Dengan kondisi ini, Partindo tetap menantikan kepulangan Soekarno untuk membangkitkan semangat massanya.

Sementara itu, anggota-anggota PNI yang tidak setuju dengan pembubaran PNI dan pembentukan Partindo, seperti Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir mendirikan partai baru yaitu PNI Pendidikan (**PNI Baru**).

#### **j. Partai Indonesia (Partindo)**

Partindo mempertahankan asas nonkooperatifnya. Konsep sosiodemokrasi dan sosionasionalisme dari Ir. Soekarno diterima sebagai cita-cita yang dituju Partindo.

Kongres Partindo pada 15-17 Mei 1932 di Jakarta dihadiri oleh Ir. Soekarno yang saat itu belum menjadi anggota. Dalam pidato tersebut, Soekarno memunculkan slogan-slogan "Indonesia merdeka sekarang," "kerakyatan dan kebangsaan," dan "Persatuan Indonesia." Sartono yang sebelumnya merupakan salah seorang pemimpin PNI yang menjadi sponsor berdirinya PPKI, ternyata menolak menggabungkan Partindo ke dalam PPKI. Dia hanya ingin bekerja sama dengan partai-partai yang non-kooperatif. Sartono mengatakan bahwa Partindo adalah partai politik yang menghendaki kemerdekaan Indonesia yang didasarkan prinsip menentukan nasib sendiri, ke-



bangsaan, menolong diri sendiri, dan demokrasi. Partindo menekankan perjuangan radikal dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan penuh.

Soekarno mencoba untuk mempersatukan dua organisasi yang berbeda tersebut. Namun, karena adanya perbedaan prinsip perjuangan, dia gagal menyatukan kedua organisasi tersebut. Setelah masuk menjadi anggota, Soekarno diangkat menjadi ketua cabang di Bandung. Ia berusaha menarik massa, sehingga pada Juni 1933 anggotanya mencapai 3.762 orang. Jumlah anggotanya bertambah besar karena kemampuan pidato dan propaganda Soekarno terutama yang dilakukannya di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pada kongres Juli 1933, Soekarno menjelaskan konsep Marhaenisme. Pada dasarnya Marhaenisme menyukai perjuangan membela rakyat kecil serta menekankan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keadilan sosial untuk marhaen atau rakyat kecil.

Sikap keras pemerintah kolonial terhadap Partindo semakin keras. Pada 1933 dikeluarkan larangan bagi pegawai negeri untuk menjadi anggota Partindo. Puncaknya adalah penangkapan Soekarno pada 1 Agustus 1933 oleh Gubernur Jenderal De Jonge. Soekarno kemudian dibuang ke Ende, Flores.

Setelah penangkapan tersebut, ruang gerak partai menjadi sempit. Kongres yang rencananya akan diselenggarakan pada 30-31 Desember 1934 dilarang oleh pemerintah. Meskipun begitu, Partindo berjalan terus sampai membubarkan diri pada 18 November 1936.

#### **k. PNI Pendidikan**

PNI Pendidikan dikenal juga dengan Pendidikan Nasional Indonesia. Organisasi ini lahir atas ketidakpuasan terhadap langkah pergerakan PNI dan pembubaran PNI. Anggota PNI yang merasa tidak puas segera bersatu dalam kelompok golongan merdeka yang tersebar di kota-kota besar di Jawa dan Sumatra. Kelompok ini menamakan dirinya klub pendidikan untuk menunjukkan bahwa anggotanya dibina dan dididik dalam kesadaran politik tinggi.

Sebelum terbentuknya PNI Pendidikan golongan merdeka ini mengeluarkan surat kabar Daulat Rakyat yang isinya menyerang Partindo. Partai ini lahir ketika diadakan konferensi di Yogyakarta pada 15-27 Agustus 1932 di bawah pimpinan Sukemi. Moh. Hatta yang baru kembali dari Belanda pada Agustus 1932 mencoba mempengaruhi dan mengembangkan PNI Pendidikan.

Saat Moh. Hatta menjadi pimpinan PNI Pendidikan, jumlah anggotanya meningkat, terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur. Setelah menjadi pemimpin, Hatta segera mengembangkan anggotanya untuk meningkatkan nasionalisme Indonesia menuju Indonesia merdeka. Penekanannya pada keadilan rakyat dan kebangsaan. Hatta tidak menghendaki pemerintahan yang dipimpin oleh golongan ningrat atau yang mementingkan kepentingan pribadi. Dia menghendaki pemerintahan rakyat.

Karena yang mengetuai PNI Pendidikan adalah Hatta dan Syahrir, sedangkan yang mendominasi Partindo adalah Soekarno, orang sering

menyebut Partindo adalah partainya Soekarno, sedang PNI Pendidikan adalah partainya Hatta dan Syahrir. Ir Soekarno berpendidikan Hindia Belanda, sedangkan Hatta dan Syahrir berpendidikan Barat yang menganut sosialisme serta demokrasi. Bila dilihat dari golongan sosial, pemimpin Partindo berasal dari keluarga bangsawan dan pemimpin PNI Pendidikan berasal dari kalangan bawah.

Pada 1934, Partindo, PNI Pendidikan, dan PSII dilarang melakukan kegiatan dan rapat-rapat. Disusul penangkapan dan pembuangan pemimpin Partindo dan PNI Pendidikan. Soekarno di buang ke Flores, sedangkan Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir di buang ke **Boven Digul**.

## I. Gerakan Wanita

Gerakan kebangsaan Indonesia tidak hanya di bidang politik melainkan juga sosial dan wanita. Salah seorang tokoh wanita yang menyuarakan pentingnya emansipasi antara pria dan wanita adalah RA. Kartini. Dia kemudian dinggap sebagai pelopor gerakan emansipasi yang dalam tulisan-tulisannya menuntut agar wanita Indonesia diberi pendidikan karena mereka memikul tugas sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya.

"Habis Gelap Terbitlah Terang" adalah buku yang merupakan kumpulan surat-surat Kartini tentang berbagai buah pikirannya. Buku ini ditulis oleh Abendanon pada 1899. Isinya antara lain tentang posisi wanita dalam keluarga, adat istiadat, dan keterbelakangan wanita.

Karena senang membaca dan bergaul dengan berbagai kalangan, Kartini memiliki pandangan yang positif tentang betapa pentingnya memajukan kaum wanita. Dengan belajar sungguh-sungguh, dia berpendapat bahwa memajukan kaumnya dan menolak konservatisme adalah sangat penting.

Demikian juga adat yang mengharuskan wanita hanya tinggal di dalam rumah harus dirombak. Kartini meminta agar rakyat Indonesia diberi pendidikan karena pendidikan merupakan masalah pokok bagi masyarakat Indonesia. Pendidikan tersebut bukan hanya untuk laki-laki, tapi juga kaum wanita. Pendidikan yang diperoleh itu selain untuk mengasah intelegensi, juga untuk membangun sopan santun dan kesusilaan. Kunci kemajuan wanita menurut Kartini adalah kombinasi antara kebudayaan Barat dan Timur.

Setelah sebagian wanita Indonesia mendapatkan pendidikan Barat serta bergaul dengan tokoh-tokoh emansipasi Barat, bermunculanlah perkumpulan atau organisasi wanita. Perkumpulan tersebut salah satu di antaranya adalah Putri Mardika (1912) yang bertujuan memajukan pengajaran terhadap anak-anak perempuan dengan memberikan penerangan dan bantuan dana. Demikian pula dengan sekolah Kaoetamaan Istri yang didirikan oleh Raden Dewi Sartika di Bandung pada 1904. Sekolah Kartini juga didirikan di Jakarta pada 1913, di Madiun pada 1914, di Malang dan Cirebon pada 1916, Pekalongan pada 1917, Indramayu, Surabaya, dan Rembang pada 1918.

Selanjutnya, pada 1920 mulai muncul perkumpulan wanita yang bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan. Di Minahasa, berdiri De Gorontalosse Mohammedaansche Vrouwen Vereeniging. Di Yogyakarta lahir perkumpulan Wanita Utomo yang mulai memasukan perempuan ke dalam kegiatan dasar pekerjaan.

Corak kebangsaan sudah mulai masuk dan besar pengaruhnya dalam pergerakan wanita setelah 1920, sehingga dirasakan perlu ada hubungan dan ikatan di antara perkumpulan wanita tersebut. Terbentuknya sikap ini yang dipengaruhi oleh propaganda PNI mendorong dilangsungkannya Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta pada 1928. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi wanita, di antaranya Ny. Sukanto (Wanita Utomo), Nyi Hajar Dewantara (Taman Siswa bagian wanita), dan Nona Suyatin (Pemuda Indonesia bagian keputrian).

Tujuan kongres Perempuan Indonesia adalah untuk mempersatukan cita-cita dan usaha untuk memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan di antara perkumpulan wanita tersebut. Dalam rapat itu dibicarakan soal nasib wanita dalam perkawinan dan poligami.

Dalam kongres itu pada umumnya disepakati untuk memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan yang berhaluan kooperatif. Hasil kongres yang terpenting adalah dibentuknya federasi perkumpulan wanita, bernama Perikatan Perempuan Indonesia (PPI).

Dalam Kongres pada 28-31 Desember 1929 di Jakarta, nama Perikatan Perempuan Indonesia diubah menjadi Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPPI).

Kongres Perempuan Indonesia II diadakan atas inisiatif PPII di Jakarta pada 20-24 Juli 1935. Kongres yang dipimpin oleh Ny. Sri Mangunsarkoro itu membicarakan tentang masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Dalam kongres tersebut, pergerakan wanita Indonesia mendapat perhatian dari Komite Perempuan Sedunia yang berkedudukan di Paris.

Kongres Perempuan III berlangsung pada 23-28 Juli 1938 di bidang dipimpin oleh Ny. Emma Puradireja. Kongres tersebut menyetujui suatu rencana undang-undang perkawinan modern yang disusun oleh Ny. Mr. Maria Ulfah Santoso. Kongres juga membicarakan masalah politik, antara lain hak pilih dan dipilih bagi kaum wanita untuk Badan Perwakilan.

Selain itu, kongres memutuskan pada 22 Desember menjadi Hari Ibu, dengan menyatakan bahwa peringatan Hari Ibu tiap tahun diharapkan akan menambah kesadaran kaum wanita Indonesia akan kewajibannya sebagai Ibu Bangsa.

## m. Perhimpunan Indonesia Sebagai Manifesto Politik Pergerakan Nasional

### 1) Berdirinya Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda

Organisasi pergerakan nasional bukan hanya berdiri di Indonesia melainkan juga di negeri Belanda. Banyaknya mahasiswa Indonesia serta orang-orang Belanda yang menaruh perhatian pada nasib Hindia Belanda mendorong terbentuknya organisasi pergerakan nasional di Negeri Belanda. Pada 1908 terbentuklah **Indische Vereeniging (IV)** atau **Perhimpunan Hindia** yang merupakan organisasi perhimpunan mahasiswa Indonesia di Belanda.

Indische Vereeniging dibentuk sebagai sebuah perhimpunan yang bersifat sosial. Organisasi ini merupakan ajang pertemuan dan komunikasi antarmahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda. Namun, setelah pemimpin Indische Partij tiba di Belanda, IV terus berkembang pesat dan memusatkan kegiatannya pada bidang politik. Tokoh-tokoh organisasi yang berpandangan maju tersebut mencetuskan untuk pertama kali konsep Hindia Bebas dari Belanda dan terbentuknya negara Hindia yang diperintah oleh rakyatnya sendiri.

Organisasi IV semakin besar setelah pada 1917 menggabungkan diri dengan **Chung Hwa Hui**, sebuah organisasi mahasiswa Indonesia keturunan Cina. Program kegiatannya antara lain bekerja di Indonesia dan membentuk **Indonesische Verbond van Studeerenden (Persatuan Mahasiswa Indonesia)**. Hal terpenting dari penggabungan ini adalah dengan digantinya "Indische" dengan "Indonesische." Hal ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia dikenalkan istilah "Indonesische" atau "Indonesia" dalam kegiatan akademik dan politik.

Sejak terpilihnya **Iwa Kusumasumatri** sebagai ketua IV yang baru pada 1923, sifat perjuangan politik organisasi semakin kuat. Dalam rapat umum 1923 organisasi ini menyepakati tiga asas pokok organisasi yaitu:

- a) Indonesia menentukan nasib sendiri;
- b) untuk itu Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemauan sendiri;
- c) untuk melawan pemerintah kolonial Belanda, bangsa Indonesia harus bersatu.

Untuk mewujudkan asas tersebut, pemimpin IV meminta kepada mahasiswa untuk terus mengikuti perkembangan politik di Indonesia. Ia juga menekankan bahwa jika seluruh komponen Indonesia bersatu dalam melawan Belanda maka ketiga tujuan tadi akan mudah tercapai.

Untuk menunjukkan sikap nasionalismenya, para pengurus organisasi ini kemudian mengubah nama majalah **Hindia Putera** dengan **Indonesia Merdeka**. Pada edisi pertama majalah Indonesia Merdeka diungkapkan bahwa penjajahan Indonesia oleh Belanda dan penjajahan Belanda oleh Spanyol memiliki banyak persamaan. Selain itu diungkapkan pula alasan tidak

disebutnya negara Hindia Belanda karena hampir sama dengan orang Belanda yang tidak mau menyebut negaranya dengan Nederland-Spanyol. Para mahasiswa mengetahui hal ini setelah mempelajari mengenai perjuangan Belanda melawan Spanyol.

Organisasi ini juga berpendapat bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa yang ada di dunia, termasuk hak bangsa Indonesia yang masih terjajah. Semangat perjuangan politiknya yang jelas menuju Indonesia merdeka menjadikan organisasi ini disegani oleh organisasi-organisasi sejenis di kalangan negara-negara terjajah di Asia. Propaganda tentang tujuan dan ideologi baru bangsa Indonesia disosialisasikan secara lebih gencar oleh organisasi ini dengan menerbitkan buklet dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-15 pada 1924.

Untuk lebih menunjukkan ke Indonesiaannya, organisasi IV berubah namanya menjadi **Perhimpunan Indonesia** pada 3 Februari 1925. Dalam majalah Indonesia Merdeka, ditulis bahwa perubahan nama ini diharapkan dapat memurnikan organisasi dan mempertegas prinsip perjuangan organisasi ini.

Sementara, dalam artikel yang muncul pada bulan yang sama dengan judul "**Strijd in Twee Front**" (**Perjuangan di Dua Front**), menyatakan bahwa perjuangan selanjutnya akan lebih berat dan pemuda Indonesia tidak akan ada yang dapat menghindarinya. Mereka harus berusaha mengerahkan semua kemampuannya jika ingin mencapai kemerdekaan.

## **2) Perhimpunan Indonesia dan Ideologi Nasional**

Para pemimpin Perhimpunan Indonesia menyatakan bahwa organisasi mereka merupakan organisasi pergerakan nasional. Sebagai kelompok elite serta golongan menengah baru, mereka harus memainkan peran pentingnya sebagai agen pengubah masyarakat dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka, dari masyarakat terbelenggu menjadi masyarakat bebas, dan dari masyarakat yang bodoh menjadi masyarakat yang pintar.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan wadah negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat. Salah seorang pemimpin PI, Moh. Hatta, dengan penuh semangat menyerukan bersatunya semua unsur nasionalis Indonesia.

Di antara empat pikiran pokok ideologi Perhimpunan Indonesia, pokok pikiran "merdeka" merupakan kuncinya. Keempat pokok pikiran itu adalah kesatuan nasional, kemerdekaan, nonkooperatif, dan kemandirian.

Ideologi Perhimpunan Indonesia yang terdiri dari empat gagasan telah disetujui pada Januari 1925. Keempat gagasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Membentuk suatu negara Indonesia yang merdeka;
- b) Partisipasi seluruh lapisan rakyat Indonesia dalam suatu perjuangan terpadu untuk mencapai kemerdekaan;

- c) Konflik kepentingan antara penjajah dan yang dijajah harus dilawan dengan mempertajam dan mempertegas konflik. Konflik ditujukan untuk melawan penjajah;
- d) Pengaruh buruk penjajahan Belanda terhadap kesehatan fisik dan psikis bangsa Indonesia harus segera dipulihkan dan dinormalkan dengan cara terus berjuang mencapai kemerdekaan.

Paham marxisme, leninisme, dan sosialisme di Eropa mengenai perjuangan kelas dan konflik antara kaum kapitalis dan kaum proletar telah mempengaruhi cara pandang tokoh-tokoh pergerakan nasional. Oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional, paham-paham tersebut diaplikasikan dalam ideologi pergerakan nasional. Mereka memandang bahwa rakyat negeri jajahan adalah sebagai kaum proletar yang tertindas akibat imperialisme yang identik dengan kapitalisme. Tokoh pergerakan, seperti Semaun, tokoh PKI yang dibuang ke Amsterdam, Mohammad Hatta, Ali Sastroamidjo, Gatot Mangkupraja, dan Subarjo adalah penganut paham-paham baru dari Eropa tersebut. Paham marxis, leninis, dan sosialis telah memberikan dorongan kepada mahasiswa dalam menumbuhkan semangat perjuangan bangsa kulit sawo matang Indonesia dengan bangsa kulit putih Belanda.

### 3) Perhimpunan Indonesia dan Kegiatan Politik

Dalam melakukan kegiatan politiknya, para mahasiswa Indonesia di Belanda sering mengadakan pertemuan-pertemuan, diskusi ilmiah dan politik di antara mereka sendiri serta dengan berbagai mahasiswa lainnya dari negeri Belanda. Tujuannya adalah untuk mengembangkan persamaan pandangan serta menggalang simpati baik dari Indonesia, dunia internasional, maupun dari orang Belanda sendiri. Terhadap tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia yang bergerak di Indonesia dan masih ragu-ragu tentang tujuan kemerdekaan, PI menaruh kekecewaannya. Oleh karena itu, PI menganjurkan agar semua organisasi pergerakan nasional menjadikan konsep Indonesia merdeka sebagai program utamanya.

PI merasa yakin bahwa yang terpenting pada kegiatan pergerakan nasional adalah mempropagandakan dan menyebarkan paham nasionalisme di kalangan orang Indonesia, baik itu yang berada di Indonesia atau di Belanda. Propaganda tersebut dilakukan dengan memanfaatkan majalah Indonesia Merdeka di Belanda. Selain itu, PI juga membuka perwakilannya di Indonesia untuk menyebarkan majalah itu di Indonesia, pada 21 Januari 1926, dengan menunjuk **Sudjadi** sebagai perwakilan pengurus.

Seruan mahasiswa Indonesia di negeri Belanda terhadap organisasi pergerakan di Indonesia untuk meningkatkan aktifitas politik mendapat sambutan di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah PKI. Pada November 1926, komite revolusioner PKI mengadakan pemberontakan di Jawa Barat. Januari 1927, PKI juga mengulangi aksinya di pantai barat Sumatra. Namun kedua aksi ini

mengalami kegagalan sehingga mempengaruhi gerakan nasionalis lainnya diantaranya:

- a) memberikan pelajaran, khususnya kepada kaum nasionalis radikal bahwa pemberontakan seperti itu adalah sia-sia dan akan mudah ditumpas;
- b) PKI yang dianggap radikal oleh pemerintah kolonial segera dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia;
- c) untuk beberapa saat pergerakan nasional menjadi mandeg karena para tokoh pergerakan nasional banyak yang ditangkap.

#### 4) Penangkapan Pemimpin Perhimpunan Indonesia

Perhimpunan Indonesia sebagai organisasi yang memiliki anggota dari kalangan intelektual ternyata mendapat reaksi dari pemerintah kolonial Belanda. Pemberontakan PKI yang gagal di Banten dianggap tanggungjawab PI di Negeri Belanda. Setelah terjadi pemberontakan tersebut pemerintahan kolonial Belanda berusaha menangkap para pemimpin PI di Belanda. Upaya tersebut dilakukan pemerintah untuk meredam gerakan nasional Indonesia.

Tokoh-tokoh PI, seperti **Ali Sastroamidjojo, Abdul Karim, M Jusuf,** dan **Moh. Hatta** dianggap memiliki hubungan dekat dengan Moskow, sebagai markas gerakan **comintern**. Akibat tuduhan itu maka pada 27 September 1927 mereka ditangkap, kemudian diadili pada Maret 1928 atas tuduhan makar terhadap pemerintah. Karena pembelaan mereka, akhirnya mereka dibebaskan setelah tidak terbukti terlibat dalam pemberontakan itu.

Dalam pidato pembelaannya, mereka menjelaskan bahwa PI hanya sekedar membicarakan kemungkinan tindak kekerasan, kecuali pemerintah Belanda memikirkan tentang kemerdekaan Indonesia.

Pembebasan mereka dari tuduhan tersebut dirayakan oleh anggota-anggota PI dan partai-partai nasionalis Indonesia, karena dianggap sebagai suatu kemenangan gerakan nasionalis atas negeri kolonial Belanda. Karena kemenangan tersebut, maka kaum nasionalis Indonesia di Belanda semakin mendapat simpati massa di Belanda.

Simpati tersebut juga diberikan sebagai bentuk penghormatan karena selama lima tahun (**1922-1927**) PI peran penting dalam pergerakan nasionalis Indonesia. Peran tersebut antara lain:

- a) sebagai pembuka keterkungkungan psikologis bangsa Indonesia dan kekuasaan sistem kolonial;
- b) pengembang ideologi sekuler sehingga bisa mendorong semangat revolusioner dan nasionalis;
- c) mempersatukan unsur golongan ke dalam organisasi secara keseluruhan;
- d) memperkenalkan istilah Indonesia untuk mengembangkan jati diri nasional dan tidak bersifat kedaerahan;
- e) sebagai organisasi kebangsaan yang paling orsinil dalam mempropagandakan ideologi Indonesia Merdeka.

## **n. Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)**

Terbentuknya gagasan tentang persatuan Indonesia dilatarbelakangi adanya kesadaran dikalangan tokoh-tokoh pergerakan nasional bahwa berjuang hanya melalui masing-masing organisasi pergerakan nasional tidak akan membawa hasil. Dengan perjuangan sendiri-sendiri akan mudah ditumpas oleh pemerintah kolonial. Terbukti, PKI yang melakukan pemberontakan sendiri juga telah gagal dan berakhir dengan dilarangnya partai politik tersebut.

Adalah Ir. Soekarno yang merupakan salah satu tokoh yang merasa yakin benar bahwa front bersama sangatlah penting bagi mempersatukan perjuangan politik pergerakan nasional Indonesia. Dalam merealisasikan ide ini, Soekarno dibantu oleh Sukiman, mengajak PSI untuk turut bergabung. Namun ide ini ditolak oleh PSI dengan alasan bahwa sebagian tokoh PNI dan Soekarno sendiri dianggap sebagai didikan Belanda, karena itu diragukan kenasionalisannya.

Sebagian kalangan pergerakan nasional Indonesia yang masih berpandangan kolot masih menganggap bahwa mereka yang bukan dididik dan dibesarkan di Indonesia tidak memiliki pandangan positif tentang kemerdekaan Indonesia.

Setelah usaha tersebut mengalami kegagalan, pada rapat tanggal 17-18 Desember 1927 diputuskan untuk dibentuk **Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)**. Perhimpunan ini menampung beberapa organisasi pergerakan nasional, seperti PSI, BU, PNI, Pasundan, Sumatranen Bond, Kaum Betawi, dan Kelompok Studi Indonesia. PPPKI dianggap telah mampu mengimbangi kekuatan pemerintah Belanda. PPPKI juga diharapkan mampu mempersatukan dan menjadikan gerakan-gerakan politik nasional berada dalam satu koordinasi yang baik.

PPPKI terus berkembang dan memiliki daya tarik tersendiri bagi parpol-parpol yang ada di Indonesia saat itu. PSI Yogyakarta dan BU merupakan salah satu yang memberikan perhatian khusus terhadap ideologi nasionalis sekuler. Akhirnya, pada 2 September 1928 diselenggarakan kongres PPPKI I di

Surabaya. Para wakil parpol berharap bahwa kongres ini merupakan kongres yang dapat membawa Indonesia ke era baru gerakan kebangsaan. Kongres menunjuk Soetomo sebagai ketua Majelis Pertimbangan PPPKI. Sebagai ketua, Soetomo berhasil mempersatukan kaum moderat dan kaum radikal di tubuh PPPKI. Kongres juga menganjurkan agar dibentuknya seksi PPPKI daerah agar memudahkan sekaligus memantapkan PPPKI dalam kesadaran nasionalisnya.

Dalam perkembangan berikutnya, PPPKI ternyata tidak mampu mewujudkan cita-cita idealnya. Pada Kongres Indonesia Raya di Surabaya, Januari 1931, yang diharapkan dapat dijadikan sebuah badan independen yang mewakili kelompok politik di Indonesia, tidak berjalan mulus. Penyebabnya adalah terjadinya pertentangan antara tokoh-tokoh partai.



Pertentangan antara PNI Baru dan Partindo semakin melemahkan PPPKI. Perhimpunan ini akhirnya tidak memiliki peran apapun di panggung politik, meskipun segala upaya sudah dilakukan Soekarno dalam rangka mempersatukan partai-partai yang ada.

Intervensi pemerintah kolonial Belanda terhadap perhimpunan ini juga menjadi salah satu penyebab semakin menurunnya peran perhimpunan ini dalam pergerakan nasional. Hal ini sangat disayangkan karena bergabungnya beberapa parpol dalam sebuah himpunan dianggap sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia.

#### **o. Kongres Pemuda**

Bersamaan dengan terbentuknya kesadaran politik pergerakan nasional tumbuh pula kesadaran bersatu di antara para pemuda dan pelajar Indonesia pada awal abad ke-20. Para pemuda yang tidak memiliki wadah berorganisasi segera membentuk perkumpulan-perkumpulan untuk menyalurkan aspirasinya. Para pemuda yang telah berorganisasi segera bergabung dalam satu wadah, yaitu **Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI)**. Wadah organisasi tersebut didirikan pada 1926.

PPPI merupakan perkumpulan mahasiswa **Recht Schoolgeschar** dan STOVIA. Organisasi yang didirikan September 1926 di Jakarta ini dirintis oleh **Sugondo, Suwiryo, Suryono** dan **Susalit**. Anggotanya berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar, terutama dari kota Jakarta dan Bandung. Asas PPPI ada tiga, yaitu kebangkitan Indonesia, antithese kolonial di antara penjajahan dan yang dijajah, serta nonkooperatif.

Untuk merealisasikan persatuan dan kesatuan nasional, PPPI mengadakan Kongres Pemuda I yang diharapkan dapat menghilangkan perbedaan sempit yang bersifat kedaerahan dan mencapai Indonesia yang bersatu. Kongres yang diselenggarakan di Jakarta pada 30 April-2 Mei 1926 tersebut dipimpin oleh Moh. Tabrani dari Jong Java. Kongres tersebut bertujuan,

- 1) membentuk badan sentral;
- 2) mengajukan paham persatuan kebangsaan;
- 3) mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan.

Dalam kongres tersebut, masing-masing tokoh pemuda menyampaikan gagasannya tentang masalah persatuan. Salah seorang di antaranya adalah **Moh. Yamin** dari organisasi **Jong Sumatranen Bond** yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia harus dijadikan sebagai bahasa persatuan. Walaupun tidak menghasilkan keputusan politis, kongres pertama tersebut telah memperkuat cita-cita Indonesia bersatu.

Selanjutnya, PPPI mengadakan kongres berikutnya yang kemudian dikenal sebagai **Kongres Pemuda II**. Kongres ini dihadiri oleh beberapa perkumpulan pemuda yang ada di Indonesia, antara lain Jong Java, Jong

Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Minahasa, Sekar Rukun, Jong Batak, dan Jong Islamieten Bond.

Susunan panitia kongres yang diselenggarakan pada 27-28 Oktober 1928 ini terdiri atas Sugondo sebagai ketua, Joko Marsaid sebagai wakil ketua, Moh. Yamin sebagai sekretaris, dan Amir Syarifudin sebagai Bendahara.

Pada hari terakhir kongres, 28 Oktober 1928, di gedung **Indonesische Clubhuis Kramat No. 106 Jakarta**, disetujui resolusi yang diusulkan oleh Moh. Yamin. Resolusi yang kemudian dikenal sebagai **Sumpah Pemuda** tersebut berisi:

- 1) Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia.
- 2) Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia.
- 3) Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.

Kongres berhasil menetapkan Sumpah Pemuda yang nantinya dijadikan landasan perjuangan Indonesia merdeka. Pada malam penutupan, untuk pertama kali diperdengarkan lagu **Indonesia Raya** oleh **WR. Supratman**. Selanjutnya, PNI, PPPI, Indonesia Muda, dan seluruh perkumpulan pemuda mengaku Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan.

#### **p. Partai Indonesia Raya (Parindra)**

Upaya untuk mempersatukan persepsi di antara organisasi pergerakan nasional terus menerus dilakukan. Mereka menyadari bahwa hanya dengan persatuan, cita-cita kemerdekaan Indonesia dapat diwujudkan. Upaya tersebut terus dilakukan dalam rapat-rapat, diskusi, dan surat kabar. Salah satu surat kabar yang menampung gagasan persatuan adalah "**Soeloeh Rayat Indonesia**." Surat kabar ini antara lain dimanfaatkan oleh **Kelompok Studi Indonesia** di Surabaya untuk menyerukan konsepsinya bahwa perbedaan golongan pendukung nonkooperasi dan pendukung kooperasi tidaklah harus di-besar-besarkan. Menurut mereka, tujuan pergerakan saat ini adalah mengangkat rakyat Indonesia dari penderitaan berkepanjangan, baik itu melalui kegiatan ekonomi, sosial, maupun politik.

Pada November 1930 kelompok studi ini mengubah namanya menjadi **Partai Bangsa Indonesia (PBI)**. Meskipun berusaha mengutamakan agitasi politik, PBI lebih terlihat sebagai partai lokal Surabaya yang berorientasi pada kerakyatan. **Perkumpulan Rukun Tani** yang didirikannya menjadi sarana perbaikan dan kesejahteraan petani. Dengan basis tersebut, PBI mendapat dukungan luas di pedesaan sehingga pada 1932 organisasi ini sudah memiliki anggota 2500 orang dengan 30 cabang. Pada tahun yang sama diadakan kongres yang menetapkan penggalakan koperasi, serikat sekerja dan pengajaran. Pada 1934, juga diadakan kongres di Malang. Kongres ini menetapkan bahwa PBI akan lebih memajukan pendidikan rakyat.

Untuk menumbuhkan rasa persatuan, PBI segera menggandeng BU untuk bekerja sama. Dari kerja sama yang telah disepakati tersebut disepakati untuk membentuk **Partai Indonesia Raya** atau Parindra pada 1935 dengan menggabungkan organisasi lainnya, seperti **Sarikat Celebes, Sarikat Sumatra, Sarikat Ambon, Perkumpulan Kaum Betawi, dan Tirtayasa**. Pada 1936 Parindra sudah beranggotakan 3425 orang dengan 57 cabang.

Dengan prinsip kooperasi, Parindra memiliki tujuan mencapai Indonesia mulia dan sempurna. Keunikan Parindra dibanding partai yang lainnya adalah bahwa partai ini bersifat kooperasi dan dalam beberapa kegiatannya juga nonkooperasi.

Dalam Kongres I Parindra yang diselenggarakan pada Mei 1937 di Jakarta diputuskan bahwa Parindra bersikap kooperatif dan anggota yang ada dalam dewan harus loyal pada partainya. **KRMH Wuryaningrat** yang menggantikan Sutomo sebagai ketua berusaha dengan keras untuk mencapai perbaikan ekonomi rakyat, pengangguran, peradilan, dan kemiskinan. Dalam memajukan kesejahteraan ekonomi rakyat, Parindra telah berjasa mendirikan **Perkumpulan Rukun Tani, Rukun Pelayaran Indonesia** dan **Bank Nasional Indonesia**.

#### **q. Gabungan Politik Indonesia (Gapi)**

Sebelum Gapi dibentuk, tokoh-tokoh pergerakan nasional masih mencari jalan lain agar perjuangan mereka mencapai kemerdekaan segera dapat diraih. Ternyata jalan perjuangan kooperatif dan non-kooperatif masih menghadapi jalan buntu. Tindakan Belanda yang menutup jalan gerakan non kooperatif dan mengharuskan gerakan yang kooperatif untuk selalu meminta izin terhadap Belanda, telah membuat kesal bangsa Indonesia. Oleh karena itu, melalui Volksraad, partai-partai mengeluarkan petisi pada 15 Juli 1936.

Petisi yang dikenal sebagai Petisi Sutardjo tersebut berisi usulan kepada pemerintah Belanda untuk mengadakan konferensi membahas tentang status politik Hindia Belanda di Indonesia. Ia menuntut kejelasan status politik Belanda pada 10 tahun mendatang. Selain itu, petisi ini juga bertujuan untuk mendorong rakyat memajukan negerinya dengan rencana yang mantap dan matang di bidang politik, ekonomi, dan sosial.

Petisi tersebut ditandatangani oleh **Sutardjo, I.J. Kasimo, Sam Ratulangi, Datuk Tumenggung** dan **Kwo Kwat Tiong**.

Sudah dapat diduga sebelumnya, Petisi Sutardjo ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal ini tentu saja membuat para tokoh pergerakan dan pendukungnya merasa sangat kecewa. Apalagi setelah petisi tersebut tidak jelas kedudukannya selama dua tahun, apakah ditolak atau diterima. Meskipun begitu, kejadian tersebut telah mendorong semangat baru bangsa Indonesia untuk mencari jalan lain dalam pergerakan nasional. Perbedaan pendapat dan krisis baru di antara tokoh-tokoh pergerakan nasional masih terus tampak.

Untuk mengatasi krisis kekuatan nasional, tampilah seorang tokoh yang berusaha untuk mengurangi konflik dan menyamakan persepsi kembali tentang betapa pentingnya kesatuan di antara partai-partai politik nasional. Tokoh tersebut adalah M.Husni Thamrin yang memelopori berdirinya sebuah organisasi baru, yaitu **Gabungan Politik Indonesia (Gapi)**, pada 21 Mei 1939. Gapi merupakan gabungan dari Parindra, Gerindo, Persatuan Minahasa, Partai Islam Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Pasundan, dan PSII.

Langkah selanjutnya yang ditempuh Gapi adalah pada 24 Desember 1939, dengan membentuk **Kongres Rakyat Indonesia (KRI)**. Tujuan utama dari kongres ini adalah "**Indonesia Berparlemen.**"

Resolusi Gapi ditanggapi dingin oleh pemerintah kolonial. Untuk meredam gerakan nasionalis, pemerintah kolonial segera membentuk **Komisi Visman**, sebuah komisi yang ditujukan untuk menyelidiki keinginan bangsa Indonesia. Komisi ini bekerja tidak jujur dan lebih memihak kepada penguasa Belanda, sehingga pemerintah Belanda hanya berjanji memberikan status dominion kepada Indonesia di kemudian hari. Di mata sebagian kaum nasionalis, komisi ini dianggap sebagai cara pemerintah kolonial untuk mengulur-ngulur waktu tentang tuntutan bangsa Indonesia.

Gapi yang tetap teguh pada pendiriannya, segera merubah KRI menjadi **Majelis Rakyat Indonesia (MRI)** pada 14 September 1941. Mr. Sartono diangkat sebagai ketua. Organisasi ini beranggotakan Gapi sebagai wakil federasi organisasi politik, **Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI)** sebagai wakil organisasi Islam, dan PVPN sebagai federasi serikat sekerja dan pegawai negeri.

Pada September 1942, MRI berhasil menyelenggarakan Kongres II di Yogyakarta. Kongres ini dihadiri oleh MIAI, PVPN, Kongres Perempuan Indonesia, Isteri Indonesia, Perti, Parindra, Gerindo, Pasundan, PII, PPKI, PAI, NU, PPBB, Muhammadiyah, PMM, Taman Siswa, dan PSII. Pada saat itu, MRI merupakan organisasi yang paling maju karena telah berhasil menggabungkan organisasi politik, sosial, dan keagamaan dalam satu wadah.

**Nasionalisme** adalah suatu gerakan yang bersifat politik dan sosial dari kelompok-kelompok bangsa yang bersifat politik dan sosial dari kelompok-kelompok bangsa yang memiliki persamaan budaya, bahasa, wilayah, serta persamaan cita-cita dan tujuan. Paham baru di Eropa tersebut berdampak luas ke wilayah Asia-Afrika. Hal itu terlihat dari banyaknya gerakan yang menentang penjajahan dan gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan setiap bangsa Asia dan Afrika.

Peristiwa-peristiwa penting antara Perang Dunia I dan II, antara lain Perang Dunia I, Perjanjian Versailles, pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, Perang Dunia II, dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pergerakan nasional Indonesia yang terjadi pada awal abad ke-20 dapat diartikan sebagai pergerakan di seluruh bangsa Indonesia yang berasal dari

berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya yang terhimpun dalam organisasi-organisasi pergerakan dan yang bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia di bidang pendidikan, ekonomi, sosial-budaya, dan politik serta untuk memperoleh kemerdekaan yang meliputi seluruh bangsa dari penjajah Belanda.

Organisasi pergerakan nasional yang pernah lahir di Indonesia antara lain, Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, PNI, Partindo, PKI, Taman Siswa, Perhimpunan Indonesia, Parindra, Muhammadiyah, PPPKI, dan PPPI. Sedangkan organisasi pemuda di antaranya Trikoro Dharmo, Jong Celebes, Jong Sumatra Bond, PPPI, Jong Indonesia, dan Indonesia Muda. Demikian pula pada pergerakan kaum wanita Indonesia yang dipelopori oleh R.A. Kartini dan Dewi Sartika.

Pada 15 Juli 1936, bangsa Indonesia mengeluarkan Petisi Sutarjo yang berisi tentang usulan untuk mengadakan konferensi membahas status politik Hindia Belanda di Indonesia. Adapun Gapi yang merupakan organisasi gabungan dari beberapa partai-partai politik dan pergerakan nasional di Indonesia menuntut kepada pemerintah kolonial Belanda agar "Indonesia Ber-parlemen."

### **C. Pembentukan Wawasan Kebangsaan pada Jaman Pendudukan Jepang**

Wawasan kebangsaan bangsa Indonesia terus terasah pada masa pendudukan Jepang. Walaupun pada masa pendudukan Jepang bangsa Indonesia mengalami penderitaan, semangat kebangsaan terus tumbuh dan berkembang bahkan pada masa ini bangsa Indonesia mampu mencapai salah satu puncak kebangsaannya saat memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari setelah Jepang menyerah pada Sekutu pada Perang Dunia II.

Ketika Perang Dunia II sedang berlangsung, keinginan Jepang sesuai doktrin **Hakko Ichi U** untuk menguasai wilayah Asia Timur semakin kuat. Ambisi tersebut diwujudkan dengan cara menyerang pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawaii pada 8 Desember 1941. Penyerangan ini bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan Amerika Serikat yang diperkirakan akan menjadi ganjalan bagi ekspansi Jepang di Asia.

Pendudukan Jepang di Indonesia diawali di kota Tarakan pada 10 Januari 1942. Selanjutnya, Minahasa, Balikpapan, Ambon, Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali yang berhasil diduduki tentara Jepang selama Januari-Februari 1942. Kota Jakarta berhasil diduduki pada 5 Maret 1942. Tentara Belanda yang kewalahan menghadapi serbuan kilat tentara Jepang kemudian mundur menuju Subang, Jawa Barat. Di daerah ini pula (**Kalijati**) tentara Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang pada 8 Maret 1942. Sejak saat itu, dimulailah masa pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia.

Pada masa pendudukannya, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah yang dipimpin oleh pemerintahan militer, yaitu:

1. Jawa dan Madura diperintah oleh **Tentara Keenam Belas Angkatan Darat** yang berpusat di Jakarta.
2. Sumatra diperintah oleh **Tentara Keduapuluh Lima Angkatan Darat** yang berpusat di Bukittinggi.
3. Indonesia bagian timur diperintah oleh **Armada Selatan Kedua Angkatan Laut (Kaigun)**, yang berpusat di Ujung Pandang.

Untuk membantu pelaksanaan pemerintahannya di Indonesia, Jepang mengangkat orang-orang Indonesia menjadi pegawai pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah pendudukan Jepang menjalankan apa yang disebut **Japanisasi** dalam seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia.

Segera setelah menduduki Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan peraturan yang melarang semua rapat-rapat dan kegiatan yang bersifat politik. Pada 20 Maret 1942, pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan aturan yang isinya membubarkan perkumpulan-perkumpulan. Namun, pada 15 Juli 1942, perkumpulan yang bersifat sosial, budaya, olahraga, atau kesenian diperbolehkan untuk tetap berdiri. Kegiatan-kegiatan yang bersifat politik tetap dilarang.

Untuk menarik simpati dan dukungan rakyat Indonesia, Jepang mempropagandakan **Gerakan 3 A**, yaitu **Nippon Cahaya Asia**, **Nippon Pelindung Asia**, dan **Nippon Pemimpin Asia**. Gerakan ini dipimpin oleh **Mr. Syamsudin**. Selain itu, dibentuk pula organisasi **Pemuda Asia Raya** yang dipimpin oleh **Sukardjo Wiryopranoto**. Namun, karena dalam pelaksanaannya tidak berhasil meraih dukungan dari bangsa Indonesia, Gerakan 3 A kemudian dibubarkan.

Jepang tahu bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Karena itu untuk memikat hati orang Islam, pada 13 Juli 1942, pemerintah pendudukan Jepang menghidupkan kembali **Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI)** yang kemudian pada 24 Oktober 1942 berganti nama menjadi **Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)**.

Mewaspada strategi atau siasat politik Jepang yang demikian, para pemimpin pergerakan nasional mengambil dua taktik yang berbeda, yaitu:

- a. **Kooperatif**, yaitu bersedia bekerja sama dengan Jepang. Tokoh-tokoh yang menjalankan taktik ini antara lain **Soekarno** dan **Moh.Hatta**.
- b. **Non kooperatif**, yaitu tidak bersedia bekerja sama dan melakukan gerakan bawah tanah melawan pemerintah pendudukan Jepang. Tokoh yang menjalankan taktik ini antara lain **Amir Syarifuddin** dan **Sutan Syahrir**.

Dalam praktiknya, pemerintah pendudukan Jepang lebih kejam dari penjajah mana pun yang pernah menduduki Indonesia. Jepang menjadi negara

kolonialis Asia pertama yang menjadi penyebab panasnya suhu politik dunia dan telah mengakibatkan berkobarnya Perang Dunia II di kawasan Asia Pasifik.

Pada masa penjajahan Jepang, kekayaan Indonesia dikuras habis sehingga rakyat menderita kelaparan. Para pemuda dipersiapkan untuk mempertahankan Indonesia demi kejayaan dan kemenangan pemerintah pendudukan Jepang dalam **Perang Asia Timur Raya**. Rakyat Indonesia dijadikan **romusha** untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah pendudukan Jepang, seperti jalan, pelabuhan, dan lapangan terbang.

**Kempetai** adalah polisi militer Jepang yang sangat kejam menyiksa atau membunuh rakyat yang dianggap membantah perintahnya. Hukuman yang dijatuhkannya tidak mengenal perikemanusiaan, seperti mencambuk, mencabuti kuku dengan tang, dan memasukkannya ke dalam sumur. Para wanita banyak yang diculik atau diiming-imingi sekolah di luar negeri untuk dijadikan pemuas kebutuhan biologis tentara Jepang (**geisha**).

Para tokoh pergerakan nasional menyadari benar bahwa apabila melawan dengan kekuatan senjata tidak mungkin, sebab dari segi militer, Jepang lebih kuat. Senjatanya lengkap, kemampuan militernya terlatih, dan disiplin tempurnya sangat tinggi. Untuk melawannya, terlebih dulu harus memanfaatkan berbagai organisasi yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang sendiri.

## 1. Organisasi Pergerakan Nasional pada Masa Pendudukan Jepang

### a. Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI)

**Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI)** yang terbentuk pada masa penjajahan Belanda (**September 1937**), pada masa pendudukan Jepang tidak dibubarkan, karena kegiatannya bersifat keagamaan dan tidak mengadakan kegiatan politik. Strategi pergerakan yang diterapkan MIAI bersifat kooperatif.

Jepang banyak membantu perkembangan kehidupan beragama. **Kantor Urusan Agama** yang pada masa Belanda diketuai oleh seorang orientalis Belanda, diubah oleh Jepang menjadi **Shumubu** yang dipimpin oleh orang Indonesia, yaitu **K.H. Hasyim Asyari**.

Pada tahun kedua masa pendudukannya di Indonesia, beberapa pesantren sering dikunjungi para pembesar Jepang. Umat Islam pada saat itu pun diizinkan membentuk **Hizbullah** yang memberikan latihan kemiliteran bagi para pemuda Islam. Organisasi ini dipimpin oleh **K.H. Zainul Arifin**. Demikian pula dengan **Sekolah Tinggi Islam** di Jakarta yang dipimpin **K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Moh. Hatta**.

Karena perkembangannya yang demikian pesat dan dinilai telah mengancam eksistensi pemerintah pendudukan Jepang, MIAI akhirnya dicurigai pihak Jepang. Pada 1943, MIAI dibubarkan dan sebagai penggantinya dibentuk **Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)**.

## b. Masyumi

**Majelis Syura Muslimin Indonesia** berdiri pada 1943 sebagai pengganti MIAI. Masyumi diketuai oleh **K.H. Mas Mansur** dan didampingi **K.H. Hasyim Asyari**. Organisasi ini segera dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh dari pergerakan nasional Indonesia untuk mengonsolidasikan organisasi-organisasi Islam, seperti **Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Persatuan Islam, dan Sarekat Islam**.

Seperti juga organisasi pergerakan Islam gabungan dalam MIAI, Masyumi memiliki visi bahwa setiap umat Islam diwajibkan untuk *Jihad Fisabilillah (berjuang di jalan Allah)* dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang politik. Para kaum muda muslim, khususnya para santri dipersiapkan untuk berjuang secara fisik maupun secara politis.

## c. Pusat Tenaga Rakyat (Putera)

Jepang membubarkan berbagai organisasi yang bersifat politik yang terbentuk pada masa penjajahan Belanda. Namun, untuk mengikat hati rakyat, pada Maret 1942 didirikanlah **Pusat Tenaga Rakyat (Putera)** yang dipimpin oleh **Empat Serangkai**, yaitu **Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur**. Pemerintah Pendudukan Jepang ingin menggunakan tokoh pergerakan Indonesia sebagai simbol untuk membangkitkan semangat dan perasaan anti bangsa kulit putih. Masalah rasial menjadi titik utama kampanye pemerintah Jepang untuk mendapat dukungan sepenuhnya dari rakyat Indonesia.

Adapun tugas Putera adalah untuk memimpin rakyat Indonesia supaya mau menghapuskan pengaruh Barat. Sementara tujuannya adalah memusatkan seluruh kekuatan rakyat dalam rangka membantu usaha Jepang memenangkan perang di Asia Pasifik.

Putera disusun dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, terutama di Jawa. Empat Serangkai dianggap oleh Jepang sebagai lambang dari pergerakan nasional Indonesia. Sebaliknya, para pemimpin nasional memanfaatkan Putera untuk mempersiapkan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaan, yang menurut perhitungan mereka besar kemungkinannya akan tercapai pada akhir Perang Dunia II. Satu hal lagi yang tidak disadari oleh pemerintah pendudukan Jepang adalah, pada perkembangan selanjutnya, Putera menjadi sebuah wadah pemupukan rasa nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia.

## d. Cuo Sangi In

**Cuo Sangi In** atau **Badan Pertimbangan Pusat** dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang. Tadinya, badan ini dimaksudkan Jepang sebagai pengendali politik di Indonesia. Akan tetapi, justru oleh para pemimpin pergerakan nasional, hal itu dimanfaatkan untuk mengimbangi politik Jepang.



Badan Pertimbangan Pusat mempunyai tugas mengajukan usul dan menjawab pertanyaan pemerintah Jepang. Badan ini kemudian dijadikan sarana strategis bagi para tokoh pergerakan Indonesia. Bangsa Indonesia diberi kesempatan menduduki jabatan kepala departemen dan residen yang sulit didapatkan pada masa pemerintah kolonial Belanda.

#### e. Jawa Hokokai

Pada 1944, Panglima Tertinggi Tentara Jepang di Jawa menyatakan berdirinya **Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa)**. Organisasi ini lahir didorong oleh situasi Perang Asia Timur Raya yang semakin gencar. Jawa Hokokai diorientasikan untuk memupuk semangat kebaktian, yaitu kesediaan untuk mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan tugas untuk kepentingan pemerintah pendudukan Jepang.

Pimpinan Jawa Hokokai ditangani langsung oleh pimpinan militer Jepang dan anggotanya diseleksi secara ketat. Jaringan organisasi ini dari pusat sampai daerah memiliki bidang-bidang kegiatan, seperti guru, kewanitaan, perusahaan, dan kesenian. Jawa Hokokai bertugas mengerahkan rakyat secara paksa untuk mengumpulkan padi, permata, besi tua, serta menanam jarak. Hasilnya harus diserahkan ke pemerintah pendudukan Jepang untuk membiayai Perang Asia Timur Raya.

#### f. Seinendan, Fujinkai, dan Keibodan

Pada periode 1944-1945 Perang Asia Timur Raya semakin berkecamuk. Kedudukan pasukan Jepang dalam Perang Dunia II yang semula sebagai penyerang kini berbalik menjadi bertahan. Untuk mempertahankan daerah pendudukannya, Jepang memerlukan dukungan dari penduduk di negeri jajahannya. Oleh karena itu, pada 9 Maret 1943, dibentuklah organisasi semi militer **Seinendan**, yaitu barisan pemuda yang anggotanya berusia 14-22 tahun. Secara resmi disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Seinendan adalah mendidik dan melatih para pemuda untuk dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Padahal, maksud sebenarnya adalah mempersiapkan pemuda Indonesia membantu Jepang untuk menghadapi pasukan Sekutu.

Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga wanita, pada Agustus 1943, pemerintah pendudukan Jepang membentuk **Fujinkai** atau **perhimpunan wanita**. Usia anggotanya harus 15 tahun ke atas. Anggota Fujinkai juga diberi latihan militer yang dipersiapkan untuk membantu Jepang.

Di samping itu, untuk memenuhi keperluan tenaga pembantu kepolisian, pemerintah pendudukan Jepang membentuk **Keibodan** atau **Barisan Bantu Polisi**. Usia anggotanya antara 25-25 tahun. Pemuda yang diterima adalah semua laki-laki yang berasal dari tiap desa dan dibentuk di desa-desa untuk mengisolasi dari pengaruh kaum nasionalis. Mereka diawasi oleh polisi dengan sangat ketat.

Dengan kepandaian para tokoh pergerakan nasional, semua organisasi semi militer tersebut dijadikan sebagai lahan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan menggalang rasa cinta kepada tanah air.

#### **g. Barisan Pelopor, Heiho, dan Pembela Tanah Air (Peta)**

Untuk menyiapkan seluruh potensi rakyat Indonesia dalam membantu dan mendukung kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, pemerintah pendudukan Jepang pada 14 September 1944 membentuk **Barisan Pelopor**. Pemimpinnya ditunjuk dari golongan nasionalis, seperti **Ir. Soekarno, R.P. Suroso, Otto Iskandardinata**, dan **dr. Buntaran**.

Barisan Pelopor dilatih cara menggunakan senapan dari kayu, bambu runcing, serta dikerahkan untuk mendengarkan pidato dari para pemimpin pergerakan nasional. Selain itu, dilatih pula cara mengerahkan massa dan membuat pertahanan. Melalui Barisan Pelopor ini, para pemuda terpelajar memasukkan pengaruhnya kepada rakyat.

Sementara itu, pada April 1943, Jepang mengumumkan dan membuka kesempatan bagi para pemuda Indonesia untuk ikut menjadi anggota pembantu prajurit Jepang (**Heiho**). Anggota Heiho langsung ditempatkan dalam struktur organisasi militer Jepang, baik di Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Heiho dianggap sebagai bagian dari angkatan perang Jepang sehingga langsung diterjunkan dalam medan pertempuran menghadapi Sekutu di berbagai front pertempuran. Para Heiho bukan hanya dikirimkan di wilayah Indonesia, melainkan juga di negara-negara lain, seperti Kepulauan Solomon, Filipina, dan Indo Cina.

Selanjutnya, pada 3 Oktober 1943, Panglima Tentara Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan tentara sukarela **Pembela Tanah Air (Peta)**. Maka dilatihlah puluhan calon perwira di Bogor. Setelah lulus, mereka kemudian diangkat masing-masing menjadi *daidanco* (**komandan batalyon**), *codanco* (**komandan kompi**), dan *syudanco* (**komandan peleton**). Ada pula yang dididik menjadi *budanco* (**komandan regu**).

#### **h. Dokuritsu Junbi Cosakai**

Pada 1 Maret 1945, **Letnan Jenderal Kumakici Harada** mengumumkan pembentukan **Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)** atau **Dokuritsu Junbi Cosakai**. Badan ini beranggotakan 60 orang dan diketuai oleh **Dr. Radjiman Wedyodiningrat**.

Tugas BPUPKI adalah menyelidiki dan mempelajari hal-hal penting yang menyangkut masalah tata pemerintahan atau pembentukan negara Indonesia merdeka. Badan ini diperbolehkan untuk melakukan propaganda menyebarkan berita tentang persiapan-persiapan ke arah kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh BPUPKI maupun para tokoh pergerakan nasional.

Bersamaan dengan pembentukan BPUPKI, pemerintah pendudukan Jepang juga memperbolehkan pengibaran Sang Merah Putih di samping bendera Jepang (**Hinomaru**). Demikian pula dengan lagu **Indonesia Raya** yang diperbolehkan untuk diperdengarkan di muka umum atau dalam rapat-rapat resmi lainnya di samping lagu kebangsaan Jepang (**Kimigayo**).

Dengan demikian, para tokoh pergerakan nasional semakin mendapat angin dalam usahanya mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

## **2. Reaksi Rakyat Indonesia Terhadap Pemerintah Pendudukan Jepang**

Reaksi yang diperlihatkan oleh rakyat Indonesia terhadap tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia terbagi ke dalam dua cara, yaitu reaksi berupa perlawanan bersenjata dan perlawanan tanpa senjata.

### **a. Reaksi Berupa Perlawanan Bersenjata**

Bangsa Jepang datang ke Indonesia dengan semboyan membebaskan seluruh rakyat Asia dari penindasan Barat. Namun, dalam beberapa bulan saja, mereka sudah membuka kedoknya dan secara terang-terangan menindas rakyat Asia yang negerinya mereka duduki. Hal itu terjadi pula di Indonesia.

Keganasan tentara Jepang telah membangkitkan kemarahan rakyat. Beberapa tokoh masyarakat segera memimpin gerakan perlawanan dengan cara kekerasan. Karena penindasan itu, timbullah pemberontakan terhadap Jepang di berbagai tempat.

#### **1) Pemberontakan Cot Plieng di Aceh**

Tidak lama sesudah Jepang berkuasa di Indonesia, timbullah pemberontakan di Aceh yang dipimpin oleh seorang ulama muda yang bernama **Tengku Abdul Jalil**, guru ngaji di Cot Plieng. Peristiwa ini terjadi beberapa kali dan puncaknya adalah pada 10 Nopember 1942. Perlawanan tersebut terjadi karena pasukan Jepang melakukan penghinaan terhadap umat Islam Aceh dengan cara membakar masjid dan membunuh sebagian jamaah yang sedang sholat subuh. Rakyat Aceh yang merasa terhina akhirnya melakukan perlawanan terhadap Jepang.

#### **2) Pemberontakan Rakyat Sukamanah**

Pemberontakan ini dipimpin oleh **K.H. Zainal Mustofa**, pemimpin pondok pesantren di Sukamanah, Singaparna, Tasikmalaya. Pemberontakan ini berawal dari pemaksaan Jepang kepada santri-santri Pesantren Sukamanah untuk melakukan **seikirei** atau menghormat kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan setengah badan ke arah matahari. Petani Sukamanah menolak karena menganggap hal tersebut sebagai syirik. Karena penolakan itulah timbul bentrokan antara pasukan Jepang dengan petani Sukamanah. Dalam peristiwa tersebut KH Zainal Mustofa dapat di-

tangkap kemudian diadili setelah pihak militer Jepang mengirim pasukan untuk menggempur Sukamanah. Peristiwa ini terjadi pada 25 Februari 1944.

### 3) Pemberontakan di Indramayu

Pemberontakan ini terjadi pada Juli 1944 di bawah pimpinan **H. Madriyas**. Penyebabnya adalah karena rakyat tidak tahan terhadap kekejaman yang dilakukan oleh tentara Jepang.

### 4) Pemberontakan Teuku Hamid di Aceh

Peristiwa ini terjadi pada November 1944 yang dipimpin oleh seorang perwira Giyugun bernama **Teuku Hamid**. Pemberontakan ini tidak terjadi dengan lancar karena keluarga Teuku Hamid diancam akan dibunuh sehingga akhirnya Teuku Hamid terpaksa kembali.

### 5) Pemberontakan Peta di Blitar

Pemberontakan ini dipimpin oleh seorang komandan peleton Peta yang bernama **Supriyadi** pada 14 Pebruari 1945. Pemberontakan ini terjadi karena anggota Peta tidak tahan melihat kesengsaraan rakyat didaerahnya dan banyaknya rakyat yang dijadikan **romusha** yang meninggal selama diperkerjakan di daerah mereka.

Pemberontakan tersebut sangat merepotkan pemerintah pendudukan Jepang dan hampir diikuti oleh seluruh anggota batalyon. Namun, pemberontakan tersebut mengalami kegagalan karena persiapannya tidak matang dan rakyat pun tidak mendukung terhadap pemberontakan tersebut.

Melalui muslihat Jepang, para pemimpin pemberontakan bisa ditangkap Jepang dan diadili di Jakarta. Sebanyak 6 orang dijatuhi hukuman mati dan 35 orang dihukum 2 tahun sampai seumur hidup. Adapun pemimpin pemberontakan Supriyadi, tidak diketahui nasibnya. Namun, sebagian orang yakin bahwa Supriyadi telah ditangkap dan diam-diam telah dibunuh oleh pemerintah pendudukan Jepang.

Itulah beberapa peristiwa perlawanan rakyat melawan Jepang. Meskipun banyak mengalami kegagalan dalam mengusir Jepang, namun itu merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia memiliki jiwa yang gagah berani dan pantang menyerah.

## b. Reaksi Berupa Perlawanan Nonsenjata

Selain perlawanan secara kekerasan dengan menggunakan kekuatan senjata, ada pula rakyat yang menentang pendudukan Jepang dengan strategi nonkooperatif. Pada umumnya mereka terorganisir secara rapi dan bergerak di bawah tanah. Mereka juga memiliki hubungan khusus dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang melakukan perjuangan secara kooperatif dengan pemerintah pendudukan Jepang.

Beberapa kelompok yang mengambil strategi nonkooperatif, antara lain:

- 1) Kelompok Sukarni.  
Tokoh-tokoh kelompok ini di antaranya Sukarni, Chaerul Salah, Adam Malik, Armunanto, Pandu Kartawiguna, D.N. Aidit, Johar Nur, Syarif Thayeb, Darwis, Eri Sadewo, dan Maruto Nitimihardjo. Kelompok ini sering mengadakan kursus politik yang pengajarnya diambil dari tokoh-tokoh pergerakan nasional, seperti Soekarno, Moh. Hatta, dan Sutan Syahrir.
- 2) Kelompok Syahrir.  
Tokoh utama kelompok ini, Sutan Syahrir, sering dipanggil untuk memberikan kursus politik bagi kaum pelajar yang berada di ibu kota maupun daerah-daerah.
- 3) Kelompok Kaigun.  
Tokoh-tokoh kelompok ini di antaranya Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Dr. Samsi, Sudiro, Wikana, dan E. Khairudin.
- 4) Kelompok Amir Syarifuddin.  
Tokoh utama kelompok ini, Amir Syarifuddin, pada 1943 ditangkap Kempetai karena aktifitas politiknya. Ia dijatuhi hukuman mati. Namun, atas bantuan Ir. Soekarno, hukuman diubah menjadi hukuman seumur hidup.

Karena menempuh taktik nonkooperatif dan dilakukan di bawah tanah, ruang gerak perjuangan kelompok-kelompok tersebut menjadi terbatas. Namun, pada masa akhir pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan Indonesia, kelompok-kelompok tersebut berperan sangat penting. Mereka telah berhasil mendorong terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan menyebarkan beritanya ke seluruh Indonesia, bahkan dunia.

### 3. Dampak Pendudukan Jepang dalam Berbagai Aspek Kehidupan

Pendudukan Jepang di Indonesia yang berlangsung selama 3,5 tahun merupakan masa yang paling menderita bagi bangsa Indonesia. Pengaruh pendudukan tersebut sangat terasa dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, mobilitas sosial, birokrasi, militer, dan penggunaan bahasa Indonesia.

#### a. Bidang Politik

Sejak masuknya Jepang, segala bentuk organisasi yang telah ada, baik yang bersifat politik, sosial, ekonomi maupun agama dan kebudayaan dihapuskan dan diganti dengan lembaga-lembaga bentukan Jepang.

Pemerintah Jepang masih membiarkan kesempatan pada golongan nasionalis Islam karena dinilainya sangat anti-Barat. Organisasi Islam yang diperbolehkan tetap berdiri yaitu **Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI)**. Namun, karena perkembangannya dianggap membahayakan, pada 1945 segera dibubarkan dan dibentuklah penggantinya yaitu **Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)**.

Sikap Jepang jelas mempengaruhi gaya dan taktik para politisi nasional dan para pejuang Indonesia lainnya saat itu dengan memanfaatkan organisasi sosial politik buatan Jepang. Pada akhirnya, berbagai bentuk organisasi yang didirikan oleh Jepang dengan berbagai cara dimasuki dan dipengaruhi oleh para pejuang nasional. Dengan demikian, lambat laun keterlibatan mereka semakin mendewasakan dan mematangkan perjuangan bangsa Indonesia.

### **b. Bidang Pendidikan**

Pendidikan pada zaman pemerintah pendudukan Jepang mengalami perubahan dan penurunan secara drastis baik dalam jumlah sekolah, murid, maupun guru.

Sistem pengajaran dan kurikulum disesuaikan dengan kepentingan perang. Siswa wajib mengikuti latihan dasar kemiliteran. Jepang juga menanamkan semangat Jepang dan siswa wajib menghafal lagu kebangsaan Jepang. Para guru diharuskan mengikuti kursus bahasa Jepang. Juga diwajibkan penggunaan bahasa Jepang dan Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah untuk menggantikan bahasa Belanda. Melalui pendidikan, Jepang bermaksud mencetak kader-kader yang akan memelopori dan merealisasikan konsepsi "Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya".

### **c. Ekonomi**

Pada pendudukan Jepang, kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang Jepang. Jepang berusaha menguasai sumber-sumber bahan mentah untuk industri Jepang. Yang pada prakteknya amat memeras sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia. Jepang menyita perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan vital lainnya, kecuali yang dipandang berguna dalam usaha perang Jepang.

Sebagian hasil panen harus diserahkan kepada pemerintah. Rakyat diperbolehkan memiliki 40% hasil panen mereka, 30% disetor ke koperasi dengan harga yang ditetapkan pemerintah dan sisa yang 30% disediakan untuk bibit dan harus disimpan di lumbung desa. Karena harga dari pemerintah sangat rendah, petani menjual hasil panennya ke pasar gelap. Kadang-kadang, semua itu dirampas kembali oleh Jepang. Rakyat hanya makan keladi yang gatal, ubi jalar, atau bekicot, serta makanan lain yang tidak layak. Selain harus menyerahkan sebagian hasil panen, Jepang juga mengharuskan kaum pria yang muda dan sehat serta produktif untuk menjadi serdadu pekerja (**romusha**). Akibatnya kekurangan gizi, stamina rendah, wabah penyakit menyebar, dan akhirnya tidak sedikit nyawa yang terenggut.

### **d. Kebudayaan**

Jepang terkenal dengan sifat disiplin, ulet, teguh, dan rela berkorban sesuai dengan tradisinya. Budayanya itu berusaha ditanamkan kepada masyarakat Indonesia dengan memupuk semangat kebaktian bangsa Indonesia. Propaganda dilakukan untuk mempersiapkan Indonesia sebagai

bangsa yang merdeka. Padahal, maksud sebenarnya untuk mengabdikan pada kepentingan Jepang, terutama dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya melawan tentara Sekutu.

Jawa Hokokai didirikan sebagai alat penanaman budaya yang diterapkan secara paksa kepada rakyat Indonesia karena tuntutan menghadapi perang. Hokokai yang berarti **Himpunan Kebaktian Rakyat**, dasar tujuannya adalah pengorbanan diri dalam rangka mengabdikan kepada pemerintah Jepang. Hal itu terlihat pada penerapan pendidikan bahasa, kemiliteran, dan adat istiadat Jepang. Semua yang diterapkan berpengaruh pada budaya masyarakat Indonesia.

Selain itu, Jepang juga membentuk pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunka Shidoso pada 1943. Lembaga ini bertujuan sebagai wadah kebudayaan yang terdiri dari tulisan, musik, tari, drama, film, dan seni lukis.

#### **d. Mobilitas Sosial**

Pendudukan Jepang berpengaruh terhadap mobilitas sosial masyarakat. Dalam arti, perpindahan penduduk dan perubahan struktur sosial masyarakat diakibatkan oleh berbagai kebutuhan militer Jepang dalam menghadapi perang melawan Sekutu. Semua itu, memerlukan tenaga-tenaga kasar terutama dari Pulau Jawa. Pada awalnya, hal itu bersifat sukarela, namun kemudian berubah menjadi **romusha**. Keadaan tersebut berpengaruh terhadap perekonomian desa karena sawah dan ladang tidak terkelola dengan baik.

Untuk memudahkan pengawasan terhadap aktivitas penduduk, pada 1944, Jepang menerapkan sistem **Tonarigumi (RT)** yang merupakan pengelompokan masyarakat menjadi 19-20 rumah tangga. Hal ini berpengaruh pada struktur desa-desa di Indonesia.

Pengaruh mobilitas sosial dalam arti pergerakan massa, diakibatkan oleh kekejaman Jepang (**terutama Kempetai**) yang telah membangkitkan kemarahan rakyat sehingga mereka memberontak terhadap pemerintahan pendudukan Jepang.

Pendudukan Jepang juga berpengaruh terhadap mobilitas sosial dalam arti sosial politik. Organisasi-organisasi yang dibentuk Jepang bertujuan untuk mendukung kepentingan Jepang. Sebaliknya, oleh tokoh pergerakan nasional, organisasi diarahkan untuk kepentingan nasional, yaitu memperjuangkan Indonesia merdeka.

Ir. Soekarno, melalui organisasi Putera, berhasil memobilisasi organisasi lain untuk bergabung dan berjuang bersama-sama mencapai Indonesia merdeka. Demikian pula organisasi-organisasi lain, telah berhasil diarahkan untuk mencapai Indonesia merdeka. Pengalaman tersebut sangat berguna dan dimanfaatkan kembali oleh Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa-bangsa yang akan menjajah kembali dalam perjuangan fisik 1945-1949.





#### e. Birokrasi

Jepang menyusun birokrasi pemerintahan di Indonesia yang meliputi sistem ketatanegaraan, ideologi, politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan. Wilayah Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah kekuasaan atau tiga pemerintahan berdasarkan pemerintahan militer yang dipimpin oleh seorang kepala staf tentara (**AD**) atau armada (**AD**) yang disebut **Gunseikan**.

Restrukturisasi ini memungkinkan bangsa Indonesia menduduki jabatan-jabatan penting karena Jepang kekurangan tenaga untuk memegang organisasi-organisasi bentukannya. Ulama Islam diperkenankan memimpin Masyumi dan memimpin **Hizbullah**, kecuali Jawa Hokokai yang dipegang Jepang.

Bidang ekonomi dikuasai oleh swasta Jepang dan ada pula yang dipegang oleh orang Indonesia meskipun ruang lingkupnya relatif lebih kecil. Misalnya, para administrator perkebunan masih dipegang oleh orang Indonesia dan sebagian oleh orang asing. Itu pun masih tetap di bawah pengawasan Jepang.

Pada bidang politik, orang Indonesia diperbolehkan memegang jabatan-jabatan tertentu. Misalnya, dalam organisasi Gerakan 3A, Kantor Urusan Agama, Putera, MIAI, Masyumi, Badan Pertimbangan Pusat, BPUPKI, dan PPKI.

Begitu juga di bidang militer, bangsa Indonesia aktif dilibatkan dalam Barisan Pelopor, Keibodan, Fujinkai, Seinendan, Heiho, dan Peta.

#### f. Militer

Untuk melanjutkan perang, Jepang memerlukan banyak tenaga manusia. Jumlah prajurit Jepang sudah banyak berkurang karena banyak yang gugur dalam pertempuran. Untuk itu, Jepang merekrut para pemuda Indonesia untuk dijadikan serdadu ataupun dijadikan tenaga cadangan perang.

Bulan April 1943 didirikan dua organisasi pemuda Seinendan dan Keibodan. Selain itu, para pemuda Indonesia juga dididik untuk menjadi prajurit Jepang (**heiho**). Pada perkembangan selanjutnya, para pemuda yang mendapat latihan militer dari Jepang itu berperan besar dalam perjuangan fisik 1945-1949.

#### g. Bahasa Indonesia

Pada masa pendudukannya, Jepang berusaha menanamkan kepada rakyat Indonesia sikap menentang segala bentuk pengaruh bangsa Barat. Hal-hal yang bersifat Barat dilarang digunakan. Salah satunya adalah penggunaan bahasa Belanda di sekolah-sekolah dan pertemuan resmi. Bahasa yang boleh digunakan adalah bahasa Indonesia di samping bahasa Jepang. Demikian pula buku-buku pelajaran maupun yang berbentuk sastra, menggunakan bahasa Indonesia.

Bangsa Jepang berusaha untuk menguasai bahasa Indonesia agar dapat berkomunikasi dengan bangsa Indonesia. Sebaliknya, bangsa Indonesia juga

harus mempelajari bahasa Jepang. Dengan demikian, kedua bahasa mengalami perkembangan di daerah pendudukan, khususnya Indonesia. Berkembanglah bahasa Indonesia akibat kebijakan pemerintahan pendudukan Jepang, baik dari segi tata bahasa maupun segi sastranya.

#### 4. Upaya Untuk Mencapai Puncak kebangsaan.

Pada akhir 1944, kedudukan Jepang dalam perang Pasifik sudah sangat terdesak. Sekutu yang sebelumnya bersifat defensif, mulai 1943 berubah menjadi ofensif. Taktik yang digunakan Panglima Tertinggi Sekutu di Pasifik **Jenderal Douglas Mc. Arthur**, yaitu "kodok melompat," terbukti sangat ampuh. Satu persatu beberapa wilayah pendudukan Jepang yang berada di kawasan Pasifik jatuh ke tangan Sekutu.

Selain itu, kedudukan Jepang semakin terancam karena pihak angkatan udara Sekutu telah memasuki wilayah udara Jepang dan mulai melakukan serangan langsung dengan cara menjatuhkan bom di lokasi-lokasi strategis negara tersebut.

Dalam kondisi seperti itu, pada 7 September 1944, **Perdana Menteri Koiso** akhirnya mempermaklumkan janjinya di depan Parlemen Jepang mengenai rencana pemberian kemerdekaan kepada bangsa Indonesia di kemudian hari.

Tindakan ini sebenarnya hanya untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mendukung sepenuhnya pemerintahan pendudukan Jepang yang saat itu telah terdesak oleh pihak Sekutu.

##### 1. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Cosakai (BPUPKI)

Sesuai dengan janji Perdana Menteri Kaiso, **Letnan Jendral Kumakici Harada**, pada 1 Maret 1945, mengumumkan pembentukan sebuah badan, yaitu **Dokuritsu Junbi Cosakai** atau **Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)** yang diketuai oleh **Dr. Radjiman Wedyodiningrat**.

BPUPKI bertugas menyelidiki dan mempelajari hal penting mengenai masalah tata pemerintahan atau pembentukan negara Indonesia merdeka.

Pada 1 April 1945 diumumkan nama-nama anggota BPUPKI yang terdiri dari 60 orang wakil dari berbagai komponen rakyat pribumi, ditambah 7 orang Jepang. Selain ketua, ada pula ketua muda yang terdiri dari 2 orang yaitu **Ischibangase** dan **R.P. Suroso**. Peresmian dan pelantikan pengurus BPUPKI dilaksanakan pada 28 Mei 1945.

## Susunan Pengurus BPUPKI

**Ketua** : Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat

**Ketua Muda** : Ichibangase

**Ketua Muda** : R.P. Suroso

**Sekretaris** : A.G. Pringgodigdo

**Anggota:**

1. Ir. Soekarno	19. K.H. Abdul Halim
2. Dr. Muh. Yamin	20. K.H. Maskhur
3. Dr. R. Kusuma Atmadja	21. R. Sudirman
4. R. Abdurahman P.	22. Prof. Dr. PAH Djayadiningrat
5. R. Aziz	23. Prof. Dr. Supomo
6. Ki Hajar Dewantara	24. Prof. Dr. Ruseno
7. Ki Bagus Hadikusumo	25. Rr. R. Pandji Singgih
8. B.P.H. Bintoro	26. Ny. Maria Ulfah Santoso
9. Kahar Muzakir	27. R.M.T.A. Surjo
10.P.B.H. Puroboyo	28. R. Ruslan Wongsokosumo
11.R.A.A Wiranatakusuma	29. Mr. R. Susanto Tirtprodjo
12.Ir. RA Asharsutedja	30. Ny. R.S. Sunardjo Mangunpuspito
13.Oei Tjong Hauw	31. Dr. R. Buntaran Manto atmodjo
14.Drs. Moh. Hatta	32. Liem Koen Hian
15.Oei Tjong Tjui	33. Mr. J. Latuharhary
16.H. Agus Salim	34. Mr. Hendromartono
17.M. Soetardjo K.	35. R. Sukardjo Wirjopranoto
18R.M. Margono D.	36. H.A. Sanusi

Dalam merumuskan hal-hal penting mengenai Indonesia merdeka, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yaitu:

### a. Sidang Pertama (29 Mei-1 Juni 1945)

Agenda sidang yang dibicarakan dalam Sidang pertama ini adalah usaha untuk merumuskan dasar negara bagi negara Indonesia merdeka dengan membahas berbagai usul dari peserta sidang.

Pada sidang 29 Mei 1945, **Moh. Yamin** mengemukakan gagasannya tentang dasar negara Kebangsaan Republik Indonesia, sebagai berikut

- 1) Peri Kebangsaan
- 2) Peri Kemanusiaan
- 3) Peri Ketuhanan
- 4) Peri Kerakyatan
- 5) Kesejahteraan Rakyat.

Kemudian, **Moh. Yamin** menyampaikan gagasannya secara tertulis dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kebangsaan Persatuan Indonesia
- 3) Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada sidang 31 Mei 1945, **Prof. Dr. Supomo** menyampaikan hasil pemikirannya mengenai dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut

- 1) Persatuan
- 2) Kekeluargaan
- 3) Keseimbangan lahir dan batin
- 4) Musyawarah
- 5) Keadilan rakyat.

Pada sidang 1 Juni 1945, **Ir. Soekarno** menyampaikan buah pikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Kebangsaan Indonesia
- 2) Internasionalisme
- 3) Mufakat atau demokrasi
- 4) Kesejahteraan sosial
- 5) Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kelima asas yang diusulkan Ir. Soekarno tersebut, sesuai dengan petunjuk "seorang ahli bahasa," diberi nama **Pancasila**. Oleh karena itu, pada 1 Juni 1945 dikenal sebagai **Hari Lahirnya Pancasila**.

Pada 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia perumus yang tugasnya untuk membahas dan merumuskan hasil sidang pertama. Panitia perumus tersebut dikenal dengan nama **Panitia Kecil** atau **Panitia 9**, karena beranggotakan 9 orang, yaitu:

1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
3. K.H. Wachid Hasyim (Anggota)
4. Kahar Muzakir (Anggota)
5. Mr. A.A. Maramis (Anggota)
6. Abikusno Tjokrosujoso (Anggota)
7. H. Agus Salim (Anggota)
8. Mr. Achmad Subarjo (Anggota)
9. Mr. Moh. Yamin (Anggota)

Sebagai tindak lanjut dari sidang pertama, direkomendasikanlah **Piagam Jakarta (Jakarta Charter)** pada 22 Juni 1945 yang berisi rumusan dasar negara dan rancangan **Pembukaan UUD**.

Adapun rumusan dasar negara berdasarkan Piagam Jakarta adalah sebagai berikut

- 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab;
- 3) Persatuan Indonesia;

- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### **b. Sidang Kedua (10 Juli-16 Juli 1945)**

Pada sidang kedua ini BPUPKI berhasil membentuk 3 panitia, yaitu:

- 1) Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno;
- 2) Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abikusno;
- 3) Panitia Keuangan dan Perekonomian yang diketuai oleh Moh. Hatta.

Panitia perancang dalam sidangnya pada 11 Juli 1945 menerima konsep naskah pembukaan UUD yang diambil dari Piagam Jakarta. Panitia perancang kemudian membentuk **Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar** yang diketuai Mr. Supomo. Tugasnya menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan UUD yang telah disepakati.

Pada 13 Juli 1945, pembentuk Tim Panitia Kecil yang diketuai oleh Ir. Soekarno, mengadakan sidang untuk membahas laporan hasil kerja Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Dalam rapat pleno pada 14 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (**BPUPKI**) menerima laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dibacakan Ir. Soekarno, yaitu pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang Tubuh Undang-Undang Dasar.

Setelah melalui sidang yang alot, hasil kerja Panitia Perancang UUD akhirnya diterima BPUPKI. Rumusan yang telah disempurnakan dan diterima secara bulat oleh sidang, kemudian dikenal sebagai **Undang-Undang Dasar 1945**.

#### **2. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai (PPKI)**

Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang karena dianggap terlalu cepat mewujudkan kehendak Indonesia merdeka dan menolak adanya keterlibatan dari pemerintah pendudukan Jepang dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Sebagai pengganti BPUPKI dibentuklah **Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)** atau Dokuritsu **Junbi Inkai**. Tugasnya adalah mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan sehubungan dengan akan diserahkannya kekuasaan pemerintah dari Jepang kepada bangsa Indonesia.

Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang: 12 dari Jawa, 3 dari Sumatra, 2 dari Sulawesi, 1 dari Kalimantan, 1 dari Nusa Tenggara, 1 dari Maluku, dan 1 dari masyarakat Tionghoa. Sebagai ketua dan wakil ketua diangkat Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Adapun Mr. Ahmad Subardjo diangkat sebagai penasehat. Kemudian tanpa sepengetahuan Jepang, anggota PPKI ditambah lagi sebanyak 6 orang, yaitu R.A.A. Wiranatakusumah, Ki Hadjar

Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, dan Mr. Ahmad Subardjo.

Pada dasarnya, PPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang sebagai upaya untuk menarik simpati dari berbagai golongan terhadap pemerintah Jepang yang sejak 1943 mulai terdesak dalam berbagai front pertempuran di Pasifik.

Susunan Pengurus BPUPKI:

**Ketua** : Ir. Soekarno

**Wakil Ketua** : Drs. Moh. Hatta

**Anggota** : 1. Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat

2. Ki Bagus Hadikusumo

3. Otto Iskandardinata

4. B.P.H. Purobojo

5. Surjahamidjojo

6. M. Sutardjo K.

7. Dr. Supomo

8. Abdul Kadir

9. Drs. Yap Tjwan Bing

10. Drs, Moh. Amir

11. Mr. Abdul Abbas

12. Dr. GSSJ Ratulangi

13. Andi Pengeran

14. Mr. J. Latuharhary

15. Mr. I. Gusti Ketut Pudja

16. A.H. Hamidhan

17. R.P. Suroso

18. A. Wachid Hasyim

19. Mr. Moh. Hassan

20. R.A.A. Wiranatakusumah

21. Ki Hadjar Dewantara

22. Mr. Kasman Singodimedjo

23. Sayuti Melik

24. Iwa Kusumasumantri

25. Mr. Ahmad Subardjo.

## **RANGKUMAN**

Wawasasn kebangsaan yang terbentuk pada awal abad ke-20 merupakan hasil dari proses kristalisasi dari kejadian-kejadian sebelumnya dalam sejarah Indonesia. Wawasan tersebut dipengaruhi oleh kondisi objektif dalam masyarakat Indonesia sebagai hasil dari penjajahan Belanda yaitu kesempatan untuk memeproleh pendidikan pada sebagian kecil masyarakat Indonesia. Ternyata kelompok terpelajar Indonesia tersebut menjadi pelopor bagi lahirnya semangat kebangsaan menuju bangsa yang merdeka dan

berdaulat melalui perjuangan organisasi pergerakan nasional sejak tahun 1908 hingga pendudukan Jepang dan mencapai puncaknya pada saat proklamasi kemerdekaan dikumandangkan..

Pendudukan Jepang sangat berpengaruh terhadap memburuknya kondisi di bidang politik dan ekonomi. Namun, dalam pendidikan dan kemiliteran terdapat sisi positifnya, yaitu berupa penempatan kemampuan militer rakyat pribumi. Bahasa Indonesia pun cukup diberi peluang untuk berkembang atas pemerintah pendudukan Jepang karena Jepang sangat anti-Barat. Adapun bidang sosial-budaya sangat diarahkan untuk dapat memenuhi serta mendukung untuk kepentingan pemerintahan militer Jepang.

Aktivitas pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang sangat terasa sekali melalui organisasi bentukan Jepang sendiri, yaitu MIAI, Masyumi, Cuo Sangi In, Putera, Jawa Hokokai, Peta, Heiho, Seinendan, Barisan Pelopor, Fujinkai, Keibodan, BPUPKI, dan PPKI.

Kekalahan Jepang oleh Tentara Sekutu telah mempercepat proses kemerdekaan Indonesia yang dimanfaatkan oleh para pemuda dan pemimpin pergerakan nasional untuk mewujudkan proklamasi kemerdekaan.

### **Kegiatan Belajar 3.**

#### **Ujian Mempertahankan Wawasan Kebangsaan Pasca Kemerdekaan Hingga Meletusnya G-30S/1965**

##### **A. Membentuk Lembaga kenegaraan**

Setelah negara RI berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 para pendiri bangsa (*founding fathers*) mulai menyadari betapa pentingnya menyusun lembaga kenegaraan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merupakan lembaga yang didirikan sebelum proklamasi mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang yang dilaksanakan di Pejambon Jakarta dan dihadiri oleh 27 anggota itu mengesahkan UUD 1945 serta berhasil memilih presiden dan wakil presiden.

Rapat PPKI untuk menetapkan UUD 1945 berjalan alot. Terjadi perdebatan di antara para anggota. Namun demikian, karena terdapat jiwa kenegaraan yang besar dari para peserta rapat akhirnya mereka sepakat untuk segera menetapkan UUD 1945 sebagai undang-undang dasar negara. Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator selalu berkonsultasi kepada para anggota rapat. Misalnya, mereka meminta Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr Teuku Mohammad Hasan untuk membahas masalah rancangan pembukaan undang-undang dasar yang pernah dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945 dan terdapat dalam Piagam Jakarta. Masalah tersebut terkait dengan kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya". Atas jiwa kenegaraan dan untuk mempertimbangkan keragaman kelompok agama maka diputuskan untuk

menghilangkan kalimat tersebut. Dalam rapat tersebut Soekarno berpidato sebagai berikut:

“Sidang yang terhormat. Pada hari ini kita berada dalam satu saat yang mengandung sejarah. Pada hari ini kita menyusun Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang kemerdekaannya kemarin menurut kehendak rakyat telah dipermaklumkan dengan proklamasi yang diumumkan pula kepada rakyat kira-kira jam setengah 12 Nippon.

Tuan-tuan sekalian tentu mengetahui dan mengakui bahwa kita duduk dalam suatu jaman beralih sebagai kilat cepatnya. Maka berhubung dengan itu saya minta kepada tuan-tuan sekalian supaya kitapun bertindak di dalam sidang sekarang ini dengan kecepatan kilat. Janganlah kita terlalu tertarik oleh kehendak yang kecil-kecil, tetapi marilah kita menurut garis besar saja yang mengandung sejarah”.

Akhirnya para peserta rapat sepakat untuk menetapkan UUD 1945 sebagai Undang-undang Dasar Negara RI. Dalam Rapat itu juga ditambah anggota PPKI yang baru yaitu Wiranatakusumah, Ki Hadjar Dewantara, MR Kasman, Sajuti Melik, Mr. Iwa Kiusumasumantri dan Mr. Subardjo.

Segera setelah menyepaakti rumusan Pembukaan Undang-undang Dasar, rapat berhasil memilih presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara spontan. Atas usulan Otto Iskandardinata, pemilihan presiden dan wapres dilakukan secara aklamasi. Atas usulannya, rapat, Ir Sukarno dipilih sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wapres. Pemilihan presiden diikuti dengan menyanyikan lagi kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu, rapat membicarakan pasal-pasal rancangan aturan peralihan dan aturan tambahan dalam UUD dan disepakati dalam waktu singkat pula.

Dengan demikian, sejak tanggal 18 Agustus 1945 bangsa Indonesia yang baru satu hari memproklamasikan kemerdekaannya telah memiliki landasan kenegaraan yaitu undang –undang dasar negara yang kemudian dikenal dengan UUD 1945. Pembukaan UUD tersebut mengandung dasar negara yaitu Pancasila yang terdiri dari lima sils seperti yang kita kenal sekarang.

Dalam rapat PPKI pertama tersebut Presiden Soekarno menunjuk 9 anggota sebagai Panitia Kecil yang ditugasi untuk menyusun rancangan penting tentang berbagai masalah seperti pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara, dan masalah ekonomi. Panitian tersebut terdiri dari Otto Iskandardinata, Subardjo, Sajuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Wiranatakusumah, Dr. Amir, A.A Hamidhan, Dr. Ratulangi dan Ketut Pudja. Panitian Kecil tersebut menetapkan pembagian wilayah Indonesia yang terdiri dari delapan provinsi, yaitu:

1. Provinsi Sumatera
2. Provinsi Jawa Barat
3. Provinsi Jawa Tengah
4. Privinsi Borneo (Kalimantan)
5. Provinsi Sulawesi



6. Provinsi Siunda Kecil (Nusa Tenggara)
7. Provinsi Maluku dan
8. Dua daerah istimewa yaitu Yogyakarta dan Surakarta.  
Panitia Kecil yang dipimpin oleh Mr Ahmad Subardjo dan beranggotakan Sutardjo Kartohadikusumo, dan Mr Kasman membentuk departemen yang terdiri dari:
  1. Departemen Dalam Negeri.
  2. Departemen Luar Negeri
  3. Departemen Kehakiman
  4. Departemen Keuangan.
  5. Departemen Kemakmuran
  6. Departemen Kesehatan
  7. Departemen Pengajaran, Pendidikan dan kebudayaan
  8. Departemen Sosial
  9. Departemen Pertahanan.
  10. Departemen Perhubungan
  11. Departemen Pekerjaan Umum.

Sebagai negara yang berdaulat dirasakan perlunya sebuah lembaga perwakilan atau parlemen semacam MPR dan DPR. Karena belum diselenggarakan pemilihan umum maka rapat pleno PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menegaskan perlunya dibentuk komite nasional. Dalam rapat-rapat selanjutnya PPKI mempersoalkan keanggotaan komite nasional serta bentuk lembaga yang akan didirikan. Dalam rapat yang diselenggarakan di *Gedung Kebaktian Rakyat Jawa, Gambir, Jakarta*, dan dipimpin oleh wapres Mohammad Hatta, tanggal 22 Agustus 1945 disepakati dibentuknya Komite Nasional yang berfungsi sebagai DPR sebelum diadakan pemilu. Pada tanggal 23 Agustus Presiden Sukarno dalam pidatonya menyatakan berdirinya tiga badan baru secara resmi, yaitu Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat. (BKR). KNI berfungsi sebagai DPR terdiri dari KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang berkedudukan di Jakarta. Sedangkan di daerah berdiri KNID (daerah) yang berkedudukan di ibukota provinsi. Pengurus KNIP terdiri dari Ketua, Mr. Kasman Singodimedjo, wakil ketua I, Sutardjo Kartohadikusumo, wakil ketua II, Mr. J Latuharhary dan Wakil Ketua III Adam Malik. Pengurus tersebut dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945.

KNIP menyelenggarakan rapat pleno tanggal 16 Oktober 1945. Dalam rapat tersebut KNIP diberikan kewenangan untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN) sebelum MPR terbentuk.

Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk atas ketetapan presiden Sukarno dimaksudkan sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah dan berada dibawah koordinasi KNI daerah. BKR terdiri dari BKR pusat dan BKR daerah. BKR pusat dipimpin oleh Kaprawi (ketua umum), Satalaksana (ketua I), Latief

Hendraningrat (ketua II) dan dibantu oleh Arifin Abdurrahman, mahmud dan Zulkifli Lubis. Mereka bertugas untuk menjaga keamanan secara umum dengan cara berkoordinasi dengan bekas opsir KNIL di Jakarta serta pemimpin BKR di Jawa Barat (Arudji Kartawinata), Jawa Timur (Drg. Moestopo) dan Jawa Tengah (Soedirman).

BKR di daerah menghendaki dibentuknya tentara nasional. Setelah usulan itu ditolak oleh presiden maka kemudian BKR dan para pemuda pejuang di daerah membentuk badan-badan perjuangan dan menggabungkan diri dalam *Komite van Aksi* yang bermarkas di Jalan Menteng Jakarta. Para pemimpin pemuda terdiri dari Adam Malik, Chaerul Saleh, Sukarni, Maruto Nitimihardjo dan lain-lain. Badan-badan perjuangan tersebut adalah Angkatan pemuda Indoensia (API), Barisan Rakyat Indonesia (BARA), Barisan Buruh Indonesia (BBI), Barisan Banteng, Barisan pemberontakan Rakyat Indonesia, Tentara Pelajar Indonesia, Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP), Tentara Geni Pelajar dan lain-lain.

Atas desakan tersebut dan setelah melihat kenyataan bahwa tentara yang dikeluarkan dari tawanan Jepang melakukan tindakan provokatif maka pemerintah segera membentuk tentara nasional. Yang ditugasi untuk tugas tersebut adalah pensiunan mayor KNIL (tentara pada jaman Belanda) Oerif Soemohardjo. Pada tanggal 5 Oktober dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang menyatakan berdirinya Tentara Kemamanman Rakyat (TKR). Sebagai pimpinnya ditunjuk Soepriadi bekas tentara Pembela Tanah Air (Peta) yang pernah memberontak kepada Jepang di Blitar. Dengan dasar maklumat pemerintah tersebut Oerif Soemohardjo membentuk markas Tertinggi TKR di Yogyakarta. Markas tersebut membawahi 10 divisi di Jawa dan 6 divisi di Sumatera.

Karena Soepriadi tidak aktif menduduki jabatannya maka diadakan pemilihan pimpinan tertinggi TKR yang baru. Yang terpilih adalah Kolonel Soedirman, Komandan Divisi V/ Banyuman. Pada tanggal 18 Desember 1945 Soedirman dilantik sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal. Sedangkan Oerif Soemohardjo tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala Stap Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal.

Dalam perkembangan selanjutnya TKR mengalami beberapa kali perubahan nama. Pada tanggal 7 Januari 1945 TKR berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Pada tanggal 24 Januari 1946 disepakati nama antara Republik Indoensia. Nama itu kemudian diubah menjadi Tentara nasional Indoensia pada tanggal 3 Juni 1947. Istilah TNI sebagai tentara nasional tetap dipertahankan sampai sekarang.

Setelah proklamasi dikumandangkan, **rakyat Indonesia menyambut gembira** karena setelah sekian lama berada dalam belenggu penjajahan maka tiba saatnya mereka memasuki jaman baru, kemerdekaan dan kedaulatan sendiri dan bebas dari pendudukan Jepang. Namun demikian, sebagian pemuda Indonesia yang baru saja menyambut kemerdekaan itu masih ragu apakah

dengan diproklamasikannya kemerdekaan itu aparat keamanan Jepang tidak akan menguasai kembali Indonesia. Untuk menegakkan kedaulatan republik, para pemuda menghendaki agar pemerintah segera melucuti senjata yang masih dimiliki oleh tentara Jepang. Para pemuda yang dipelopori oleh *Komite van Aksi Menteng 31* berencana untuk mengerahkan masa pada suatu rapat di Lapangan Ikada, Jakarta agar para pemimpin berbicara di hadapan mereka. Dalam rapat raksasa di lapangan tersebut sebagian para pemuda membawa berbagai senjata dan berada dibawah pengawasan tank-tank tentara Jepang yang telah menyerah pada Sekutu. Rapat yang berlangsung pada tanggal 19 September 1945 itu merupakan pertemuan pertama antara pemerintah dengan rakyat secara tatap muka. Rakyat mendapat dukungan dari pemimpinnya untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya menegakkan kedaulatan.

Sebagian besar rakyat di daerah masih merasa resah karena RI yang sudah diproklamasikan itu belum memiliki kedaulatan penuh. Buktinya tentara Jepang masih bersenjata dan berkuasa atas beberapa daerah serta memiliki markas. Keresahan tersebut segera diikuti dengan upaya pelucutan senjata milik tentara Jepang sambil menyambut kemerdekaan dan penegakkan kedaulatan. Para pemuda di berbagai daerah Indonesia berusaha menduduki dan merebut gedung-gedung penting yang diduduki Jepang.

Di Surabaya, **serangan terhadap kepentingan Jepang** diarahkan pada Markas Don Bosco, Markas Pertahanan Jawa Timur serta pabrik-pabrik. Serangan tidak hanya ditujukan kepada Jepang melainkan juga bekas tentara Belanda yang dibebaskan dari tawanan Jepang. Ketika orang-orang Belanda yang dibebaskan Jepang mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato maka dengan segera para pemuda menurunkannya dan merobek warna biru dari bendera *merah putih biru* menjadi hanya *merah putih*, bendera RI. Hotel tersebut diserbu oleh para pemuda dan berhasil merebutnya. Serangan selanjutnya adalah ke markas *Kempetei* (markas tentara Jepang) pada tanggal 1 Oktober 1945 dan berhasil menguasainya.

Serangan yang sama juga terjadi di Yogyakarta. Di kota ini para pemuda dari BKR dan barisan lainnya merebut perusahaan-perusahaan yang dimiliki Jepang. Para buruhnya melakukan aksi pemogokan. Mereka memaksa penguasa Jepang untuk menyerahkan kartor milik tentara Jepang kepada semua orang Indonesia. Pada tanggal 27 September 1945 KNI Jogja mengumumkan bahwa Yogyakarta telah berada di tangan Pemerintah RI. Walaupun demikian, kejadian itu harus dibayar mahal dengan gugurnya sebagian pemuda dalam pertumpahan darah dengan pasukan Jepang.

Serangan terhadap bangunan, perusahaan, markas militer serta pabrik milik Jepang terjadi di berbagai daerah lainnya. Di Bandung, misalnya terjadi serangan terhadap Pangkalan Udara Andir serta pabrik senjata ACW (sekarang Pindad). Di Semarang, upaya pelucutan menimbulkan perlawanan Jepang sehingga pertempuran kedua belah pihak tidak dapat dihindari. Hal yang sama juga terjadi di Sulawesi. Para pemuda di daerah itu berusaha merebut gedung-

gedung penting serta studio radio dan tangsi polisi. Para Pemuda Gorontalo pada tanggal 13 September 1945 berusaha merebut markas Jepang dan berhasil menegakkan kedaulatan RI di daerah itu. Kelompok Pemuda yang tergabung dalam Pasukan Pemuda Indonesia (PPI) mengadakan gerakan di Tangsi Putih dan Tangsi Hitam di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 14 Februari 1946. Mereka membebaskan para pemuda yang ditahan NICA (tentara Belanda) di berbagai daerah di Sulawesi Utara.

Dukungan terhadap Proklamasi kemerdekaan RI juga sangat heroik di Kalimantan. Di daerah ini, walaupun mendapat ancaman dari tentara Australia yang sudah mendarat di sana, para pemuda tetap bersemangat mempertahankan kedaulatannya. Di Balikpapan, misalnya, pada tanggal 14 September 1945 sejumlah 8000 orang berkumpul di depan kompleks NICA sambil membawa bendera merah putih, sebagai tanda dukungan terhadap pemerintahan RI hasil proklamasi.

**Dukungan terhadap pemerintahan RI** sambil merebut senjata dari Jepang dan menentang kehadiran tentara Belanda juga terjadi di Nusa Tenggara, Irian, Aceh, Sumatera Selatan dan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Di pulau Sumbawa, sejumlah 200 pemuda menyerang tentara Jepang pada bulan Desember. Di Biak, Irian Jaya (Papua) terjadi pemberontakan terhadap tentara NICA pada tanggal 14 Maret 1948. Di Banda Aceh, Langsa, Lho'Nga, Ulee Lheue dan tempat lainnya terjadi pembangkangan terhadap imbauan Jepang untuk menghormati kedudukan tentara Jepang. Pembangkangan segera diikuti dengan pelucutan tentara Jepang. Sedangkan di Sumatera Selatan, dukungan terhadap Pemerintah RI dilakukan melalui upacara penaikan dan penghormatan bendera *merah putih*. Tentara Jepang yang melihat nasionalisme rakyat Sumatera Selatan segera menyerahkan senjata sehingga insiden besar tidak terjadi. Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan betapa besar dukungan rakyat di daerah terhadap proklamasi yang baru saja dikumandangkan.

**Keadaan ekonomi RI** pasca proklamasi 1945-1950 sangat kacau. Kekacauan antara lain ditandai dengan inflasi yang sangat tinggi karena jumlah uang yang beredar tidak dapat dikendalikan. Uang yang berlaku pada awal kemerdekaan adalah uang Jepang. Peredaran mata uang tersebut sangat tinggi, sedangkan kemampuan ekonomi untuk menyerap uang tersebut masih sangat rendah. Pemerintah RI tidak dapat mengendalikan peredaran uang tersebut dan menggantinya dengan uang republik karena pemerintah belum mampu. Kebijakan sementara yang diambil adalah dengan menetapkan tiga mata uang yang berlaku, yaitu mata uang pendudukan Jepang, mata uang Hindia Belanda dan mata uang De Javasche Bank.

Setelah Belanda masuk kembali ke Indonesia, situasi perekonomian semakin buruk. Para petani yang paling banyak memegang mata uang pendudukan Jepang merupakan kelompok masyarakat yang paling menderita. Hasil pertanian mereka tidak dapat dijual nilai tukar uang yang dipegang sangat

rendah. Untuk melemahkan republik, Belanda melakukan blokade ekonomi sejak bulan November 1945. Blokade ekonomi juga bertujuan untuk mencegah masuknya peralatan militer ke Indonesia, dan mencegah dikeluarkannya hasil perkebunan milik Belanda. Tujuan lainnya adalah untuk menciptakan situasi kacau di kalangan masyarakat agar timbul kebencian dari rakyat terhadap pemerintahan republik. Dalam kondisi seperti ini Belanda akan dengan mudah menguasai kembali Indonesia.

Upaya pemerintah RI untuk mengatasi hal itu antara lain melalui:

1. Melakukan pinjaman nasional atas persetujuan Badan Pekerja KNIP. Pinjaman sebesar satu milyar itu dilakukan kepada seluruh rakyat. Caranya, rakyat harus menyetor uang ke Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian. Upaya ini mendapat response yang baik dari seluruh rakyat. Terbukti dalam waktu singkat pemerintah RI telah menghimpun sejumlah lima ratus juta, sebagai target tahap pertama. Kesuksesan ini menunjukkan adanya dukungan rakyat terhadap pemerintah RI.
2. Melarang penduduk untuk mempergunakan uang NICA yang dikeluarkan Belanda pada tanggal 6 Maret 1946. Perdana Menteri Sutan Sjahrir segera melancarkan protes atas tindakan Belanda dan menganggap tindakan tersebut adalah untuk mengacaukan republik.
3. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI untuk pertama kali mengeluarkan uang republik. Namanya ORI atau Oeang Repoeblik Indonesia. Uang tersebut dimaksudkan untuk mengganti mata uang Jepang. Pada tahun pertama penggunaan uang tersebut, pemerintah hanya mengizinkan setiap keluarga memiliki RP 300 saja dan bagi yang tidak berkeluarga hanya Rp. 100,-.
4. Mendirikan Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November 1946. Bank tersebut diharapkan berfungsi untuk menjaga nilai tukar rupiah serta valuta asing yang ada di Indonesia.

Dalam situasi ekonomi yang buruk akibat blokade ekonomi, pemerintah RI masih mampu menunjukkan secara politis kepada dunia internasional bahwa blokade ekonomi Belanda telah gagal. Untuk menembus blokade ekonomi Belanda, pemerintah RI mampu mengirimkan bantuan beras sebesar 500.000 ton kepada India yang sedang ditimpa kelaparan. Pengiriman yang lebih bersifat politis segera dijawab oleh India dengan cara mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan Indonesia.

**Usaha lainnya untuk menembus blokade** adalah dengan menjalin hubungan ekonomi dengan perusahaan swasta Amerika Serikat (AS). Usaha ini dirintis oleh banking and Trading Corporation, sebuah badan usaha semi pemerintah yang dipimpin oleh seorang ekonom terkemuka Dr Sumitro Djojohadikusumo. Melalui perjanjian, perusahaan AS bersedia membeli barang-barang dari Indonesia terutama hasil perkebunan seperti karet, gula, dan lain-lain. Akhirnya barang dagangan dari Indonesia dapat diekspor ke AS melalui pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta dan Pelabuhan Cirebon.

Hasil perkebunan di Sumatera juga dapat diekspor ke Singapura dan Malaya, dua negara yang relatif dekat dengan Indonesia. Usaha yang dirintis sejak tahun 1946 ini mampu mendatangkan devisa untuk kepentingan ekonomi negara. Namun demikian, secara keseluruhan, baik pemerintah maupun rakyat mengalami kesulitan yang besar untuk menciptakan situasi ekonomi yang baik. Rakyat tetap menderita. Penderitaan rakyat akibat pendudukan Jepang masih belum pulih ketika mereka memasuki jaman republik sejak tahun 1945.

Untuk mengatasi kesengsaraan rakyat, pemerintah membentuk Badan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (PPBM) dibawah pengawasan kementerian Kemakmuran. Badan ini menjadi cikal bakal lahirnya Badan Urusan Logistik. Sejak adanya badan ini maka larangan untuk pengiriman bahan makanan antar keresidenan dihapuskan. Terbentuknya badan ini sebagai hasil dari Konferensi Ekonomi yang diselenggarakan pada bulan Februari 1946 yang dihadiri oleh para cendekiawan dan para ekonom. Dalam Konferensi ekonomi kedua yang diselenggarakan di Solo bulan Mei 1946 diputuskan untuk merehabilitasi pabrik-pabrik gula. Alasannya adalah gula merupakan barang ekspor yang sangat penting untuk menambah devisa negara. Tindakan lainnya adalah pembentukan Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara dan pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

**Langkah kongkrit** yang ditempuh pemerintah RI selanjutnya adalah membentuk **Badan Perancang Ekonomi** (*Planning Board*). Atas inisiatif Menteri Kemakmuran AK Gani, Indonesia membuka diri untuk penanaman modal asing. Untuk membiayai rencana pembangunan ekonomi, pemerintah mengerahkan dana masyarakat melalui pinjaman nasional melalui tabungan masyarakat serta melibatkan badan-badan swasta dalam pembangunan ekonomi.

Langkah lainnya adalah melakukan rasionalisasi. Atas usulan Mohammad Hatta, rasionalisasi meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang dan aparat ekonomi. Rasionalisasi diikuti dengan intensifikasi pertanian, penanaman bibit unggul dan peningkatan peternakan. Melalui usaha ini, pemerintah berusaha menunjukkan kepada rakyat bahwa pemerintah RI berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya yang baru saja memiliki pemerintahan sendiri dan berdaulat, walaupun Belanda masih tetap bercokol di Indonesia sampai tahun 1949.

## **B. Upaya Mempertahankan Kedaulatan Negara.**

Kedaulatan negara terancam saat terjadinya konflik Indonesia-Belanda. Konflik yang terjadi tahun 1945-1949 disebabkan Belanda tidak mengakui kemerdekaan dan kedaulatan RI yang telah memproklamasikan kemerdekaannya. Belanda masih merasa berhak untuk menguasai Indonesia setelah Jepang kalah dari Sekutu. Jepang yang kalah perang juga menunjukkan

sikap yang sama. Karena masih berhak mengurus Indonesia, Belanda memanfaatkan pasukan Sekutu untuk kembali berkuasa atas Indonesia. Para pemuda Indonesia yang baru saja menyambut kemerdekaan dihadapkan pada kenyataan bahwa penjajah masih saja ingin tetap berkuasa atas Indonesia. Pasukan Sekutu dibawah komando Asia Tenggara (South East Asia Command atau SEAC) yang dipimpin Laksamana Lord Louis Mountbatten mulai mendarat di Tanjung Priok pada tanggal 29 September 1945.

Tentu saja kedatangan pasukan tersebut disambut dengan sikap curiga oleh para pemuda Indonesia karena mereka merasa bahwa RI sudah berdiri sebagai negara. Kecurigaan bangsa Indonesia semakin meningkat setelah mengetahui bahwa pasukan Sekutu membawa orang-orang NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) yang akan menegakkan kembali kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia. Permusuhan mulai terjadi setelah para pemuda pejuang mengetahui bahwa NICA mempersenjatai kembali orang-orang KNIL yang baru dilepaskan dari tawanan Jepang. Orang-orang NICA dan KNIL di Jakarta, Bandung dan kota-kota lain kemudian memancing kerusuhan dengan cara mengadakan provokasi-provokasi bersenjata. Pihak Sekutu sendiri tidak menghormati kedaulatan Indonesia dengan cara membiarkan pasukan NICA dan KNIL melakukan tindakan yang merusak keamanan. Pertempuran antara pasukan Indonesia dengan pasukan Serikat tidak dapat dihindari.

Menghadapi konflik Indonesia dengan Serikat (Inggris) dan Belanda tersebut pemerintah RI memilih jalan diplomasi. Pada tanggal 1 Nopember 1945 Pemerintah mengeluarkan sebuah maklumat politik berupa keinginan pemerintah RI agar Inggris dan Belanda mengakui kedaulatan RI.

Atas usulan pemerintah RI itu, Sir Archibald Clark Kerr, duta istimewa Inggris di Indonesia, dan Gubernur Jenderal Dr. H.J. van Mook menawarkan perundingan pada tanggal 10 Februari 1946. Dalam awal perundingan itu van Mook menyampaikan pernyataan politik pemerintah Belanda yang terdiri atas 6 fasal yang mengulangi pidato Ratu Belanda pada tanggal 7 Desember 1942. Isi pokoknya adalah :

1. Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi yang memiliki pemerintahan sendiri di dalam lingkungan Kerajaan Nederland;
2. Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedang urusan luar diurus oleh pemerintah Belanda;
3. Sebelum dibentuknya persemakmuran akan dibentuk pemerintah peralihan selama 10 tahun;
4. Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB.

Dalam situasi perundingan tersebut tekanan bukan hanya datang dari luar melainkan juga dari dalam. Dari dalam oposisi datang dari Persatuan Perjuangan (PP) yang menghendaki agar pengakuan kedaulatan harus meliputi 100 persen atas wilayah Indonesia.

Pada tanggal 27 Maret 1946 Sutan Sjahrir sebagai perdana Menteri memberikan jawaban disertai persetujuan dalam membentuk traktat yang isi pokoknya adalah :

1. Supaya pemerintah Belanda mengakui kedaulatan *de facto* RI atas Jawa dan Sumatra;
2. Supaya RI dan Belanda bekerjasama membentuk RIS;
3. Republik Indonesia Serikat bersama-sama dengan Nederland, Suriname, Curacao, menjadi peserta dalam suatu ikatan kenegaraan Belanda.

Walaupun belum ada titik temu, perundingan tersebut menunjukkan adanya pendekatan kedua belah pihak. Perundingan dilanjutkan di Hooge Veluwe (Negeri Belanda). Pemerintah RI mengirimkan delegasi yang terdiri dari Mr. Suwandi, dr. Sudarsono, dan Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Delegasi RI berangkat ke Nederland pada tanggal 4 April 1946 bersama-sama dengan Sir Archibald Clark Kerr. Delegasi Belanda yang diajukan dalam perundingan ini terdiri atas Dr. van Mook, Prof. Logemann, Dr. Idenburgh, Dr. van Royen, Prof. Van Asbeck, Sultan Hamid II dari Pontianak, dan Surio Santoso.

Usul Belanda itu pada tanggal 17 Juni 1946 ditolak oleh pemerintah RI, karena dianggap tidak mengandung sesuatu yang baru. Adapun usul balasan Pemerintah RI adalah :

1. Republik Indonesia berkuasa *de facto* atas Jawa, Madura, Sumatra, ditambah dengan daerah-daerah yang dikuasai oleh tentara Inggris dan Belanda;
2. Republik Indonesia menolak ikatan kenegaraan dengan Belanda dan menghendaki penghentian pengiriman pasukan Belanda ke Indonesia, sedangkan Pemerintah Republik Indonesia tidak akan menambah pasukannya;
3. Pemerintah Republik menolak suatu periode peralihan di bawah kedaulatan Belanda.

**Cara diplomasi** yang ditempuh pemerintah telah menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Persatuan Perjuangan (PP) tetap menentang sikap pemerintah tersebut dan menghendaki dilakukannya konfrontasi terhadap Belanda. Mendapat tantangan tersebut Pemerintah RI menangkap beberapa tokoh PP seperti Tan Malaka, Sukarni, Abikusno Tjokrosujoso, Chaerul Saleh, Muh. Yamin, Suprpto dan Wondoamiseno serta membubarkan organisasi PP pada tanggal 4 Juni 1946. Sebagai gantinya pemerintah mendirikan organisasi Konsentrasi Nasional dan kemudian organisasi tersebut mendukung kebijaksanaan pemerintah.

Pertentangan pemerintah dengan kelompok oposisi dimanfaatkan oleh Belanda untuk memberikan tekanan politik dan militer kepada pemerintah RI. Tekanan politik diberikan dengan cara menyelenggarakan Konferensi Malino dengan tujuan untuk membentuk "negara-negara" di daerah-daerah yang baru diserahkan oleh Inggris dan Australia. "Negara-negara" itu kelak dijadikan imbalan terhadap RI, untuk memaksa pemerintah RI agar menerima



bentuk federasi sebagaimana yang diusulkan oleh pihak Belanda. Konferensi lainnya diselenggarakan di Pangkalpinang khusus untuk golongan minoritas. Konferensi Malino diadakan pada tanggal 15-25 Juli 1946 dan Konferensi Pangkalpinang pada tanggal 1 Oktober 1946. Sedangkan tekanan militer dilakukan dengan cara mengirimkan pasukan ke daerah-daerah konflik di berbagai wilayah Indonesia.

Menghadapi **konflik Indonesia Belanda**, Inggris mencampurinya dengan cara menawarkan diri menjadi perantara. Tawaran Inggris itu diterima oleh Pemerintah RI dan sepakat untuk melakukan perundingan kembali dengan Belanda mengenai:

1. gencatan senjata secara total di darat, laut dan udara.
2. penghentian pemasukan pasukan Belanda ke Indonesia;
3. jaminan dari Sekutu bahwa Sekutu tidak akan menyerahkan senjata-senjatanya
4. kepada pihak Indonesia;
5. pembukaan atau kebebasan memakai jalan di darat, laut dan udara oleh pihak RI;
6. penyingkiran orang Jepang baik sipil maupun militer dari seluruh Indonesia.

Perundingan gencatan senjata yang berlangsung tanggal 9-14 Oktober 1946 menyepakati persetujuan sebagai berikut :

1. Delegasi Indonesia, Inggris dan Belanda mengadakan gencatan senjata atas dasar kedudukan militer pada waktu kini dan atas dasar kekuatan militer;
2. Disetujui pembentukan Komisi Gencatan Senjata yang bertugas untuk menimbang dan memutuskan pelaksanaan gencatan senjata dan pengaduan terhadap pelanggarannya;
3. Komisi ini bekerja sampai 30 Nopember 1946.
4. Disetujui bersama membentuk sub-komisi teknis yang terdiri atas para kepala staf militer Inggris, Indonesia dan Belanda. Tugas sub-komisi ini adalah untuk secepatnya memberi perintah penghentian tembak-menembak, menyusun instruksi untuk pedoman pelaksanaan gencatan senjata, membentuk badan arbitrase, dan lain-lain.

Masalah gencatan senjata tidak diikuti dengan perintah penghentian tembak menembak. Oleh karena itu Penglima Besar Soedirman menegaskan bahwa dalam masalah gencatan senjata ini belum ada perintah penghentian tembak-menembak, sekalipun telah tercapai persetujuan. Sesuai dengan persetujuan itu pada akhir Nopember dan awal Desember diadakan perundingan-perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk menetapkan garis demarkasi. Perundingan itu dihadiri oleh anggota Komisi Gencatan Senjata dari kedua belah pihak, tetapi tidak menghasilkan sesuatu keputusan. Perundingan diteruskan di Linggajati, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada tanggal 10 Nopember 1946. Hasil perundingan diumumkan pada tanggal 15 Nopember dan menyepakati:

1. Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara berdasarkan federasi, yang dinamai Negara Indonesia Serikat;
2. Pemerintah RIS akan bekerjasama dengan pemerintah Belanda membentuk Uni Indonesia-Belanda.

Hasil **perundingan Linggajati** ditanggapi dengan sikap pro dan kontra. Mereka bergabung dalam partai yang berbeda. Partai politik menyatakan menentang terdiri dari Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Wanita, Angkatan Komunis Muda (Acoma), Partai Rakyat Indonesia, Laskar Rakyat Jawa Barat, Partai Rakyat Jelata. Sedangkan yang mendukung adalah PKI, Pesindo, BTI, Laskar Rakyat, Partai Buruh, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katholik. Dewan Pusat Kongres Pemuda menyatakan tidak menentukan sikap terhadap naskah persetujuan demi menjaga persatuan di kalangan organisasi mereka yang berbentuk federasi. Golongan yang menolak Linggajati bergabung di dalam Benteng Republik Indonesia, yang terdiri dari partai serta organisasi tersebut di atas.

Akhirnya Persetujuan Linggajati pada tanggal 25 Maret 1947 dan naskah persetujuan tersebut ditandatangani oleh pihak Belanda dan Indonesia. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya hasil persetujuan tersebut tidak mengubah hubungan Indonesia-Belanda. Kedua negara tetap berada dalam perselisihan. Pihak Belanda sendiri melakukan penafsiran yang berbeda sehingga pelanggaran terus dilakukan. Misalnya seminggu sebelum Persetujuan ditandatangani Belanda sudah melenggar garis demarkasi. Belanda juga terus berusaha membentuk negara-negara bagian serta mempropokasi negara-negara bagian yang sudah ada untuk terus menentang pemerintah Republik Indonesia.

Atas desakan dari Belanda serta tuntutan dari beberapa negara bagian, Pemerintah RI menyatakan bersedia mengakui Negara Indonesia Timur sekalipun pembentukannya tidak selaras dengan Linggajati. Status Borneo harus dibicarakan bersama oleh RI-Belanda. RI tetap diakui sebagaimana termaktub dalam Linggajati. Dalam bidang militer pemerintah RI menyetujui demiliterisasi daerah demarkasi antara kedua pihak dengan menyerahkan penjagaan zone bebas-militer itu kepada Polisi. Peta demarkasi dikembalikan pada situasi 24 Januari 1947. Tentara kedua belah pihak harus diundur dari daerah demarkasi ke kota garnisun masing-masing. Penyelenggaraan fasal 16 tentang pertahanan Indonesia Serikat, adalah urusan Negara Serikat sebagai kewajiban nasional dan pada dasarnya harus dilakukan oleh tentara nasional sendiri.

Hasil Persetujuan Linggajati tanggal 25 Maret 1947, dengan adanya pengakuan secara de facto Pemerintah RI atas Jawa dan Sumatera oleh Belanda telah menarik dunia internasional terlebih-lebih setelah Belanda melakukan berbagai pelanggaran. Ketegangan-ketegangan baru timbul, karena perbedaan tafsir mengenai isi persetujuan itu. Pihak Belanda tidak dapat

menahan diri, dan melanjutkan agresinya Agresi militer Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 merupakan salah satu pelanggaran besar atas persetujuan tersebut. Dunia internasional bereaksi keras atas pelanggaran tersebut. Oleh karena itu masalah Indonesia kemudian dimasukkan ke dalam acara sidang Dewan Keamanan pada 31 Juli 1947. Australia mengusulkan bahwa atas dasar pasal 39 Piagam PBB, Dewan Keamanan agar mengambil tindakan terhadap suatu usaha yang mengancam perdamaian dunia. Aksi militer yang dilakukan terhadap RI oleh Belanda itu merupakan suatu ancaman terhadap perdamaian. Kedudukan Republik Indonesia semakin kuat dan dunia luar mengakui Perjuangan Kemerdekaan Indonesia dan sejak itu organisasi internasional tersebut memberikan jasa-jasa baik untuk menyelesaikan sengketa Indonesia dengan Belanda.

Pada tanggal 1 Agustus 1947 PBB mengeluarkan seruan kepada Indonesia dan Belanda untuk segera menghentikan tembak-menembak; menyelesaikan pertikaiannya dengan cara perwasitan (arbitrase) atau dengan cara-cara damai yang lain dan melaporkan tentang hasil-hasil penyelesaian itu kepada Dewan Keamanan. Demikianlah pada tanggal berlaku Gencatan senjata disepakati pada 4 Agustus 1947 dan kemudian meningkat kepada perundingan.

Suatu teks resmi **Keputusan Dewan Keamanan** yang disampaikan kepada Republik Indonesia berbunyi "supaya membuat laporan yang sesungguhnya tentang keadaan di Indonesia" pembentukan suatu komisi yang akan memberikan jasa-jasa baik untuk membantu penyelesaian pertikaian Indonesia dengan Belanda. Sutan Sjahrir sebagai Duta Keliling Republik Indonesia diminta oleh sidang Dewan Keamanan berbicara di muka sidang Dewan Keamanan untuk menjelaskan perjuangan rakyat Indonesia melawan Belanda dan meminta Dewan Keamanan untuk membentuk suatu badan arbitrase yang tidak memihak. Permintaan tersebut dijawab oleh PBB dengan membentuk suatu komisi jasa-jasa baik bernama Komisi Tiga Negara (KTN). Anggota KTN seorang dipilih oleh Indonesia, seorang dipilih oleh Belanda, sedangkan kedua anggota itu memilih anggota ketiga. Pemerintah Republik Indonesia memilih Australia, pemerintah Kerajaan Belanda meminta Belgia, sedang kedua negara tersebut memilih Amerika Serikat sebagai anggota ketiga. Selanjutnya pemerintah Australia menunjuk Richard C. Kirby, sebagai wakilnya untuk duduk dalam Komisi itu. Pemerintah Belgia menunjuk Paul van Zeeland sebagai wakilnya, dan Pemerintah Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank B. Graham.

Anggota KTN mulai bekerja sejak tanggal 27 Oktober 1947. Sejak dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan pada tanggal 1 Nopember 1947, maka tugas KTN bukan lagi hanya di bidang politik saja, tetapi juga di bidang militer. Atas jasa KTN ini maka Indonesia dan Belanda menerima tawaran pemerintah Amerika Serikat untuk berunding di atas kapal angkut pasukan Renville sebagai tempat perundingan netral pada atanggal 8 Desember 1947 di kapal tersebut. Perundingan di atas kapal tersebut berakhir pada tanggal 17

Januari 1948 dengan di tandatanganinya naskah Persetujuan Renville yang antara lain berisi : "persetujuan gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda; dan enam pokok prinsip tambahan untuk perundingan guna mencapai penyelesaian politik".

Ternyata Belanda masih melakukan pelanggaran yang telah disepakatinya. Negara bekas penjajah ini melakukan aksi militernya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948. KTN melaporkan kepada Dewan Keamanan bahwa Belanda nyatanya melakukan pelanggaran ketentuan Dewan Keamanan. Dewan Keamanan bersidang pada 22 Desember 1948, dan menghasilkan resolusi; mendesak supaya permusuhan segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditawan segera dibebaskan. KTN ditugaskan untuk menjadi pengawas pelaksanaan resolusi itu.

Di forum internasional, Indonesia memperoleh kemenangan diplomatik. Kemenangan tersebut diperoleh setelah dukungan terhadap Indonesia diperoleh dari negara-negara di Asia dan Afrika. Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, tanggal 23 Januari 1949 atas nama Konferensi Asia di New Delhi menuntut dipulihkannya Republik Indonesia kepada keadaan semula, ditariknya mundur tentara Belanda, diserahkannya kedaulatan kepada rakyat Indonesia dan diperluasnya wewenang KTN. Konferensi New Delhi ini diprakarsai oleh Perdana Menteri India dan dihadiri oleh wakil-wakil negara-negara Afghanistan, Australia, Burma, Sri Langka, Mesir, Ethiopia, India, Iran, Iraq, Libanon, Pakistan, Philipina, Saudi Arabia, Suriah dan Yaman sebagai peserta; dan wakil dari negara-negara Cina, Nepal, Selandia Baru dan Muangthai sebagai peninjau.

Atas desakan para peserta Konferensi New Delhi maka Dewan Keamanan PBB menerima suatu resolusi konferensi tersebut yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

- a. Segera melakukan gencatan senjata dan
- b. Pemimpin-pemimpin Republik Indonesia segera dibebaskan dan dikembalikan ke Yogyakarta.

Resolusi itu untuk pertama kalinya menentukan dengan jelas garis-garis dan jangka waktu "penyerahan" kedaulatan dari tangan Belanda ke pihak Indonesia, dan meluaskan wewenang KTN yang namanya diubah menjadi United Nations Commission for Indonesia (UNCI). Oleh karena Republik Indonesia dengan jujur menjalankan politik damai dan bersedia berunding untuk menyelesaikan soal-soal Indonesia atas prinsip Indonesia merdeka dan sikap berperang untuk membela diri apabila diserang. Atas resolusi itu Belanda mulai terdesak dan menyadari perlunya mengakui kedaulatan Indonesia.

**Negara-negara boneka** di berbagai daerah di Indonesia juga menyadari bahwa dukungan Belanda terhadap mereka adalah upaya Belanda untuk menguasai kembali seluruh Indonesia. Negara-negara bagian di luar Republik Indonesia hasil dari Perjanjian Linggajati dan Renville sepakat untuk mengadakan konferensi semua negara bagian dan merumuskan formula untuk

mengusir Belanda. Pada tanggal 19 – 22 Juli 1949 diadakan perundingan antara kedua belah pihak, yaitu RI dan negara-negara bagian, yang disebut Konferensi Antar-Indonesia. Konferensi itu memperlihatkan, bahwa politik divide et impera Belanda untuk memisahkan daerah-daerah di luar Republik dari Republik Indonesia, akhirnya mengalami kegagalan. Pada Konferensi Antar-Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta itu dihasilkan persetujuan mengenai bentuk dan hal-hal yang bertalian dengan ketatanegaraan Negara Indonesia Serikat.

1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme;
2. RIS akan dibentuk kepalai seorang presiden konstitusional dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada dewan perwakilan rakyat;
3. Akan dibentuk dua badan perwakilan, yakni sebuah dewan perwakilan rakyat dan sebuah dewan perwakilan negara bagian (senat). Pertama kali akan dibentuk dewan perwakilan rakyat sementara;
4. Pemerintah Federal Sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak Negara Belanda, melainkan pada saat yang sama juga dari Republik Indonesia;

Di bidang militer juga telah tercapai persetujuan :

1. Angkatan Perang RIS adalah angkatan perang nasional. Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS;
2. Pertahanan Negara adalah semata-mata hak Pemerintah RIS; negara-negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang sendiri;
3. Pembentukan angkatan perang RIS adalah semata-mata untuk kedaulatan bangsa Indonesia. Angkatan perang RIS akan dibentuk RIS dengan inti angkatan perang RI.
4. Pada masa permulaan RIS menteri pertahanan dapat merangkap sebagai Panglim besar APRIS.

Pada tanggal 30 Juli 1949 **Konferensi Antara Indonesia** dilanjutkan di Jakarta dan dipimpin oleh PM Hatta. Konferensi ini membahas masalah pelaksanaan dari pokok persetujuan yang telah disepakati di Yogyakarta. Kedua belah pihak setuju untuk membentuk panitia Persiapan Nasional yang bertugas menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah **Konferensi Meja Bundar (KMB)**. Sesudah berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri dengan musyawarah di dalam Konferensi Antar Indonesia kini bangsa Indonesia sebagai keseluruhan siap menghadapi KMB. Delegasi Indonesia terdiri dari Dr. Mohammad Hatta, Mr Moh Roem, Prof. Mr Supomo, dr J Leimena, Mr Ali Sastroamidjojo, Ir Djuanda, dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr Sumitro Djojohadikusumo, Mr Abdul Karim Pringgodigdo, Kol TB Simatupang, dr Mr. Sumardi. Sedangkan dari BFO dipimpin oleh Sultan hamid II dari Pontianak.

Pada tanggal 23 Agustus 1949 KMB dimulai di Den Haag dan berlangsung sampai tanggal 2 Nopember 1949. Hasil kesepakatan tersebut kemudian diajukan kepada KNIP untuk diratifikasi. Berdasarkan hasil sidang

KNIP yang berlangsung tanggal 6 Desember 1949, berhasil menerima KMB dengan 226 pro lawan 62 kontra, dan 31 meninggalkan sidang. Dengan demikian, hasil KMB dapat dinyatakan diterima untuk diratifikasi atau disahkan.

Sebagai realisasi dari KMB maka pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS. Calon yang diajukan adalah Ir. Soekarno dan terpilih sebagai Presiden RIS pada tanggal 16 Desember 1949. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember Presiden RIS diambil sumpahnya. Pada tanggal 20 Desember 1949 Kabinet RIS yang pertama di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta selaku Perdana Menteri, dilantik oleh Presiden. Akhirnya pada tanggal 23 Desember delegasi RIS yang dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta berangkat ke Netherland untuk menandatangani akte "penyerahan" kedaulatan dari Pemerintah Belanda. Tepat pada tanggal 27 Desember 1949 di Indonesia dan Negeri Belanda terajdi upacara penandatanganan naskah "penyerahan" kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada RIS. Istilah penyerahan perlu diberi tanda kutif karena sebenarnya Belanda tidak perlu menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia karena negara ini telah memiliki kedaulatannya secara *de jure* pada tanggal 17 Agustus 1945. "Penyerahan" kedaulatan berarti secara formal pemerintah Belanda telah **mengakui kedaulatan Indonesia**. Dengan demikian, perang kemerdekaan yang berlangsung sejak tahun 1945 telah berakhir berkat perjuangan militer serta diplomasi yang terus-menerus dilakukan oleh bangsa Indonesia.

### **C. Ujian Terhadap Wawasan Kebangsaan pada Saat Demokrasi Terpimpin (1949-1965)**

Pada masa pemerintahan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, kehidupan negara dan masyarakat ditandai dengan pergolakan sosial dan politik. Dalam kehidupan kenegaraan, terjadi kedakstabilan pemerintahan. Hal ini ditandai dengan pergantian pemerintah beberapa kali, terutama pada masa pemerintahan demokrasi liberal. Adapun kehidupan masyarakat ditandai dengan berbagai kesulitan ekonomi dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat. Oleh karena itu, pada masa ini terjadi pergolakan di daerah, baik yang bersifat sosial maupun politis. Pergolakan sosial mengarah pada protes terhadap kelompok masyarakat yang dianggap memiliki kedudukan ekonomi. Sedangkan pergolakan politik dilakukan oleh kelompok sipil dan militer yang menentang pemerintahan pusat.

Negara RIS yang dibentuk sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 2 Desember 1949 di Den Haag, merupakan negara federal yang terdiri dari negara-negara bagian yang memiliki luas wilayah berbeda. Di antara negara-negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia yang mempunyai daerah terluas dan penduduk terbanyak, yaitu Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan dan Negara Indonesia Timur. Negara ini menganut sistem pemerintahan parlementer. Sebagai

presiden atau kepala negara yang pertama RIS Ir. Sukarno, sedangkan Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai perdana Menteri yang pertama. Tokoh-tokoh terkemuka yang duduk dalam kabinet ini antara lain dari pihak Republik Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Ir. Djuanda, Mr. Wilopo, Prof. Dr. Supomo, dr. Leimena, Arnold Mononutu, Ir. Herling Laoh, Sultan Hamid II dan Ide Anak Agung Gede Agung. Menurut sistem perlembagaan.

Sistem federal ini ternyata tidak berlangsung lama. Beberapa negara bagian menyatakan ingin bergabung dengan Republik Indonesia. Rakyat di negara-negara bagian umumnya menuntut agar wilayahnya dikembalikan kepada Republik Indonesia, seperti tuntutan rakyat Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1950 yang telah berdemonstrasi di Bandung agar Negara Pasundan dibubarkan dan seluruh wilayahnya dimasukkan ke dalam RI. Dengan berakhirnya existensi Negara Pasundan, maka tugas Sewaka sebagai Komisaris RIS berakhir dan kemudian ia diangkat menjadi Gubernur RI untuk daerah Jawa barat. Sikap yang serupa ditunjukkan pula oleh rakyat dari negara-negara bagian lainnya yaitu NIT (Negara Indonesia Timur) dan NST (Negara Sumatra Timur). Kedua negara bagian ini menginginkan agar wilayahnya dikembalikan kepada RI. Oleh karena adanya desakan rakyat yang kuat, maka akhirnya pada tanggal 8 April 1950 diselenggarakan konferensi segitiga antara RIS – NIT – NST. Kedua negara bagian tersebut menyerahkan mandatnya kepada Perdana Menteri RIS Hatta pada tanggal 12 Mei 1950. Beberapa negara bagian juga menyatakan ingin bergabung dengan RI dan meninggalkan sistem federal.

Pada tanggal 17 Agustus 1950 **pembentukan Negara Kesatuan** terlaksana setelah ditandatanganinya Piagam Persetujuan antara Pemerintah RIS dan Pemerintah RI. Kesepakatan antara RIS dan RI (sebagai negara bagian) untuk membentuk negara kesatuan, tercapai pada tanggal 19 Mei 1950. Setelah selama kurang-lebih 2 bulan bekerja, Panitia Gabungan RIS-RI yang bertugas merancang UUD Negara Kesatuan menyelesaikan tugasnya pada tanggal 20 Juli 1950. Kemudian setelah diadakan pembahasan di masing-masing DPR, rancangan UUD negara kesatuan diterima, baik oleh Senat dan Parlemen RIS maupun oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Pada tanggal 15 Agustus 1950 Presiden Sukarno menandatangani rancangan UUD tersebut yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (UUDS 1950).

**UUDS 1950** ini mengandung unsur-unsur dari UUD 1945 maupun dari Konstitusi RIS. Menurut UUDS 1950 kekuasaan legislatif dipegang oleh presiden, kabinet dan DPR. Pemerintah mempunyai hak untuk mengeluarkan undang-undang darurat atau peraturan pemerintah, walaupun kemudian perlu juga disetujui oleh DPR pada sidang berikutnya. Presiden juga dapat mengeluarkan dekritnya kalau diperlukan. Tetapi walaupun demikian, kabinet, baik secara keseluruhan maupun secara perorangan, masih bertanggungjawab pada DPR yang mempunyai hak untuk menjatuhkan kabinet seluruhnya atau memberhentikan menteri-menterinya secara individual.

Setelah kembali ke negara kesatuan, kehidupan masyarakat tetap buruk. Hal ini disebabkan pemerintah belum berbuat banyak untuk menjaga stabilitas ekonomi serta menciptakan kemakmuran. Akibat buruk perang kemerdekaan yang ditandai dengan hancurnya prasarana telah memperburuk situasi ekonomi. Secara psikologis, keadaan ekonomi yang umumnya buruk ini berpengaruh terhadap kerusakan mental. Inflasi dan defisit dalam anggaran belanja membumbung tinggi.

Untuk mengatasi masalah ekonomi, pemerintah menjalankan suatu tindakan dalam bidang keuangan yaitu dikeluarkannya peraturan pemotongan uang pada tanggal 19 Maret 1950. Peraturan ini menentukan bahwa uang yang bernilai 2,50 gulden ke atas dipotong menjadi dua, sehingga nilainya tinggal setengahnya. Walaupun banyak pemilik uang yang dirugikan oleh peraturan ini, pemerintah mulai dapat mengendalikan inflasi, ekspor Indonesia meningkat dan pendapatan negara juga bertambah.

Bidang kepegawaian, baik sipil maupun militer juga mengaloi masalah yang berat.. Untuk mengatasi beban negara, jumlah tentara pasca perang harus dikurangi dan dirasionalisasi. Personil bekas anggota Angkatan Perang Belanda yang akan dilebur ke dalam APRIS meliputi kira-kira 33.000 orang dengan 30 orang perwira. Pada Angkatan Udara diserahkan 10.000 orang. Pembentukan APRIS sebagai salah satu keputusan KMB ternyata menimbulkan masalah psikologis. Di satu pihak TNI berkeberatan untuk bekerja sama dengan bekas musuhnya. Sebaliknya dari pihak KNIL terdapat pula tuntutan untuk ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan menentang masuknya TNI ke dalam negara bagian tersebut. Gejala ini terlihat di Bandung berupa gerakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) yang mengirimkan ultimatum kepada Pemerintah RIS dan Negara Pasundan serta menuntut untuk diakui sebagai tentara Pasundan dan menolak dibubarkannya negara tersebut. Di Kalimantan Barat Sultan Hamid II menentang masuknya TNI serta menolak untuk mengakui Menteri Pertahanan RIS. Di Makasar muncul gerakan Andi Azis dan di Ambon gerakan Republik Maluku Selatan (RMS). Selain harus mengatasi suasana instabilitas nasional sebagai akibat bom-bom waktu yang sengaja ditinggalkan oleh pihak kolonialis, maka pemerintah juga tetap harus menghadapi pemberontakan DI/TII terutama di Jawa dan Sumatera.

Sistem pemerintahan perlemitter sesuai dengan UUDS tahun 1950 ternyata tidak membawa kestabilan politik. Dari tahun 1950 sampai tahun 1955 terdapat 4 kali pergantian kabinet sehingga rata-rata tiap tahun terdapat pergantian kabinet. Kabinet-kabinet tersebut adalah Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952), Kabinet Wilopo (April 1952-1953) dan Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953-1955). Sesuaio dengan konstitusi maka parlemen dapat menjatuhkan kabinet apabila opisisi di perlemen kuat dan partai politik yang memerintah kehilangan dukungan. Kondisi ini menyebabka sering terjadinya penjatuhan kabinet oleh parlemen dan menjurus ke arah ketidak stabilan politik.



**Kabinet Natsir** (6 September 1950 sampai tanggal 20 Maret 1951) adalah kabinet koalisi di mana PNI sebagai partai kedua terbesar dalam Parlemen tidak turut serta. Salah satu sebab PNI menolak turut dalam kabinet ini ialah karena merasa tidak diberi kedudukan yang sesuai. Inti kabinet ini adalah Masyumi, dengan meliputi juga anggota-anggota yang non-partai. Banyak di antara anggota yang cukup punya nama dan dianggap ahli pada bidangnya, sehingga sesungguhnya kabinet ini termasuk kuat formasinya. Tokoh-tokoh terkenal di antaranya ialah Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Assaat (bekas Pejabat Presiden RI), Ir. Djuanda dan Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo.

. Kegagalan kabinet ini menyelesaikan dan mengembalikan Irian Barat ke Indonesia menyebabkan mosi tidak percaya dari Parlemen terhadap kabinet. Krisis menjadi lebih mendalam dengan adanya mosi Hadikusumo (PNI) sekitar pencabutan PP No. 39/1950 tentang DPRS dan DPRDS yang diterima baik oleh Parlemen, sehingga Kabinet Natsir jatuh. Pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Sukarno.

**Kabinet Sukiman Wirjosandjojo** yang berusaha menjalankan menjamin keamanan dan ketentraman, mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya, dan memperbaharui hukum agraria, mempercepat persiapan-persiapan pemilihan umum, menjalankan politik luar negeri secara bebas-aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya, juga tidak berlangsung lama. Kabinet Sukiman dijatuhkan karena menandatangani persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Aci (MSA). Persetujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memihak Blok Barat (AS), yang berarti bertentangan dengan program kabinet yaitu menjalankan politik luar negeri bebas-aktif.

**Kabinet Wilopo (PNI)** menggantikan kabinet Sukiman pada tanggal 30 Maret 1951. Kabinet ini terdiri dari anggota partai PNI dan Masyumi yang masing-masing mendapat jatah 4 orang, PSI 2 orang, PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Parindra (Partai Indonesia Raya), Partai Buruh dan PSII masing-masing 1 orang dan golongan tak ber partai 3 orang. Kabinet ini dianggap sebagai sebuah tim yang terpadu sesuai dengan keahlian masing-masing para menternya. Oleh karena itu kabinet ini disebut sebagai Zaken Kabinet.

**Silih bergantinya kabinet** berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Keadaan ekonomi negara dan masyarakat semakin buruk. Buruknya ekonomi diperparah dengan jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia seperti : karet, timah dan kopra. Sebaliknya impor barang konsumsi termasuk beras cenderung meningkat. Karena penerimaan negara menurun maka defisit tidak dapat dihindarkan. Untuk meningkatkan ekspor dan memperbaiki neraca pembayaran, pemerintah mengambil langkah menurunkan pajak ekspor serta menghapuskan sistem sertifikat yang oleh kabinet sebelumnya diadakan untuk meningkatkan penerimaan Negara

dengan mengorbankan barang-barang yang pada waktu itu kuat pasarannya. Peningkatan ekspor dimbangi juga dengan upaya pembatasan impor dengan jalan menaikkan pajak terhadap barang-barang yang diimpor.

Hampir sama dengan kabinet sebelumnya, Kabinet Wilopo - yang memiliki program menyiapkan pemilu untuk memilih anggota Konstituante, DPR dan DPRD, peningkatan kemakmuran, pendidikan rakyat dan keamanan, serta pengembalian Irian Barat - tidak dapat melaksanakan programnya dengan baik. Pada masa pemerintahannya, kabinet ini dihadapkan pada beberapa masalah seperti:

1. gerakan provinsialisme serta separatisme. Gerakan yang terutama muncul di Sumatra dan Sulawesi didasari atas ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah Pusat. Mereka kecewa dengan tidak seimbangnnya alokasi keuangan yang diberikan oleh pusat ke daerah. Daerah merasa bahwa sumbangan yang mereka berikan kepada Pusat dari hasil ekspor misalnya lebih besar dari yang dikembalikan oleh Pusat kepada Daerah. Mereka juga menuntut diperluasnya hak otonomi daerah.
2. Kekecewaan dan tuntutan tersebut ditandai juga dengan munculnya perkumpulan-perkumpulan yang berlandaskan semangat kedaerahan seperti, Paguyuban Daya Sunda di Bandung dan Gerakan Federal Republik Indonesia di Ujungpandang.
3. Perselisihan dalam tubuh angkatan bersenjata yang dikenal dengan peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa ini dimulai dengan perdebatan sengit di DPR selama bebulan-bulan mengenai masalah pro dan kontra kebijaksanaan Menteri Pertahanan dan Pimpinan Angkatan Darat. Aksi dari piak kaum politik itu akhirnya menimbulkan reaksi keras dari pihak angkatan Darat.
4. Berkembangnya berbagai demonstrasi yang menuntut perubahan Parlemen di daerah seperti di Semarang, Banjarmasin, Medan dan Bandung. Akibat peristiwa ini maka kedudukan kabinet menjadi goyah.
5. Perselisihan masalah tanah perkebunan di Sumatera. Salah satu peristiwa besar adalah Peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa itu terjadi karena perselisihan antara pemilik perkebunan yang merasa sudah mendapat ijin membuka perkebunan dengan para petani yang merasa telah lama menggarap tanah perkebunan yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Peristiwa ini diakhiri pada tanggal 16 Maret 1953 dengan pengusiran petani oleh aparatur kepolisian serta jatuhnya korban jiwa di kalangan petani. kemudian melaksanakannya.. Peristiwa ini mendapat sorotan tajam dan emosional dari pers maupun Parlemen.

Berbagai masalah yang dihadapi oleh parlemen ini mendorong munculnya mosi tidak dari parlemen. Berbagai golongan masyarakat menuntut agar Kabinet Wilopo dibubarkan. Tuntutan paling keras datang dari Sidik Kertapati dari Sarekat Tani Indonesia (Sakti). Pada tanggal 2 Juni 1953 Wilopo mengembalikan mandatnya kepada presiden.

Sebagai pengganti Kabinet Wilopo, Mr. Ali Sastroamidjojo (PNI) ditunjuk untuk menyusun pemerinthan baru. Kabinet yang dikenal dengan nama **Kabinet Ali-Wongso** ini diresmikan pada tanggal 31 Juli 1953. Dalam kabinet ini Masyumi sebagai partai kedua terbesar dalam Palemen tidak turut serta dan sebagai gantinya Nahdlatul Ulama (NU) muncul sebagai kekuatan politik baru.

Kabinet ini juga dihadapkan pada persoalan daerah terutama dengan munculnya gerakan "DI/TII" Kartosuwiryo di Jawa Barat, "Daud Beueueh di Aceh dan "DI/TII" Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Walaupun cukup berhasil menyiapkan pemilu, kabinet ini berakhir setelah Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya pada tanggal 24 Juli 1955. Kabinet ini ternyata tidak dapat menyelesaikan persoalan dalam tubuh angkatan bersenjata sebagai lanjutan dari Peristiwa 17 Oktober dan soal pimpinan TNI-AD menolak pimpinan baru yang diangkat oleh Menteri Pertahanan. Persoalan memburuknya situasi ekonomi juga telah meningkatkan ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah.

Setelah Kabinet Ali-Wongso berakhir, selama empat tahun kemudian sampai tahun 1959 terjadi pergantian tiga buah kabinet, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956 – Maret 1957) dan Kabinet Djuanda (Maret 1957 – Juli 1959). Selama empat tahun tersebut, kehidupan kenegaraan yang paling menonjol adalah dilaksanakannya pemilihan umum tahun 1955 sebagai pemilu pertama dalam sejarah RI.

**Pemilihan umum** yang diikuti oleh 39 juta rakyat Indonesia dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada 15 Desember 1955 untuk anggota Konstituante, yaitu lembaga pembuat UUD yang baru pengganti UUDS 1950. Hasil Pemilu 1955 yang diikuti oleh 39 partai politik dan 13 kontestan perseorangan ini menempatkan Masyumi, NU, PNI, dan PKI sebagai empat partai terbesar. Sementara, jumlah anggota DPR yang terpilih adalah sebanyak 272 orang. Mereka dilantik pada 20 Maret 1956. Adapun jumlah anggota Konstituante yang sudah terpilih sebanyak 270 orang. Mereka dilantik pada 10 November 1956. Total anggota DPR dan Konstituante mencapai 542 orang. Pemilu dilaksanakan pada masa pemerintahan **Kabinet Burhanuddin Harahap**.

Pada tanggal 3 Maret 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap berakhir dan Presiden Sukarno pada tanggal 8 Maret 1959 menunjuk Ali Sastroamidjojo untuk membentuk kabinet baru. Berakhirnya kabinet ini disebabkan kekecewaan para pegawai beberapa kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri dan Perekonomian yang terkena mutasi. Kabinet Burhanuddin digantikan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo pada tanggal 20 Maret 1956 dengan program sebagai berikut:

1. memasukkan Irian ke Indonesia,
2. melaksanakan pemebentukan daerah-daerah otonom dan mempercepat pemilihan anggota-anggota DPRD;

3. mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai;
4. menyetatkan keuangan negara sehingga tercapai imbangan anggaran-belanja serta
5. berusaha untuk mewujudkan pergantian ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.

Walaupun mendapat kepercayaan yang penuh dari Presiden Sukarno, kabinet ini tidak luput dari kesukaran-kesukaran yang harus dihadapi seperti pertikaian antar etnis dan kekacauan di beberapa daerah yang ditandai dengan pengrusakan toko oleh kelompok yang tidak puas dengan kesenjangan ekonomi. Pertikaian ini disulut antara lain oleh adanya anjuran untuk mengadakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Anjuran tersebut dijawab oleh perusahaan-perusahaan Belanda dengan cara menjual perusahaannya, terutama kepada orang-orang Cina ini memang sejak lama sudah mempunyai kedudukan yang kuat dalam ekonomi Indonesia. Pada tanggal 19 Maret 1956 Mr. Assaat di depan Kongres Nasional Importir Indonesia di Surabaya mengatakan perlunya pemerintah mengeluarkan peraturan yang melindungi pengusaha-pengusaha nasional terutama perusahaan pribumi. Pernyataan Assaat ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat berupa "gerakan Assaat". Pemerintah menanggapi gerakan ini dengan keluarnya pernyataan dari Menteri Perekonomian Burhanuddin (NU) bahwa pemerintah akan memberi bantuan terutama pada perusahaan-perusahaan pribumi.

Pergantian pemerintahan dalam waktu yang singkat menyadarkan elit bangsa bahwa sistem parlementer memberi peluang terhadap ketidakstabilan politik. Dalam peringatan Sumpah Pemuda 1957 Presiden Sukarno menyatakan bahwa segala kesulitan yang dihadapi negara disebabkan oleh banyaknya partai-partai politik. Partai politik yang saling bersaing untuk memperoleh kedudukan yang kuat di parlemen berpengaruh terhadap terjadinya perpecahan dalam tubuh pemerintahan. Untuk menyelamatkan Negara dari perpecahan maka partai-partai politik tersebut harus dibubarkan. Dalam pemikiran Presiden Sukarno, model pemerintahan yang baik adalah **Demokrasi Terpimpin**. Ketika Sukarno menawarkan konsepsi tersebut kepada masyarakat, reaksi datang dari berbagai kalangan. Sebenarnya, tawaran tersebut dimaksudkan sebagai jawaban atas kegagalan Konstituante dalam menyusun undang-undang dasar yang baru serta bermunculannya gerakan-gerakan separatis seperti *Dewan Banteng* di Sumatra Tengah, *Sumatera Selatan*, *Dewan Lambung Mangkurat* di Kalimantan Selatan dan *Dewan Manguni* di Sulawesi Utara.

#### **D. Perdebatan Dalam Konstituante dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.**

Pemilihan umum yang telah dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante tidak diikuti oleh kesadaran para anggota DPR dan Konstituante

untuk menghilangkan segala bentuk primordialisme politik. Para anggota DPR ternyata lebih senang memperjuangkan kepentingan partainya dibandingkan dengan kepentingan rakyat. Demikian pula dengan anggota Konstituante yang ditugaskan untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Mereka berdebat berlarut-larut tanpa menghasilkan suatu keputusan yang bisa diterima semua pihak. Bahkan para anggota Konstituante memutuskan untuk tidak lagi mengadakan sidang.

Kegagalan Konstituante untuk membentuk UUD yang baru serta situasi negara yang kian tidak menentu telah mendorong Presiden Soekarno untuk mengumumkan konsepnya agar kembali ke UUD 1945. Konsep Presiden yang diumumkan pada 21 Februari 1957 ini berisi tiga hal penting, yaitu

- a. Sistem Demokrasi Parlementer secara Barat tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia. Oleh karena itu, harus diganti dengan Sistem Demokrasi Terpimpin.
- b. Untuk pelaksanaan Sistem Demokrasi Terpimpin perlu dibentuk suatu kabinet gotong royong yang anggotanya terdiri dari semua partai dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat.
- c. Pembentukan Dewan nasional yang terdiri dari golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Tugasnya adalah memberi nasehat kepada kabinet baik diminta maupun tidak.
- d. Konsep Presiden ini ditolak oleh beberapa partai, yaitu Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik, dan Partai Rakyat Indonesia. Mereka berpendapat bahwa perubahan sistem pemerintahan dan susunan ketatanegaraan secara radikal seperti itu merupakan hak Konstituante. Selain itu, secara prinsipil mereka pun berkeberatan untuk mengikutsertakan PKI dalam pemerintahan.

Dalam suasana pro dan kontra akibat adanya Konsep Presiden, pada 25 April 1959 Presiden Soekarno menyampaikan amanat di depan para anggota Konstituante yang berisi anjuran untuk kembali ke UUD 1945. Amanat Presiden ini kemudian menjadi bahan perdebatan di Konstituante, sehingga diputuskan untuk mengadakan pemungutan suara. Setelah dilakukan pemungutan suara sebanyak tiga kali masing-masing pada 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959, didapat hasil yang menunjukkan bahwa mayoritas para anggota Konstituante menghendaki untuk kembali ke UUD 1945. Namun, jumlah suaranya tidak mencapai 2/3 dari jumlah suara yang masuk sebagaimana disyaratkan dalam pasal 137 UUDS 1950.

Keadaan ini memperlihatkan ketidakmampuan partai politik yang ada dalam Konstituante untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan sistem demokrasi parlementer. Demokrasi bukan lagi menjadi sarana untuk memajukan rakyat, melainkan hanya sebagai permainan bagi tokoh-tokoh politik mewujudkan keinginan partai. Pada 3 Juni 1959, Konstituante mengadakan reses yang ternyata untuk selama-lamanya. Berbagai fraksi dalam

Konstituante kemudian berturut-turut menyatakan tidak akan menghadiri sidang Konstituante lagi.

Kegagalan Konstituante untuk menyusun dan menetapkan sebuah UUD yang baru serta perdebatan-perdebatan yang terjadi di dalamnya menyebabkan situasi politik di dalam negeri yang saat itu telah bergolak akibat adanya berbagai gangguan keamanan di daerah-daerah, menjadi semakin gawat. Kondisi seperti ini mendorong Presiden Soekarno mengambil langkah yang sebenarnya bertentangan dengan undang-undang (inkonstitusional).

Akhirnya, pada Minggu, 5 Juli 1959, dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit yang dikenal sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Adapun inti dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah

- a. pembubaran Konstituante.
- b. berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950.
- c. pembentukan MPRS dan DPAS

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berarti Kabinet Parlementer yang sebelumnya memerintah di bawah pimpinan Perdana Menteri Djuanda dinyatakan demisioner dan diganti oleh Kabinet Presidensial yang langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno.

### **DEKRIT**

*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*

**KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG**

*Dengan ini menyatakan dengan hidmat:*

*Bahwa anjuran presiden dan pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan amanat presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara.*

*Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian besar anggota-anggota sidang pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak menghadiri sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya.*

*Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa, dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.*

*Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi.*

*Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjadi Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.*

*Maka atas dasar tersebut di atas,*

**KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG**

*Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari, tanggal penetapan Dekrit ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.*

*Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.*

*Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 1959*

*Atas nama Rakyat Indonesia  
Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang*

**SOEKARNO**

## **E. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin**

Sejak kekuasaan kembali berada di tangan Presiden Soekarno, bangsa Indonesia mulai memasuki masa Demokrasi Terpimpin. Menurut UUD 1945, pengertian "terpimpin" adalah "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Artinya kekuasaan terbesar negara berada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya konsep Demokrasi Terpimpin berkembang menjadi sebuah demokrasi yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan pada satu tangan saja, yaitu eksekutif (presiden).

Karena adanya pemusatan kekuasaan dalam tangan eksekutif, tidak mengherankan apabila banyak tindakan presiden yang justru akhirnya bertentangan dengan semangat UUD 1945 itu sendiri.

Berikut akan diuraikan dinamika politik maupun ekonomi dalam Demokrasi Terpimpin.

**a. Pembentukan Kabinet Kerja.**

Sebelum melaksanakan langkah kerja yang lain pada 10 Juli 1959, Presiden Soekarno membentuk Kabinet baru, yaitu Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini Ir. Soekarno duduk sebagai Perdana Menteri, sedangkan Ir. H. Djuanda duduk sebagai Menteri Pertama. Program kerja kabinet ini dinamakan Triprogram, yaitu terdiri dari sandang, pangan, keamanan, dan pengembalian wilayah Irian Barat.

**b. Penetapan Pidato Presiden tentang Manipol USDEK sebagai GBHN.**

Pada HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-14, 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno berpidato di hadapan penduduk Jakarta. Pidatonya tersebut diberi judul "Penemuan Kembali Revolusi Kita". Pidato ini kemudian dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol). Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam sidangnya pada 23-25 September 1959 mengusulkan agar Manipol dijadikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Adapun intisari dari manipol adalah UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (USDEK). Usul DPAS tersebut disambut baik oleh pemerintah dan MPRS. Melalui Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960 dan TAP MPRS No. 1 tahun 1960, Manipol USDEK akhirnya dijadikan sebagai GBHN.

**c. Pembubaran DPR Hasil Pemilu 1955.**

DPR hasil pemilu 1955 yang diketuai oleh Mr. Sartono bersedia melanjutkan tugas-tugasnya sebagai lembaga perwakilan rakyat bersama pemerintah. Oleh karena itu, pada 23 Juli 1959, DPR hasil pemilu tersebut dilantik secara resmi oleh presiden. Namun, ketika pemerintah mengajukan anggaran belanja negara untuk tahun 1961, terjadi perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah. Akibatnya, presiden membubarkan DPR dengan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 pada 5 Maret 1960.

**d. Pembentukan MPRS.**

Melalui Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959, Presiden membentuk MPRS yang diketuai oleh Chaerul Saleh. Seperti halnya DPRGR, anggota MPRS seluruhnya diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Dalam sidang pertamanya pada 10 November 1960, MPRS berhasil merumuskan tiga ketetapan penting, yaitu:

- 1) Tap MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manipol RI sebagai GBHN.
- 2) Tap MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pembangunan Nasional Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.
- 3) Mengangkat Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi dan Mandataris MPRS.



**e. Pembentukan DPRGR.**

Setelah DPR hasil pemilu dibubarkan, Presiden Soekarno membentuk DPRGR melalui Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 pada 24 Juni 1960. Susunan DPRGR ini diatur sedemikian rupa untuk menjamin adanya kerja sama secara gotong royong antara pemerintah dan DPR. Anggotanya terdiri dari wakil-wakil golongan politik, golongan-golongan karya, dan seorang wakil dari Irian Barat. Semuanya dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden Soekarno.

Adapun tugas-tugas DPPR-GR adalah

- 1) melaksanakan Manipol.
- 2) merealisasikan amanat penderitaan rakyat
- 3) melaksanakan demokrasi terpimpin

**f. Pembentukan Front Nasional.**

Untuk mengamankan dan melaksanakan Manipol USDEK yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai GBHN, Presiden Soekarno dengan Penetapan Presiden No. 13 tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959, membentuk Front Nasional. Menurut Penetapan Presiden tersebut tujuan Front Nasional adalah sebagai berikut:

- a) menyelesaikan revolusi nasional Indonesia:
- b) melaksanakan Pembangunan Semesta Nasional:
- c) mengembalikan Irian Barat ke wilayah RI:

Dalam perkembangannya, Front Nasional dapat dipengaruhi dan dikuasai oleh PKI serta para simpatisannya. Organisasi ini digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik PKI.

**g. Sistem Ekonomi Terpimpin.**

Sistem ekonomi yang dijalankan dalam masa Demokrasi Terpimpin adalah sistem Ekonomi Terpimpin. Dalam sistem ekonomi ini presiden secara langsung terjun dan mengatur perekonomian. Seluruh kegiatan perekonomian terpusat pada pemerintah pusat. Sistem ekonomi yang terpusat ini mengakibatkan menurunnya kegiatan perekonomian. Volume uang yang meningkat akibat defisit dan arus uang yang cepat tidak membangkitkan produksi atau melancarkan barang.

Untuk mengatasi persoalan ekonomi nasional, pada 28 Maret 1963 mengeluarkan Deklarasi Ekonomi atau Dekon. Sebagai pelaksanaannya pada 26 Mei 1963 dikeluarkan serangkaian peraturan di bidang ekspor dan impor, harga, dan yang lainnya yang seluruhnya berjumlah 14 buah peraturan yang dikenal sebagai "Peraturan-Peraturan 26 Mei." Namun, dalam pelaksanaannya, Peraturan 26 Mei ternyata tidak mencapai tujuannya mengatasi kesulitan ekonomi karena inflasi tidak juga berkurang sebagaimana yang diharapkan bahkan menjadi meningkat. Sebagai penggantinya, pemerintah kemudian mengeluarkan tiga buah peraturan di bidang ekonomi pada 17 April 1964.

Peraturan-peraturan itu juga ternyata tidak mampu mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi.

- h. **Menggabungkan tiga kekuatan politik** dalam nasakom atau Nasionalis, Agama dan Komunis, Ketiga kekuatan yang sudah bersaing dalam kancah politik Indonesia disatukan oleh Presiden Sukarno sebagai sebuah konsepsi yang harus diterima oleh seluruh rakyat.

### **Nasionalisasi Ekonomi (Dari Demokrasi Parlementer ke Demokrasi Terpimpin).**

Kondisi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan (1945-1949) sampai pemerintahan Demopkrasi Terpimpin sangat buruk dan menyedihkan. Hal ini merupakan akibat adanya pendudukan Jepang selama 3,5 tahun (Maret 1942-Agustus 1945) yang menguras seluruh potensi sumber daya alam dan manusia secara besar-besaran semata-mata untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Perang kemerdekaan juga menuntut bangsa Indonesia untuk mencurahkan seluruh perhatian guna mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Jepang, Sekutu, dan Belanda.

Setelah melewati masa perang kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai secara leluasa mencurahkan perhatiannya pada masalah ekonomi bangsa. Beberapa tindakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pasca perang kemerdekaan adalah:

#### **1. Nasionalisasi de Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia**

Nasionalisasi *de Javasche Bank* menjadi Bank Indonesia dilaksanakan pada masa Kabinet Sukiman yang memerintah sejak April 1951 hingga Februari 1952. Kebijakan ini diberlakukan untuk mengatasi krisis keuangan yang terjadi.

Adapun beberapa hal yang menyebabkan diberlakukannya kebijakan nasionalisasi *de Javasche Bank* sebagai berikut.

- a. Bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan akibat ketentuan-ketentuan hasil Konferensi Meja Bundar 1949.
- b. Sumber devisa Indonesia hanya mengandalkan ekspor hasil-hasil perkebunan, sehingga sulit untuk mencukupi kebutuhan anggaran belanja negara.
- c. Perusahaan-perusahaan swasta besar dan bank yang ada saat itu pada umumnya masih dikuasai oleh orang-orang Belanda.
- d. Situasi dan kondisi politik yang masih belum stabil.

Kebijakan nasionalisasi *de Javasche Bank* dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nasionalisasi *de Javasche Bank* No. 24 Tahun 1951 pada 5 Desember 1951. Sebelumnya, pemerintah telah memberhentikan Presiden *de Javasche Bank* yang lama, yaitu Dr. Howink dan mengangkat Mr. Syafrudin Prawiranegara sebagai Presiden *de Javasche Bank* yang baru berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 123 pada 12 Juli 1951.

Sementara itu, perubahan nama *de Javasche Bank* menjadi Bank Indonesia (BI) yang berfungsi sebagai Bank Sentral dan Bank Sirkulasi terjadi setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 dan Lembaran Negara No. 40 tentang UU Pokok BI yang mulai berlaku pada 1 Juli 1953.

Nasionalisasi *de Javasche Bank* menjadi Bank Indonesia ini melengkapi kepemilikan Pemerintah RI terhadap bank-bank peninggalan kolonial Belanda. Sebelumnya, pada Agustus 1946 Pemerintah RI secara resmi telah mengambil alih *de Javasche Bank* Yogyakarta menjadi Bank Negara Indonesia yang dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo.

Nasionalisasi yang dijalankan pemerintah hanya berpengaruh positif terhadap jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah. Bekas perusahaan Belanda telah dikuasai oleh pemerintah. Namun demikian, tindakan tersebut **tidak memiliki pengaruh yang positif** terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Rakyat di berbagai daerah tetapa dihadapkan pada kondisi rutin yang sudah lama mereka alami yaitu kesulitan bahan pangan, pakaian dan perumahan. Kondisi serba kekurangan tersebut dirasakan oleh mereka sampai pemerintahan berikutnya.

## 2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan gagasan dari Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Menteri Perdagangan pada masa pemerintahan Kabinet Natsir, September 1950-April 1951.

Sistem ekonomi *Gerakan Benteng* adalah suatu cara perbaikan dan perubahan struktur ekonomi peninggalan Belanda ke arah ekonomi nasional melalui gerakan konfrontasi ekonomi. Inti dari tujuan sistem ekonomi ini adalah untuk melindungi para pengusaha pribumi dari persaingan pengusaha nonpribumi.

Selama tiga tahun (1950-1953) kurang lebih sekitar 700 pengusaha pribumi mendapat kredit bantuan dari program ini. Dalam perkembangannya, ternyata usaha ini tidak mencapai tujuan. Hal ini terjadi karena pengusaha pribumi lamban dalam usahanya. Bahkan, ada yang menyalahgunakan bantuan pemerintah ini. Akhirnya, sistem ekonomi *Gerakan Benteng* mengalami kegagalan. Setelah Kabinet Natsir jatuh, sistem ekonomi tersebut dilanjutkan oleh kabinet penggantinya, yaitu Kabinet Sukiman. Menteri Keuangan pada kabinet tersebut, Jusuf Wibisono, memberlakukan kebijakan pemberian kredit kepada para pengusaha pribumi. Kebijakan ini pun mengalami kegagalan.

## 3. Rencana Soemitro

Dalam periode yang sama, pemerintahan Kabinet Natsir mengeluarkan kebijakan untuk memperbaiki keadaan ekonomi, terutama di bidang industri. Kebijakan industrialisasi ini dikenal sebagai Rencana Soemitro. Sasaran kebijakan ini lebih ditekankan pada pembangunan industri dasar, antara lain pendirian pabrik semen, pabrik pemintalan, pabrik karung, peningkatan

produksi pangan, perbaikan sarana dan prasarana pertanian, dan masalah penanaman modal asing.

#### **4. Sistem Ali-Baba**

Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Agustus 1954-Agustus 1955), Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo memperkenalkan sistem ekonomi baru yang dikenal dengan nama Sistem Ali-Baba. Artinya, bentuk kerja sama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikkan dengan Ali dan pengusaha Tionghoa yang diidentikkan dengan Baba. Sistem ekonomi ini lebih menekankan pada kebijakan Indonesianisasi yang mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi.

Adapun beberapa langkah yang ditempuh sebagai pelaksanaan dari sistem ekonomi Ali-Baba adalah

- a. keharusan bagi para pengusaha asing untuk memberikan pelatihan dan memberikan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia untuk menduduki jabatan-jabatan staf.
- b. mendirikan perusahaan-perusahaan negara.
- c. menyediakan kredit dan lisensi baru bagi perusahaan swasta nasional
- d. memberikan perlindungan bagi perusahaan-perusahaan swasta nasional agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing.

Dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi Ali-Baba tidak berjalan sebagaimana mestinya. Para pengusaha pribumi akhirnya hanya dijadikan sebagai alat bagi para pengusaha Tionghoa untuk mendapatkan kredit dari pemerintah.

Memasuki jaman pemerintahan **Demokrasi Terpimpin**, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, kondisi kehidupan rakyat tetap menderita. Bahan makanan, sandang dan pakaian sulit diperoleh. Kondisi buruk seperti ini diperparah dengan tidak berjalannya distribusi bahan makanan dari pusat produksi ke daerah konsumsi. Penghambatnya adalah pemberontakan-pemberontakan di berbagai daerah yang tidak puas terhadap pemerintah pusat. Sementara itu, jumlah uang yang beredar semakin banyak akrena pemerintah terus men cetak uang tanpa kendali. Uang tersebut digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar seperti Ganefo (Games of the New Emerging Forces) dan Conefo (Conference of the New Emerging Forces). Akibatnya inflasi semakin tinggi dan mencapai hingga 300 %. Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dengan pemotongan nilai mata uang. Misalnya uang Rp. 500,- dihargai Rp.50 dan uang Rp.1000 dihargai seratus. Tindakan pemerintah tersebut ternyata tidak menambah perbaikan kehidupan ekonomi rakyat. Sampai meletusnya peristiwa Gerakan 30 September tahun 1945 sebagian rakyat Indonesia tetap menderita karena kondisi perekonomian negara masih buruk karena berbagai faktor.

## **F. Kehidupan/Pergolakan Politik di Daerah Semasa Demokrasi Liberal dan Terpimpin.**

Kehidupan politik dan ekonomi masyarakat Indonesia di berbagai daerah yang paling menonjol ditandai dengan berbagai gerakan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan pusat. Bentuk ketidakpuasan itu diekspresikan melalui gerakan perlawanan dan pemberontakan. Tentu saja tidak semua gerakan tersebut mewakili masyarakat setempat sebab sebagian besar masyarakat lainnya menderita karena peristiwa-peristiwa tersebut.

Pada tahun 50-an, sebagian besar bangsa Indonesia merasa tersiksa dengan terjadinya gangguan keamanan dalam negeri berupa pemberontakan-pemberontakan bersenjata. Untuk memperoleh dukungan rakyat, sebagian gerakan dan pemberontakan tersebut menggunakan nama Islam walaupun dalam prakteknya tidak mencerminkan nilai-nilai agama Islam. Pemberontakan tersebut antara lain, Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), Andi Azis, Republik Maluku Selatan (RMS), dan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Piagam Perjuangan Semesta (PRRI/Permesta).

**Gerakan DI/TII pertama kali muncul di Jawa Barat.** Pemimpin gerakan ini adalah Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo yang sejak lama telah mempunyai gagasan untuk membentuk sebuah negara Islam di wilayah Republik Indonesia. Ketika terjadi Perjanjian Renville yang salah satu isinya mewajibkan para pengikut Republik untuk mengosongkan daerah-daerah gerilya di Jawa Barat ke Jawa Tengah, Kartosuwirjo merasa kecewa. Menurutnya, dengan dipatuhinya perjanjian tersebut, Pemerintah RI secara tidak langsung telah "menjual" wilayah Jawa Barat kepada pihak Belanda.

Bukti kekecewaan tersebut terlihat ketika bersama kurang lebih 2000 orang pengikutnya yang kebanyakan dari laskar Hisbullah dan Sabilillah, Kartosuwirjo tetap tinggal di Jawa Barat melanjutkan perlawanan terhadap tentara Belanda.

Kondisi *vacum of power* akibat hijrahnya TNI Divisi Siliwangi ke daerah RI di Jawa Tengah kemudian dimanfaatkan oleh Kartosuwirjo dengan sebaik-baiknya. Beserta para pengikutnya ia kemudian menggantikan peran TNI Divisi Siliwangi dalam melakukan perlawanan bersenjata, terutama di daerah Priangan Timur terhadap tentara Belanda. Hal ini menumbuhkan simpati di kalangan rakyat sehingga dukungan dan pengaruh Kartosuwirjo semakin kuat. Namun demikian, setelah melihat cara-cara Kartosuwirjo dan pengikutnya melakukan cara-cara kekerasan (penculikan, pembunuhan) terhadap masyarakat yang tidak mau bergabung, akhirnya kecaman muncul dari masyarakat.

Untuk mewujudkan cita-citanya mendirikan sebuah negara Islam, Kartosuwirjo mengadakan berbagai konsolidasi dengan para pengikutnya. Salah

satu konsolidasi tersebut adalah konferensi yang diadakan di Cipeundeuy, Tasikmalaya, pada Maret 1948. Hasil konferensi tersebut antara lain

1. mengadakan persiapan untuk membentuk Negara Islam Indonesia (NII)
2. membentuk Tentara Islam Indonesia (TII).
3. membentuk sebuah Majelis Islam yang dikepalai oleh seorang Imam, yaitu S.M. Kartosuwirjo.
4. Majelis tersebut harus merupakan sebuah pemerintahan Islam sementara di Jawa Barat yang harus ditaati oleh seluruh umat Islam di daerah tersebut.

Proklamsi berdirinya Negara Islam Indonesia sendiri baru dilakukan pada 7 Agustus 1949 di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Bentrokan antara TNI Divisi Siliwangi dan DI/TII terjadi pertama kali di Desa Antralina, daerah Malangbong, Garut, pada 25 Januari 1949. Bentrokan ini terjadi ketika pasukan Divisi Siliwangi Batalyon III Brigade XIV pimpinan Mayor Mohamad Rivai yang melakukan *long march* dari Jawa Tengah menjumpai kesatuan-kesatuan yang bersenjata lengkap (DI/TII) ketika memasuki daerah Jawa Barat. Sementara itu, pasukan Divisi Siliwangi sendiri oleh pihak DI/TII dianggap sebagai "tentara liar" yang telah sengaja memasuki wilayah NII. Oleh karena itu, mereka harus dilucuti senjatanya dan dibujuk untuk bergabung menjadi anggota TII. Apabila menolak, terpaksa harus dihancurkan.

Sejak saat itu, DI/TII dan TNI terlibat dalam berbagai bentrokan. Bahkan dalam perkembangannya, DI/TII menjadi sumber gangguan keamanan utama di Jawa Barat pada tahun 50-an menelan banyak korban harta dan jiwa.

Melihat keadaan ini, pemerintah melakukan beberapa upaya pendekatan secara pribadi kepada Kartosuwirjo melalui pemimpin Masyumi, yaitu Mohammad Natsir. Namun, upaya ini tidak berhasil.

Usaha untuk menumpas gerakan DI/TII memakan waktu yang lama. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) medan pegunungan di Jawa Barat sangat tepat untuk bergerilya.
- 2) pasukan DI/TII sejak semula dapat bergerak leluasa dan memiliki pengaruh di kalangan rakyat.
- 3) DI/TII telah mengadakan hubungan dan mendapat bantuan dari beberapa orang Belanda, antara lain dari pemilik perkebunan, tokoh-tokoh, dan penyokong Negara Pasundan;
- 4) suasana politik dan sikap beberapa kalangan partai politik yang secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan mendukung DI/TII.

Setelah beberapa upaya tidak berhasil, pemerintah akhirnya menjalankan operasi militer. Operasi yang diberi nama "*pagar betis*" ini mengikutsertakan rakyat. Dengan operasi ini banyak anggota DI/TII yang turun gunung untuk menyerahkan diri kepada TNI. Adapun pemimpin DI/TII, yaitu Kartosuwirjo, akhirnya dapat ditangkap pada 4 Juni 1962 di Gunung Geber, Majalaya.

Dengan tertanggapnya pemberontak ini, suasana aman mulai dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat.

Seperti di Jawa Barat, unsur-unsur **gerakan DI/TII di Jawa Tengah** telah ada semenjak Perang Kemerdekaan. Pemimpin DI/TII di daerah ini adalah Amir Fatah yang bergerak di daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Gerakan ini menggabungkan diri dengan gerakan DI/TII Kartosuwirjo di Jawa Barat. Amir Fatah kemudian diangkat sebagai Komandan Pertempuran Jawa Tengah dengan pangkat Jenderal Mayor Tentara Islam Indonesia. Proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia di Jawa Tengah berlangsung pada 23 Agustus 1949 di desa Pangarasan, Tegal.

Untuk menumpas gerakan ini, pemerintah pada Januari 1950 membentuk Komando Operasi yang disebut Gerakan Benteng Negara (GBN) dengan pimpinan berturut-turut Letnan Kolonel Sarbini, Letnan Kolonel M. Bachrun, dan Letnan Kolonel Ahmad Yani. Namun, operasi ini gagal. Penyebabnya adalah pasukan DI/TII dapat menggalang berbagai pasukan yang menentang terhadap pemerintah. Kelompok tersebut adalah:

- 1) sisa-sisa anggota Angkatan Umat Islam (AUI) dengan pimpinan Kyai Mohammad Mahfudz Abdurachman yang dikenal sebagai Romo Pusat atau Kyai Somalangu.
- 2) anggota Batalyon 426 Divisi Diponegoro di Kudus dan Magelang.
- 3) sisa-sisa anggota gerakan Merapi-Merbabu Complex (MMC).

Akhirnya, setelah pusat kekuatannya di perbatasan Pekalongan-Banyumas dapat dihancurkan oleh pasukan khusus yang diberi nama Benteng Raiders. Melalui Operasi Guntur pada Juni 1954, gerakan DI/TII di Jawa tengah dapat dipatahkan.

**Gerakan DI/TII di Kalimantan Selatan** dipimpin oleh Ibnu Hadjar alias Haderi bin Umar alias Angli, seorang mantan Letnan Dua TNI. Ggerakannya ini adalah bagian dari NII- Kartosuwirjo. Dengan pasukan yang dinamakannya *Kesatuan Rakyat Yang Tertindas* (KRYT), Ibnu Hadjar menyerang pos-pos TNI di Kalimantan Selatan dan melakukan tindakan pengacauan pada Oktober 1950.

Melalui bujukan pemerintah, Ibnu Hadjar pernah menyerahkan diri dengan kekuatan pasukan beberapa peleton. Namun, setelah bergabung dan memperoleh kembali persenjataan, ia kembali melanjutkan pemberontakannya. Melalui operasi militer TNI yang dimulai tahun 1959, Ibnu Hadjar akhirnya berhasil ditangkap. Ia diajukan ke pengadilan militer dan kemudian dijatuhi hukuman mati pada 22 Maret 1965.

**Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan** dipimpin oleh Kahar Mudzakar. Gerakan ini muncul karena adanya ambisi Kahar Mudzakar untuk memimpin Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Pada masa Perang kemerdekaan, Kahar Mudzakar sangat aktif berjuang dan berjasa sebagai komandan TRI Persiapan Resimen Hasanudin dengan pangkat Letnan Kolonel. Setelah Perang Kemerdekaan usai, ia ditugaskan oleh pemerintah untuk memimpin laskar-laskar perjuangan yang ada di Sulawesi Selatan. Dia

menginginkan agar semua anggota KGSS masuk ke dalam APRIS dengan nama Brigade Hasanuddin, tetapi pemerintah menolak karena untuk masuk ke dalam APRIS mereka harus memenuhi persyaratan. Namun, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan, yaitu memasukkan semua anggota KGSS ke dalam Corps Tjadangan Nasional dan Kahar Mudzakar diangkat sebagai pemimpin dengan pangkat letnan kolonel.

Kahar Mudzakar menolak kebijaksanaan dari pemerintah tersebut. Akhirnya, pada Agustus 1951, ia melarikan diri ke hutan dan menyatakan bahwa daerah Sulawesi Selatan adalah bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Karena kemampuannya memanfaatkan kondisi geografis menyebabkan gerakan ini sulit dipadamkan. Baru pada tahun 1965 Kahar Mudzakar dapat ditangkap dan pada Februari tahun itu juga dia ditembak mati.

**Gerakan DI/TII di Aceh** dipimpin oleh Daud Beureuh. Pendukung gerakan ini merasa kecewa dengan diubahnya status Daerah Istimewa Aceh menjadi sebuah keresidenan di bawah Provinsi Sumatra Utara. Kebijakan pemerintah tersebut ditentang oleh Daud Beureuh yang dalam masa Perang Kemerdekaan menjabat sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa Aceh dan juga para pemimpin Aceh lainnya. Mereka kecewa karena Aceh tidak bisa menjadi provinsi yang memiliki otonomi sendiri. Pada tanggal 20 September 1953 Daud Beureuh mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwirjo. Setelah itu, Daud Beureuh segera menguasai kota-kota penting di Aceh.

Penumpasan gerakan ini dihadapkan pada faktor sulitnya keadaan geografis Aceh serta dukungan rakyat Aceh terhadap Daud Beureuh. Oleh karena itu, penumpasan dilakukan melalui pendekatan sosial budayanya. Panglima Kodam I Iskandar Muda, Kolonel Muhamad Yasin, memprakarsai Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh pada 17-28 Desember 1962 yang mempertemukan Daud Beureuh, tokoh ulama Aceh, dan pemerintah. Pertemuan ini akhirnya berhasil mengakhiri gerakan DI/TII di Aceh.

**Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)** merupakan salah satu gerakan yang mengganggu keamanan di dalam negeri. Pemberontakan APRA dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksepahaman mengenai pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Pembentukan APRIS menimbulkan ketegangan-ketegangan yang mengakibatkan terjadinya serangkaian pertumpahan darah. TNI menolak bekerja sama dengan mantan anggota tentara Belanda, seperti Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL atau tentara Belanda yang berasal dari orang-orang pribumi), yang menurut keputusan KMB harus dilebur ke dalam APRIS. Sebaliknya di pihak KNIL ada tuntutan agar bekas-bekas kesatuannya ditetapkan sebagai alat pertahanan dari negara bagian. Ketegangan ini dipertajam oleh pertentangan politik antara golongan federalis yang ingin tetap



mempertahankan eksistensi negara bagian dan golongan "unitaris" yang menginginkan Negara Kesatuan.

Tentara bekas anggota KNIL, pelarian pasukan payung, barisan pengawal, baret hijau, dan polisi Belanda yang kecewa dengan kondisi diatas akhirnya membentuk APRA. Dibawah pimpinan Kapten Raymond Westerling, mereka melakukan serangan terhadap kepentingan RI di Bandung pada 23 Januari 1950. Gerombolan ini berjumlah kurang lebih 800 orang terdiri atas dengan dilindungi oleh kendaraan lapis baja. Serangan itu dilakukan ketika Kesatuan Siliwangi baru beberapa saat saja memasuki Kota Bandung setelah perdamaian tercapai sebagai hasil KMB, serta ketika Panglima Divisi Siliwangi, Kolonel Sadikin, sedang mengadakan peninjauan ke Subang bersama Gubernur Jawa Barat Sewaka.

Upaya penumpasan dan pengejaran gerombolan APRA segera dilakukan TNI. Dalam suatu pertempuran di daerah Pacet pada 24 Januari 1950, pasukan TNI berhasil menghancurkan sisa-sisa gerombolan APRA. Westerling melarikan diri Bandung dan kemudian bekerja sama dengan Sultan Hamid II, seorang menteri negara tanpa departemen dalam Kabinet RIS. Mereka berdua berencana akan menculik semua menteri yang sedang mengadakan sidang kabinet dan membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sekjen Kementerian Pertahanan, Mr. Ali Budiardjo, dan Pejabat Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel T.B. Simatupang. Namun, upaya ini dapat digagalkan. Sultan Hamid II dapat segera ditangkap, sedangkan Westerling berhasil melarikan diri ke luar negeri pada 22 Februari 1950 dengan menumpang pesawat *Catalina* milik Angkatan Laut Belanda.

**Pemberontakan Andi Azis** terjadi pada 5 April 1950, di Makasar, Sulawesi Selatan. Andi Azis yang sebelumnya menjadi Letnan Ajudan Wali Negara Indonesia Timur beserta satu kompi anak buahnya mantan anggota KNIL telah resmi diterima masuk APRIS pada 30 Maret 1950. Ia diangkat sebagai komandan kompi dengan pangkat kapten. Namun, sehari setelah pelantikannya, Kapten Andi Azis menggerakkan pasukannya yang didukung pasukan batalyon KNIL yang tidak masuk APRIS untuk menawan Pejabat Panglima Teritorium Indonesia Timur Letnan Kolonel A.J. Mokoginta, beserta seluruh stafnya. Ia kemudian menuntut agar APRIS mantan KNIL dan Koninklijk Leger (KL) yang menjadi tentara di daerah Negara Indonesia Timur. Oleh karena itu, ia menolak masuknya pasukan APRIS dari TNI yang dipimpin Mayor Worang dari Jawa ke Makasar.

Melihat perkembangan ini, Pemerintah RIS pada 8 April 1950 mengeluarkan ultimatum kepada Andi Azis untuk menghadap ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, Andi Azis tidak menghiraukannya sehingga akhirnya Pemerintah RIS mengirimkan pasukan ekspedisi ke Makasar.

Pada 26 April 1950, seluruh pasukan ekspedisi di bawah pemimpin Kolonel A.E Kawilarang berhasil mendarat di Makasar. APRIS segera bergerak

dan menguasai Kota Makasar. Meskipun Andi Azis sendiri telah menyerahkan diri namun pertempuran antara APRIS dan KNIL yang dibantu KL masih tetap terjadi pada Mei dan Agustus 1950.

Akhirnya, pada 8 Agustus 1950 pertempuran dihentikan setelah pihak KNIL dan KL yang diwakili oleh Mayjen Scheffer menyanggupi tuntutan APRIS untuk keluar dari Makasar tanpa membawa senjata mereka. Dengan persetujuan ini, keamanan Makasar dapat dipulihkan kembali.

Pemberontakan terhadap pemerintah pusat juga terjadi di Ambon dan digerakkan oleh para pengikut **Republik Maluku Selatan (RMS)**. RMS yang didirikan di kota itu pada 25 April 1950 itu dipimpin oleh Dr. Soumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. RMS memanfaatkan tentara bekas pasukan KNIL dan pasukan Baret Hijau yang terlibat pemberontakan Andi Azis, ke Ambon. Pasukan-pasukan khusus itulah yang menjadi tulang punggung perlawanan RMS.

Pemerintah Pusat semula mencoba untuk menyelesaikan peristiwa ini secara damai dibawah tim yang dipimpin oleh Dr. Leimena. Karena upaya damai gagal maka pemerintah menggunakan kekuatan senjata untuk menumpasnya melalui pasukan ekspedisi di bawah pemimpin Kolonel Kawilarang.

Pada 14 Juli 1950, pasukan ekspedisi APRIS/TNI mendarat di Laha, Pulau Buru dengan dilindungi Korvet Pati Unus. Dengan susah payah, karena belum mengenal medannya, APRIS berhasil merebut pos-pos penting di Pulau Buru. Setelah Pulau Buru dapat dikuasai, pasukan APRIS bergerak menuju Pulau Seram. Sementara itu, pasukan APRIS yang lain mendarat dan dapat segera menguasai Pulau Tanimbar, Kepulauan Kei, dan Pulau Aru.

RMS ternyata memusatkan kekuatannya di Pulau Seram dan Ambon di Maluku Tengah. Gerakan pasukan-pasukan APRIS di Seram mengalami kesulitan dan banyak minta korban. Setelah Seram dapat dikuasai, gerakan selanjutnya diarahkan ke Ambon yang menjadi pusat kedudukan RMS. Pada permulaan November 1950 kota Ambon dapat dikuasai oleh pasukan-pasukan APRIS setelah melalui pertempuran-pertempuran yang sengit dengan korban yang besar. Dalam pertempuran jarak dekat memperebutkan benteng *Nieuw Victoria*, Letnan Kolonel Slamet Rijadi menjadi salah satu korbannya. Setelah Kota Ambon jatuh ke tangan pasukan pemerintah, sisa-sisa pasukan RMS melarikan diri ke dalam hutan-hutan dan untuk beberapa tahun lamanya melakukan kegiatan pengacauan.

**Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Piagam Perjuangan Semesta (PRRI/Permesta)** merupakan gerakan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun latar belakang pemberontakan ini adalah:

- a. Sebagaimana daerah merasa tidak puas terhadap pemerintah pusat dan menganggap bahwa pembangunan hanya terjadi di Jawa.

- b. ketidakpuasan beberapa daerah mengenai masalah keuangan yang diterima dari pemerintah pusat.
- c. pertentangan politik yang berlarut-larut di mana setiap partai politik berusaha saling menjatuhkan.

Ketidakpuasan ini didukung oleh beberapa panglima militer. Mereka kemudian membentuk dewan-dewan daerah, antara lain Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein (20 Desember 1956), Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon (22 Desember 1956), Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian, Dewan Manguni di Manado yang dipimpin oleh Letkol Ventje Sumual (18 Februari 1957), dan Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, serta Dewan Manguni di Manado. Pembentukan dewan-dewan dilanjutkan dengan upaya pengambilalihan kekuasaan pemerintah setempat. Gerakan ini berkembang menjadi gerakan terbuka yang menentang pemerintah pusat.

Pada 9 Januari 1958, diselenggarakan suatu pertemuan di Sungai Dareh, Sumatra Barat yang dihadiri oleh Letkol Ahmad Husein, Letkol Ventje Sumual, Kolonel Simbolon, Kolonel Dahlan Djambek, Kolonel Zulkifli Lubis, Mohamad Natsir, Sjarif Usman, Burhanudin Harahap, dan Sjafrudin Prawiranegara. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan kemungkinan pembentukan pemerintah baru serta hal-hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut. Pada tanggal 10 Februari 1958 diadakan rapat raksasa di Padang. Dalam kesempatan tersebut, Letkol Achmad Husein mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat yang isinya sebagai berikut.

- a. Dalam waktu 5 x 24 jam, Kabinet Djuanda harus menyerahkan mandat kepada presiden atau presiden mencabut mandat Kabinet Djuanda.
- b. Presiden menugaskan Drs. Moh. Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk
- c. membentuk zaken kabinet
- d. Presiden diminta supaya kembali kepada kedudukannya sebagai Presiden Konstitusional.

Ultimatum tersebut dijawab oleh pemerintah dengan memecat secara tidak hormat tokoh-tokoh TNI yang duduk sebagai pemimpin gerakan, antara lain Letkol Ahmad Husein, Letkol Ventje Sumual, Kolonel Simbolon, Kolonel Dahlan Djambek, dan Kolonel Zulkifli Lubis. Selanjutnya, Komando Daerah Militer Sumatra Tengah dibekukan dan ditempatkan langsung di bawah KSAD.

Tindakan Pemerintah Pusat tersebut kembali dijawab oleh Ahmad Husein pada 15 Februari 1958 dengan memperlakukan berdirinya PRRI berikut pembentukan kabinetnya dengan Sjafrudin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri. Dua hari kemudian (17 Februari 1958), Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah Letkol D.J. Somba memutuskan hubungan dengan

pemerintah pusat dan mendukung sepenuhnya PRRI. Pernyataan ini dikenal sebagai Piagam Perjuangan Semesta (Permesta).

Setelah jalan perundingan tidak berhasil, untuk menumpas pemberontakan tersebut pemerintah menjalankan operasi militer gabungan dari unsur-unsur darat, laut, dan udara, sebagai berikut.

- a. *Operasi Tegas* dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution untuk menguasai daerah Riau.
- b. *Operasi 17 Agustus* dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani untuk mengamankan daerah Sumatra Barat.
- c. *Operasi Sapta Marga* dipimpin oleh Brigjen Djatikusumo untuk mengamankan daerah Sumatra Utara
- d. *Operasi Sadar* dipimpin oleh Letkol Dr. Ibnu Sutowo untuk mengamankan daerah Sumatra Selatan
- e. *Operasi Merdeka* dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat

Dalam pelaksanaannya, operasi militer tersebut cukup sulit karena pasukan PRRI/Permesta pada umumnya mempunyai pengalaman tempur yang tinggi. Selain itu, persenjataan yang mereka miliki pun ternyata lebih lengkap dan moderen. Bahkan, disinyalir bahwa pihak PRRI/Permesta secara tidak langsung maupun tidak langsung telah mendapat sokongan dana dan persenjataan dari Amerika Serikat. Hal ini terbukti dari peristiwa ditembaknya pesawat B-26 yang dipiloti Allan Lawrence Pope, warga Amerika Serikat. Akan tetapi melalui operasi yang terus menerus yang dilakukan oleh pasukan RI, akhirnya, tokoh-tokoh PRRI menyerah satu persatu. Pada 29 Mei 1961, Letkol Ahmad Husein beserta pasukannya secara resmi menyerah disusul oleh tokoh-tokoh sipil, militer, anggota Permesta lainnya. Pada pertengahan 1961, mereka memenuhi seruan pemerintah untuk menyerahkan diri.

### **A. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan Peralihan Kekuasaan Politik**

**Gerakan tiga puluh September 1965 (G 30 S 1965)** merupakan peristiwa paling tragis dalam sejarah pergantian kekuasaan di Indonesia. Peristiwa tersebut bukan hanya menandai pergantian pemerintahan dari rezim Orde Lama ke Orde Baru melainkan juga menandai berakhirnya pergolakan di berbagai daerah kearah terciptanya integrasi bangsa, terselenggarakannya stabilitas sehingga negara memungkinkan dapat menjalankan otoritasnya dengan besar atas semua komponen bangsa. Namun demikian, pergantian tersebut harus dibayar mahal dengan ratusan ribu korban jiwa manusia di berbagai daerah sebagai akibat dari bentrokan antara kelompok yang dianggap pendukung G 30 S 1965 dan kelompok yang mengatasnamakan pendukung pemerintahan baru, menyusul tumbanganya rezim orde lama dan lahirnya orde baru. Oleh pemerintahan orde baru, Peristiwa G 30 S 1965 dianggap sebagai upaya perebutan kekuasaan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pada

zaman pemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965) mendapat kedudukan yang kuat dalam pemerintahan Presiden Sukarno. Akan tetapi, tentang siapa dalang gerakan tersebut masih merupakan masalah yang kontroversial karena banyak persi yang berkembang dalam masyarakat dan masing-masing memiliki dukungan fakta yang cukup objektif. Yang jelas adalah bahwa menjelang terjadinya peristiwa tersebut, PKI merupakan partai politik yang paling kuat yang berambisi merebut kekuasaan dari pemerintah.

### **1. Tindakan dan Perluasan Pengaruh PKI dalam Masyarakat**

PKI semakin berpengaruh secara politik sejak konsep Demokrasi Terpimpin dilaksanakan di Indonesia pada 1959. Perkembangan politik pada waktu itu yang didasarkan pada pelaksanaan ide Nasionalis, Agama, dan Komunisme (Nasakom), memberi kesempatan kepada PKI untuk memperluas pengaruhnya di dalam semua komponen masyarakat.

Perluasan pengaruh PKI ini didukung oleh terjadinya krisis politik, sosial, dan ekonomi nasional sejak awal tahun 1960-an. Keputusan pemerintah untuk membubarkan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang merupakan pesaing utama PKI dalam kehidupan politik nasional pada bulan Agustus 1960, semakin memperbesar kesempatan bagi PKI untuk memperluas pengaruhnya. Kondisi ekonomi nasional yang semakin menurun berhasil dimanfaatkan oleh komunis untuk membangun simpati di dalam masyarakat, terutama lapisan masyarakat bawah yang memang sedang mengalami tekanan ekonomi yang sangat berat.

Pada akhir 1963, sebuah gerakan yang disebut "aksi sepihak" mulai dilancarkan oleh PKI dan pendukungnya. Para petani dibantu oleh para kader PKI mengambil alih tanah penduduk, terutama penduduk yang memiliki tanah yang luas. Tindakan yang serupa juga dilakukan oleh para pendukung PKI di daerah perkebunan. Mereka mengambil alih tanah perkebunan milik pemerintah, kemudian membuka lahan pertanian atau membuat permukiman di atas tanah perkebunan yang mereka duduki. Dalam melakukan kegiatannya, para pendukung PKI tidak jarang mengancam dan melakukan tindakan kekerasan lainnya terhadap para pemilik tanah, pegawai pemerintah, dan pengurus perkebunan. Beberapa contoh aksi sepihak yang dilakukan PKI dan pendukungnya, antara lain Peristiwa Jengkol (15 November 1961), Peristiwa Indramayu (15 Oktober 1964), Peristiwa Boyolali (November 1964), Peristiwa Kanigoro (13 Januari 1965), dan Peristiwa Bandar Betsi (14 Mei 1965). Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para petani atau buruh yang didukung oleh PKI beserta organisasi pendukungnya, dibalas juga dengan kekerasan oleh kelompok anti PKI. Akibatnya, pertikaian berkepanjangan terjadi.

Pertikaian antara kelompok PKI dengan kelompok anti PKI juga terjadi di kalangan seniman dan intelektual. Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) merupakan salah satu organisasi pendukung PKI yang bergerak dalam bidang kebudayaan. Perluasan pengaruh komunis menimbulkan reaksi dari kelompok

anti Lekra, yang tidak menginginkan adanya dominasi ideologi politik tertentu di dalam kegiatan seni atau intelektual. Kelompok ini juga menyatakan perlunya menempatkan Pancasila dalam kebudayaan nasional. Sikap yang menentang Lekra tersebut kemudian dituangkan melalui sebuah pernyataan, yang dikenal sebagai Manifesto Kebudayaan (Manikebu) pada Agustus 1963. Sebaliknya, kelompok Lekra melihat kelompok Manikebu juga telah berpolitik. Perkembangan politik pada waktu itu memungkinkan bagi PKI memojokkan kelompok anti komunis sama dengan anti pemerintah. Akibatnya Manikebu dilarang pemerintah pada bulan Mei 1964, karena dianggap sebagai hasil kebudayaan Barat yang humanis dari kelompok borjuis yang tidak revolusioner. Hasil karya beberapa sastrawan Angkatan 45 dan pencetus Manikebu dinyatakan terlarang, dan sebagian dari mereka dipenjara tanpa proses pengadilan.

Upaya PKI dalam mempengaruhi seluruh komponen masyarakat diterapkan juga pada ABRI. Beberapa divisi berhasil disusupi kelompok pendukung PKI. Begitu juga dengan Angkatan Laut, yang terpaksa harus kehilangan beberapa orang perwira terbaiknya karena sikap mereka yang menentang perluasan pengaruh komunis di tubuh TNI-AL. Beberapa perwira Kepolisian Negara juga telah berhasil dipengaruhi oleh PKI. Berkembangnya simpati terhadap ideologi komunis ini di dalam tubuh ABRI, menimbulkan sikap saling curiga baik di antara anggota maupun di antara angkatan.

Dominasi politik PKI berpengaruh besar dalam menentukan kebijakan pemerintah. Hal ini terbukti pada September 1964, ketika Partai Murba yang garis politiknya berseberangan dan menentang PKI, dibubarkan oleh pemerintah. Demikian pula organisasi wartawan anti komunis yang tergabung dalam Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS), dilarang oleh pemerintah pada Desember 1964.

Selanjutnya, pada 14 Januari 1965, Ketua *Comittee Central* (CC) PKI Dipa Nusantara Aidit menuntut pemerintah agar mempersenjatai kaum buruh dan tani. Untuk menampung kaum buruh dan tani yang telah dipersenjatai ini rencananya akan dibentuk angkatan kelima, setelah Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. D.N. Aidit merencanakan meminjam 100.000 pucuk senjata dari RRC untuk kaum buruh dan tani.

Tuntutan ini ditentang keras oleh kalangan TNI AD, antara lain Menteri Panglima Angkatan Darat Men/Pangab Jenderal Ahmad Yani. Ia menegaskan bahwa semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha mempersenjatai penduduk sipil seharusnya langsung berada di bawah pengawasan dan koordinasi TNI. Namun, beberapa anggota TNI yang bersimpati kepada PKI mulai mendukung ide tersebut pada awal Juni 1965.

Gagal dalam usahanya membentuk angkatan kelima, PKI menggunakan kedok mempersiapkan pasukan sukarelawan untuk Dwikora. PKI secara terang-terangan melatih para anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani dengan keterampilan teknis militer, seperti tata cara menggunakan senjata dan

berperang. Kegiatan ini mulai dilakukan pada awal Juli 1965. Tempat yang digunakan untuk latihan PKI itu berada di sekitar Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur. Sampai akhir September 1965, diperkirakan tidak kurang dari 2.000 orang telah mengikuti latihan militer itu di Jakarta. Latihan serupa juga telah dilakukan di luar ibu kota.

Tindakan dan perluasan pengaruh komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan kelompok anti komunis dan mempertinggi persaingan di antara elite politik nasional. Kecurigaan dan persaingan itu tergambar dengan jelas dalam berbagai polemik yang menonjolkan pendapat masing-masing, melalui surat kabar atau media massa lain yang dimiliki masing-masing kelompok serta aktivitas kemasyarakatan lainnya.

Kecurigaan dan persaingan itu semakin meningkat dengan munculnya berbagai desas desus di dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat.

Pada 15 Mei 1965, Dr. Subandrio selaku Wakil Perdana Menteri I/Menteri Luar Negeri menerima sepucuk surat tanpa tanda tangan si pembuat. Dalam surat tersebut hanya ditemukan nama Gilchrist (duta besar Inggris) yang seolah-olah memberikan laporan kepada Duta Besar Amerika mengenai situasi di Indonesia. Di dalam dokumen Gilchrist itu ditemukan kata-kata "*our local army friends*," yang oleh PKI ditafsirkan bahwa di dalam tubuh TNI AD ada sebuah Dewan Jenderal yang bertugas menilai kebijaksanaan presiden. Tuduhan terhadap Angkatan Darat semakin lantang pada September 1965, ketika ribuan tentara mulai berkumpul di Jakarta dalam rangka persiapan ulang tahun ABRI, 5 Oktober 1965.

Tuduhan ini ditolak oleh Angkatan Darat. Angkatan Darat kemudian secara resmi mengumumkan penolakan terhadap penerapan prinsip Nasakom ke dalam jajaran TNI dan pembentukan "angkatan kelima" pada 27 September 1965. Hal ini secara langsung mempertinggi kecurigaan dan persaingan politik antara Angkatan Darat dengan PKI.

## **2. Pelaksanaan Gerakan 30 September**

Di tengah-tengah kecurigaan dan persaingan politik yang semakin tinggi itu, sekelompok pasukan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Komandan Batalyon I Kawal Resimen Cakrabirawa (pasukan khusus pengawal Presiden) melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Kelompok bersenjata ini bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya pada tengah malam di penghujung hari Kamis, 30 September dan awal 1 Oktober 1965. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Di operasi itu, para tentara itu berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat, yaitu Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprpto, Mayor Jenderal Harjono Mas Tirtodarmo, Mayor Jenderal Suwondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Izacus Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo.

Di samping itu telah gugur pula Letnan Satu Piere Andreas Tendean sebagai ajudan Menhankam/Kasab Jenderal Nasution serta Brigadir Polisi Sasuit Tubun sebagai pengawal Wakil Perdana Menteri II J. Leimena. Selain perwira TNI, puteri Jenderal Nasution, Ade Irma Suryani Nasution, gugur dalam peristiwa tersebut.

Di Yogyakarta gugur pula dua orang perwira TNI-AD, yaitu Kolonel Katamso sebagai Komandan Korem 072/Yogyakarta dan Kepala Staf Korem Letnan Kolonel Sugiyono. Mereka kemudian diculik dan dibunuh di desa Kentungan, sebelah utara Yogyakarta. Gerakan 30 September di kota ini dipimpin oleh Mayor Mulyono. Mereka yang gugur oleh Gerakan 30 September itu oleh pemerintah diangkat sebagai Pahlawan Revolusi, yakni pahlawan yang gugur dalam mempertahankan Pancasila dari ancaman PKI.

Pada 1 Oktober 1965, pemimpin gerakan mengumumkan melalui RRI Jakarta tentang aksi yang telah dilakukan. Dalam pengumuman itu disebutkan tentang beberapa hal, antara lain Gerakan 30 September telah berhasil menggagalkan kudeta terhadap pemerintah atau Presiden Soekarno, pembentukan Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, pembubaran kabinet, dan penghapusan pangkat jenderal dalam TNI.

Berita tentang Gerakan 30 September segera menyebar pada 1 Oktober 1965, dan menimbulkan kebingungan di dalam masyarakat. Presiden Soekarno pergi ke bandar udara Halim Perdanakusuma dengan alasan untuk mempermudah tindakan penyelamatan jika keadaan memburuk. Presiden Soekarno kemudian memerintahkan agar masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta mencegah terjadinya pertumpahan darah.

### **3. Penumpasan Gerakan 30 September**

Berita kudeta dan penculikan yang dilakukan oleh PKI segera diterima oleh Panglima (Komando Strategi Angkatan Darat) Kostrad Mayor Jenderal Soeharto. Kevakuman di dalam tubuh Angkatan Darat karena terbunuhnya Men/Pangad Letnan Jenderal Ahmad Yani berhasil dikuasai setelah beliau menyimpulkan kegiatan rutin Men/Pangad. Apabila Men/Pangad berhalangan, yang mewakilinya umumnya Panglima Kostrad. Atas pertimbangan dan kesimpulan itu, panglima Kostrad berkesimpulan untuk segera menumpas Gerakan 30 September itu. Panglima Kostrad memerintahkan pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) untuk menumpas pemberontakan.

Pada 2 Oktober 1965, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edhie Wibowo berhasil menguasai markas pemberontak di Jakarta. Keberhasilan serupa kemudian terjadi juga di daerah-daerah, seperti di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ternyata aksi Gerakan 30 September tidak mendapat dukungan baik dari anggota ABRI maupun masyarakat.

Pada 3 Oktober 1965, satuan-satuan RPKAD atas bantuan Brigadir Polisi Sukitman yang dapat meloloskan diri dari penculikan Gerakan 30 September



satuan-satuan TNI berhasil menemukan jejak mayat para perwira TNI AD tersebut.

Keesokan harinya, 4 Oktober 1965, dengan dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto satuan-satuan Amphibi KKO Angkatan Laut segera menggali dan mengangkat jenazah para perwira TNI-AD dari sebuah sumur tua yang kedalamannya mencapai 12 meter. Baru pada pukul 15.00 WIB, semua jenazah berhasil diangkat dan diangkut ke RSAD (Rumah Sakit Angkatan Darat) dan kemudian disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta.

Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ABRI 5 Oktober 1965, dilakukan upacara penghormatan penguburan jenazah para Perwira Tinggi AD tersebut. Dengan Keputusan presiden Nomor 111/KOTI/1965 pada 5 Oktober 1965, keenam perwira pertama itu diangkat sebagai Pahlawan Revolusi.

Kini, di sekitar sumur tua tersebut dibangun Monumen Pancasila Sakti untuk mengenang jasa-jasa Pahlawan Revolusi tersebut, sekaligus untuk mengenang kebiadaban PKI. Tanggal 1 Oktober dijadikan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Sementara itu, operasi penumpasan sisa-sisa Gerakan 30 September terus dilanjutkan. Seorang demi seorang tokoh-tokoh gerakan tersebut dapat ditangkap. Kolonel Latief, mantan Komandan Brigade Infantri I/Kodan V Jaya berhasil ditangkap di Jakarta pada 9 Oktober 1965. Dua hari kemudian, pada 11 Oktober 1965, Untung Sutopo dalam pelariannya tertangkap di daerah Tegal Jawa Tengah oleh anggota Pertahanan Sipil dan Rakyat. Adapun Ketua CC PKI D.N. Aidit diberitakan kematiannya tanggal 24 November 1966. Tokoh-tokoh Gerakan 30 September yang berhasil ditangkap kemudian diajukan ke pengadilan, di antaranya Nyono, Untung Sutopo, Kolonel Latief, Dr. Subandrio, Omar Dani, Kamaruzaman, Sudisman, Oetomo Ramelan, Kolonel Sahirman, Mayor Mulyono, dan Brigjen Soesparjo.

#### **4. Polemik di Sekitar Peristiwa Gerakan 30 September**

Selama dua dasawarsa lebih hingga kini, sebenarnya masih terjadi polemik di seputar peristiwa Gerakan 30 September. Bahkan semakin menghangat setelah Presiden Soeharto turun dari jabatannya pada Mei 1998 lalu.

Dari beberapa polemik tersebut, terdapat beberapa versi yang terungkap, namun masih harus diuji kebenarannya. Adapun beberapa versi tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Versi yang menyebutkan bahwa PKI adalah dalang dari peristiwa Gerakan 30 September. Penganut versi tersebut berpendapat bahwa PKI telah membangun kekuatan secara sistematis. Termasuk menyaring dan memeralat oknum-oknum ABRI dalam rangka menghancurkan kelompok penentangannya.

Bukti pendukung versi ini adalah kehadiran Biro Khusus yang dipimpin oleh Syam Kamaruzaman, sebuah organ rahasia dan nonstruktural di bawah

D.N. Aidit. Bukti lain adalah dukungan terbuka dari surat kabar "Harian Rakyat" pada 2 Oktober terhadap Gerakan 30 September. Selain itu, bukti versi ini diperkuat oleh adanya pengakuan dari para pemimpin PKI di depan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub). Njono, misalnya, mengaku agar anggota ormas PKI dilatih sebagai tenaga cadangan. Versi ini terdapat dalam "buku putih" yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia maupun buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah

- b. Versi yang menyebutkan bahwa peristiwa Gerakan 30 September sebenarnya merupakan akibat dari konflik intern di dalam tubuh Angkatan Darat. Versi ini dikemukakan oleh Ben Anderson dan Ruth Mc Vey dalam kertas kerjanya yang kemudian dikenal sebagai *Cornell Paper*. Dalam versi ini kedua ahli tersebut menyatakan bahwa PKI tak memiliki motif melakukan kudeta karena saat itu situasi politik sangat menguntungkan PKI. Oleh karena itu, upaya terbaik PKI adalah mempertahankan *status quo* dan sebaliknya bukan mengacaukannya dengan peristiwa berdarah yang akan merugikan posisinya.

Dalam pandangan versi ini, peristiwa Gerakan 30 September adalah puncak kekecewaan dari beberapa perwira menengah Jawa atas kepemimpinan di AD. Para perwira "progresif" itu menilai bahwa para jenderal AD "telah disilaukan oleh kehidupan Jakarta yang gemerlap" sehingga perlu "diingatkan".

- c. Versi yang menyebutkan bahwa Letjen Soeharto adalah orang yang sesungguhnya berada di balik peristiwa Gerakan 30 September. Mereka lantas menyodorkan sejumlah fakta. Sebagai Panglima Kostrad ia adalah jenderal yang biasa mewakili Panglima AD bila yang bersangkutan pergi ke luar negeri dan pemegang komando pasukan. Namun, dalam posisi itu, Soeharto tak masuk dalam daftar korban penculikan. Logikanya, pihak lawan harus mengutamakan pembersihan terhadap orang-orang yang memiliki pasukan dan memegang komando. Kecuali bila ia dianggap sebagai "kawan" atau setidaknya tidaknya diperkirakan akan bersimpati terhadap gerakan tersebut.

Lebih jauh, W.F. Wertheim, sejarawan Belanda, mengatakan Soeharto memiliki hubungan dengan semua perwira AD yang terlibat Gerakan 30 September. Misalnya, Kolonel Untung Sutopo dan Kolonel Latief yang merupakan bekas anak buah dan dikenal dekat dengan Soeharto. Keterangan Soeharto yang berubah-ubah juga membangkitkan rasa curiga. Dalam wawancara dengan majalah "*Der Spiegel*", Juni 1970, Soeharto mengaku sempat berbincang dengan Kolonel Latief di RSPAD Gatot Subroto pada 30 September malam. Namun, dalam buku "Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya," Soeharto menyatakan hanya melihat Kolonel Latief dari kejauhan. Berdasarkan pengakuan dari Kolonel Latief sendiri disebutkan bahwa memang pada malam itu ia bertemu dan melaporkan

tentang rencana penculikan para jenderal AD kepada Soeharto. Namun, Soeharto tidak mengambil tindakan.

- d. Versi yang menyebutkan bahwa Amerika Serikat tidak ikut campur dalam peristiwa Gerakan 30 September. Versi ini bahkan menyebut Presiden Soekarno sebenarnya mengetahui rencana PKI sebelumnya. Sebagai indikasi, ada "surat rahasia" yang diberikan kepada Presiden Soekarno di sela-sela acara pertemuan persatuan ahli teknik di Senayan, Jakarta pada 30 September 1965. Surat tersebut konon berasal dari Kolonel Untung Sutopo. Versi ini terdapat dalam kumpulan dokumen CIA yang diterbitkan pada 1995, yaitu "The Coup that Backfired". Dokumen tersebut juga menyebut adanya pertemuan antara Brigjen Sugandhi, Kepala Penerangan Hankam, dan Presiden Soekarno pada 30 September 1965 siang. Dalam pertemuan itu, Brigjen Sugandhi memberitahukan tentang rencana kudeta PKI yang diketahuinya dari pembicaraannya dengan D.N. Aidit dan Sudisman. Tapi, konon, Presiden Soekarno justru marah dan menyebut Sugandhi sebagai seorang komunisfobia. Presiden Soekarno kemudian memerintahkan Sugandhi untuk tutup mulut.
- e. Versi yang menyebutkan bahwa peristiwa Gerakan 30 September adalah sebuah skenario Presiden Soekarno untuk melenyapkan oposisi dari para perwira tinggi yang menentang sikap politiknya. Versi ini dikemukakan oleh Anthony Dake, sejarawan Amerika Serikat. Kesimpulan tersebut didasarkan atas kesaksian Bambang Widjonarko, ajudan presiden, di Mahmilub. Pihak Amerika Serikat juga percaya dengan versi tersebut, terutama karena kemunculan Soekarno di Pangkalan Halim Perdanakusuma, perlindungannya kepada sejumlah pemimpin PKI, dan ketidakmampuannya untuk memperlihatkan simpati atas terbunuhnya para jenderal.
- f. Versi yang menyebutkan bahwa Gerakan 30 September terjadi karena adanya campur tangan dari Central Intelligence Agency (CIA). Dinas intelejen Amerika Serikat itu dianggap memprovokasi PKI agar melakukan kudeta. Tapi, kudeta itu dikondisikan sedemikian rupa supaya berlangsung secara prematur. Dengan begitu, PKI bisa langsung dihancurkan. Versi ini dikemukakan oleh Peter Dale Scott, guru besar Universitas California, Amerika Serikat. Namun, menurut Audrey dan George Mc Turner Kahin dalam buku "Subversion as a Foreign Policy," pihak Inggrislah yang paling memiliki motif untuk mendesakkan perubahan politik di Indonesia. Alasannya, dengan perubahan politik, Inggris tidak perlu lagi mengucurkan dana besar-besaran untuk mempertahankan Malaysia dari politik konfrontasi yang saat itu dijalankan pihak Indonesia.
- g. Versi yang menyebutkan bahwa pelaku peristiwa Gerakan 30 September adalah faktor intern (dalam negeri) yang didukung oleh faktor internal (luar

negeri). Versi ini dikemukakan oleh Dr. Asvi Warman Darman, seorang peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Berbagai versi di seputar peristiwa Gerakan 30 September seperti yang disebutkan di atas merupakan versi yang diungkapkan oleh para pelaku yang terlibat atau mereka yang berada pada saat peristiwa itu terjadi serta para ahli yang khusus meneliti peristiwa tersebut. Namun, sekali lagi, berbagai versi tersebut masih perlu diuji kebenarannya agar diperoleh fakta sejarah yang objektif.

## **RANGKUMAN.**

Kegiatan belajar ini membicarakan masalah perkembangan sejarah bangsa Indonesia pasca proklamasi sampai tahun 1949. Periode tersebut ditandai dengan berbagai upaya pemerintah RI menegakkan kedaulatannya yang ditandai dengan dibentuknya perangkat negara seperti KNIP, tentara, kementerian, pemerintahan daerah serta perbaikan bidang ekonomi. Namun demikian, sebagian besar upaya dilakukan untuk menegakkan kedaulatan sebab Belanda yang sudah kalah dari Jepang tahun 1942 ingin berkuasa kembali di Indonesia. Berbagai upaya diplomatik dan militer dilakukan oleh seluruh bangsa. Akhirnya, kedaulatan diperoleh melalui perjuangan diplomasi pada tahun 1949.

### **Kegiatan Belajar 4.**

### **Memperkuat Wawasan Kebangsaan Pada Masa Orde Baru dan Reformasi.**

#### **A. Kelahiran Orde Baru**

Setelah Gerakan 30 September tahun 1965 berhasil ditumpas dan kemudian diketahui bahwa PKI diindikasikan berada di balik peristiwa tersebut, masyarakat menjadi marah. Mereka menuntut pemerintah untuk membubarkan PKI dan mengadili tokoh-tokoh yang terlibat Gerakan 30 September.

Masyarakat umum dan partai-partai politik yang berseberangan dengan PKI secara spontan mulai membentuk berbagai kelompok yang menuntut pertanggungjawaban PKI dan para pendukungnya. Pada 8 Oktober 1965, mulai terjadi demonstrasi massa menuntut pertanggungjawaban PKI. Beberapa kesatuan aksi yang terbentuk pada waktu itu antara lain Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), dan Kesatuan Aksi Pengemudi Becak Indonesia (KAPBI).

Kesatuan-kesatuan aksi itu membentuk Front Pancasila yang bersama-sama dengan organisasi yang menentang PKI mengadakan rapat akbar pada 26 Oktober 1965 di Lapangan Banteng Jakarta. Menghadapi arus demonstrasi

yang kian deras, Presiden Soekarno berjanji akan mengadakan penyelesaian politik terhadap pemberontakan Gerakan 30 September. Namun, janji tersebut masih belum ditepati. Hal ini menyebabkan para mahasiswa, pelajar, dan kelompok lainnya yang didukung oleh masyarakat luas dan juga ABRI mulai melakukan tindakan yang langsung mengarah kepada PKI dan pendukungnya. Pertikaian langsung antara para pemuda, mahasiswa, pelajar, dan kesatuan aksi lainnya dengan PKI dan pendukungnya tidak dapat dihindarkan. Di beberapa tempat seperti di Jakarta dan Yogyakarta, mahasiswa dan pelajar bahkan telah berkorban jiwa.

Para pemuda anti-PKI di berbagai daerah juga melakukan aksi yang sama melalui berbagai organisasi. Pertikaian langsung dengan PKI dan para pendukungnya tidak dapat dihindari. Di beberapa daerah khususnya di Jawa, Bali, dan Sumatra Utara, situasi berkembang menjadi aksi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa yang banyak para anggota PKI beserta pendukungnya serta orang-orang yang diduga menjadi pendukung komunisme. Namun aksi kekerasan ini juga dimanfaatkan oleh kelompok atau individu tertentu untuk kepentingan sendiri. Akibatnya, orang-orang yang tidak ada kaitan dengan PKI atau organisasi pendukungnya juga menjadi korban. Tidak ada yang tahu secara pasti berapa jumlah orang yang telah terbunuh, karena semuanya hanya berdasarkan perkiraan. Perkiraan berdasarkan berbagai laporan, jumlah korban jiwa mencapai ratusan ribu nyawa manusia. Hal yang pasti, sebuah tragedi kemanusiaan yang bertentangan, baik dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia maupun hak asasi manusia universal, telah terjadi dalam jangka waktu yang sangat pendek.

Sementara itu, dengan dasar pertimbangan kemelut politik yang tidak menentu dan membumbungnya harga-harga kebutuhan pokok rakyat, KAMI dan KAPPI di hadapan gedung DPRGR pada 10 Januari 1966, mengajukan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), yaitu

- a. bubarkan PKI;
- b. bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur Gerakan 30 September;
- c. turunkan harga.

Menghadapi situasi yang semakin meruncing dan memanas, Presiden Soekarno memanggil seluruh menterinya untuk mengadakan sidang Kabinet di Istana Bogor, Dalam sidang itu, banyak tokoh-tokoh KAMI yang diundang. Namun, di luar Istana Bogor, masyarakat yang berdemonstrasi semakin ramai dan semakin berani menuntut dilaksanakannya Tritura.

Dalam sidang kabinet tersebut Presiden Soekarno sekali lagi berjanji akan memberikan penyelesaian politik, bahkan menawarkan jabatan menteri kepada siapa saja yang sanggup menurunkan harga. Janji penyelesaian politik yang diucapkan Presiden Soekarno dalam sidang kabinet Dwikora, diwujudkan dengan merombak susunan Kabinet Dwikora menjadi Kabinet Dwikora yang disempurnakan. Kabinet Dwikora yang disempurnakan itu dikenal dengan sebutan Kabinet 100 Menteri karena itu terdiri dari 100 orang menteri yang

banyak memihak kepada PKI. Pada 24 Februari 1966, Kabinet Dwikora dilantik di Istana Merdeka Jakarta. Pada saat pelantikan Kabinet Dwikora inilah salah seorang mahasiswa UI yang sedang berdemonstrasi bernama Arief Rahman Hakim gugur akibat bentrokan dengan pasukan pengawal presiden.

Melihat penyelesaian politik yang dilakukan Presiden Soekarno tidak sesuai dengan kehendak rakyat, tentu saja rakyat sangat marah. Terjadilah gelombang aksi demonstrasi yang semakin besar yang kini ditujukan langsung kepada Presiden Soekarno.

Presiden Soekarno yang merasa tersinggung dengan kesatuan-kesatuan aksi yang mendemonstrasinya, segera membalas dengan membubarkan KAMI pada 26 Februari 1966 dan menutup kampus Universitas Indonesia pada 3 Maret 1966. Tindakan Presiden Soekarno itu semakin memperuncing keadaan. Arus demonstrasi semakin keras dan membanjiri Jakarta. Keadaan kota semakin tidak menentu.

Pada 11 Maret 1966, di Istana Negara dilangsungkan sidang Kabinet Dwikora yang disempurnakan. Namun, sebelum sidang berakhir, terdengar berita dari Komandan Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa Brigjen Sabur, bahwa di luar Istana Bogor banyak pasukan yang tidak dikenal identitasnya. Mendengar laporan itu, Presiden Soekarno gusar dan menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena. Selanjutnya, beliau bersama Wakil Perdana Menteri I Dr. Subandrio dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh meninggalkan sidang menuju Istana Bogor.

Setelah sidang selesai, tiga orang perwira TNI AD masing-masing Mayor Jenderal Basuki Rahmat Menteri Veteran, Brigadir Jenderal M. Yusuf Menteri Perindustrian Dasar, dan Brigadir Jenderal Amir Mahmud Panglima Kodam V/Jaya menyampaikan hasil sidang Kabinet Dwikora itu kepada Letnan Jenderal Soeharto, yang kebetulan tidak hadir karena sakit. Ketiga perwira TNI-AD itu, meminta izin Letnan Jenderal Soeharto untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor. Letnan Jenderal Soeharto mengizinkan ketiga perwira TNI-AD untuk menemui Presiden Soekarno dan menyampaikan pesan, bahwa Letnan Jenderal Soeharto sanggup menyelesaikan kemelut politik dan memulihkan keamanan dan ketertiban di ibu kota.

Setelah melakukan pembicaraan beberapa jam, Presiden Soekarno akhirnya setuju memberikan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat dan Pangkoptamtib untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah pada 11 Maret 1966. Dalam menjalankan tugas, penerima mandat juga diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada presiden. Karena surat itu dibuat pada 11 Maret, surat itu dikenal dengan sebutan **Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)**.

Dengan Surat perintah tersebut, Letnan Jenderal Soeharto memiliki kekuatan hukum untuk memenuhi tuntutan rakyat. Oleh karena itu, Letnan Jenderal Soeharto mengambil beberapa tindakan di antaranya adalah membubarkan PKI pada 12 Maret 1966 dan mengamankan 15 orang menteri

Kabinet Dwikora yang Disempurnakan yang diduga terlibat Gerakan 30 September.

Turunnya Surat Perintah Sebelas Maret merupakan jawaban terhadap berbagai tuntutan mahasiswa dan rakyat yang menginginkan pembubaran PKI. Hal ini merupakan tonggak sejarah kelahiran Orde Baru.

## **B. Masa Transisi dari Orde Lama ke Orde Baru**

Menindaklanjuti pembersihan Kabinet Dwikora yang disempurnakan, pada 2 Mei 1966 diselenggarakan sidang DPRGR, selain dihadiri oleh anggota DPRGR, juga dihadiri ratusan mahasiswa yang membacakan nota politiknya. Hasil sidang DPRGR itu adalah sebagai berikut.

- a. Menyatakan pimpinan DPRGR demisioner;
- b. Mengangkat pengganti pimpinan DPRGR, yakni Achmad Syachu, Laksamana Muda (laut) Mursalin Daeng Mamanggung, dan Brigjen Syarif Tayeb.

Dengan kepemimpinan pengganti, DPRGR terus mengadakan sidang-sidang untuk penghilangan unsur Gerakan 30 September dari tubuh DPRGR. Pada 17 Mei 1966, DPRGR berhasil menyusun kepengurusan DPRGR, yaitu sebagai berikut.

- |           |   |  |
|-----------|---|--|
| Ketua     | : | Ahmad Syaichu (dari Golongan Islam)              |
| Wk. Ketua | : | Moh Isnaeni (dari Golongan Nasionalis)           |
| Wk. Ketua | : | Drs. Ben Mang Reng Say (Kristen Katolik)         |
| Wk. Ketua | : | Laksda (laut) Mursalin Daeng Mamanggung (Golkar) |
| Wk. Ketua | : | Brigjen. Syarif Tayeb (Golkar).                  |

Di samping itu, DPRGR juga berhasil membersihkan anggotanya dengan memecat 65 orang anggota DPRGR yang mewakili PKI dan ormas-ormasnya. Selanjutnya dalam menegakkan tertib hukum di Indonesia, DPRGR juga berhasil merumuskan memorandum kepada MPRS tentang Sumber Tertib Hukum yang berlaku di Indonesia yang kemudian oleh MPRS ditetapkan dengan Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966.

Setelah DPRGR secara maraton mengadakan sidang-sidangnya, giliran MPRS untuk melaksanakan berbagai persidangan. Dalam sidang MPRS IV, pada 20 Juni-5 Juli 1966, MPRS berhasil merumuskan 24 keputusan, yaitu sebagai berikut.

1. Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Supersemar.
2. Tap MPRS No. X/MPRS/1966 tentang kedudukan lembaga-lembaga tingkat pusat dan daerah pada posisi yang telah diatur di dalam UUD 1945.
3. Tap MPRS No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilu.
4. Tap MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang penegasan kembali landasan politik luar negeri Indonesia.
5. Tap MPRS No. XIII tentang pengukuhan Kabinet Ampera.
6. Tap MPRS No. XIV/MPRS/1966 tentang pembentukan panitia-panitia ad hoc.

8. Tap MPRS No. XV/MPRS/1966 tentang Pemilihan/Penunjukan wakil presiden dan tata cara pengangkatan Pejabat Presiden.
9. Tap MPRS No. XVI/MPRS/1966 tentang pengertian mandataris.
10. Tap MPRS/No. XVII/MPRS/1966 tentang Pemimpin Besar Revolusi.
11. Tap MPRS No. XVIII/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali Tap MPRS No. III/MPRS/1963.
12. Tap MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali produk-produk Legislatif di luar Produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945.
13. Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum di Indonesia.
14. Tap MPRS No. XXI/MPRS/1966 tentang pemberian otonomi kepada daerah seluas-luasnya.
15. Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang kepartaian, keormasan dan kekaryaan.
16. Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1966 tentang pembaruan kebijaksanaan landasan ekonomi dan pembangunan.
17. Tap MPRS No. XXIV/MPR/1966 tentang kebijaksanaan dalam bidang hankam.
18. Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah RI.
19. Tap MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang pembentukan Panitia Penelitian Ajaran-ajaran Pemimpin besar Revolusi Bung Karno.
20. Tap MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan.
21. Tap MPRS No. XXVIII/MPRS/1966 tentang kebijaksanaan peningkatan kesejahteraan rakyat.
22. Tap MPRS No. XXIX/MPRS/1966 tentang Pahlawan Ampera.
23. Tap MPRS No. XXX/MPRS/1966 tentang pencabutan gelar Bintang Mahaputra Kelas III dari DN Aidit.
24. Tap MPR No. XXXI/MPRS/1966 tentang penggantian sebutan Paduka Yang Mulia, Yang Mulia, Paduka Tuan dengan sebutan Tuan atau Saudara-saudari.
25. Tap MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang pembinaan pers.

Setelah dilangsungkan sidang umum MPRS IV tahun 1966, pada 25 Juli 1966, Presiden Soekarno melaksanakan Tap MPRS Nomor XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet Ampera. Beliau membentuk Kabinet Ampera dan membubarkan Kabinet Dwikora yang disempurnakan. Kabinet Ampera dibangun oleh tiga unsur, yaitu

- a. pimpinan kabinet yang dipegang oleh Presiden Soekarno;
- b. pembantu pimpinan yang terdiri dari lima orang Menteri Utama yang merupakan suatu Presidium;
- c. anggota kabinet terdiri dari 24 Menteri.



Tugas pokok dari Kabinet Ampera ini disebut Dwi Darma, yaitu mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan stabilitas ekonomi. Sedangkan program kerja Kabinet Ampera disebut Catur Karya yang terdiri dari empat hal, yaitu

- a. memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan;
- b. melaksanakan pemilu dalam batas waktu sebagaimana disebutkan di dalam Tap MPRS No. XI/MPRS/1966;
- c. melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan Tap MPRS No. XI/MPRS/1966;
- d. melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Dalam perkembangan politik selanjutnya, dengan mempertimbangkan keadaan ketatanegaraan yang perlu dinormalisasikan, berdasarkan isi dari Tap MPRS RI No. XV/MPRS/1966, di Jakarta pada 22 Februari 1967 berlangsung penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto, sebagai pengemban Tap MPRS No. IX/MPRS/1966. Penyerahan kekuasaan ini mendapat sambutan yang meriah di seluruh penjuru tanah air.

Dengan terjadinya penyerahan kekuasaan tersebut, pada 4 Maret 1967 Jenderal Soeharto memberikan keterangan resmi pemerintahan di hadapan sidang DPRGR, setelah sebelumnya pada 24 Februari 1967 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengeluarkan kebulatan tekad untuk mengamankan penyerahan kekuasaan tersebut.

Menindaklanjuti penyerahan kekuasaan tersebut, MPRS mengadakan Sidang Istimewa pada 7-12 Maret 1967. Dalam Sidang Istimewa tersebut, MPRS berhasil merumuskan Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, yang berisi hal-hal sebagai berikut.

- a. Mencabut kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno.
- b. Menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno dengan segala kekuasaan pemerintah sebagaimana yang diatur di dalam UUD 1945.
- c. Mengangkat Pengemban Tap MPRS Nomor IX/MPRS/1966 sebagai Pejabat Presiden hingga dipilihnya presiden menurut hasil pemilihan umum.

Pada akhir sidang istimewa MPRS, yakni pada 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto secara resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua MPRS, Jendral TNI AH. Nasution, sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia.

Di samping Tap MPRS No. XXXIII, MPRS juga berhasil merumuskan:

- a. TAP MPRS No. XXXIV/MPRS/1967 tentang peninjauan kembali Tap MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik RI sebagai GBHN karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan.
- b. Tap MPRS No. XXXV/MPRS/1966 tentang Pencabutan Tap MPRS No. XVII/MPRS/1966 tentang Pemimpin Besar Revolusi.

Di dalam Sidang Umum MPRS yang berlangsung pada 21 hingga 30 Maret 1968, Pejabat Presiden Jenderal TNI Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia sampai dengan terpilihnya Presiden RI hasil

Pemilihan Umum. Selain itu, di dalam Sidang Umum MPRS 1968, telah dirumuskan tujuh ketetapan sebagai berikut.

- a. Tap MPRS No. XXXVII/MPRS/1968 tentang pencabutan TAP MPRS No. VIII/MPRS/1965 tentang pedoman pelaksanaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- b. Tap MPRS No. XXXVIII/MPRS/1968 tentang pencabutan Tap MPRS No. II/MPRS/1960, Tap MPRS Nomor IV/MPRS/1963, Tap MPRS No. V/MPRS/1965, Tap MPRS Nomor VI/MPRS/1965 dan Tap MPRS No. VII MPRS/1965.
- c. Tap MPRS No. XXXIX/MPRS/1968 tentang pelaksanaan Tap MPRS No. IX/MPRS/1966.
- d. Tap MPRS No. XL/MPRS/1968 tentang pembentukan panitia ad hoc MPRS yang tugasnya meninjau kembali Tap-tap MPRS hasil sidang umum IV tahun 1966 dan sidang istimewa MPRS tahun 1967.
- e. Tap MPRS No. XLI/MPRS/1968 tentang tugas pokok Kabinet Pembangunan.
- f. Tap MPRS No. XLII/MPRS/1968 tentang perubahan Tap MPRS No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum.
- g. Tap MPRS No. XLIII/MPRS/1968 tentang penjelasan Tap MPRS No. IX/MPRS/1966.

Pada 27 Maret 1968, Jenderal Soeharto diambil sumpah sebagai Presiden RI yang kedua. Sejak 1968, Soeharto secara resmi menjabat sebagai Presiden RI yang kedua.

### **C. Pembangunan Nasional**

Semenjak pemerintahan Orde Baru berdiri, terutama setelah Jenderal Soeharto resmi menjabat sebagai Presiden RI yang kedua, dicanangkanlah berbagai konsepsi dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Langkah utama melaksanakan pembangunan nasional adalah membentuk Kabinet Pembangunan I sesuai dengan Tap MPRS No. XLI/MPRS/1968 pada 6 Juni 1968. Tugas pokok Kabinet Pembangunan I adalah melanjutkan tugas-tugas dari Kabinet Ampera, Programnya dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan. Isinya adalah sebagai berikut.

- a. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Pemilihan Umum (Pemilu).

- b. Menyusun dan merencanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun.
- c. Melaksanakan pemilihan umum selambat-lambatnya pada Juli 1971.
- d. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa Gerakan 30 September dan setiap rongrongan, penyelewengan, serta penghianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945.
- e. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di tingkat daerah.

Untuk merealisasikan pembangunan seperti yang diamanatkan GBHN, Orde Baru melaksanakan konsep Pembangunan Lima Tahun (Pelita) yang dimulai sejak 1 April 1969.

- a. Pelita I (1 April 1969-31 Maret 1974)
- b. Pelita II (1 April 1974-31 Maret 1979)
- c. Pelita III (1 April 1979-31 Maret 1984)
- d. Pelita IV (1 April 1984 Maret 1989)
- e. Pelita V (1 April 1989-31 Maret 1994)
- f. Pelita VI (1 April 1994-31 Maret 1999)
- g. Pelita VII (1 April 1999 – 31 Maret 2004)

Berbeda dengan pemerintahan Orde Lama (Presiden Sukarno), Pemerintahan Orde Baru (Presiden Suharto) berusaha menciptakan **stabilitas politik dan ekonomi**. Stabilitas tersebut dianggap oleh rezim ini sebagai syarat berhasilnya pelaksanaan pembangunan serta terselenggaranya pemerintahan. Untuk memperbaiki kehidupan rakyat yang selama pemerintahan Orde Lama berada dalam kehidupan yang berat karena mengalami serba kekurangan maka Pemerintah Orde baru melakukan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Sampai Pemerintahan ini tumbang pada tahun 1998 telah dilaksanakan selama enam pelita. Pelita merupakan langkah pembangunan yang tersusun dan terencana dengan sasaran dan tujuan yang jelas. Melalui langkah-langkah tersebut terlihat adanya peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang terlihat dari **kondisi objektif** di bawah ini.

1. Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk Indonesia, baik yang tinggal di kota maupun di desa. Pada tahun 1982 Bank Dunia sudah menggolongkan Indonesia sebagai negara yang berpenghasilan menengah karena berpendapatan sekitar 600 dolar AS meninggalkan kategori sebagai negara miskin. Penggolongan ini tentu saja membanggakan rezim yang sedang berkuasa saat itu dan dijadikan sebagai isu politik bahwa pembangunan telah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan ini juga

didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat rata-rata di atas 7 persen setiap tahun. Namun demikian, peningkatan tersebut tidak diikuti dengan pemerataan pendapatan penduduk. Sebagian kecil penduduk menikmati kemakmuran yang luar biasa karena keberhasilan mereka memanfaatkan segala peluang ekonomi yang diberikan oleh pemerintah. Pada masa ini lahir pengusaha besar yang mampu meningkatkan devisa negara, walaupun keberhasilan mereka dilakukan karena kedekatannya dengan pusat kekuasaan Presiden Suharto. Kondisi ini telah menciptakan jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin, terutama mereka yang tinggal di perkotaan. Ternyata, pemerintah orde baru tidak mampu meningkatkan pemerataan kesejahteraan warganya.

2. Meningkatnya produksi pangan sehingga Indonesia pernah dikategorikan oleh badan pangan dunia FAO pada tahun 1986 sebagai negara yang paling berhasil meningkatkan swasembada. Pada waktu itu impor beras mencapai nol persen. Namun demikian, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan maka impor bahan pangan tetap dilakukan karena kemampuan para petani untuk meningkatkan produksi pangan masih terbatas.
3. Meningkatnya berbagai sarana untuk menunjang tercapainya kesejahteraan penduduk. Misalnya, sarana pendidikan serta kesempatan penduduk untuk menikmati pendidikan telah meningkat. Melalui program wajib belajar, pemerintah mengeluarkan impres (instruksi Presiden) berupa penyediaan dana yang cukup banyak untuk membangun sarana pendidikan terutama pendidikan dasar. Melalui kebijaksanaan ini, jumlah penduduk yang melek huruf meningkat. Pada tahun 1961 tingkat melek huruf hanya 46,7 persen meningkat menjadi 60 persen pada tahun 1971 dan meningkat lagi menjadi 72 persen pada tahun 1981 dan meningkat menjadi lebih dari 90 persen pada tahun 1990-an.
4. Pada masa Orde Baru, Indonesia mengalami stabilitas ekonomi yang baik. Apabila pada akhir pemerintahan Presiden Sukarno inflasi mencapai lebih dari 600 persen maka pada awal Orde Baru inflasi hanya mencapai 10 persen dan selalu berada dibawah 10 persen pada akhir kekuasaan Presiden Suharto tahun 1998. Stabilitas ekonomi ini memungkinkan tumbuh dan berkembangnya dunia usaha di Indonesia. Harapan usia hidup terus meningkat, mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan.
5. Rata-rata jumlah pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan setiap tahun, berkurang dari rata-rata lebih 2 persen pada masa orde lama menjadi kurang dari 2 persen pada masa orde Baru. Keberhasilan ini terjadi karena dilaksanakannya program keluarga berencana (KB). Dengan laju pertumbuhan tersebut penduduk Indonesia sampai berakhirnya Orde baru tahun 1998 adalah 200 juta jiwa.

- Keberhasilan dan peningkatan tersebut harus dibayar mahal dengan terjadinya kerusakan lingkungan hidup di berbagai daerah. Misalnya, di perkotaan yang dijadikan kawasan industri telah meningkatnya polusi selain karena semakin padatnya jumlah penduduk.. Sedangkan luas hutan di luar Jawa semakin berkurang karena dieksploitasi untuk industri perkayuan dan demi memperoleh devisa.

#### **D. Kekuasaan Negara dan Dampaknya Bagi Kehidupan Masyarakat.**

Selama pemerintahan Orde Berkuasa 32 tahun, istilah pembangunan, stabilitas dan pertumbuhan telah merupakan jargon politik yang dijalankan oleh rezim ini. Untuk mencapai tujuan tersebut maka **negara telah mengambil peran** yang menentukan dengan menempatkan kekuasaan yang besar di tangan presiden. Secara konstitusional, memang pemerintahan berdasarkan pada UUD 1945 sehingga setiap tahun diadakan pemilihan umum dan diikuti dengan pengangkatan presiden. Namun demikian, dengan struktur politik yang dibuat oleh pemerintah serta pengorganisasian seluruh unsur politik dan potensi masyarakat maka peran negara semakin meningkat yang direpresentasikan oleh semakin kuatnya tangan eksekutif pada Presiden Suharto. Misalnya, sejak tahun 1971, pemilu pertama pada masa Orde Baru, partai politik yang diakui hanya tiga buah yaitu Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan. Golongan Karya sebagai salah satu kekuatan politik merupakan partai yang sejak pemilu tahun 1971 memenangkan pemilu dan dalam pemilu-pemilu selanjutnya selalu memperoleh suara terbanyak. Golkar sendiri merupakan kekuatan politik orde baru yang berada di bawah pembinaan presiden Suharto sendiri. Sedangkan dua partai lainnya hanyalah sebagai pelengkap dari sistem demokrasi (demokrasi Pancasila) yang dikembangkan oleh rezim ini.

Untuk mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan tahapan pelita yang direncanakan maka diperlukan stabilitas. Stabilitas akan tercipta apabila oposisi terhadap pemerintah dapat dikendalikan. Untuk itu, birokrasi pemerintahan dibersihkan dari unsur-unsur yang mampu melawan negara. Para pegawai pemerintah diorganisir dalam Korp Pegawai Republik Indonesia, (Kopri). Para buruh, pengusaha, wartawan, guru, pemuda dan pelajar, mahasiswa kelompok profesional dan lain-lain ditampung dalam wadah yang disponsori oleh pemerintah. Maka lahirlah PGRI, IDI, KNPI, Kadin, PWI dan lain-lain yang berafiliasi dengan pemerintah. Para pengurus serta anggota organisasi-organisasi tersebut juga harus menjadi anggota Golongan Karya. Mudah dipahami apabila Golkar selalu memenangkan dalam setiap pemilu dan selalu memilih Suharto sebagai presiden.

Selama orde baru semua aktifitas masyarakat dikontrol dengan ketat oleh pemerintah. Pers, kehidupan kampus, organisasi massa dan lain-lain berada dibawah kendali pemerintah. Pelajaran sejarah disekolah-sekolah dijadikan

sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaannya. Oleh karena itu, penulisan sejarah tentang Orde Baru ditulis besar-besaran. Sedangkan peranan rezim penguasa sebelumnya dikecilkan. Banyak pengamat mengatakan bahwa cara berpikir masyarakatpun telah dikendalikan oleh pemerintah melalui berbagai aturan yang dikeluarkannya.

Kelompok yang menentang kebijaksanaan negara dianggap sebagai musuh negara yang anti ideologi negara, Pancasila. Mereka yang menentang kebijaksanaan pemerintah sering diidentikkan dengan komunis. Untuk membersihkan unsur-unsur komunis dalam masyarakat maka sejak tahun 1978 melalui ketetapan MPR dikeluarkan ketetapan mengenai perlunya Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila atau P-4. P-4 menjadi semacam acuan bagi semua kelompok masyarakat dalam mempraktekkan kehidupan bernegara. Untuk itu maka di setiap instansi serta diadakan penataran P-4, yang dalam pelaksanaannya mirip dengan indoktrinasi. Pemerintah Orde baru memang bertekad untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Untuk itu semua unsur harus ikut serta mendukung dan melaksanakannya. Salah satu cara untuk mengetahui keterlaksanaan P-4 dan kesetiaan semua unsur terhadap negara antara lain melalui upacara resmi, terutama pada instansi pemerintah yang dilaksanakan pada setiap tanggal 17 setiap bulan, sumpah setia serta penyeragaman cara pandang dan pikir masyarakat untuk mendukung pemerintah yang sedang berkuasa.

Menguatnya perang negara dalam kehidupan politik Orde baru terlihat dari tampilnya ABRI sebagai kekuatan sosial politik. Melalui konsep *dwi fungsi ABRI*, angkatan bersenjata ini bukan hanya berfungsi menjaga keamanan, integrasi bangsa dari musuh di dalam dan luar negeri melainkan juga sebagai kekuatan dalam kehidupan politik. Sebagai kekuatan politik, ABRI memiliki suara yang menentukan dalam MPR dengan cara ditunjuk. Presiden Suharto telah memanfaatkan ABRI sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaannya. Dengan fungsi tersebut, ABRI telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Terbukti selama pemerintahan Orde Baru berkuasa, stabilitas dapat ditegakkan serta pergolakan daerah dan gerakan disintegrasi seperti pada masa rezim sebelumnya dapat dihindari.

Sejak kalahnya Orde Baru mulai disadari pentingnya peningkatan ekonomi yang pada jaman Orde Lama mengalami kemerosotan. Melalui kemampuan manajerial yang baik yang dimiliki oleh presiden Suharto maka dipilihlah orang-orang yang cakap di bidang ekonomi untuk mulai merancang pembangunan ekonomi nasional. Lima orang di antaranya adalah Emil Salim, Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Mohammad Sadli dan Subroto. Mereka kemudian dikenal sebagai *Mafia Berkeley* karena semuanya alumni dari Universitas California Berkeley Amerika Serikat. Mereka semua merancang repelita atau tahapan pembangunan lima tahunan dengan menekankan pada pertumbuhan, stabilitas dan terciptanya kesempatan kerja pada angkatan kerja. Untuk itu, modal asing dari barat diundang masuk ke Indonesia, hubungan dengan

lembaga internasional diciptakan dengan baik. Lembaga seperti IGGI (Inter-Governmental Group Indonesia) yang dibentuk tahun 1966-1967 sebagai negara-negara yang bersedia memberi pinjaman ekonomi kepada Indonesia serta Dana Moneter Internasional, IMF serta Bank Dunia menjadi penyedia dana bagi pembangunan ekonomi. Melalui kebijaksanaan tersebut modal asing masuk dengan deras, industri berkembang dengan pesat serta laju pertumbuhan ekonomi meningkat dengan tajam. Pertumbuhan tersebut dicapai antara lain berkat harga minyak di pasaran internasional meningkat sejak tahun 1973. Indonesia yang sudah menjadi negara anggota pengekspor minyak OPEC menikmati keuntungan dari harga minyak internasional.

Dilihat dari pertumbuhan skala makro, ekonomi mengalami kemajuan. Namun demikian, kekecewaan berbagai kelompok mulai muncul terutama pada awal tahun 1990-an. Kekecewaan tersebut disebabkan ada kesan bahwa pembangunan lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang yang dekat dengan kuasa Presiden Suharto. Sementara daerah dengan segala potensimsosial ekonomi dan busasya merasa lebih banyak dieksploitasi oleh Pemerintah Pusat.

Karena saluran kontrol dari masyarakat tersumbat maka Presiden Suharto dengan leluasa menjalankan semua keinginannya, termasuk membangun imperium bisnis keluarga. Selama kekuasaannya lahir pengusaha-pengusaha besar (konglomerat) yang mampu mendatangkan devisa bagi negara, walaupun tumbuhnya mereka menjadi pengusaha disebabkan karena kedekatannya dengan lingkungan kepresidenan. Sebagian rakyat kecewa menyaksikan jurang pemisah kaya dan miskin yang semakin lebar dan nampak secara kasat mata serta terbelenggunya aspirasi mereka untuk disampaikan kepada rezim yang sedang berkuasa. Parlemerter yang dililih sesuai pemilu setiap tahun tidak mencerminkan perwakilan rakyat. Sebaliknya mereka lebih banyak berperan sebagai kepanjangan tangan eksekutif untuk melegitimasikan kekuasaannya. Demokrasi yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru adalah demokrasi sesuai dengan yang ditafsirkan oleh elit yang sedang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya.

## **E. Wawasan Kebangsaan di Era Reformasi.**

### **1. Faktor-faktor Munculnya Tuntutan Reformasi.**

Runtuhnya Orde Baru dan diganti dengan Orde Reformasi merupakan ujian bagi bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi nasional serta wawasan kebangsaan yang telah dimilikinya. Pengunduran Presiden Suharto pada tanggal 21 Mei 1998 serta tuntutan reformasi yang terus dikumandangkan masyarakat Indonesia disebabkan karena krisis multi dimensional yang melanda negeri ini. Krisis yang bermula dari Thailand dan negara-negara Asia lainnya itu juga melanda Indonesia. Berbeda dengan negara-negara di Asia yang hanya terkena krisis ekonomi dan moneter, krisis yang melanda Indonesia sifatnya sangat kompleks atau multidimensional. Disebut multidimensional karena krisis

bukan hanya menyangkut masalah ekonomi dan moneter, yang sering disingkat "*krismon*" oleh sebagian besar masyarakat serta MPR sejak tahun 1997, melainkan juga krisis politik, kepemimpinan, peran militer dan peran masyarakat serta mengarah pada terjadinya disintegrasi bangsa.

Krisis yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 sampai sekarang sebenarnya bukan yang pertama kali terjadi. Dalam sejarah Indonesia, setiap menjelang terjadinya suksesi atau pergantian kepemimpinan selalu diawali dengan krisis. Pada suksesi kerajaan-kerajaan Mataram di Jawa selalu bermula dari pertentangan antar keluarga di lingkungan keraton yang berujung pada pertumpahan darah. Setelah bangsa kita memperoleh kemerdekaan dari penjajah tahun 1945, krisis tetap melanda bangsa ini. Pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, terutama pada masa akhir Demokrasi Terpimpin terjadi krisis yang besar yang ditandai dengan kesulitan ekonomi rakyat dan berujung dengan meletusnya Gerakan 30 September 1965. Krisis ekonomi pada masa Pemerintahan Presiden pertama RI tersebut disebabkan Indonesia memutuskan hubungan dengan negara-negara Barat. Istilah "*go to hell*" terhadap bantuan (baca:pinjaman) Amerika Serikat serta lembaga-lembaga keuangan seperti IMF (International Monetary Fund), Bank Dunia dan lain-lain adalah *jargon* yang sering diungkapkan oleh para politisi Orde Lama.

Sedangkan krisis sekarang (sejak 1997) disebabkan keterikatan sistem ekonomi Indonesia dengan sistem ekonomi internasional atau global dimana IMF, Bank Dunia dan lembaga keuangan lain menjadi salah satu sumber keuangan Indonesia dalam pembiayaan pembangunan ekonominya. Krisis ekonomi yang ditandai dengan jatuhnya nilai mata uang rupiah bersamaan dengan melabungnya nilai mata uang dolar AS dan segera diikuti dengan melambungnya harga-harga kebutuhan *sembako* (sembilan bahan pokok) berpengaruh kuat terhadap terjadinya krisis politik. Dengan demikian, ada hubungan antara krisis ekonomi dengan krisis politik.

Krisis politik di Indonesia ditandai dengan munculnya ketidakpercayaan kaum intelektual terutama mahasiswa terhadap kepemimpinan Presiden Suharto dan ikut campurnya militer dalam politik. Ketidakpercayaan juga ditujukan pada angkatan bersenjata yang menjadi pendukung utama Orde Baru dan dianggap menjadi bagian dari sumber krisis.

Krisis yang melanda Indonesia sekarang juga karena berbagai praktek yang telah lama dilakukan oleh rezim Orde Baru. Istilah KKN atau kolusi, korupsi dan nepotisme adalah istilah yang paling populer yang disuarakan oleh kaum reformis (kaum yang menghendaki adanya perubahan) untuk segera diberantas. Kolusi antara elit politik Orde Baru dengan para pengusaha hanya menguntungkan kedua belah pihak. Sebaliknya rakyat hanya menerima akibat buruk dari praktek tersebut. Demikian juga dengan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara—mulai dari tingkat paling atas sampai bawah - telah menguras sumber ekonomi negara sehingga uang yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat tidak sampai pada sarannya. Sedangkan



nepotisme adalah praktek penguasa yang lebih mementingkan anggota keluarga atau golongan untuk memperoleh jabatan serta kesempatan-kesempatan dalam dunia usaha.

Penderitaan rakyat akibat krisis ekonomi dibaca dengan baik oleh kelompok intelektual terutama pada mahasiswa. Mereka mulai turun ke jalan berdemonstrasi seperti yang dilakukan oleh para mahasiswa tahun 1965-1966 untuk menuntut turunkan harga serta berbagai tuntutan lainnya. Mereka melakukan berbagai aksi demonstrasi ke lembaga pemerintahan serta lembaga legislatif (DPR /MPR). Pelaku demonstrasi yang menghendaki agar pemerintah segera mengatasi krisis ekonomi berasal dari berbagai kalangan seperti mahasiswa, buruh, dan organisasi kemasyarakatan. Demonstrasi tersebut selalu dihadapi dengan tindakan yang represif oleh aparat keamanan sehingga menimbulkan korban jiwa.

Sejak krisis melanda Indonesia pada tahun 1997 dan jatuhnya Presiden Suharto 1998 terjadi ratusan demonstrasi mahasiswa di berbagai kota di Indonesia. Pada mulanya mereka menuntut agar pemerintah segera dapat mengatasi krisis ekonomi, kemudian berkembang menjadi demonstrasi menuntut dilaksanakannya reformasi di segala bidang sampai menuntut dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR dan meminta pertanggungjawaban presiden. Aksi mahasiswa menuntut presiden Suharto mundur terjadi setelah terjadi penembakan oleh aparat keamanan terhadap sejumlah mahasiswa dan meninggalnya empat orang mahasiswa Trisakti, Jakarta, pada tanggal 12 Mei 1998. Penembakan yang kemudian dikenal dengan Peristiwa Semanggi (Tragedi Trisakti) tersebut telah merenggut empat orang pahlawan reformasi Elang Mulya Lesmana (mahasiswa Arsitektur angkatan 1996), Herry Hartanto (mahasiswa Teknik Industri Jurusan Mesin angkatan 1995), Hendriawan Lesmana (mahasiswa Fakultas Ekonomi angkatan 1996), dan Hafidhin Royan (mahasiswa Teknik Sipil angkatan 1995).

Sejak peristiwa penembakan itu, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dari seluruh Indonesia berdemonstrasi di berbagai kampus di Jakarta serta Gedung DPR MPR Jakarta. Puncak dari demonstrasi mahasiswa tersebut terjadi pada tanggal 19-21 Mei 1998 di Depan Gedung DPR MPR sampai munculnya pernyataan Presiden Suharto mundur dari jabatannya dan digantikan oleh BJ Habibie.

Ternyata Orde Baru yang naik karena demonstrasi mahasiswa harus turun pula karena demonstrasi mahasiswa. Masa-masa suram kondisi ekonomi dan politik era Orde Lama ternyata terulang kembali pada akhir masa Orde Baru. Keadaan ekonomi Orde Baru pada Pelita IV secara umum mulai menunjukkan prestasi yang luar biasa dan sempat dipuji oleh Bank Dunia sebagai salah satu negara termaju lapis dua di Asia setelah Jepang, Korea Selatan, Hongkong, dan Taiwan. Hal tersebut ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang rata-rata per tahun mencapai 7%-8%, tingkat inflasi yang selalu di bawah 10% per tahun, *booming* perbankan sejak adanya Paket Oktober 1987 (Pakto 87), Penanam

Modal Asing (PMA) maupun Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) bernilai triliunan rupiah yang mendorong tumbuhnya berbagai industri industri besar yang dimiliki konglomerat.

Akan tetapi pembangunan ekonomi masa Orde Baru tersebut ambruk hanya kurang dari satu tahun. Tanda-tanda keambrokan ekonomi yang juga menjadi penyebab keambrokan Orde Baru tersebut adalah:

1. Sejak Juli 1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS merosot drastis dan hanya tinggal bernilai 30%. Pada bulan Juli 1997 nilai tukar rupiah masih Rp. 2.678,- menjadi Rp. 11.000 pada akhir bulan Januari 1998. Berarti dalam waktu singkat nilai rupiah telah jatuh pada angka yang sangat rendah.
2. Sebagai akibat dari menurunnya nilai rupiah maka harga-harga mulai melambung tinggi dan daya beli masyarakat menurun. Sebagian besar warga dari golongan bawah tidak mampu membeli bahan pokok kebutuhan sehari-hari karena harga yang membumbung tinggi.
3. Utang luar negeri mencapai 163 miliar dollar AS lebih. Hal ini terjadi karena sebagian besar hutang Indonesia menggunakan mata uang dolar AS sehingga ketika mata uang tersebut meningkat maka jumlah hutang Indonesiapun membumbung tinggi dalam waktu singkat. Peningkatan tersebut juga terjadi karena sejak krisis Indonesia meminta tambahan hutang luar negerinya pada lembaga donor.
4. Pendapatan perkapita hanya tinggal US \$400. Indonesia yang oleh Bank Dunia dipuji-puji sebagai negara lapis kedua yang memiliki keajaiban karena pertumbuhan ekonominya sangat pesat ternyata telah jatuh sebagai negara miskin. Jumlah orang miskinpun meningkat menjadi lebih dari 50 juta orang karena krisis ini.
5. Perusahaan banyak yang bangkrut terutama perusahaan yang mengandalkan sumber keuangan dari luar negeri serta pabrik-pabrik yang sebagian besarnya bahan bakunya diimpor dengan menggunakan mata uang asing.
6. Pengangguran dan kemiskinan penduduk meningkat tajam. Hal ini terjadi karena banyak perusahaan yang melakukan rasionalisasi tenaga kerja dengan cara pemutusan hubungan kerja (PHK), sementara lapangan kerja yang baru tidak tersedia.
7. Ratusan triliunan rupiah dana perbankan menjadi kredit macet. Hal ini disebabkan bank-bank menggunakan uang yang dimilikinya dipakai oleh perusahaan sendiri. Ketika, perusahaan-perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan maka mereka tidak dapat mengembalikan uangnya.

Untuk menyetatkan perbankan, pemerintah melakukan likuidasi sejumlah bank yang bermasalah. Akibatnya, rubuah pegawai "dirumahkan", istilah lain untuk PHK.sekitar empat puluh lebih bank bermasalah dilikuidasi pemerintah;

8. Sejak krisis melanda Indonesia tahun 1997 maka pertumbuhan ekonomi menjadi minus sekitar 20%-30%. Fundamen ekonomi Indonesia yang sempat dipuji oleh kreditor asing ternyata dalam waktu sangat singkat mengalami penurunan yang besar.
9. Krisis ekonomi Indonesia ternyata diperburuk oleh praktek politik dalam kehidupan negara sejak Orde baru lahir. Praktek tersebut adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh para penguasa dan pengusaha.

Kondisi krisis ekonomi yang demikian buruk telah memaksa pemerintah Soeharto tunduk di bawah *International Monetary Fund* (IMF). IMF mengucurkan bantuan sebesar US\$ 40 milyar lebih kepada Indonesia dengan disertai syarat-syarat tertentu. Kondisi krisis ekonomi dan krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah ini pula yang telah mendorong ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi.

## **2. Runtuhnya Orde Baru dan Tampilnya Pemerintahan Reformasi.**

Tuntutan reformasi akhirnya menyulut kerusuhan besar di Jakarta pada 14 Mei 1998 dan kemudian merembet ke kota-kota besar lainnya, seperti Solo, Surabaya, Medan, dan Padang. Ratusan bangunan dan kendaraan dihancurkan dan dibakar massa. Ratusan nyawa melayang. Belum lagi luka traumatik yang diderita oleh sebagian warga Tionghoa yang menjadi sasaran amuk kerusuhan. Kondisi pada waktu itu menjadi tidak menentu. Sementara itu, mahasiswa bersama-sama rakyat yang berdemonstrasi di jalan-jalan semakin gencar menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Bahkan gedung DPR/MPR pun diduduki oleh ribuan mahasiswa.

Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri dan segera digantikan oleh B.J. Habibie yang tadinya menjabat sebagai wakil presiden. Namun, naiknya B.J. Habibie ke kursi presiden RI-3 itu tidak secara bulat dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat. Bahkan, kekuatan proreformasi menjadi terbelah di antara pendukung dan penentang B.J. Habibie.

Dalam kurun waktu setahun pemerintahan B.J. Habibie telah mengadakan sejumlah langkah pembaruan politik maupun ekonomi. Upaya-upaya pembaruan tersebut, antara lain menyangkut beberapa hal penting, yaitu kebebasan pers, pelepasan narapidana politik, kebebasan mendirikan partai politik, penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR November 1998, dan Pemilu 7

Juni 1999, program rekapitulasi perbankan, pemisahan Kepolisian dan TNI, dan memberikan otonomi yang luas bagi Provinsi Timor Timur.

Dalam kaitannya dengan Sidang Istimewa (SI) MPR yang dilaksanakan lima bulan setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri, telah dihasilkan tidak kurang 12 ketetapan baru MPR.

- a. Tap VII 1998 Perubahan dan Tambahan atas Tap I/MPR/1983 tentang perubahan tata tertib MPR.
- b. Tap VIII 1998 Pencabutan Tap IV/MPR/1983 tentang referendum.
- c. Tap IX 1998 Pencabutan Tap II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
- d. Tap X 1998 Pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara.
- e. Tap XI 1998 Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- f. Tap XII 1998 Pencabutan Tap V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepala Presiden/Mandataris MPR dalam rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengalaman Pancasila.
- g. Tap XIII 1998 Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- h. Tap XIV 1998 Perubahan dan Tambahan atas Tap III/MPR/1998 tentang Pemilu.
- i. Tap XV 1998 Penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- j. Tap XVI 1998 Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.
- k. Tap XVII 1998 Hak asasi Manusia.
- l. Tap XVIII 1998 Pencabutan Tap II/MPR/1978, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Panca Karsa) dan penetapan tentang Pancasila sebagai dasar negara.

Akan tetapi, selain langkah-langkah reformasi yang memberikan harapan, pemerintah B.J. Habibie juga diwarnai sejumlah persoalan yang menyangkut hak asasi manusia dan supremasi hukum, seperti Peristiwa Semanggi, kasus kerusuhan di Ambon, kasus kerusuhan Sambas, kasus Aceh, kasus penculikan para aktivis politik, pemeriksaan mantan Presiden Soeharto dan kroninya, kasus Baligate, serta kaburnya bankir-bankir pemilik hutang ke luar negeri yang meninggalkan hutang puluhan triliun rupiah.

Sejak krisis moneter yang meluas menjadi krisis ekonomi dan disertai dengan krisis legitimasi yang pada akhirnya mengakibatkan Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden dan menyerahkannya pada B.J. Habibie, memang sudah sangat terasa pergeseran-pergeseran politik yang berlangsung di Indonesia. Sidang Istimewa MPR pun terpaksa dilaksanakan pada 10-14 November 1998 untuk melegakan jalan menuju reformasi politik. Kemudian diselenggarakan pemilihan umum anggota DPR pada 7 Juni 1999 yang diikuti 48 partai. Pemilu ini menghasilkan beberapa partai besar, seperti PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PPP, PAN, PK, dan PBB. Namun, tetap belum bisa mengakhiri peran TNI/Polri dalam politik formal legislatif, karena fraksi TNI/Polri sudah memperoleh jatah 38 kursi DPR.

Dari hasil pemilu anggota DPR itu disusunlah kenggotaan MPR yang berjumlah 700 orang dengan komposisi 500 anggota berasal dari DPR dan 200 anggota lagi berasal dari seleksi Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Penyusunan anggota MPR ini menghasilkan 11 fraksi. Amien Rais terpilih sebagai ketua MPR, sedangkan Akbar Tanjung terpilih sebagai ketua DPR. SU MPR kemudian mengambil keputusan melalui pemungutan suara pada 19 Oktober 1999, terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie yang telah disampaikan pada 16 Oktober 1999. Hasilnya, 355 suara menolak, 322 suara menerima, 9 suara abstain, dan 4 suara tidak sah. Salah satu faktor penting yang mengakibatkan ditolaknya pidato pertanggungjawaban tersebut adalah indikator yang digunakan dalam pidato tersebut dinilai kalangan pengamat ekonomi, tidak akurat, dan cenderung manipulatif.

Akhir dari SU itu adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. MPR menyeleksi tiga kandidat presiden, yaitu Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri dan Yusril Ihza Mahendra. Namun, sebelum pemungutan suara dilakukan, Yusril menyatakan mundur dari pencalonan. Hasilnya, Gus Dur keluar sebagai pemenang dengan meraih 373 suara dan Megawati merebut 313 suara. Lima suara lainnya abstain. Dengan demikian, Presiden RI ke-4 untuk masa bakti 1999-2004 adalah KH Abdurrahman Wahid. Adapun Megawati Soekarno Putri terpilih sebagai Wakil Presiden RI setelah sebelumnya mengumpulkan 396 suara dalam pemungutan suara mengalahkan Hamzah Haz yang hanya memperoleh 284 suara. Dua calon wakil presiden lainnya, yaitu Jenderal Wiranto dan Akbar Tanjung mengundurkan diri. Pelantikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia

dilaksanakan pada 20 Oktober 1999, sedangkan pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia dilaksanakan pada 21 Oktober 1999.

- a. Tap I 1999 Perubahan kelima atas ketetapan MPR RI No. I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI.
- b. Tap II 1999 Peraturan Tata Tertib MPR RI.
- c. Tap III 1999 Pertanggungjawaban Presiden RI Prof Dr Ing Baharudin Jusuf Habibie.
- d. Tap IV 1999 GBHN 1999-2004.
- e. Tap V 1999 Penentuan Pendapatan di Timor Timur.
- f. Tap VI 1999 Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI.
- g. Tap VII 1999 Pengangkatan Presiden RI.
- h. Tap VIII 1999 Pengangkatan Wakil Presiden RI.
- i. Tap IX 1999 Penugasan Badan Pekerja Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Melanjutkan Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (amandemen).

Selain telah berhasil mengangkat presiden dan wakil presiden yang baru, SU MPR yang berlangsung dari 1-21 Oktober 1999, juga telah berhasil menetapkan 9 ketetapan MPR dan mengamandemen UUD 1945 untuk pertama kalinya.

1. Pasal 5 ayat (1), "Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR."
2. Pasal 6 ayat (1), "Presiden ialah warga negara Indonesia asli."
3. Pasal 7, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu masa jabatan."
4. Pasal 9. Isi pasal lama berubah menjadi ayat (1), sedangkan ayat (2) berbunyi "Jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan Sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan MA."
5. Pasal 13 ayat (1), "Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR."
6. Pasal 13 ayat (2), "Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR."
7. Pasal 14 ayat (1), "Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan DPR."

8. Pasal 14 ayat (1), "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
9. Pasal 15, "Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU."
10. Pasal 17 ayat (2), "Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden." Kata "diperhentikan" diganti menjadi kata "diberhentikan."
11. Pasal 17 ayat (3), "Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan." Pasal 17 ayat (4), "Presiden membentuk departemen dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
12. Pasal 20 ayat (1), "DPR memegang kekuasaan membentuk UU."
13. Pasal 20 ayat (2), "Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Pasal 20 ayat (3), "Jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Pasal 20 ayat (4), "Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU.

10. Pasal 21, "Anggota DPR berhak mengajukan usul RUU."

Dalam masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri dihadapkan pada berbagai persoalan bangsa akibat krisis yang diwariskan, baik oleh pemerintahan Soeharto maupun Habibie. Oleh karena itu, segera setelah pelantikannya, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk kabinet yang kemudian diberi nama Kabinet Persatuan Nasional. Komposisi kabinet ini merupakan gabungan dari para tokoh profesional dan para tokoh partai pendukung pemerintahan koalisi.

Pembentukan kabinet baru tersebut disambut secara positif oleh masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika hingga mencapai Rp7.000 setelah diumumkannya komposisi kabinet tersebut. Rakyat berharap pemerintahan yang baru ini bisa menanggulangi krisis ekonomi yang telah berlangsung selama dua tahun (1997-1999).

Pada masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid telah berjasa dalam menumbuhkan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat dan kalangan pers. Namun, pemerintahannya secara umum belum bisa membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Hal ini terlihat dari masih terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dollar, meningkatnya angka pengangguran, membengkaknya jumlah utang luar negeri, dan bertambahnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Demikian pula dengan masalah disintegrasi bangsa di Aceh, Maluku, dan Papua, serta masalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), belum juga terselesaikan.

Masa pemerintahannya juga diwarnai pertentangan dengan lembaga legislatif, antara lain karena masalah Bruneigate dan Bulaggate I sehingga DPR mengeluarkan Memorandum I dan Memorandum II kepada Presiden. Inti kedua memorandum tersebut ialah peringatan agar Presiden mengubah kinerja pemerintahannya dan kembali terfokus pada program kerja pemerintahannya sesuai amanat GBHN. Puncak pertentangan tersebut ialah pengagendaan Sidang Istimewa (SI) MPR pada 1 hingga 7 Agustus 2001 yang akan meminta pertanggungjawaban Presiden atas kinerja pemerintahannya.

Rencana SI MPR tersebut mengundang tanggapan yang pro dan kontra di masyarakat. Kalangan yang pro menganggap SI MPR perlu diadakan sebagai sarana pertanggungjawaban Presiden terhadap kinerja pemerintahannya selama ini. Adapun kalangan yang kontra menganggap SI MPR ilegal dan tidak konstitusional.

Sementara itu, pada 7 Juli 2001, Presiden Abdurrahman Wahid menyelenggarakan pertemuan antarpimpinan partai politik sebagai salah satu upaya mewujudkan kompromi politik untuk menyelesaikan masalah dengan legislatif. Namun, pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan tidak dihadiri oleh pimpinan partai politik besar lainnya, seperti PDI Perjuangan, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Bulan Bintang.

Pada saat yang genting tersebut, pada 20 Juli 2001 pukul 17.45, Presiden Abdurrahman Wahid mengangkat Komisaris Jenderal (Pol) Chaerudin Ismail sebagai Pemangku Sementara Jabatan Kepala Kepolisian RI menggantikan Jenderal Bimantoro yang sebelumnya telah dinonaktifkan. Selanjutnya, Presiden mengadakan konferensi pers pada pukul 18.00. Ia menyatakan bahwa apabila sampai 31 Juli 2001 tidak ada penyelesaian masalah melalui kompromi politik, ia akan menetapkan negara dalam keadaan darurat konstitusi. Kompromi politik yang dimaksud ialah MPR sepakat tidak akan mengeluarkan Rancangan Ketetapan (Rantap) MPR tentang pertanggungjawaban Presiden dalam SI MPR.

Tindakan ini mengundang reaksi dari MPR yang menganggap pengangkatan tersebut telah melanggar haluan negara dan membahayakan keselamatan negara. Presiden dinilai telah menciptakan dualisme kepemimpinan di tubuh Polri. Malam itu juga, pukul 21.10, MPR mengadakan rapat pimpinan. Rapat tersebut memutuskan untuk mempercepat SI MPR menjadi 21 Juli 2001 pukul 10.00 dan mengundang presiden untuk memberikan pertanggungjawabannya pada 23 Juli 2001.

Menanggapi tindakan tersebut, Presiden Abdurrahman Wahid menjawab dengan menegaskan bahwa ia tidak akan datang dalam SI MPR yang dipercepat karena sidang itu melanggar tata tertib MPR sehingga tidak sah dan ilegal. Presiden juga menegaskan dirinya tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya karena ia harus mempertaruhkan UUD 1945. Meskipun demikian, Presiden tetap mengharapkan terjadinya kompromi politik secara damai.

Sementara itu, sejumlah pimpinan partai politik terbesar datang ke kediaman Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri pada 22 Juli 2001.



Pertemuan tersebut merupakan upaya memberikan dorongan moril kepada Megawati Soekarnoputri untuk maju ke tampuk kepemimpinan nasional.

Perkembangan tersebut mendorong Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan dekrit pada 23 Juli 2001 pukul 1.10 malam. Isi dekrit tersebut ialah sebagai berikut.

## **MAKLUMAT PRESIDEN RI**

Setelah melihat dan memperhatikan dengan saksama perkembangan politik yang menuju pada kebuntuan politik akibat krisis konstitusional yang berlarut-larut yang telah memperparah krisis ekonomi dan menghalangi usaha penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi yang disebabkan oleh pertikaian kepentingan politik kekuasaan yang tidak mengindahkan lagi kaidah-kaidah perundang-undangan.

Apabila tidak dicegah, akan segera menghancurkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan keyakinan dan tanggung jawab untuk menyelamatkan negara dan bangsa serta berdasarkan kehendak sebagian terbesar masyarakat Indonesia, kami selaku Kepala Negara Republik Indonesia, terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa dengan memaklumkan:

1. Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu satu tahun.
3. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru, dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.

Untuk itu, kami memerintahkan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mengamankan langkah-langkah penyelamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang serta menjalankan kehidupan sosial ekonomi seperti biasa.

Semoga Tuhan Yang Mahakuasa meridoi negara dan bangsa Indonesia.

Jakarta, 22 Juli 2001

Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi  
Angkatan Perang  
KH Abdurrahman Wahid

Pada 23 Juli 2001, pukul 8.00, SI MPR memutuskan bahwa dekrit yang dikeluarkan Presiden telah melanggar haluan negara. Hal ini diperkuat oleh fatwa dari Mahkamah Agung (MA) yang dibacakan langsung pada sidang tersebut.

Meskipun melalui persidangan yang rumit akibat berbagai interupsi tentang teknik perumusan masalah, delapan dari sepuluh fraksi MPR (fraksi PKB dan PDKB tidak menghadiri SI) yang beranggotakan 599 orang akhirnya setuju dengan pemberhentian KH Abdurrahman Wahid dari kursi Presiden dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden. Pengangkatan Megawati Soekarnoputri tersebut didasarkan pada Tap MPR No III/MPR/2001. Masa jabatannya terhitung dari mulai diucapkannya sumpah jabatan sampai dengan habis sisa masa jabatannya pada 2004. Adapun Hamzah Haz terpilih sebagai wakil presiden setelah memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara yang dilakukan dengan sistem voting secara tertutup pada 26 Juli 2001. Hamzah Haz memperoleh 340 suara, sedangkan Akbar Tanjung memperoleh 237 suara dari 610 suara anggota MPR yang hadir.

Pada 9 Agustus 2001, Presiden Megawati Soekarnoputri akhirnya mengumumkan komposisi kabinetnya yang diberi nama Kabinet Gotong Royong. Seperti kabinet sebelumnya, komposisi kabinet ini merupakan gabungan dari para tokoh profesional dan para tokoh partai pendukung pemerintahan koalisi. Hamzah Haz sangat berat karena harus menghadapi berbagai persoalan bangsa yang semakin kompleks.

## **F. Menguji Wawasan kebangsaan di Era Reformasi.**

### **1. Perkembangan Politik setelah 21 Mei 1998.**

Di era reformasi setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah selain masalah menurunnya kehidupan sosial ekonomi, pergantian pemerintahan dalam waktu singkat, juga ujian terhadap masalah kebangsaan. Ketika pada era Orde Baru kesatuan dan persatuan atau integrasi bangsa nampak sangat kuat maka di era baru tersebut bangsa Indonesia dihadapkan pada ujian berat yaitu mempertahankan wawasan kebangsaan sebagai wawasan untuk memperkuat integrasi bangsa,

Jatuhnya Presiden Suharto pada tanggal 21 Mei 1992 sebagai tanda jatuhnya Pemerintahan Orde Baru menandai era baru dalam kehidupan politik di Indonesia. Setelah 32 tahun berkuasa, Presiden Suharto harus rela menyerahkan tahtanya kepada wakilnya, BJ Habibie. Kehidupan politik pertama yang paling menonjol pada pemerintahan BJ Habibie adalah diselenggarakannya Pemilihan Umum (pemilu) pada tanggal 7 Juni 1999. Untuk pertama kalinya, bangsa Indonesia mampu menyelenggarakan pemilu secara demokratis setelah tahun 1955. Pemilu tersebut diikuti oleh 44 partai politik

(parpol) yang memenuhi syarat untuk ikut serta dari sekitar 1421 parpol yang mendaftar. Pemilu tersebut dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), pimpinan Megawati Sukarnoputri, anak sulung mantan Presiden Sukarno, dengan jumlah suara 33, 73 persen suara atau memperoleh 153 kursi di parlemen; diikuti dengan Golongan Karya (Golkar dengan 22,43 persen suara atau 120 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 12,60 persen suara atau 51 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 10,70 persen suara atau 58 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 7,11 persen suara atau 34 kursi dan partai-partai baru lainnya. Dengan demikian, untuk pertama kalinya sejak pemilu pertama orde baru tahun 1971, Golkar mengalami kekalahan.

Banyaknya partai pada masa Reformasi ternyata tidak diikuti dengan terjadinya ketentraman dalam kehidupan politik bangsa. Konflik terjadi, bukan hanya antar partai melainkan juga dalam tubuh partai itu sendiri. Golkar, PPP dan PDIP pun tidak luput dari konflik dalam tubuhnya sendiri. Demikian juga partai baru yang mengklaim diri sebagai partai reformis mengalami hal yang sama seperti terjadi dalam tubuh PKB, PAN, PDIP dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh konflik dalam kehidupan politik parpol di Indonesia:

1. Dalam tubuh Partai Golkar terjadi konflik setelah terpilihnya Akbar Tanjung sebagai ketua umum pada masa Presiden BJ Habibie. Sebagian fungsionaris Golkar merasa tidak setuju dengan pengangkatan Tanjung. Konflik diikuti dengan pembentukan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) dengan mengangkat Edy Sudrajat, purnawirawan ABRI, sebagai ketuanya. Terpilihnya Akbar Tanjung juga diikuti dengan ketidakpuasan pendukung Golkar dari kawasan Indonesia Timur. Ketidakpuasan yang mengatasnamakan warga Golkar dari Iramasuka (Irian Jaya, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan) dan digerakkan oleh A.A Baramuli tersebut menentang kepemimpinan Akbar Tanjung. Beberapa fungsionaris Golkar pada tanggal 18 Agustus 1999 menghendaki agar AA Baramuli diadili. Setelah partai ini berjasa dalam mengangkat Abdurahman Wahid dan Megawati Sukarnoputri sebagai presiden konflik internal terus terjadi dalam partai ini. Misalnya antara ketua umum Golkar yang menuding beberapa fungsionaris partai akan membentuk Partai Madani yang dipimpin oleh Marwah Daud Ibrahim yang dibahtah oleh Marwah sendiri.
2. PDIP sebagai pecahan dari PDI pada masa Orde Baru pimpinan Suryadi juga tidak lepas dari konflik internal. Kelahiran PDIP sendiri diawali dengan konflik antar kubu Suryadi dan Kubu Megawati. Dalam Kongres di Medan tanggal 24 Agustus 1998, PDI Megawati mengacaukan acara kongres tersebut. Menjelang pemilu 1999 Kubu Megawati membentuk partai sendiri dan akhirnya memenangkan pemilu. Menjelang Kongres di Semarang (Maret 2000) konflik internal tetap terjadi antara kelompok yang menghendaki Megawati tetap sebagai ketua umum dengan kelompok yang dipimpin oleh Eros Djarot dan Dimiyati Hartono. Dimiyati Hartono akhirnya mendirikan

- partai baru bernama Partai Indonesia Tanah Air Kita (PITA) setelah mengundurkan diri dari PDIP pada tanggal 7 Maret 2002.
3. Konflik dalam tubuh PPP ditandai dengan keluarganya banyak kader dan mendirikan partai baru dan mengklaim diri sebagai partai reformis. Salah seorang di antara kader tersebut adalah KH Zainuddin MZ yang mendirikan PPP Reformasi pada bulan Januari 2002.
  4. Dalam tubuh PKB, konflik internal terjadi menjelang dilengserkannya (diturunkannya) Presiden Abdurahmad Wahid oleh MPR. Dua kubu tampil ke muka, yaitu kubu Matori Abdul Djilil dan kubu Alwi Shihab. Dalam Sidang MPR mengenai penurunan Presiden Wahid, kubu Matori hadir, walaupun PKB menyatakan akan memboikot sidang tersebut. Akhirnya Matori diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua umum Dewan Tanfidzi di PKB pada tanggal 27 Januari 2001. Tentu saja pemecatan tersebut tidak diterima oleh kubu Matori dan akhirnya mereka mengadakan Mukernas yang dihadiri 25 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) pada tanggal 12 November 2001 dan memilih Matori sebagai Ketua Umum PKB. Sampai April 2002 terdapat dua kubu PKB dengan lambar yang sama tetapi pengurus yang berbeda.
  5. Dalam tubuh Partai Bulan Bintang (PBB) konflik terjadi di antara para fungsionaris. Misalnya Yusril Ihza Mahendra sebagai ketua umum mendapat tantangan dari beberapa anggota partai seperti Hartono Mardjono dkk yang tidak puas dengan laporan pertanggungjawabannya. Konflik semakin meruncing setelah kubu Hartono mengadakan muktamar dan mengangkat Hartono sebagai ketua umum PBB. Konflik yang berujung pada pengadilan tersebut akhirnya dimenangkan oleh kubu Yusril.

Kehidupan parpol yang semakin marak tersebut ditandai pula dengan masuknya para pensiunan militer ke dalam tubuh parpol. Fenomena tersebut sebenarnya sudah dimulai pada masa Orde Baru. Pada bulan Mei 1991, misalnya sejumlah 40 orang purnawirawan ABRI masuk menjadi anggota PDI pimpinan Suryadi. Pada masa Reformasi, jumlah pensiunan ABRI yang masuk parpol semakin banyak. Pada tahun 1988, misalnya sejumlah 160 orang purnawirawan masuk ke dalam PDIP. Sebagian lainnya mendirikan partai baru seperti yang dilakukan oleh Edy Sudrajat, mantan Panglima ABRI. Fenomena seperti ini dilihat oleh pengamat Indoensia, Prof. William Liddle, dari Ohio State University, merupakan salah satu kelemahan politisi sipil Indonesia dalam menegakkan supremasi sipil. Fenomena seperti ini bisa memberi peluang kepada militer untuk tampil sebagai *power behind the throne*, atau kekuatan di belakang singgasana, yang merupakan ancaman bagi tegaknya demokrasi.

Harapan rakyat terhadap wakil-wakilnya yang telah mereka pilih dalam pemilu tahun 1999 dan sudah duduk sebagai anggota DPR agar mereka membawa aspirasi masyarakat ternyata masih merupakan impian yang panjang. Harapan rakyat agar anggota DPR lebih banyak berperan dan berpihak pada mereka ternyata tidak terwujud. DPR hasil pemilu 1999 ini

memang dianggap lebih baik dibandingkan dengan anggota DPR pada masa Orde Baru. Pada masa reformasi ini sejumlah undang-undang yang sifatnya reformis telah dikeluarkan. Namun demikian, prestasi mereka tidak seperti yang diharapkan rakyat. Bahkan menurut beberapa poling, citra anggota DPR mengalami penurunan yang sangat tajam selama tahun 2000-2002. Rakyat tidak puas dengan para anggota legislatif ini dalam membuat undang-undang dan dalam mengontrol kinerja pemerintah. Rakyat juga curiga dengan sikap para anggota badan legislatif ini yang menerima uang dari para eksekutif seperti yang terjadi pada anggota DPRD Jabar yang menerima "uang kadeudeuh" atau uang belas kasihan dari pejabat setempat dengan menggunakan anggaran pembangunan daerah.

Para anggota legislatif masih sering diterpa isu KKN seperti yang terjadi pada Ketua Umumnya, Akbar Tanjung, yang oleh Pengadilan Tinggi Jakarta bulan Januari 2003 difonis hukuman penjara selama tiga tahun karena kasus penyalahgunaan dana *nonbujeter* Bulog. Sebagian anggota lainnya dianggap tidak memiliki *sense of crises* karena masih menampilkan gaya hidup mewah seperti terlihat dari berjejernya mobil-mobil mewah mereka di halaman parkir Gedung DPR dan MPR, Jakarta. (tampilkan gambar mobil-mobil mewah milik anggota DPR yang diiparkir di gedung tsb).

Lembaga legislatif (DPR) hasil pemilu 1999 ini banyak mengalami konflik dengan eksekutif. Misalnya pada zaman Presiden AW, DPR memprotes keputusan presiden yang memberhentikan Kapolri Jenderal Roesdihardjo dari jabatannya. Alasan pemecatan berupa ketidakmampuan Kapolri dalam menjalankan tugas diprotes oleh DRR (24 September 2000). DPR beranggapan bahwa pemberhentian tersebut tidak tepat karena tidak dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR. Akhirnya Presiden AH tetap pada keputusannya dengan mengangkat Jenderal Surojo Bimantoro sebagai pelaksana harian Polri.

Kehidupan politik yang menonjol di Era Reformasi ini ditandai pula dengan penegakkan hukum yang tidak berjalan, baik pada masa pemerintahan BJ Habibie, AW maupun MS. Pada pemerintahan ketiga presiden tersebut KKN tetap berjalan, bahkan beberapa pengamat politik mengatakan bahwa tingkat korupsi di Era Reformasi jauh lebih tinggi dibandingkan era sebelumnya. Ketiga presiden tersebut dianggap tidak mampu menyeret para penguasa yang menyalahgunakan wewenangnya (KKN) serta para pengusaha besar (konglomerat) yang menerima kucuran dana dari pemerintah dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indoensia) yang jumlahnya trilyunan rupiah yang dikucurkan oleh Presiden Suharto kepada para bankir tetap merupakan masalah yang terkatung-katung. Di era reformasi ini banyak bankir yang menyalahgunakan bantuan BLBI tetap bebas dari jeratan hukum.

Berbagai ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah di Era Reformasi terlihat dari maraknya demonstrasi yang dilakukan berbagai kalangan mahasiswa, buruh dan organisasi profesi. Dalam pelaksanaan

demonstrasi di hampir semua kota di Indonesia, para demonstran yang mengaku diri reformis dan demokrat tersebut mendapat dukungan dari masyarakat. Akan tetapi setelah beberapa demonstrasi tersebut didanai oleh kelompok tertentu dan para pengikutnya adalah orang-orang bayaran maka simpati masyarakat mulai berubah. Mereka mulai bosan dengan berbagai aksi demo yang dalam pelaksanaannya sering kali mengganggu aktifitas kelompok masyarakat lainnya. Misalnya, banyak para pedagang di pasar yang tidak bisa berjualan akibat jalanan macet yang disebabkan aksi demo. Banyak pula pengguna angkutan kota yang marah karena sopir angkot melakukan mogok kerja. Sebagian masyarakat yang mulai bosan dengan aksi-aksi demo tersebut mulai bernostalgia dengan suasana “damai” pada masa Orde Baru.

Kehidupan politik pada masa reformasi ditandai dengan **aksi-aksi demo** yang terjadi hampir setiap hari dengan berbagai tuntutan. Tuntutan yang mereka lakukan bervariasi dari masalah tuntutan mundurnya pejabat tertentu, penurunan harga, pemberantasan KKN, aksi keprihatinan sampai turunnya presiden yang berkuasa. Pada awal tahun 2003, setelah presiden MS berusaha menghapuskan subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik dan telepon, yang berakibat pada kenaikan ketiga komponen barang tersebut, para mahasiswa segera turun ke jalan menuntut pembatalan kenaikan tarif tersebut. Setelah pemerintah memenuhi tuntutan mereka, tuntutan segera bergeser dari penurunan harga menjadi penurunan presiden yang sedang berkuasa. Kelompok yang dijadikan sasaran demo, sering kali membalasnya dengan aksi demo tandingan. Caranya adalah dengan menyewa kelompok masyarakat yang menggurur untuk membawa spanduk atau poster sesuai dengan yang ditulis oleh kelompok pemberi dana. Keadaan seperti ini tentu saja merupakan hal yang berlawanan dengan kondisi masyarakat madani (civil society) seperti yang dicita-citakan kaum reformis pada awal reformasi tahun 1997/1998.

## **2. Gerakan Disintegrasi dan Pecahnya Ikatan Sosial Masyarakat.**

Era keterbukaan di jaman reformasi ini ditandai pula dengan **gerakan disintegrasi** oleh beberapa daerah seperti Aceh, Papua dan Timor Timur. Daerah-daerah tersebut merasa tidak puas dengan pemerintah pusat yang mengalokasikan anggaran pembangunan tidak sebesar sumbangan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Tokoh-tokoh di daerah merasa bahwa kekayaan alam mereka telah lama dieksplotasi oleh pemerintah pusat sedangkan sebagian besar rakyatnya tetap miskin. Untuk itu, mereka menuntut melepaskan diri dari pemerintah pusat, otonomi khusus, bahkan merdeka dari RI.

**Provinsi Timor Timur** sebagai daerah bekas jajahan Portugal yang oleh pemerintah Orde baru dijadikan sebagai provinsi ke 27 berhasil melepaskan diri dari RI dan membentuk negara tersendiri. Lepasnya provinsi tersebut terjadi pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie melalui jejak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999. Hasil jejak pendapat yang disponsori

oleh Unamet, sebuah badan PBB untuk Timor Timur, diperoleh 78,5 persen suara menyatakan ingin merdeka. Kelompok yang pro RI merasa kecewa dan melakukan pemberontakan sehingga menimbulkan kerusakan. Setelah itu, Timtim berada dibawah pengawasan pasukan multinasional PBB (Interfet) serta penguasaan PBB sampai terpilihnya Xanana Gusmao, tokoh pretilin yang pernah ditawan RI di Jakarta, terpilih sebagai presiden. Tanggal 20 Mei 2002 dinyatakan sebagai hari Kemerdekaan Timor Lorosae.

Berbeda dengan sikap terhadap Timor Timur, sikap pemerintah di era reformasi terhadap Irian Jaya dan Aceh ditunjukkan dengan cara memberikan otonomi khusus pada dua daerah tersebut. Disamping itu, dunia internasional sangat mendukung RI untuk tetap memepertahankan kedua daerah yang kaya dengan sumber daya alam tersebut. Povinsi Irian Jaya diberi nama Papua serta otonomi khusus pada bulan Oktober 2001 melalui persetujuan DPR atas RUU Otonomi Khusus bagi provinsi tersebut. Dengan demikian, sebagian aspirasi warga setempat dapat direspon oleh pemerintah pusat walaupun setelah itu masih terjadi gerakan pemisahan diri serta pembunuhan terhadap Theeys H Eluay, ketua Presideum Dewan Papua pada tanggal 11 November 2001 yang dilakukan oleh beberapa oknum TNI dari Satgas Tribuana X.

**Tuntutan merdeka** bagi Aceh telah menimbulkan banyak korban baik pada pihak tentara RI, tentara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) maupun warga sipil serta rusaknya sarana dan prasarana seperti sekolah dan kantor pemerintahan yang dirusak oleh GAM. Tuntutan tersebut sebenarnya sudah lama dilakukan sejak pemerintahan Orde Baru. Presiden BJ Habibie pada tanggal 26 Maret 1999 pernah mengakui adanya operasi militer Orde Baru yang banyak memakan korban jiwa dan meminta maaf kepada seluruh warga Aceh. Perpintaan maaf tersebut segera diikuti dengan tuntutan referendum oleh GAM untuk melepaskan diri dari RI. Pasukan GAM menganggap bahwa tumbangnya Orde Baru sebagai peluang baik bagi Aceh untuk melepaskan diri dari RI melalui cara militer. Setelah bentrokan antara TNI dan GAM terjadi di berbagai wilayah dan korban warga sipil semakin banyak maka pemerintah pusat segera meresponnya dengan cara antara lain menetapkan daerah Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus dengan nama Nangroe Aceh Darussalam. Pada tanggal 9 Agustus 2001 presiden MS menandatangani UU Nomor 18 tentang otonomi daerah tersebut. Melalui diplomasi internasional akhirnya RI dan GAM mencapai kesepakatan damai pada tanggal 9 Desember 2002 Persetujuan tersebut dilakukan di Swiss atas sponsor Henry Dunant Center (HDC) .

Ketidakpuasan terhadap Pemerintah Pusat tidak hanya berasal dari tiga daerah tersebut melainkan juga dari darah lainnya terutama daerah yang selama pemerintahan Orde Baru merasa dieksploitasi. Daerah-daerah di Kalimantan, misalnya, sebagai penghasil kayu dan minyak bumi merasa tidak memperoleh imbalan yang memadai dari pemerintah pusat. Di daerah yang kaya tersebut ternyata kehidupan sosial ekonomi warganya tetap buruk.

Tuntutan yang mereka ajukan kepada pemerintah pusat adalah desentralisasi atau otonomi daerah. Dalam otonomi tersebut, daerah merasa berhak mengelola sumber daya alamnya sendiri dan digunakan untuk pembangunan daerah setempat. Semangat otonomi juga diikuti dengan semangat pemekaran daerah kabupaten. Hingga bulan September 2002 terdapat 287 kabupaten dan 88 kota baru di Indonesia. Dilihat dari segi ekonomi, pembentukan kabupaten yang terjadi pada masa krisis tersebut merupakan pemborosan sebab jumlah biaya yang diperlukan untuk itu cukup besar.

Di era keterbukaan ini, **pelanggaran hak asasi manusia (HAM)** yang dilakukan oleh militer (TNI) dapat diungkap dengan jelas serta diproses dan diputuskan dalam pengadilan militer serta pengadilan koneksitas. Oleh pengadilan, para pelanggar dijatuhi hukuman atau dipecat dari jabatannya. Beberapa pelanggaran HAM yang diproses di pengadilan militer dan pengadilan koneksitas di antaranya adalah:

1. Penculikan Aktivis yang berlangsung sejak bulan April 1997- April 1999. Walaupun para pelanggar telah dihukum masih terdapat 13 aktivis yang hilang.
2. Penembakan mahasiswa Trisakti, Semanggi I dan II di Jakarta pada tanggal 13 November 1988 dan 24 September 1999.
3. Pelanggaran HAM di Aceh (1996-1999) yang ditandai dengan kasus penganiayaan dan pembunuhan di Rumah Geudong, Pemerksaan Sumiati di Pidie, pembunuhan dan penculikan di Idi Cut, penembakan di Simpang KKA dan pembunuhan Teungku Bantaqiah. Beberapa pelanggar telah dijatuhi hukuman sedangkan kasus-kasus lainnya masih belum terungkap.
4. Pelanggaran HAM di Timor Timur seperti serangan terhadap rumah Uskup Belo dengan 25 orang tewas, serangan ke rumah Manuel Carrascalao yang menewaskan 12 orang, bentrokan di Liquica dan serangan terhadap sejumlah gereja dan memakan korban jiwa sampai tahun 2002 masih belum diputuskan di pengadilan.
5. Pembunuhan terhadap Ketua Presidium Dewan Papua Theys Hiyo Eluay tanggal 10 November 2001 masih belum diputuskan sampai Desember 2001, walaupun pelaku sudah diketahui yaitu oknum TNI.

Sementara itu pelanggaran HAM dalam kasus kerusuhan massal bulan Mei 1998 di Jakarta yang ditandai dengan pembakaran beberapa pusat perbelanjaan yang menimbulkan banyak korban jiwa dan pemerkosaan terhadap wanita keturunan Tionghoa masih belum terungkap. Penggagas dan pelaku peristiwa tersebut sampai tahun 2002 masih merupakan misteri.

Perkembangan politik di Era Reformasi juga ditandai dengan teror bom. Sejak bulan Juli 1997 sampai bulan Oktober 2002 terjadi lebih dari 60 kali ledakan bom di berbagai daerah. Ledakan-ledakan tersebut terjadi di pusat perdagangan seperti mal, gedung pemerintah, rumah ibadah, serta tempat hiburan. Ledakan tersebut telah menimbulkan kerusakan pada sasaran ledakan serta sejumlah korban jiwa. Ledakan paling besar terjadi pada tanggal 12



Oktober 2002 di daerah wisata Jalan Legian, Kuta, Bali, yang menewaskan lebih dari 180 orang korban jiwa terutama turis Australia serta lebih dari 130 orang luka-luka. Kerugian yang ditimbulkan oleh teroris tersebut tidak terhitung jumlahnya, terutama kerugian dalam aspek ketenangan dan serta rasa aman yang sangat didambakan masyarakat sejak runtuhnya Orde Baru.

Ledakan Bom yang terjadi di Bali dan beberapa daerah lainnya telah menimbulkan kerugian materi yang besar. Sektor pariwisata yang menjadi andalan pemerintah untuk mengatasi krisis ini mengalami kehancuran, serta devisa yang diperoleh dari sektor ini mengalami penurunan yang sangat tajam. Citra Bali sebagai salah satu tujuan wisata internasional paling aman telah pupus. Beberapa negara telah melarang warganya untuk tidak bepergian ke Bali dan daerah wisata lainnya di Indonesia. Citra Indonesia di mata internasional semakin buruk akibat teroris tersebut. (editor tolong tampilkan gambar ledakan a.l di Bali).

## **2. Menurunnya Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat di Berbagai Daerah.**

Era keterbukaan dan demokratisasi di era reformasi ini ternyata tidak diikuti dengan suasana tenang, aman dan tenteram dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Apabila dalam kehidupan politik terjadi konflik vertikal maka dalam kehidupan masyarakat bawah terjadi konflik horizontal. Konflik ditandai dengan pertentangan antar kelompok etnis di berbagai daerah. Kasus paling menonjol adalah bentrokan antar etnik di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Konflik tersebut sangat kompleks dan dilatarbelakangi masalah-masalah sosial ekonomi dan agama.

Konflik di Kalimantan Barat yang melibatkan kelompok etnik Melayu, Dayak dan Madura terjadi karena masalah sepela. Konflik bermula pada tanggal 19 Januari 1999 dari sebuah penyerangan yang dilakukan oleh warga desa Sarimakmur beretnik Madura terhadap desa Paritsetia, kecamatan Jawai, Sambas Kalimantan barat. Penyerangan ini disulut oleh pembunuhan atas seorang warga Sarimakmur beretnik Madura ketika sedang mencuri di Desa Paritsetia. Akibatnya empat orang tewas dan satu orang luka berat, dan lebih dari 90 persen penduduk desa yang berjumlah 3000 orang mengungsi. Konflik tersebut terus menjalar ke berbagai daerah lain di Kalimantan Barat yang ditandai dengan penyerangan dan pembunuhan diantara kelompok etnis Melayu, Dayak dan Madura. Sampai bulan April 1999 tercatat ratusan orang meninggal dunia dan sejumlah 68.934 warga Madura harus mengungsi. Konflik tersebut akhirnya dapat diselesaikan berkat peran serta pemerintah. Pada tanggal 26 April 1999 wakil masyarakat dari keempat kelompok etnik di daerah tersebut (Melayu, Dayak Tionghoa dan Madura) sepakat untuk membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Kalimantan Barat. Forum tersebut menyepakati bahwa mulai saat ini perselisihan dianggap sebagai perselisihan perorangan bukan perselisihan kelompok etnik.

Konflik antar suku Dayak dan Madura juga terjadi di Kalimantan Tengah. Konflik yang bermula dari pertikaian perorangan dari kelompok etnis yang berbeda tanggal 18 Februari 2001 tersebut menyebar luas ke seluruh Kalimantan Tengah. Ribuan rumah hancur dan korban tewas mencapai ratusan orang serta jumlah pengungsi mencapai puluhan ribu. Konflik tersebut juga menimbulkan masalah sosial di daerah Madura, Jawa timur. Sebagian pengungsi yang diangkut dari Sampit pada bulan Februari 2001 serta yang mengungsi dengan cara sendiri telah mencapai lebih dari 16.000 jiwa. Sebagian pengungsi tersebut tidak begitu saja diterima oleh masyarakat daerah asalnya karena kondisi ekonomi daerah asal mereka yang buruk.

Konflik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah dan Maluku merupakan konflik antar agama. Pemicu konflik di Maluku adalah bentrokan seorang warga Batumerah, Ambon dengan seorang sopir angkutan kota. Kejadian pada tanggal 19 Januari 1999 tersebut memicu konflik massa disertai pembakaran Masjid Al Falah. Dalam insiden ini 11 orang tewas, 23 orang luka-luka, puluhan rumah dan kios hancur serta ratusan kendaraan dirusak. Konflik segera meluas menjadi konflik antar Islam dan Kristen. Pada tanggal 9 Maret 1999 terjadi bentrokan besar yang menyebabkan sejumlah gereja dan masjid (masing-masing 18 buah) hancur, ratusan orang tewas serta ribuan rumah hancur serta kantor pemerintahan rusak. Bentrokan yang bermula pada masa pemerintahan BJ Habibie tersebut terus berlanjut hingga pemerintahan Presiden AW dan Presiden MS. Berbagai upaya damai telah dilakukan untuk mengakhiri masalah tersebut seperti yang dirumuskan dalam Perjanjian Malino, Sulawesi Selatan tanggal 11-12 Februari 2002. Akan tetapi konflik terus terjadi bahkan menjurus ke arah gerakan disintegrasi. Pada tanggal 25 April 2002 warga Maluku yang tergabung dalam Front Kedaulatan Maluku mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di beberapa tempat. Tindakan ini diikuti dengan upaya penurunan bendera tersebut oleh warga yang menolaknya. Sampai tahun 2002 konflik Maluku yang telah memakan ribuan korban jiwa masih belum dapat diatasi.

Konflik antar agama juga terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Pemicu konflik diawali dari kejadian sepele. Pada tanggal 26 Desember 1998, pada masa pemerintahan BJ Habibie, terjadi perkelahian Roy Luntu Bisalembah (Kristen) yang dalam keadaan mabuk dengan Ahmad Ridwan (Islam) di dekat Masjid Darussalam, Kecamatan Sayo, Kabupaten Poso. Perkelahian kemudian berkembang menjadi ketegangan antar warga yang berasal dari agama yang berbeda. Pada tanggal 28 Desember 1998 bentrokan meluas ke seluruh kabupaten hingga puluhan rumah musnah dibakar dan kegiatan ekonomi setempat menjadi lumpuh. Konflik terus berlanjut hingga pemerintahan Pres AW dan MS. Tanggal 23 Mei, setelah situasi sedikit reda, bentrokan kembali terjadi yang ditandai dengan munculnya kelompok yang tidak dikenal dan mengakibatkan 2000 orang mengungsi. Pada tanggal 26 November – 2 Desember, konflik terjadi dan melibatkan banyak kelompok termasuk bentrokan

dengan aparat keamanan serta munculnya kelompok yang tidak dikenal. Akibatnya, puluhan rumah hancur dan kegiatan ekonomi lumpuh.

Untuk mengatasi masalah tersebut berbagai upaya dilakukan antara lain melalui Pertemuan Malino, Sulawesi Selatan tanggal 19-20 Desember 2001. Dalam pertemuan tersebut disepakati agar pihak yang bertikai menghentikan perselisihan dan sepakat melaksanakan 10 butir kesepakatan tersebut. Setelah itu, pemerintah segera mengadakan razia senjata yang masih dimiliki oleh warga yang bertikai dan terkumpul sejumlah 25.454 pucuk senjata rakitan yang kemudian dimusnahkan.

Konflik antar kelompok etnis dan agama di masa krisis ini telah menambah penderitaan warga. Krisis ekonomi telah diperburuk dengan krisis hubungan sosial antara kelompok masyarakat. Sejak konflik terjadi tahun 1997 tercatat sejumlah **1.247.449 pengungsi** orang Indonesia di negerinya sendiri. Kamp-kamp pengungsi tersebar di berbagai daerah dan memperlihatkan bahwa penderitaan warga bertambah parah akibat kejadian tersebut. Dari dua puluh daerah tempat pengungsian, Provinsi Maluku merupakan daerah paling banyak menampung pengungsi dari daerahnya sendiri. Tercatat 300.000 orang pengungsi di Maluku dan 125.5000 orang pengungsi di Maluku Utara. Di tempat tersebut, mereka mengalami penderitaan yang berat karena serba kekurangan fasilitas sanitasi, bahan makanan serta sarana tempat tinggal. Buruknya lingkungan menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti demam, tifus, penyakit kulit, diare dan kekurangan gizi. Sedangkan anak-anak usia sekolah tidak mendapat kesempatan mendapat pendidikan formal. Sulit dibayangkan bagaimana nasib masa depan anak-anak pengungsi tersebut ketika masa kecilnya tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya mereka dapatkan. Pemerintahan di era reformasi yang sedang krisis ini nampaknya tidak memiliki cukup dana untuk mengatasi sejuta lebih pengungsi warganya.

Kekerasan warga sipil terhadap sesamanya merupakan salah satu ciri kehidupan masyarakat di era krisis ini. Apabila pada pemerintahan Orde baru kekerasan dilakukan oleh Negara yang direpresentasikan oleh tentara maka pada era reformasi, kekerasan dilakukan oleh sesama warga sipil. Penganiayaan terhadap seorang pencurian kecil sering berakhir dengan kematian dengan cara dibantai atau dibakar oleh massa. Sejak tahun 1997-2002 terjadi sejumlah lebih dari 160 kejadian pembakaran terhadap pencuri/perampok tertangkap oleh massa. Masa seperti sudah tidak percaya lagi dengan aparat keamanan untuk menangkap dan menghukum pelaku.

Kemiskinan dan kesengsaraan warga di era krisis telah mendorong mereka melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejak krisis tahun 1997 terjadi 14 kali penjarahan perkebunan oleh warga, terutama di Jawa Timur. Mereka menjarah perkebunan kayu jati, kakau yang siap panen, kopi, dan kelapa sawit. Warga juga melakukan pendudukan lahan perkebunan yang dianggap merupakan hasil jarahan para pengusaha di era Orde baru. Tercatat 22 kali pendudukan lahan perkebunan di berbagai daerah. Misalnya

yang terjadi bulan Mei 1998 di Cengkareng Jakarta Barat, sekitar 500 warga menduduki lahan yang dikira milik mantan Presiden Suharto. Bulan Juli 1998 terjadi pendudukan lahan peternakan di Tapos, Bogor Jawa Barat yang dimiliki mantan presiden Suharto. Demikian juga pendudukan lahan di Lampung pada bulan Agustus 1998 terjadi pengkaplingan 1.400 hektar lahan yang dimiliki putra sulung Presiden Suharto. Pendudukan tersebut berakhir setelah aparat keamanan turun tangan.

Penjarahan tambak udang mengindikasikan adanya kekerasan warga serta kesenjangan ekonomi antara industri moderen dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat bawah. Warga merasa tersisih dan tidak mendapat apa-apa dari lahan yang dulu mereka miliki setelah berubah menjadi tambak udang. Tambak tersebut dikelola secara moderen dan mendatangkan keuntungan besar bagi pengusaha, sementara masyarakat sekitar tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Sejak tahun 1998–2000 terjadi 9 kali penjarahan tambak udang milik konglomerat di berbagai daerah di Indonesia.

Krisis ekonomi berdampak pada masalah pendidikan. Semasa krisis, banyak orang tua yang tidak mampu membiayai pendidikan anak-anaknya. Antara tahun 1997-2002 hampir 5 persen anak usia sekolah dari semua tingkatan mengalami putus sekolah. Penyebabnya antara lain semakin mahal biaya pendidikan sehingga banyak orang tua yang tidak mampu lagi membiayai pendidikan anak-anaknya.

Untuk mengatasi **masalah kemiskinan** serta kesulitan pembiayaan sekolah, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan berupa program jaring pengaman sosial (JPS). Program ini bertujuan untuk 1) memulihkan kecukupan pangan, 2) menciptakan kesempatan kerja, 3) memulihkan pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan 4) memulihkan kegiatan ekonomi rakyat. Program yang diluncurkan pada tahun 1998 tersebut didanai dari APBN serta pinjaman luar negeri. Program ini telah dirasakan manfaatnya oleh rakyat miskin yang menjadi sasaran program ini. Misalnya, masyarakat dilibatkan dalam program budidaya ayam buras, tambak udang, beasiswa serta dana bantuan operasional bagi sekolah dasar dan menengah serta bidang kesehatan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tidak semua program mencapai sasarannya. Penyebabnya adalah korupsi dalam bentuk kesalahan prosedur, penyelewengan dan kesalahan administrasi. Setelah tiga tahun program berjalan, tercatat 2.365 pengakuan menyangkut korupsi. Sebagian pengaduan tersebut dapat diproses dan terbukti benar. Ternyata mental masyarakat yang terkena krisis bertambah buruk, terbukti dana untuk masyarakat miskin pun dikorupsi oleh mereka yang memiliki kesempatan untuk melakukannya.

## RANGKUMAN

Runtuhnya pemerintahan Orde Baru bulan Mei 1998 yang telah berkuasa selama tiga puluh tahun terjadi karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Krisis tersebut mampu membuka semua kebobrokan praktek politik pemerintahan seperti kolusi, korupsi dan nepotisme yang telah dijalankan oleh para elit politik. Melalui gerakan reformasi yang dipelopori para mahasiswa akhirnya Orde baru jatuh dan digantikan dengan pemerintahan yang kemudian menamakan diri pemerintahan yang reformis.

Namun demikian, di era reformasi beberapa masalah warisan Orde Baru seperti KKN tidak dapat segera dituntaskan. Sebaliknya kehidupan masyarakat tetap sulit dan bahkan buruk karena berbagai pergolakan serta kekerasan di berbagai daerah serta tidak tuntasnya masalah penegakkan hukum. Rakyat masih menunggu cukup lama untuk mencapai masyarakat yang madani serta terpenuhinya kebutuhan hidup mereka.

## **BAB III**

### **EVALUASI**

#### **SOAL ESAI**

1. Jelaskan bagaimana proses terbentuknya interaksi antara berbagai tradisi Islam dan tradisi Indonesia lama pada awal perkembangan Islam di Indonesia!
2. Jelaskan bagaimana konsep kekuasaan dalam kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia pada abad 15-16.
3. Jelaskan peranan Islam dalam proses integrasi bangsa Indonesia pada abad ke-16-19!
4. Jelaskan dampak jatuhnya kota pelabuhan Malaka ke tangan Portugis pada 1511 bagi proses integrasi bangsa Indonesia pada abad ke-16-19!
5. Jelaskan peranan pelayaran dan perdagangan antarpulau dalam proses integrasi bangsa Indonesia pada abad ke-16-19!
6. Sebutkan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses integrasi!
7. Mengapa lahirnya kelompok migran terdidik pada awal abad ke-20 telah membantu terjadinya proses integrasi bangsa?
8. Jelaskan mengapa pada awal perkembangan agama dan tradisi Islam dan tradisi Hindu-Buddha terjadi proses interaksi yang mengarah pada terbentuknya integrasi bangsa?

#### **SOAL PILIHAN GANDA.**

1. Berikut adalah **bukan** termasuk karakteristik geografis Indonesia.
  - a. pulau yang terdapat di kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan
  - b. laut-laut yang mengelilingi semua pulau di Indonesia merupakan jembatan penghubung
  - c. selat-selat yang terdapat di antara pulau-pulau merupakan sebuah jembatan penghubung
  - d. laut-laut yang mengelilingi pulau-pulau merupakan pemisah dari pulau-pulau lain yang terdapat di wilayah Indonesia
  - e. laut merupakan satu kesatuan
2. Berikut adalah **bukan** termasuk faktor eksternal yang mempengaruhi proses integrasi bangsa Indonesia pada abad ke-16-19!
  - a. adanya monopoli perdagangan oleh para pedagang Eropa
  - b. berkaitan dengan suksesi kepemimpinan
  - c. memperluas wilayah kekuasaan kerajaan
  - d. menghindari perpecahan di antara dua saudara
  - e. kolonisasi Portugis atas Malaka pada 1511

3. Peristiwa yang menjadi titik tolak perubahan sikap para pedagang Indonesia terhadap para pedagang Eropa adalah ....
  - a. ditandatanganinya Perjanjian Bongaya pada 1667
  - b. jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada 1511
  - c. ditandatanganinya Perjanjian Gianti pada 1775
  - d. jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Usmani pada 1453
  - e. perang Diponegoro pada 1825-1830
4. Berikut adalah **bukan** peranan Islam dalam proses integrasi bangsa Indonesia pada abad ke-16-19!
  - a. Islam bersifat terbuka
  - b. Islam mengajarkan toleransi agama
  - c. Islam bersifat eksklusif
  - d. cara penyebarannya tidak dipaksakan
  - e. Islam bersifat demokratis
5. Berikut adalah akibat monopoli perdagangan yang dilakukan bangsa Eropa terhadap proses integrasi bangsa Indonesia pada abad ke-16-19!
  - a. terjadi persaingan tidak sehat di antara para pedagang bangsa Eropa dan Indonesia
  - b. timbul solidaritas di antara pedagang Indonesia
  - c. beralihnya kegiatan berdagang dari wilayah barat Indonesia ke wilayah timur Indonesia
  - d. timbulnya perpecahan di antara para pedagang Indonesia
  - e. berkembangnya agama Islam di Nusantara
6. Berikut adalah **bukan** faktor pendorong diterimanya bahasa Melayu sebagai bahasa nasional.
  - a. bahasa Melayu berasal dari bahasa kerajaan yang berpengaruh di perdagangan internasional
  - b. suku Jawa menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional
  - c. bahasa Melayu memiliki sistem yang sederhana
  - d. sejak dahulu bahasa Melayu menjadi *lingua franca*
  - e. suku Sunda menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional
7. Alasan terjadinya migrasi bangsa Indonesia pada abad ke-16-19 adalah ....
  - a. ramainya perdagangan di kawasan Indonesia
  - b. perkembangan politik pada masa pemerintahan Sultan Agung dari Mataram
  - c. pemberlakuan sistem Tanam Paksa
  - d. kebutuhan akan tenaga kerja untuk perkebunan
  - e. a, b, c, dan d benar
8. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang menyebabkan timbulnya kelompok migran perkebunan adalah ....
  - a. pemberlakuan Politik Etis
  - b. pemberlakuan Preanger Stelsel
  - c. pemberlakuan sistem Hongi

- d. pemberlakuan sistem Tanam Paksa
  - e. pemberlakuan sistem Rodi
9. Salah satu dampak kebijakan pemerintah kolonial Belanda di bidang pendidikan yang berpengaruh pada proses integrasi bangsa Indonesia adalah ....
- a. munculnya daerah-daerah *melting pot*
  - b. lahirnya kelompok migran perkebunan
  - c. lahirnya golongan migran terdidik
  - d. munculnya paham primordialisme
  - e. lahirnya nasionalisme
10. Berikut adalah **bukan** faktor yang dapat memperlemah proses integrasi bangsa.
- a. kedaerahan
  - b. toleransi
  - c. kemiskinan
  - d. diskriminasi
  - e. kebodohan

#### TUGAS DAN KEGIATAN

- Buatlah tulisan tentang salah satu contoh kasus interaksi budaya dalam masyarakat lingkungan sekitar Anda!
- Diskusikanlah tentang "Upaya untuk membangun wawasan kebangsaan".

#### DAFTAR ISTILAH

- Budanco adalah kamandan regu.
- Cudanco adalah komandan kompi.
- Daidanco adalah komandan batalyon.
- Fujinkai adalah himpunan wanita.
- Geisha adalah wanita yang bertugas untuk melayani segala keinginan tentara Jepang, termasuk kebutuhan biologisnya.
- Gerakan 3 A adalah salah satu propaganda Jepang di Indonesia yang terdiri dari Nippon Cahaya Assia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon pemimpin Asia.
- Kempetai adalah polisi rahasia Jepang. Polisi ini terkenal karena tindakan sewenang-wenangnya.
- Keibodan adalah barisan pembantu polisi.
- Putera atau Pusat Tenaga Rakyat, yaitu suatu organisasi yang dibentuk Jepang sebagai pengganti Gerakan 3 A.
- Romusha adalah orang-orang yang dipaksa untuk bekerja secara paksa pada zaman pendudukan Jepang.



- Seikerei adalah bentuk penghormatan ala Jepang kepada Tenno Heika yang dilambangkan dengan membungkukan badan ke arah matahari pada pagi hari.
- Seinendan adalah barisan pemuda.
- Status Quo adalah keadaan tetap seperti semula sebelum terjadinya suatu peristiwa.
- Syudanco adalah komandan peleton.
- Propaganda adalah penerangan, paham, pendapat dan sebagainya yang benar atau salah yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang agar menganut suatu aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu.
- Politik Kanalisasi adalah politik penyaluran atas rasa tidak puas dan sebagainya.
- Propaganda adalah penerangan yang benar atau salah yang dilakukan dengan tujuan meyakinkan orang agar mengikuti suatu aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu.
- Pandu adalah sebutan untuk pramuka pada masa lalu.
- Petisi adalah permohonan secara resmi pada pemerintah.
- Restorasi, yaitu pembaharuan di segala bidang ke hidupan masyarakat.
- Shogun adalah gelar diktatot militer yang memerintah Jepang pada abad ke-12 sampai 19.
- Samurai adalah golongan satria atau prajurit pada zaman feodalisme Jepang. Mereka tidak bisa dipisahkan dari dua buah pedang, yaitu sebilah pedang yang panjang dan pendek. Pedang yang panjang digunakan untuk menyerang dan bertahan. Adapun pedang yang pendek digunakan untuk menusuk dirinya bila merasa gagal dalam menjalankan tugasnya (harkiri).
- Westernisasi adalah pemujaan terhadap Barat yang berlebihan; pembaratan.

## **EVALUASI.**

### **I. Kerjakanlah soal-soal di bawah ini.**

1. Jelaskan mengapa sistem demokrasi perlementer telah menciptakan ketidakstabilan dalam pemerintahan.
2. Jelaskan mengapa Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.
3. Jelaskan latarbelakang terjadinya pemberotakan di berbagai daerah pada masa Orde Lama.
4. Mengapa Konstituante gagal merumuskan undang-undang dasar negara yang abru setelah RI kembali ke negarta kesatuan.
5. Jelaskan bagaimana cara PKI membentuk kekuatan untuk merebut kekuasaan.

6. Jelaskan mengapa terdapat banyak versi mengenai peristiwa Gerakan 30 September 1965.
7. Jelaskan mengapa pada masa Orde baru kehidupan demokrasi tidak berjalan dengan baik.
8. Jelaskan ciri-ciri pemerintahan Orde Baru.
9. Jelaskan sisi positif dan negatif Revolusi Hijau pada masa Orde baru.
10. Jelaskan arti Supersemar bagi terjadinya peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde baru.
11. Uraikan oleh anda bagaimana cara pemerintahan RI menegakkan kedaulatan setelah proklamasi dilaksanakan.
12. Jelaskan mengapa arti penting rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 bagi sejarah bangsa Indonesia selanjutnya.
13. Jelaskan bagaimana gejolak sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia pasca Proklamasi.
14. Jelaskan mengapa para pemuda Indonesia melakukan pelucutan senjata tentara Jepang pada pasca proklamasi.
15. Jelaskan peran dan fungsi KNIP sebagai parlemen pasca proklamasi.
16. Jelaskan mengapa Belanda ingin berkuasa kembali atas Indonesia.
17. Jelaskan upaya-upaya diplomatik dan militer yang dilakukan bangsa Indonesia dalam menghadapi agresi Belanda.
18. Sebutkan konferensi-konferensi yang dilaksanakan sebagai upaya diplomatik bangsa Indonesia menegakkan kedaulatan.
19. Jelaskan bagaimana kondisi perekonomian bangsa Indonesia pasca proklamasi.
20. Jelaskan upaya-upaya pemerintah RI dalam menjalankan roda ekonomi pasca proklamasi.

## **II, Pilihlah satu jawaban dari soal-soal di bawah ini.**

1. Negara Republik Indonesia Serikat yang diakui oleh RI berdasarkan hasil perundingan dalam:
  - a. Konferensi meja Bundar (KMB).
  - b. Konferensi Malono
  - c. Konferensi antar Indonesia.
  - d. Perundingan Linggajati
  - e. Perundingan Renfille.
2. Kabinet yang berkuasa dalam sistem parlementer sebelum dilaksanakannya Pemilu tahun 1955 adalah:
  - a. Kabinet Natsir
  - b. Kabinet Sukiman
  - c. Kabinet Wilopo
  - d. Kabinet Ali Sastroamidjojo
  - e. Kabinet Djuanda.

3. Pada masa Sistem Pemerintahan Demokrasi Parlementer maka partai-partai politik (parpol) adalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut, kecuali:
  - a. Jumlahnya tidak dibatasi
  - b. Memiliki kebebasan menyalurkan aspirasi anggotanya.
  - c. Parpol besar cenderung berkuasa dalam pemerintahan.
  - d. Sering mekritisi dan menjatuhkan pemerintah yang sedang berkuasa.
  - e. Didominasi dan dikuasai oleh presiden.
4. Kabinet Wilopo yang menggantikan kabinet Sukiman pada tanggal 30 Maret 1951 berisikan partai-partai sebagai berikut, kecuali:
  - a. PNI
  - b. Masyumi
  - c. PKI
  - d. PSI
  - e. PKRI
5. Konsepsi Presiden Sukarno yang diumumkan pada 21 Februari 1957 berisi hal-hal sebagai berikut, kecuali:
  - a. Sistem Demokrasi Parlementer dianggap tidak sesuai untuk Indonesia
  - b. Demokrasi Parlementer harus diganti dengan Sistem Demokrasi Terpimpin.
  - c. Demokrasi Terpimpin harus didukung oleh kabinet gotong
  - d. Perlu dibentuk Dewan nasional yang terdiri dari golongan-golongan fungsional dalam masyarakat.
  - e. Demokrasi Terpimpin harus didukung oleh Nasakom.
6. Yang tidak termasuk dalam isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut:
  - a. pembubaran Konstituante.
  - b. berlakunya kembali UUD 1945
  - c. tidak berlakunya UUDS 1950.
  - d. tidak berlakunya RIS
  - e. pembentukan MPRS dan DPAS.
6. Gangguan keamanan dalam negeri pada masa pemerintahan Demokrasi Parlementer (1950-1959) terjadi karena sebab-sebab berikut ini, kecuali:
  - a. adanya ketidakpuasan terhadap PKI
  - b. adanya ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat.
  - c. Adanya kekecewaan anggota KNIL dan KL terhadap APRIS
  - d. Adanya kecemburuan daerah luar Jawa terhadap kemajuan Jawa.
  - e. Adanya keinginan daerah untuk melepaskan diri dari pemerintah pusat.
7. Terbentuknya PRRI/Permesta didukung oleh perkumpulan militer daerah yang dinamakan *banteng daerah* seperti berikut ini, kecuali:

- a. Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein (20 Desember 1956),
  - b. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon (22 Desember 1956),
  - c. Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian,
  - d. Dewan Manguni di Manado yang dipimpin oleh Letkol Ventje Samual (18 Februari 1957),
  - e. Dewan Cendrawasih di Maluku dan Irian yang dipimpin oleh Dr Soumokil.
8. Menurut Pemerintah Orde baru, dalang dan pelaku utama Gerakan 30 September 1965 adalah:
- a. CIA
  - b. PKI
  - c. Sukarno
  - d. Angkatan Bersenjata
  - e. Pendukung Demokrasi Terpimpin.
9. Upaya PKI untuk memperkuat kedudukannya menjelang meletusnya gerakan 30 September adalah melalui cara-cara sebagai berikut, kecuali:
- a. memprovokasi masyarakat petani tentang konsep pemerataan.
  - b. Mendekati rezim yang sedang berkuasa.
  - c. Mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk "angkatan kelima".
  - d. Menginfiltrasi tubuh angkatan bersenjata.
  - e. Mendekati badan intelejen Amerika Serikat CIA.
10. Versi yang menyebutkan bahwa Gerakan 30 September 1965 adalah campur tangan Central Intelligence Agency (CIA), dikemukakan oleh:
- a. Asvi Warman Adam (sejarawan dari LIPI)
  - b. Audrey dan George Mc Turner Kahin
  - c. Peter Dale Scott, guru besar Universitas California, Amerika Serikat.
  - d. Sartono Kartodirdjo (sejarawan)
  - e. W.F. Wertheim, sejarawan Belanda,
11. Konferensi Meja Bundar (KMB) yang memiliki arti penting bagi pengakuan kedaulatan Belanda atas Indonesia dirandatangani oleh pihak Belanda dan Indonesia pada tanggal.....
- a. 14 Desember 1949
  - b. 15 Desember 1949
  - c. 25 Desember 1949
  - d. 26 Desember 1949
  - e. 27. Desember 1949.
12. Yang tidak diputuskan dalam Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut:
- a. dibentuknya KNIP
  - b. dipilihnya presiden
  - c. dipilihnya wakil presiden

- d. dibentuknya UUD negara RI.
  - e. Dibentuknya TNI.
13. Perdebatan dalam sidang PPKI mengenai penetapan undang-undang dasar negara lebih banyak menyangkut kalimat dalam pembukaan undang-undang dasar yang terkait dengan masalah:
- a. kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
  - b. Kewajiban negara ikut serta dalam perdamaian dunia.
  - c. Kewajiban negara dalam memajukan kesejahteraan negara.
  - d. Keseluruhan isi pembukaan
  - e. Butir mengenai arti kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.
14. Bangsa Indonesia memiliki landasan konstitusional dalam berbangsa dan bernegara sejak tanggal:
- a. 17 Agustus 1945
  - b. 18 Agustus 1945
  - c. 19 Agustus 1945
  - d. 20 Agustus 1945
  - e. 21 Agustus 1945.
15. Provinsi di Indonesia yang belum dibentuk dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah:
- a. Jawa Barat,
  - b. Jawa Tengah
  - c. Jawa timur.
  - d. Sumatera Selatan.
  - e. Maluku.
16. Yang bukan pengurus KNIP yang berfungsi sebagai parlemen sebelum diadakan pemilu dan dibentuk pada bulan Agustus 1945 adalah.....
- a. Adam malik.
  - b. Mr. Kasman Singodimedjo,
  - c. Sutardjo Kartohadikusumo,
  - d. Mr. J Latuharhary
  - e. Otto Iskandardinata.
17. Yang bukan sebagai pemimpin Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dibentuk oleh Presiden Sukarno adalah.....
- a. Arifin Abdurrahman,
  - b. Kaprawi
  - c. Latief Hendraningrat
  - d. Oerif Somohardjo.
  - e. Satalaksana
18. Berikut ini adalah nama-nama barisan perjuangan yang menghendaki kedaulatan penuh Indoensia dan berjuang untuk mengusir Belanda adalah....
- a. Angkatan Pemuda Indoensia (API),

- b. Badan Keamanan Rakyat.
  - c. Barisan Rakyat Indonesia (BARA),
  - d. Barisan Buruh Indonesia (BBI),
  - e. Barisan Banteng,
19. Gejolak sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia pasca proklamasi terkait dengan masalah sebagai berikut, kecuali:
- a. kesulitan ekonomi pasca perang
  - b. kekhawatiran berkuasanya kembali Jepang di Indonesia.
  - c. upaya pelucutan senjata Jepang.
  - d. Keamanan dan ketertiban yang dirasakan rakyat.
  - e. Terbentuknya ebrbagai organisasi perjuangan.
20. Tujuan para pemuda Indonesia pasca Proklamasi melucuti senjata yang masih dimiliki tentara Jepang adalah untuk:
- a. memerangi para pejuang yang tidak pro dengan mereka.
  - b. menunjukkan kedaulatan dan menganggap Jepang telah kalah.
  - c. Menjadi angkatan bersenjata yang kaut.
  - d. Menunjukkan bahwa mereka bagian dari tentara Sekutu.
  - e. Menghindari peperangan dengan Belanda.
21. Kelompok masyarakat yang paling menderita akibat rendahnya nilai tukar mata uang Jepang yang dipegang mereka pada pasca Proklamasi adalah.....
- a. petani
  - b. pegawai negeri
  - c. tentara
  - d. pejabat negara
  - e. para pejuang.
22. Tindakan pemerintah RI untuk menjalankan roda perekonomian serta mengarasi kesulitan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut, kecuali.....
- a. Mendirikan Bank Negara Indonesia.
  - b. Mengeluarkan uang republik.
  - c. Melarang penduduk untuk menggunakan uang NICA.
  - d. Melakukan pinjaman nasional kepada rakyat.
  - e. Melakukan devaluasi mata uang Jepang.
23. Arti politis pengiriman sejumlah 500.000 ton beras dari Indonesia ke India pada pasca proklamasi adalah sebagai berikut.....
- a. menunjukkan bahwa blokade ekonomi Belanda telah gagal.
  - b. menunjukkan bahwa India sebagai negara miskin yang perlu dibantu.
  - c. menunjukkan bahwa Indonesia sebagai engara kaya.
  - d. menunjukkan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif.

- e. menunjukkan bahwa bangsa Indonesia meminta imbalan dari India.
24. Seorang ekonom terkemuka Indonesia pasca proklamasi yang berhasil menyarankan pemerintah menembus blokade ekonomi Belanda adalah.....
- a. AK Gani.
  - b. Mohammad Hatta
  - c. Otto Iskandardinata.
  - d. Sumitro Djojohadikusumo.
  - e. Wiranatakusumah.
25. Terjadinya Perang Kemerdekaan tahun 1945 – 1949 disebabkan oleh faktor berikut ini....
- a. Kemerdekaan RI hasil proklamasi dianggap belum tuntas
  - b. Belanda memaksakan kehendaknya untuk menguasai kembali Indonesia.
  - c. Jepang masih ingin menjajah dan menguasai Indonesia.
  - d. Bangsa Indonesia perlu berlatih perang-perangan untuk memperkuat diri.
  - e. Belum terbentuknya sistem pertahanan yang memadai.
26. Ambisi Belanda untuk menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia dilakukan melalui organisasi.....
- a. ACW
  - b. NICA
  - c. KNIL.
  - d. Kempetai.
  - e. KTN.
27. Usaha Belanda untuk menguasai kembali Indonesia dengan cara memecah belah kedaulatan RI adalah dengan cara....
- a. bekerjasama dengan Inggris memerangi RI
  - b. membentuk negara-negara boneka di daerah.
  - c. memberikan bantuan ekonomi kepada rakyat jelata.
  - d. Mempersoalkan Indonesia di Dewan Keamanan PBB
  - e. Bekerjasama dengan kelompok oposisi terhadap pemerintah RI.
28. Negara Indonesia Serikat (RIS) yang antara lain terdiri dari RI dan beberapa negara bagian disepakati berdiri setelah terjadi perundingan di.....
- a. ooge Veluwe
  - b. Lingajati.
  - c. Jaakarta.
  - d. Pangkalpinang.
  - e. Pontianak.
29. Isi Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Indonesia setelah Belanda melakukan agresi militernya yang kedua, berisi hal-hal berikut, kecuali.....
- a. mendesak supaya permusuhan segera dihentikan
  - b. pemimpin Indonesia yang ditawan segera dibebaskan.
  - c. Perlu dibentuk pengawas keamanan.

- d. KTN ditugaskan untuk menjadi pengawas pelaksanaan resolusi itu.
  - e. Belanda menarik seluruh pasukannya dari Indonesia.
30. Negara-negara peserta Konferensi New Delhi yang memberikan dukungan diplomatik kepada perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi agresi militer Belanda adalah sebagai berikut, kecuali.....
- a. Afghanistan,
  - a. Australia,
  - b. Burma,
  - c. Malaysia
  - d. Sri Langka,

### **EVALUASI.**

I. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Jelaskan faktor-faktor penyebab munculnya tuntutan reformasi.
2. Jelaskan latarbelakang runtuhnya pemerintahan Orde baru.
3. Jelaskan hubungan antara krisis ekonomi, politik dan jatuhnya Orde baru.
4. Jelaskan bagaimana kehidupan sosial di berbagai daerah di Era Reformasi.
5. Jelaskan latarbelakang munculnya tuntutan disintegrasi di berbagai daerah.
6. Jelaskan latarbelakang munculnya tuntutan otonomi daerah dan desentralisasi di berbagai daerah.
7. Jelaskan mengapa kebrutalan massa muncul di era reformasi.
8. Jelaskan bagaimana konflik horizontal terjadi dalam masyarakat Indonesia.
9. Jelaskan mengapa Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Dekrit pembubaran DPR/MPR.
10. Jelaskan mengapa penegakan hukum tidak berjalan dengan baik di era reformasi.

### **II. Pilihlah salah satu jawaban yang benar pada soal-soal di bawah ini.**

1. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 berpengaruh terhadap kejadian berikut ini, kecuali:
  - a. meningkatnya jumlah hurang luar negeri RI.
  - b. Meningkatnya kepercayaan terhadap pemerintah.
  - c. Meningkatnya harga-harga barang
  - d. Meningkatnya jumlah warga miskin.
  - e. Meningkatnya tuntutan terhadap perubahan.
2. Perbedaan antara krisis yang menimpa pemerintah Orde Lama dengan Pemerintah Orde Baru terletak pada aspek berikut, kecuali:
  - a. penyebab krisis.
  - b. Kurun waktu terjadinya krisis.
  - c. Pemerintah yang sedang berkuasa.
  - d. Meruntuhkan kedua pemerintahan.
  - e. Reaksi warga terhadap krisis.
3. Jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998 disebabkan oleh faktor utama berikut ini:
  - a. keinginan pemerintah Orde Baru mengakhiri kekuasaanya.



- b. Desakan IMF agar Presiden Suharto mundur.
  - c. Desakan ABRI agar Presiden Suharto menyerahkan kekuasaannya.
  - d. Tuntutan mahasiswa dan masyarakat agar Presiden Suharto lengser (mundur).
  - e. Tuntutan berbagai daerah untuk melepaskan diri dari pusat.
3. Posisi angkatan bersenjata RI pada bulan Mei 1998 dalam menanggapi aksi-aksi mahasiswa yang menuntut agar Orde baru mengakhiri kekuasaannya adalah dengan cara:
- a. Menanggapi secara positif.
  - b. Melakukan perundingan
  - c. Melakukan tindakan represif.
  - d. Meminta bantuan pasukan asing.
  - e. Mendukung usulan kaum reformis.
4. Di Era reformasi, kelompok masyarakat yang merasa menjadi kaum reformis berasal dari kalangan yang:
- a. Menghendaki adanya perubahan.
  - b. Menghendaki agar Orde Baru diperkuat.
  - c. Menghendaki status quo.
  - d. Menghendaki ABRI memainkan fungsi sosial politik.
  - e. Menghendaki agar tidak terjadi perubahan.
5. Presiden Suharto yang telah berkuasa selama 32 tahun menyatakan mundur dari jabatannya pada tanggal:
- a. 18 Mei 1998
  - b. 19 Mei 1998
  - c. 20 Mei 1998
  - d. 21 Mei 1998
  - e. 22 Mei 1998.
6. Sikap kaum reformis terhadap pengunduran Presiden Suharto pada bulan Mei 1998 dan menyerahkan kekuasaan pada wakilnya, BJ Habibie, adalah:
- a. Menerima secara penuh.
  - b. Menentang secara penuh.
  - c. Terbelah antara pro dan kontra.
  - d. Melakukan tindakan kekerasan.
  - e. Bekerjasama dengan kaum buruh.
7. Tuntutan mahasiswa yang berdemonstrasi sebelum runtuhnya Orde Baru adalah sebagai berikut, **kecuali**:
- a. pemerintah segera dapat mengatasi krisis ekonomi,
  - b. dilaksanakannya reformasi di segala bidang
  - c. dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR

- d. pertanggungjawaban presiden.
  - e. Membentuk PDIP.
8. Pelantikan Presiden Abdurahman Wahid sebagai Presiden ke-4 RI dilaksanakan pada tanggal:
- a. 20 Oktober 1999.
  - b. 21 Oktober 1999.
  - c. 22 Oktober 1999.
  - d. 23 Oktober 1999.
  - e. 24 Oktober 1999.
9. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dirumuskan dalam:
- a. Tap MPR Nomor XI 1998.
  - b. Tap MPR Nomor XII 1998.
  - c. Tap MPR Nomor XIII 1998.
  - d. Tap MPR Nomor XIV 1998.
  - e. Tap MPR Nomor XV 1998.
10. Masalah Bruneigate dan Bulaggate I yang menyebabkan DPR mengeluarkan Memorandum I dan Memorandum II terjadi terhadap:
- a. Presiden Suharto
  - b. BJ Habibie
  - c. Presiden Abdurrahmad Wahid
  - d. Presiden Megawati Sukarnoputri
  - e. Wapres Megawati Sukarnoputri.
11. Maklumat presiden Presiden Abdurahman Wahid mengenai dekrit pada 23 Juli 2001 pukul 1.10 malam berisi:
- a. Pembubaran MPR dan DPR.
  - b. Penuntutan terhadap Presiden Suharto.
  - c. Penolakan terhadap bantuan IMF.
  - d. Perubahan ABRI menjadi TNI.
  - e. Penyerahan kekuasaan kepada wapres Megawati.
12. Pemilihan Umum (pemilu) di Era Reformasi yang diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999 dimenangkan oleh:
- a. Golkar.
  - b. PPP
  - c. PDI
  - d. PKB
  - e. PDIP.

13. Ciri-ciri kehidupan partai politik di Era reformasi adalah sebagai berikut, kecuali:

- a. Terjadi pertentangan internal dalam tubuh partai.
- b. Didukung oleh para purnawirawan tentara.
- c. Banyak keluar masuknya kader partai.
- d. Menderminkan aspirasi rakyat yang sebenarnya.
- e. Menggalang massa melalui pawai-pawai politik.

14. Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri dari Iramasuka (Irian Jaya, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan) dan digerakkan oleh A.A Baramuli merupakan konflik internal dalam tubuh parpol bernama:

- a. Golkar.
- b. PPP
- c. PDI
- d. PKB
- e. PDIP.

Daerah-daerah di Indonesia yang ingin melepaskan diri dari pemerintah Pusat dilatar belakang oleh faktor di bawah ini, kecuali:

- a. ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat.
- b. Sumber daya alam yang dimiliki tidak mendatangkan kemakmuran masyarakatnya
- c. Dukungan IMF dan Bank Dunia untuk pemisahan diri.
- d. Ketimpangan sosial daerah mereka dengan Jakarta.
- e. Semangat diintegrasikan.

Kelemahan politisi sipil Indonesia dalam menegakkan supremasi sipil yang dikemukakan oleh Prof. William Liddle, dari Ohio State University dapat memberi jalan pada:

- a. kemungkinan tampilnya kembali militer dalam panggung politik.
- b. kemungkinan tampilnya kembali Orde Baru dalam panggung politik.
- c. kemungkinan tampilnya kembali Orde Lama dalam panggung politik.
- d. kemungkinan tampilnya kembali komunis dalam panggung politik.
- e. kemungkinan tampilnya kembali kaum feodal dalam panggung politik.

Konflik **horizontal** dalam masyarakat Indonesia di Era Reformasi ditandai dengan hal-hal berikut, kecuali:

- a. pertentangan antar kelompok etnis
- b. pertentangan antar kelompok agama
- c. pertentangan dalam masyarakat marjinal/bawah
- d. pertentangan dalam merebut kekuasaan
- e. pertentangan dalam lapis sosial yang sama.

Alasan masyarakat memiliki sikap yang tidak positif terhadap anggota DPRD hasil pemilu tahun 1999 sebagai berikut, kecuali:

- a. Sebagian anggota DPRD tidak memiliki *sense of crises*.
- b. Sebagian anggota DPRD menerima uang dari eksekutif

- c. Sebagian anggota DPRD tidak mewakili aspirasi rakyat
- d. Sebagian anggota DPRD tidak berasal dari parpol
- e. Sebagian anggota DPRD tidak mendukung KKN.

Jaring pengaman sosial (JPS) yang diluncurkan di Era Reformasi bertujuan sebagai berikut, kecuali:

- a. memulihkan kecukupan pangan,
- b. menciptakan kesempatan kerja,
- c. memulihkan pelayanan kesehatan dan pendidikan,
- d. memulihkan kegiatan ekonomi rakyat.
- e. meredam gerakan disintegrasi.

Sikap masyarakat terhadap aksi-aksi demo mulai berubah menjadi tidak simpati karena alasan berikut, kecuali:

- a. aksi demo sering kali ditungangi oleh kelompok lain.
- b. aksi demo sering mengganggu aktifitas keseharian masyarakat
- c. aksi demo dilakukan oleh orang yang dibayar.
- d. aksi demo sering mengganggu ketertiban
- e. aksi demo dilakukan oleh para mahasiswa.

21. Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) di depan gedung DPRGR pada 10 Januari 1966, dikemukakan oleh.....

- a. para pemuda yang anti PKI dan Orde Lama.
- b. Para pedagang kaki lima di Jakarta
- c. Angkatan bersenjata RI
- d. Golongan karya.
- e. PKI dan para pendukungnya.

22. Surat Perintah 11 Maret 1966 (*Supersemar*) diberikan oleh:

- Presiden Sukarno kepada Letjen Suharto
- Presiden Sukarno kepada PKI.
- Presiden Sukarno kepada AH Nasution.
- Letjen Suharto kepada Presiden Sukarno.
- Letjen Suharto kepada Pangkostrad.

23. Tap MPRS tentang Supersemar terdapat dalam:

- Tap MPRS No. IX/MPRS/1966
- Tap MPRS No. X/MPRS/1966
- Tap MPRS No. XI/MPRS/1966
- Tap MPRS No. XII/MPRS/1966
- Tap MPRS No. XIII/MPRS/1966.

Tap MPRS No. XLI/MPRS/1968 berisi tentang:

- a. Pemilu
- b. Pengangkatan Jenderal Suharto sebagai presiden RI.
- c. Pembubaran PKI.
- d. Pembentukan Orde baru.
- e. Repelita. tentang tugas pokok Kabinet Pembangunan.

Pada masa pemerintahan Orde Baru menguatnya peran negara terlihat dalam hal-hal di bawah ini, kecuali:

- Pengendalian semua potensi oposisi.

Kekuasaan terbesar berada di tangan eksekutif.  
Angkatan Bersenjata menjalankan fungsi sosial politik.  
Semua kelompok masyarakat disatukan dalam struktur kenegaraan.  
Pарpol diberi peluang untuk mengembangkan diri menjadi beberapa parpol.

Yang tidak menjadi prioritas dalam bidang pembangunan Orde Baru adalah:

pertumbuhan  
stabilitas politik.  
Integrasi bangsa.  
Produktifitas.  
Kritik dan kontrol.

Prestasi pembangunan pada masa pemerintahan Orde baru ditandai dengan hal-hal di bawah ini, kecuali:

laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.  
Pemerataan pendapatan pada semua golongan.  
Stabilitas politik di berbagai daerah.  
Peningkatan ekspor yang pesat.  
Peningkatan jumlah sarana dan prasarana.

Peningkatan produksi pertanian serta swasembada pangan pada masa pemerintahan Orde baru dicapai melalui istilah:

Revolusi Hijau  
Revolusi Pangan  
Revolusi Industri  
Revolusi perdagangan  
Revolusi swasembada.

Pemerintah Orde Baru mampu memanfaatkan tenaga ahli yang trampil untuk merancang pembangunan ekonomi antara lain yang dilakukan oleh kelompok yang dikenal sebagai "Mafia Berkeley", yaitu:

Ahli yang menggunakan pendekatan sosialis.  
Ahli dan alumni dari Universitas Berkeley.  
Ahli yang pernah dimanfaatkan oleh Orde Lama.  
Mafia dari Berkeley.

Pemikir yang dekat dengan negara-negara komunis.

30. Surat Perintah 11 Maret 1966 (*Supersemar*) diberikan oleh:

Presiden Sukarno kepada Letjen Suharto  
Presiden Sukarno kepada PKI.  
Presiden Sukarno kepada AH Nasution.  
Letjen Suharto kepada Presiden Sukarno.  
Letjen Suharto kepada Pangkostrad.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Kartodirdjo, Sartono K, 1999, Pengantar Sejarah Indoensia baru Jilid 1-3, Jakarta, Gramedia.
- Lombard Denys, 1999, Nusa jawa: Silang Budaya, kajian Sejarah Terpadu, Jakarta, Gramedia.
- Poesponegoro, M.J Dkk, (1993), Sejarah nasional Indonesia, jilid 4-6, Jakarta, Balai Pustaka.
- Priggodigdo, A.G, 1985, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Jaakrta, Pustaka Universitas.
- Pujatmaka, A hadyana, dkk, 1990, Ensiklopedi nasional Indonesia, Jakarta, Cipta Adi Pustaka.
- Ricklef, M.C, 1998, Sejarah Indonesia Moderen, Yogyakarta, Gadjah m ada university Press.
- Tim Penyusun 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1993, 30 Tahun Indonesia Merdeka, Jakarta, Tira Pustaka.
- Tim Penyusun Indonesian Heritage, 1996, Indonesian Heritage, Singapore, Global International.

### 2. Majalah dan koran.

- Terbitan majalah Tempo 1997-2003
- Terbitan harian Kompas 1998-2003.